

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk melaksanakan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 mengacu pada sistematika Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/9803/OTDA tanggal 17 Desember 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu satu (1) tahun yang berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan *good governance*.

**Billahi Taufik Wal Hidayah.**

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Pangkalpinang, Maret 2019

**GOVERNOR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**ERZALDI ROSMAN**

# DAFTAR ISI



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

Halaman

	<b>Kata Pengantar</b> .....	i
	<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	I-1
	A. Dasar Hukum.....	I-1
	B. Gambaran Umum Daerah .....	I-3
	1. Kondisi Geografis Daerah .....	I-3
	C. Gambaran Umum Demografis .....	I-12
	D. Kondisi Ekonomi .....	I-13
	1. Potensi Unggulan Daerah .....	I-13
	2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (Tiga Tahun Terakhir) .....	I-20
<b>BAB II</b>	<b>RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)</b> .....	II-1
	A. Visi dan Misi .....	II-1
	B. Strategi dan Arah Kebijakan .....	II-6
	C. Prioritas Daerah .....	II-13
<b>BAB III</b>	<b>URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b> .....	III-1
	A. Urusan Konkuren.....	III-1
	a. Ringkasan Urusan Wajib.....	III-4
	1. Pendidikan .....	III-4
	2. Kesehatan .....	III-14
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	III-28
	4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	III-31
	5. Sosial .....	III-34
	6. Tenaga Kerja .....	III-41
	7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	III-44
	8. Pangan .....	III-51
	9. Pertanahan .....	III-54
	10. Lingkungan Hidup .....	III-57
	11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	III-61
	12. Pemerintahan Masyarakat dan Desa .....	III-64
	13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	III-66
	14. Perhubungan .....	III-69
	15. Komunikasi dan Informatika.....	III-73
	16. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	III-75
	17. Penanaman Modal.....	III-78
	18. Kepemudaan dan Olahraga.....	III-81
	19. Statistik.....	III-84
	20. Persandian.....	III-86
	21. Kebudayaan.....	III-87
	22. Perpustakaan.....	III-89
	23. Kearsipan .....	III-93

	b. Ringkasan Urusan Pilihan	III-97
	1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	III-96
	2. Urusan Pariwisata.....	III-101
	3. Urusan Pertanian.....	III-103
	4. Urusan Kehutanan .....	III-108
	5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....	III-113
	6. Urusan Perdagangan .....	III-118
	7. Urusan Perindustrian .....	III-120
	8. Urusan Transmigrasi .....	III-123
	B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya) .....	III-126
	C. Urusan Pemerintahan Umum .....	III-143
	D. Indikator Kinerja Kunci .....	III-148
<b>BAB IV</b>	<b>REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018 .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V</b>	<b>TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>V-1</b>
	Tugas Pembantuan Yang Diterima .....	V-1
<b>BAB VI</b>	<b>TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....</b>	<b>VI-1</b>
	A. Kerjasama Antar Daerah.....	VI-1
	B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga .....	VI-1
	C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal .....	VI-17
	D. Pembinaan Batas Wilayah.....	VI-20
	E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana.....	VI-25
	F. Pengelolaan Kawasan Khusus .....	VI-32
	G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum .....	VI-34
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VII-1</b>
	<b>LAMPIRAN :</b>	
	1. Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) I.1	
	2. Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) I.2	
	3. Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) I.3	



# **BAB I**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR HUKUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), serta pada Pasal 71 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Di usia yang ke 18 (delapan belas) tahun, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan pembenahan dan perbaikan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan "*Bumi Serumpun Sebalai*" ini, mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri A).

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 1°50' sampai 3°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

#### **a. Batas Wilayah**

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

#### **b. Luas Wilayah**

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,68 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.155,77 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,61 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km<sup>2</sup>
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 89,40 km<sup>2</sup>

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

#### **c. Topografis**

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan Hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

#### **d. Geologi**

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (*quartz*) dan bilitonite (dikenal dengan nama “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

#### **e. Hidrologi**

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

#### **f. Klimatologi**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 67,9 mm sampai dengan 409 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 238,45 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 23,5 °C sampai dengan 32,1 °C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

#### **g. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih detailnya dapat diperhatikan Tabel II.9. Dari seluruh luas lahan, 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

**Tabel I.1.**  
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan  
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					2017
	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Pertanian Sawah	23.042	13.262	15.719	15.719	22.771	<b>25.058</b>
Tegalan	112.777	109.820	113.105	113.105	117.376	99.038
Ladang	48.960	44.085	30.348	30.348	28.147	27.435
Perkebunan	332.179	334.698	441.152	441.152	367.848	391.064
Hutan Rakyat	85.738	71.323	47.753	47.753	42.637	43.315
Pengembalaan	6.086	4.235	1.815	1.815	2.263	3.232
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	121.407	126.272	76.588	76.588	67.415	55.987
Lain-Lain (pekarangan)	387.443	388.068	397.806	397.806	538.195	529.810
Permukiman	526.303	550.651	517.741	517.741	455.762	489.080
<b>JUMLAH</b>	<b>1.642.414</b>	<b>1.642.414</b>	<b>1.642.027</b>	<b>1.642.027</b>	<b>1.642.414</b>	<b>1.664.018</b>

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 529.810 ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 489.080 Ha dan perkebunan sebesar 391.064 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

#### **(1) Kawasan hutan produksi**

Pengembangan kawasan hutan produksi dilakukan melalui penataan batas kawasan hutan produksi, identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi), peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi (kayu dan bukan kayu), pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha, dengan perincian :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan dua) Ha;
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 67.083,52 (enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga koma lima dua) Ha;
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.497,75 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) Ha;
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.451,10 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh satu koma satu nol) Ha;
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 43.595,77 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) Ha; dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 55.650,83 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma delapan tiga) Ha.

## **(2) Kawasan peruntukan pertanian**

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional, pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya, meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura, mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala, penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya, penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan, penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar, pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dan membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri dari:



- a. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha, meliputi:
  - a.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
  - a.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;
  - a.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
  - a.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;
  - a.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
  - a.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
  - a.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.
  
- b. Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
  - b.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
  - b.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
  - b.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;
  - b.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
  - b.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha;
  - b.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha; dan
  - b.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha.
  
- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
  - c.1 Perkebunan Besar meliputi :
    - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha;
    - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha;
    - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha;
    - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha;
    - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha; dan
    - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha.
  - c.2 Perkebunan rakyat meliputi :
    - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha;
    - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha;
    - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha;
    - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha;
    - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha; dan
    - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha.
  
- d. Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
  - d.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
  - d.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
  - d.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;
  - d.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
  - d.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
  - d.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
  - d.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

### **(3) Kawasan peruntukan perikanan**

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan, menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap, pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar, pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar, penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan), pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap, dan pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.

Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi untuk pengembangan, meliputi :

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan, dan perikanan tangkap yang telah didukung pelabuhan perikanan (2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan 18 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)).

Dilain pihak pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

### **(4) Kawasan pertambangan**

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

### **(5) Kawasan industri**

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung,

membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri, membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri, penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan, dan mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan adalah:

- a. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

#### **(6) Kawasan peruntukan pariwisata**

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan, identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh, penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung, revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada, pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi, dan peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
  - a.1 Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
  - a.2 Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
  - a.3 Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
  - a.4 Taman wisata laut;
  - a.5 Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
  - a.6 Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya, wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - b.1 Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
  - b.2 Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
  - b.3 Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
  - b.4 Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible

maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;

b.5 Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan

b.6 Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.

c. Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

#### (7) Kawasan peruntukan permukiman

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan, penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota, penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan, identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

#### (8) Kawasan peruntukan lainnya

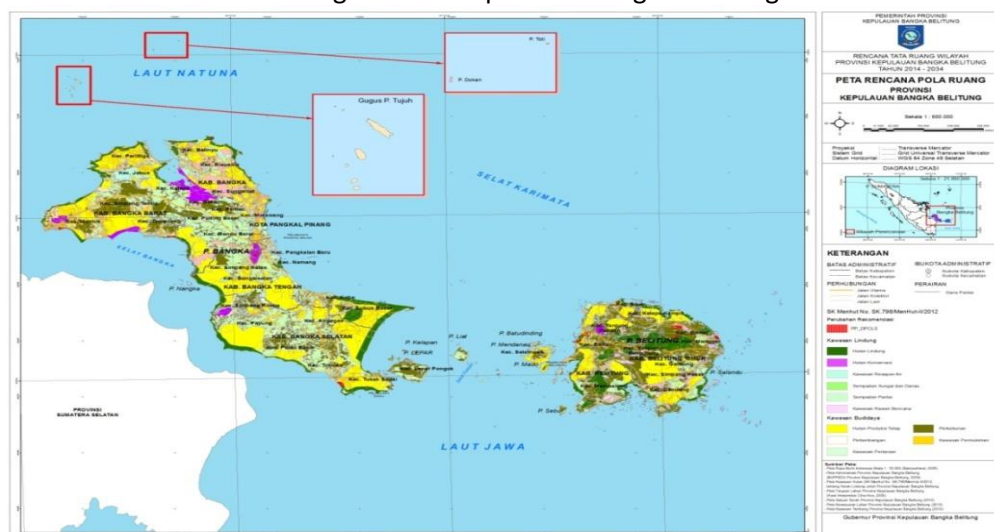
Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

- Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

Semua kawasan peruntukan ini telah dipetakan kedalam pola ruang Gambar I.1 dan Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gambar I.2.

**Gambar I.1**

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

**Gambar I.2**

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

### C. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.430.865 orang, dengan laju pertumbuhan 2016-2017 sebesar 2,07 persen. Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebesar 115.742 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,80 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.

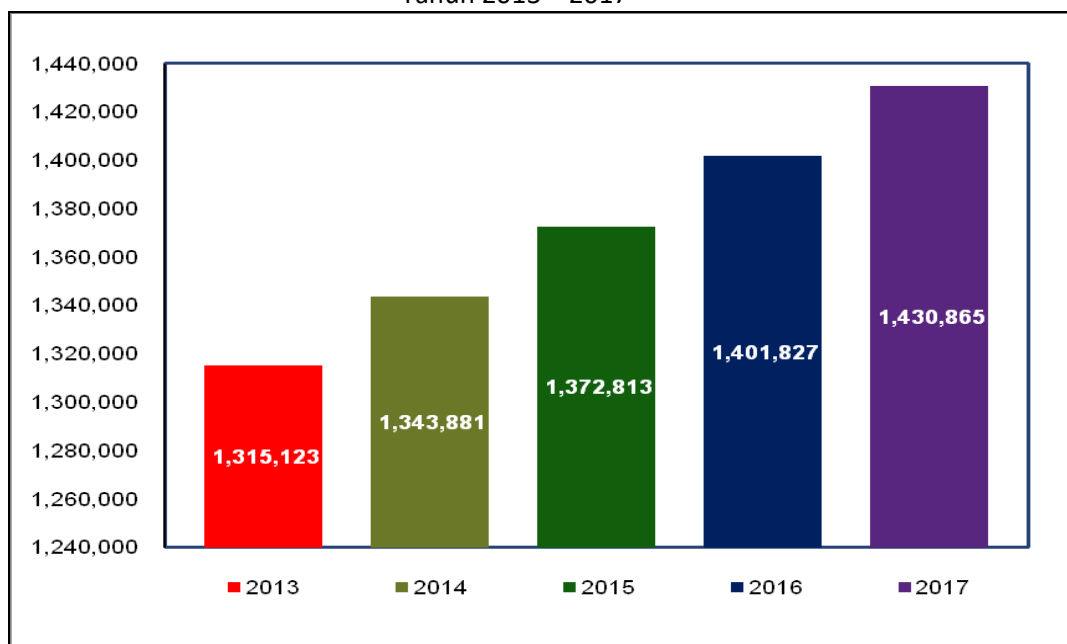
**Tabel I.2**

Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	298.013	304.485	311.085	317.735	324.305
Belitung	167.602	171.271	175.048	178.721	182.418
Bangka Barat	188.271	192.395	196.598	200.684	204.778
Bangka Tengah	173.346	177.218	180.903	184.720	188.603
Bangka Selatan	185.514	189.492	193.583	197.670	201.782
Belitung Timur	114.469	117.026	119.394	121.971	124.587
Pangkalpinang	187.908	191.994	196.202	200.326	204.392
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>1.315.123</b>	<b>1.343.881</b>	<b>1.372.813</b>	<b>1.401.827</b>	<b>1.430.865</b>

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

**Grafik I.1**  
Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2013 – 2017



Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Pada tahun 2013 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.315.123 jiwa dan meningkat menjadi 1.430.865 pada tahun 2017. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

## D. KONDISI EKONOMI

### a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

#### 1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambutan, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel I.3.

**Tabel I.3**  
Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Penggunaan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
<b>I.</b>	<b>LAHAN PERTANIAN</b>	<b>1.174.938</b>
I.1.	Lahan Sawah	<b>25.058</b>
	a. Irigasi	4.234
	b. Tadah hujan	17.878
	c. Pasang surut	390
	d. Lebak	2.556
I.2.	Lahan Bukan Sawah	<b>1.149.880</b>
	a. Tegal	99.038
	b. Ladang	27.435
	c. Perkebunan	391.064
	d. Hutan rakyat	43.315
	e. Pengembalaan	3.232
	f. Sementara tidak diusahakan	55.987
	g. Lain-lain	529.810
<b>II.</b>	<b>LAHAN BUKAN PERTANIAN</b>	<b>489.080</b>
	a. Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	489.080
	Jumlah	<b>1.664.018</b>

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 3,36% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

## 2. Potensi Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat 654.561,34 Ha yang terdiri dari 432.883,52 Ha Hutan Produksi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Konservasi dan 692,59 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.

**Tabel I.4**  
Luas Hutan Tahun 2013 s.d 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	432.882,82	432.882,82	432.882,82	432.882,82	436.647,89
Hutan Lindung	189.965	189.965	189.965	189.965	184.276,95
Hutan Konservasi	35.473	35.473	35.473	35.473	35.750,84
Hutan Produksi Konversi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
<b>Jumlah</b>	<b>659.014,58</b>	<b>659.014,58</b>	<b>659.014,58</b>	<b>659.014,58</b>	<b>657.378,26</b>

*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018*

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

### 3. Potensi Kelautan, Pesisir dan Perikanan

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman.

Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada tabel I.5.



**Tabel I.5**  
Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	199.241,40	203.284,40	139.632,96	196.704,00	208.019,7
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	2.939,12	4.198,62	4.305,29	4.618,87	3.844,97

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

#### **a) Perikanan Budidaya**

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 tercatat sebesar 3.844,97 ton. Produksi ini turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.618,87 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2016 disumbangkan oleh produksi udang vannamei, rumput laut dan kerang-kerangan.

#### **b) Perikanan Tangkap**

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km<sup>2</sup> atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 208.019,7 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar 196.704,00 Ton dimana jumlah produksinya 196.704,00 ton. Hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

### **4. Potensi Pertambangan**

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel I.9 berikut.

**Tabel I.6**  
Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(3)
1	Pasir Kwarsa	1.482.301 ton
2	Pasir Bangunan	666.188,06 ton
3	Kaolin	205.487,50 ton
4	Granit	55.508,29 m3
5	Diabas	89.551,12 m3

*Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

## 5. Potensi Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis juga mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar I.4 berikut.

**Gambar I.3**  
Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya SKPD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

**Tabel I.7**  
Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2013 s.d 2018  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri	236.370	369.743	465.554	460.236	362.279	384.596
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	2.035	3.020	4.690	6.613	7.143	7.497
3.	Jumlah	238.405	372.763	470.244	466.876	369.422	390.465

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2013 jumlah wisatawan sebanyak 238.405 orang meningkat di tahun 2014 menjadi 372.763 orang dan pada tahun 2018 sebesar 390.465 orang.

#### **b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dan menyusun rencana pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan suatu daerah merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi. Selain pemerintah, pelaku pertumbuhan ekonomi adalah rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor.

Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan kerja keras yang terarah, sehingga pencapaiannya tepat sasaran dan tepat waktu.

**Tabel I.8**  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010=100)  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (miliar rupiah), 2014-2018

PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	56.373,6	60.992,1	65.048,2	69.861,2	73.069
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	44.159,4	45.961,5	47.848,3	49.986,8	52.212

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan. Hal ini diharapkan pada tahun mendatang kondisi perkeonomian semakin lebih meningkat.

### 1.) Struktur Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010.

Perkembangan sektor-sektor pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel I.9 dan Tabel I.10. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; serta sektor industri pengolahan merupakan 4 (empat) sektor utama yang relatif dominan menggerakkan perekonomian daerah. Dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling dominan, diikuti oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori pertambangan dan penggalian.

**Tabel I.9**  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014 –2018  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.748,3	12.060,4	13.117,1	13.135,7	13.159,5
Pertambangan dan Penggalian	7.622,8	7.735,4	7.743,3	8.182,0	7.741,5
Industri Pengolahan	12.877,3	12.888,4	13.074,0	14.237,9	15.078,7
Pengadaan Listrik, gas	42,0	51,1	66,5	79,4	86,7
Pengadaan Air	10,4	12,1	13,1	15,04	14,81
Konstruksi	4.712,4	5.264,2	5.753,08	6.371,9	7.110,3
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	7702,4	8.634,1	9.621,63	10.840,52	11.471,23
Transportasi dan Pergudangan	2.125,6	2.461,8	2.642,1	2.900,0	3.104,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.321,4	1.459,8	1.609,0	1.734,0	1.896,8

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Informasi dan Komunikasi	849,1	941,7	1.034,0	1.135,3	1.254,8
Jasa Keuangan	998,5	1.095,3	1.198,1	1.280,6	1.408,1
Real Estate	1.823,4	1.964,7	2.104,4	2.281,2	2.517,5
Jasa Perusahaan	154,0	169,6	176,3	196,7	217,2
Administrasi Pemerintahan	3.025,6	3.471,6	3.781,6	4.116,3	4.372,0
Jasa Pendidikan	1.362,8	1.639,7	1.859,5	1.190,3	2.128,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	629,9	710,7	759,8	845,2	905,7
Jasa Lainnya	371,7	426,6	493,1	548,5	600,43
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>56.373,6</b>	<b>60.987,3</b>	<b>65.048,2</b>	<b>69.861,2</b>	<b>73.069,3</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

**Tabel I.10**  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 – 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.557.7	8.254.3	8.743.5	9.116.9	9.083.8
Pertambangan dan Penggalian	6.230.2	6.354.1	6.458.1	6.491.1	6.633.0
Industri Pengolahan	10.143.3	10.270.4	10.400.6	10.688.4	11.363.1
Pengadaan Listrik, gas	31.5	35.6	38.9	43.7	45.9
Pengadaan Air	7.3	7.7	8.1	8.6	9.4
Konstruksi	3.414.7	3.552.4	3.760.1	4.021.6	4.252.1
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	5.846.6	6.139.5	6.402.1	6.727.7	7.259.8
Transportasi dan Pergudangan	1.484.8	1.570.8	1.662.3	1.752.3	1.892.2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	931.0	1.000.6	1.034.8	1.086.5	1.136.5
Informasi dan Komunikasi	740.2	790.9	849.0	926.9	1.002.8
Jasa Keuangan	728.3	766.6	807.9	860.0	881.3
Real Estate	1.312.6	1.403.9	1.442.0	1.494.8	1.572.5
Jasa Perusahaan	108.1	115.7	120.3	120.4	127.5
Administrasi Pemerintahan	2.014.4	2.149.8	2.337.1	2.478.7	2.604.2
Jasa Pendidikan	903.7	964.9	1.059.1	1.139.3	1.183.3
Jasa Kesehatan dan	475.3	500.6	533.8	559.6	605.4

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Kegiatan Sosial					
Jasa Lainnya	261.0	281.7	304.6	334.4	354.9
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>42.190.9</b>	<b>44.159.4</b>	<b>45.962.3</b>	<b>47.850.8</b>	<b>50.007.8</b>

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

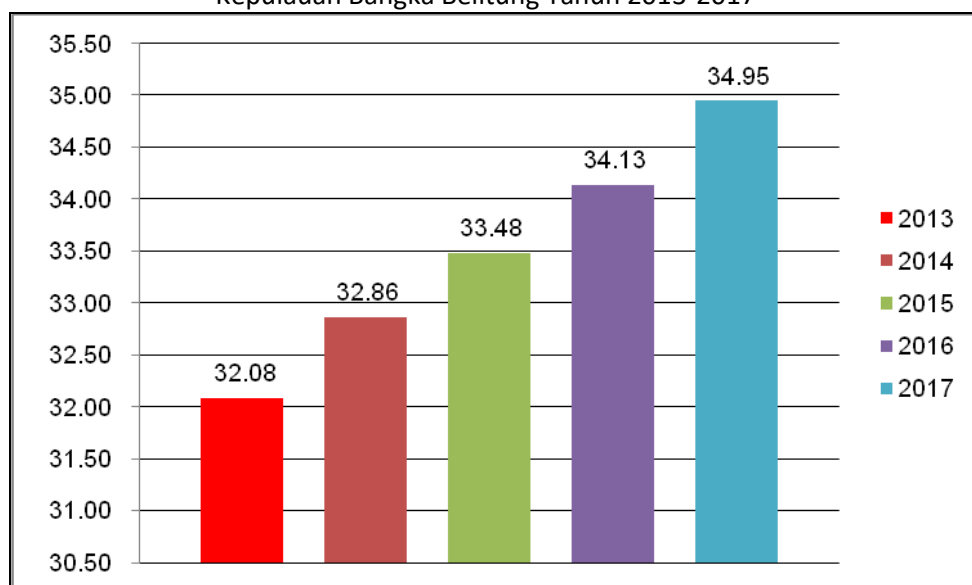
## 2.) PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 32.081.301,21 kemudian naik mencapai Rp. 34.949.314,51 rupiah pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 2.868.013,30. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013-2017, sebagaimana disajikan pada Grafik I.3

**Grafik I.3**  
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)  
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2017



# **BAB II**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

#### A. VISI DAN MISI

##### 1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***. Setidaknya ada lima makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. ***Unggul*** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. ***Teknologi*** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

##### 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

##### 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. ***Pembangunan ekonomi*** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.
2. **Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;**  
 Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
  - b. **Konektifitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. **Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;**  
 Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.
4. **Meningkatkan kesehatan masyarakat ;**  
 Pernyataan misi ini mengandung makna :  
**Kesehatan Masyarakat** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.
5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**  
 Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
  - b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.
6. **Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;**  
 Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
  - b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

### Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke

dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah**, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan :
  - a. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
    - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
    - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
    - Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
    - Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalan
    - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
    - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan.
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
    - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
  - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
    - Menurunnya angka Pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran
    - Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
    - Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

**Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)
    - Ketersediaan Air Baku (M3)
    - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
  - b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
    - Persentase kawasan permukiman yang tertata
    - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
  - c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
    - Persentase armada pengangkutan
    - Persentase jalan kondisi mantap

**Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

**Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat.

**Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
    - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
    - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
    - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
  - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Indeks Profesionalitas ASN
    - Nilai rata-rata delapan area perubahan
  - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)
    - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Skor aspek kebebasan sipil
    - Skor aspek hak-hak politik
    - Skor aspek lembaga demokrasi

**Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah.
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
    - Indeks Air
    - Indeks Udara
    - Indeks Tutupan Lahan
    - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refosmasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan antar lain sebagai berikut :

### **a) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan;
  - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
  - c. Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
  - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
  - e. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
3. Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
  - b. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
  - c. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
  - d. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan

### **b) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan arah kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan

2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan
  - b. Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
  - c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
  - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
  - e. Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
  - b. Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
  - c. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
  - d. Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
  - e. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
  - f. Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

**c) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
  - b. Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
  - c. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
  - d. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
  - e. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
  - f. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
  - g. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.



2. Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
  - b. Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
  - c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
  - d. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
  - e. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
  - f. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
  - g. Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
  - h. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
3. Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
  - a. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
  - b. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

**d) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral.
- b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk sumber daya mineral.
- c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral.
- d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertambangan khususnya sektor sumber daya mineral.
- e. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral.

**e) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis industri dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
- b. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
- c. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
- d. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
- e. Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
- f. Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri

**f) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya kemandirian energi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah dengan arah kebijakan Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;

**g) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya belanja publik pemerintah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan arah kebijakan Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

**h) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Pengangguran dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penciptaan peluang kesempatan kerja
- b. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan

**i) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

**j) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Inflasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
- b. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi.

**k) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

**l) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
2. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku

**m) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
2. Meningkatkan penataan kawasan permukiman dengan arah kebijakan Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.

**n) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
2. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung jalan dan terminal
3. Meningkatkan aksesibilitas dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan

**o) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. peningkatan mutu layanan pendidikan.
  - b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
  - c. Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

**p) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
- b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
- d. Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza

**q) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
5. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakan Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa

**r) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
  - b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
2. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

**s) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien

- b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
- c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
- d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
- e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

**t) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

- 1. Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
  - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
- 2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
- 3. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi dengan arah kebijakan Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

**u) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

- 1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
  - b. Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur.

**v) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

- 1. Meningkatkan kualitas air dengan arah kebijakan Pengendalian kualitas air
- 2. Meningkatkan kualitas Udara dengan arah kebijakan pengendalian kualitas udara
- 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan tutupan lahan
  - b. Pengembangan Perhutanan Sosial
- 4. meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- b. Pengembangan kawasan TPA Regional

### **C. PRIORITAS DAERAH**

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk program dan kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

#### **1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan**

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

#### **2. Pembangunan Bahari**

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

#### **3. Pengembangan Pariwisata**

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city*.

#### **4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan**

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

#### **5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah**

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

#### **6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

#### **7. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan**

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

## **8. Pembangunan Pendidikan**

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/entrepreneur bidang pariwisata di Babel

## **9. Pembangunan Kesehatan**

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

## **10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanan Publik**

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi ( smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

## **11. Pembangunan Berdemokrasi**

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

## **12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan**

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.



### **13. Pengendalian Lingkungan Hidup**

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahar; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

#### **Tema Prioritas Pembangunan Daerah**

1. Tahun 2018, Tema Prioritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”.
2. Tahun 2019, Tema Prioritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”.
3. Tahun 2020, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah”.
5. Tahun 2022, Tema Prioritas Pembangunan “Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana”.

**Tabel. II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**  
**RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Visi**

***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
<b>Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah</b>				
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Pertumbuhan PDRB	1 Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
			2 Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan
			3 Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
			4 Meningkatnya produksi sektor pertambangan	4 Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalan
			5 Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5 Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan
			6 Terwujudnya kemandirian energi	6 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan
2	Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat	1 Pengeluaran pemerintah perkapita	1 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	1 Persentase Pertumbuhan belanja pemerintah daerah
		2 Pendapatan perkapita	1 Menurunnya angka	1 Persentase Angka Pengangguran

No.	Tujuan	Indikator KinerjaTujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
		masyarakat	Pengangguran	
			2 Menurunnya angka kemiskinan	2 Persentase Angka Kemiskinan
			3 Menurunnya angka Inflasi	3 Persentase TingkatInflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			4 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4 Persentase laju pertumbuhan Penduduk
Misi II.Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas				
3	Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	1 Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	1 Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;	1 Terbangunnya daerah irigasi (ha)
				2 Ketersediaan air baku (m3)
			2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	1 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
				2 Persentase kawasan permukiman yang tertata
				3 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
			3 Meningkatkan konektivitas antar wilayah	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
				2 Persentase armada pengangkutan
				3 Persentase jalan kondisi mantap
Misi III.Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal				

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
4	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah gabungan, rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	1 Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	1 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)
<b>Misi IV.Meningkatkan kesehatan masyarakat</b>				
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup gabungan, Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
<b>Misi V.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi</b>				
6	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan
				2 Tingkatkematangan Maturitas SPIP
				3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi
				4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			2 Birokrasi yang efektif dan efisien	1 Indeks Profesionalitas ASN
			3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
				2 Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
7	Meningkatkan pembangunan demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	1 Skor aspek kebebasan sipil 1 Skor aspek hak-hak politik 1 Skor aspek lembaga demokrasi
<b>Misi VI . Ppengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup</b>				
8	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	1 Indeks Resiko Bencana	1 Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	1 Indeks kapasitas Bencana Daerah
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas air sungai 2 Indeks kualitas udara 3 Indeks tutupan 4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

**Tabel.II.2**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis**

**Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
<b>Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah</b>			
<b>1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi</b>	<b>1 PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN</b>	1 Meningkatkan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah pertanian berkelanjutan
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan
			3 Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan
	<b>2 PEMBANGUNAN BAHARI</b>	2 Meningkatkan produksi Sub Sektor perikanan	4 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
			5 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
			6 Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanaan
	<b>3 PENGEMBANGAN PARIWISATA</b>	3 Meningkatkan pengembangan Pembangunan pariwisata	7 Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata
			8 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
			9 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
	<b>4 PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN</b>	4 Meningkatkan Produksi sektor pertambangan	10 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
		5 Meningkatnya pembangunan	11 Mengembangkan Kawasan industri berbasis

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
		berbasis industri	potensi daerah
		6 Terwujudnya kemandirian energi	12 Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah
2 Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	5 <b>PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH</b>	7 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	13 Meningkatkan pendapatan asli daerah
	6 <b>PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT</b>	8 Menurunnya angka Pengangguran	14 Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
		9 Menurunnya angka kemiskinan	15 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
		10 Menurunnya angka Inflasi	16 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
		11 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	17 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
<b>Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas</b>			
3 Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	7 <b>PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR DAN</b>	12 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	18 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian
			19 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
		13 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	20 Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			21 Meningkatkan penataan kawasan permukiman
			22 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
		14 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	23 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut
			24 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat
			25 Meningkatkan aksesibilitas
<b>Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal</b>			
4 Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	8 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	15 Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	26 Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
			27 Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
<b>Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat</b>			
5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9 PEMBANGUNAN KESEHATAN	16 Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	28 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
<b>Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi</b>			
6 Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	10 PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	17 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	29 Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
			30 Peningkatan tata kelola pengawasan
			31 Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
			32 Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
			33 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
		18 Birokrasi yang efektif dan	34 Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor



TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
		efisien	hasil pencapaian reformasi birokrasi
			35 Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
		19 Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	36 Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
			37 Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
7 Terwujudnya pembangunan demokrasi	11 PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI	20 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	38 Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif
			39 Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
			40 Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
<b>Misi VI . Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup</b>			
8 Meningkatnya tata kelola kebencanaan	12 PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	21 Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	41 Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
			42 Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
9. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	13 PENEGNDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	22 Peningkatan Kualitas Lingkungan	43 Meningkatkan kualitas air
			44 Meningkatkan kualitas Udara
			45 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
			46 Meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan

# BAB III



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

**BAB III**  
**URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**A. URUSAN KONKUREN**

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, organisasi perangkat daerah pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib  
Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Sosial.	1. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Tabel 3.2**  
**Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib**  
**Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

<b>NO.</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PELAKSANA</b>
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Pangan	Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Pertanahan	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Kepulauan Bangka Belitung
18	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.3  
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Pilihan

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Pertanian	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.4  
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Fungsi Penunjang Lainnya	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Fungsi Penunjang Lainnya	Sekretariat DPRD
3	Fungsi Penunjang Lainnya	Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	- Perencanaan - Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian, Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Kuangan	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7	Fungsi Penunjang Lainnya	Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## **a. RINGKASAN URUSAN WAJIB**

### **▪ Pendidikan**

#### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

##### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi
- Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi
- Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional
- Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan PAUD oleh Kab/Kota
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas
- Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA
- Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA
- Pengembangan Kurikulum SMA
- Pemberian Beasiswa Siswa SMA
- Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)

##### **Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan**

- Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK

##### **Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus**

- Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus
- Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus
- Pengembangan kurikulum pendidikan khusus
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik)

**Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan**

- Peningkatan Mutu PTK SMA
- Peningkatan Mutu PTK SMK
- Peningkatan Mutu PTK SLB

**Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka**

- Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat

**Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat**

- Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat

- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parit Tiga, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok

**Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan**

- Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan



- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba

**Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur**

- Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan,

#### Belitung

- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur

#### **Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)**

- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka

(DAK Non Fisik)

- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)

- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten

#### Belitung (DAK Non Fisik)

- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)

### **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009, sampai dengan dilaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang SPM yang baru oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada kepastian format (bentuk) laporan yang akan disampaikan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi begitu pula bentuk laporan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat dan solusinya terus melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku leading sektor pelaksanaan SPM.

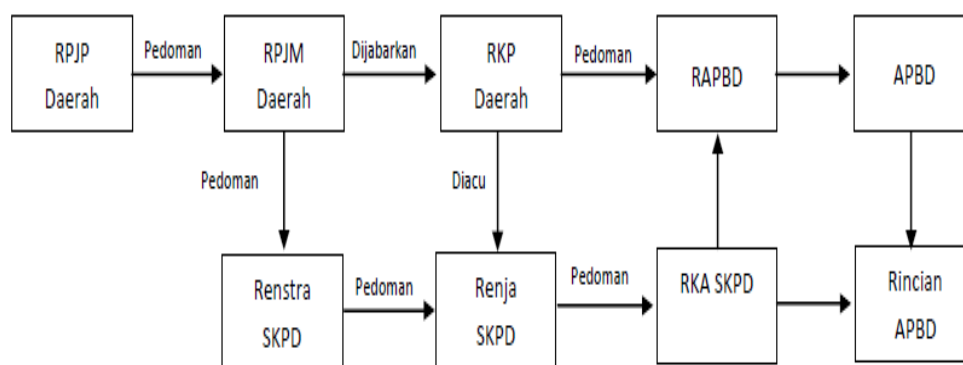
#### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	408		408
		Gol. III	1.507		1.507
		Gol.II	122		122
		Gol. I	9		9
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-		-
		S2	89		89
		S1	1.659		1.659
		D. IV	8		8
		D. III	137		137
		D.I	2		2
		SMA/ sederajat	130		130
		SMP/ sederajat	3		3
		SD/ sederajat	0		0
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1		1
		Eselon III	5		5
		Eselon IV	80		80
		Fungsional:			
		Tertentu	1.761		1.761
		Umum	199		199
JUMLAH TOTAL					2.046

#### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
235.860.540.205	9.391.469.000	187.072.318.898	48.081.353.403	480.405.681.506	445.081.042.472,48	92,65	Dinas Pendidikan

#### 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	✓	-	-

## 8. Permasalahan dan solusi

### Permasalahan

- Belum semua Sekolah SMA terakreditasi minimal B
- Hasil ujian nasional siswa SMA di peringkat dibawah rata-rata nasional
- Tingkat keterlayanan pendidikan menengah dibawah 95 %
- Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan, bidang Perikanan dan Kemaritiman, bidang Pariwisata dan bidang kesehatan.
- Kualifikasi guru rendah
- Terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
- Penilaian LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi baru mencapai 76 (BB)
- Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah belum optimal
- Pembiayaan operasional sekolah belum memadai

## **Solusi**

- Memenuhi Sarana Prasarana Sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan
- Peningkatan Kompetensi Guru
- Try out UN
- Memberikan motivasi bagi siswa antara lain penyediaan beasiswa prestasi bagi siswa berprestasi
- Penambahan daya tampung (Ruang Kelas Baru atau Unit Sekolah Baru).
- Pengembangan LSP SMK Bidang Pertanian, perkebunan dan perternakan bidang Perikanan dan Kemaritiman, bidang Pariwisata dan bidang kesehatan.
- Pemenuhan Sarana Produktif SMK Bidang pertanian, perkebunan dan Perternakan, bidang Perikanan dan Kemaritiman, bidang Pariwisata dan bidang kesehatan
- Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan
- Penyesuaian Program Keahlian SMK dengan sektor unggulan daerah dan kondisi wilayah.
- Kerjasama dengan DUDI serta Instansi Pemerintah Lainnya dibidang pertanian, perkebunan dan Perternakan, bidang Perikanan dan Kemaritiman, bidang Pariwisata dan bidang kesehatan
- Peningkatan Kompetensi Guru
- Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)
- Penambahan Jumlah GTK sesuai dengan analisis kebutuhan GTK.
- Pembangunan Asrama Siswa.
- Penerapan Pendidikan keluarga di satuan pendidikan.
- Revitalisasi Guru BK
- Penerapan Pendidikan Inklusi
- Optimalisasi Fungsi PLA
- Mendeteksi dini siswa berkebutuhan khusus
- Pemerataan guru dan tenaga kependidikan
- Peningkatan Kesejahteraan guru.
- Pemberian penghargaan bagi guru
- Pelaksanaan lomba-lomba GTK.
- Sinkronisasi dan koordinasi yang optimal untuk penyusunan dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja
- Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah berbasis kebutuhan
- Dukungan pembiayaan dana BOS melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

## **■ Kesehatan**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan



Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **7. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

### **Dinas Kesehatan**

#### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Labkes

#### **Program Kesehatan Masyarakat.**

- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Box Provinsi (Dak Non Fisik)
- Penurunan Kematian Ibu.
- Penurunan Angka Kematian Bayi
- Peningkatan Kesehatan Gizi Anak dan Keluarga
- Peningkatan Penyehatan Lingkungan
- Peningkatan Kesehatan Kerja dan olahraga
- Upaya Peningkatan Kesehatan keluarga.

#### **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB
- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian HIV
- Peningkatan Pengendalian Penyakit malaria
- Penanganan Penyakit Menular Lainnya (Hepatitis, Ispa, diare, kusta, filariasi, DBD, Zoonosis)
- Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kanker
- Peningkatan Pencegahan Penyakit tidak menular Lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas diabetes melitus)
- Peningkatan Penanganan Pelayanan Kesehatan Jiwa
- Peningkatan surveilans, imunisasi dan Kesehatan situasi khusus

#### **Program Pelayanan Kesehatan**

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer.
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

#### **Program Pengembangan Sumber daya Kesehatan.**

- Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan /SDMK
- Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

- Peningkatan Ketersediaan Alkes dan PKRT
- Kefarmasian Dinkes Provinsi (Dak Fisik)
- Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan.
- Akreditasi Laboratorium ( DAK Non Fisik )

### **Rumah Sakit Jiwa Daerah**

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Rumah Sakit dengan Klasifikasi Kelas B berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.03/I/0470/2015 tanggal 2 Maret 2015. Berdasarkan SK Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) nomor KARS-SERT/914/XI/2017 tanggal 24 November 2017 maka ditetapkan mencapai Tingkat Paripurna. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Direktur Utama (eselon II B) dengan 2 Orang Direktur (eselon III A) dan 4 orang eselon III B dan 8 orang Eselon IV A

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### **Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA**

- Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGI
- Penjangkauan Bebas Pasung
- Promosi Kesehatan Jiwa
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit
- Survey Kepuasan Masyarakat

#### **Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA**

- Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Homesivite
- Penyusunan Panduan Praktik Klinis
- Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
- Penilaian Akreditasi
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
- Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
- Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)
- Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial
- Rehabilitasi Dapur Gizi
- Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Minum
- Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
- Rehabilitasi Gedung Laundry
- Pembangunan Selasar

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
- Pengujian dan Kalibrasi Rumah Sakit
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
- Pengadaan Alat-alat Laundry
- Pengadaan PABX dan Jaringannya
- Pengadaan Genset
- Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen
- Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)
- Pengembangan SIMRS
- Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Rumah Sakit
- Pengadaan Master Plan Rumah Sakit
- Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)

#### **Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**

- Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

#### **Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### **Program Pelayanan Teknis Perawatan**

- Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Standar Operasional Prosedur Keperawatan

#### **Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis**

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Upaya Kesehatan Masyarakat

#### **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit**

- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- Pembangunan Gedung B Rumah Sakit
- Pembangunan dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kelas 3 Rumah Sakit
- Review DED dan Masterplan
- Perluasan IPAL
- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)

#### **Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**

- Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

### **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009, sampai dengan dilaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang SPM yang baru oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada kepastian format (bentuk) laporan yang akan disampaikan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi begitu pula bentuk laporan dari Pemerintah Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan solusinya terus melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku leading sektor pelaksanaan SPM.

#### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

##### Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	22	-	22
		Gol. III	88	-	88
		Gol.II	17	-	17
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	27	-	27
		S1	63	-	63
		D. IV	3	-	3
		D. III	27	-	27
		D.I	1	-	1
		SMA/ sederajat	6	-	6
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	18	-	18
		Fungsional:			
		Tertentu	34		34
		Umum	68		68
JUMLAH			127		127

##### Rumah Sakit Jiwa Daerah

No	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	160	-	160
		Gol. II	42	-	42
		Gol. I	1	-	1
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	0
		S2	11	-	11
		S1	80	-	80
		D IV	1	-	1

		D III	69	-	69
		D II/I	1	-	1
		SMA/Sederajat	46	-	46
		SMP/Sederajat	1	-	1
		SD/Sederajat	2	-	2
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		- Eselon II	1	-	1
		- Eselon III	4	-	4
		- Eselon IV	10	-	10
		Fungsional	196	-	196
<b>JUMLAH</b>			<b>211</b>		<b>211</b>

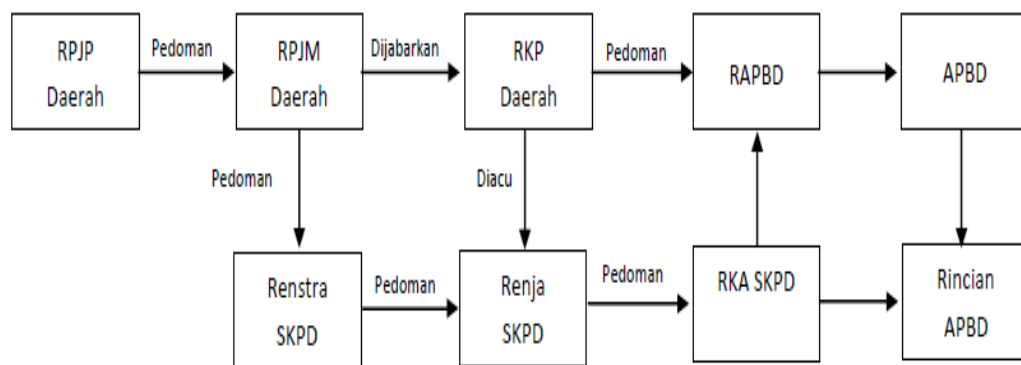
#### Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	11	-	11
		Gol. III	135	-	135
		Gol.II	95	-	95
		Gol. I			
II.	Berdasarkan Pendidikan	S2	1	-	1
		Sp-1	14	-	14
		S1	68	-	68
		D. IV	5	-	5
		D. III	150	-	150
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	-	-	-
		SMP/ sederajat	3	-	3
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	-	-	-
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	8	-	8
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	184	-	184
		Umum	44	-	44
<b>JUMLAH</b>			<b>241</b>		<b>241</b>

#### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.356.741.031,00	910.895.500,00	35.291.367.336,00	1.775.774.456,00	52.334.778.323,00	46.214.838.494,16	88,31	Dinas Kesehatan
26.877.057.605,90	785.484.000,00	24.425.819.134,00	11.854.558.372,00	63.942.919.111,90	53.356.282.906,92	83,44	Rumah Sakit Jiwa Daerah
31.649.306.291,00	1.122.162.500,00	38.368.984.554,00	82.090.045.000,00	153.230.498.345,00	139.553.445.803,72	91,07	RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno
<b>72.883.104.927,90</b>	<b>1.122.162.500,00</b>	<b>62.793.453.688,00</b>	<b>93.944.603.372,00</b>	<b>269.508.195.779,90</b>	<b>239.124.567.204,80</b>	<b>88,73</b>	

#### 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

### Dinas Kesehatan

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
✓	-	-	

### Rumah Sakit Jiwa Daerah

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	✓	-	Kondisi SARPRAS yang ada untuk menunjang tugas dan fungsi masih kurang

#### **Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	✓	-	

### **8. Permasalahan dan solusi**

#### **Dinas Kesehatan**

##### **Permasalahan:**

- Belum sinkronisasi dokumen perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat terhadap program ataupun indikator kinerja yang digunakan sebagai pelaksanaan program kesehatan di masing-masing wilayah kerja dan belum terintegrasi program program kesehatan secara internal maupun lintas sektor sehingga pencapaian kinerja kesehatan belum tercapai secara maksimal.
- Hasil evaluasi kinerja program belum maksimal digunakan untuk dasar perencanaan disetap program.
- e-Puskesmas yang diusulkan menggunakan dana bantuan (DABA) hanya disetujui untuk wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, untuk Kabupaten /Kota lainnya ditunda, sedangkan Kab. Bangka menjalankan e-Puskesmas tanpa menggunakan dana bantuan.
- Untuk aplikasi lasegar, masih dianggap belum memiliki kejelasan struktur dan wewenang penggunaan aplikasi dan keterkaitan aplikasi dengan pihak ke 3 yang berkaitan dengan pemasukan daerah harusnya memiliki perda yang menaturnya, belum adanya konsep terstrukturmenyebabkan keragaman dalam menjalankan lasegar.
- Belum tercapainya target (100%) cakupan kunjungan ibu hamil K4 (88,65%)
- belum tercapainya target (100%) cakupan persalinan yang ditolong di fasilitas pelayanan kesehatan/fasyankes (80,56)
- Peningkatan kasus kematian ibu 43 kasus/27.364 KH dari tahun sebelumnya (21 kasus/23.294 KH)
- Meningkatnya kasus kematian neonatus sebesar 126 kasus dari kasus tahun sebelumnya 144 kasus, kematian bayi sebesar 166 kasus 6,06/1000KH menurun dari tahun sebelumnya sebesar 7,20/1000KH
- Umur kematian neonatus terbesar terdapat pada usia kurang dari 1 minggu (91 kasus/72,22%)
- Kasus lahir mati yaitu 176 kasus meningkat dari tahun 2017 sejumlah 153 kasus
- belum tercapainya target program berdasarkan data tahun 2018, persentase balita yang ditimbang berat badanya 67,41% menurun dari tahun 2017 sebesar 71,93%, persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah

darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan 94%, persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan 95,90%

- Masih adanya perbedaan persepsi mengenai definisi operasional kasus gizi buruk terutama oleh tenaga kesehatan lain dan pimpinan institusi kesehatan.
- Kabupaten Belitung timur belum terbentuk Kabupaten/Kota Sehat dan Belum semua kabupaten/Kota mempunyai pasar sehat yang memenuhi syarat kesehatan.
- Seluruh puskesmas dan rumah sakit yang dilakukan survey belum melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan secara internal.
- Sistem verifikasi desa/kelurahan STBM masih ada perubahan oleh kementerian kesehatan RI dan sistem pelaporan Penyehatan pangan yang bersifat *online* belum bias digunakan dan dukungan kabupaten terhadap petugas kesehatan lingkungan puskesmas belum maksimal dalam *updating* data.
- Kurangnya advokasi Kab/Kota dan Puskesmas terhadap lintas sektor untuk masalah kesehatan masyarakat.
- Kurangnya SDM terlatih dan sarana prasarana untuk pelaksanaan layanan HIV-AIDS dan IMS di fasyankes.
- Pelaporan secara esismal masih belum maksimal sehingga pelaporan masih diimbangi laporan secara manual, disebabkan karena kurangnya SDM dalam pengoperasian computer dan jumlah alat pengolah data/computer di puskesmas yang terbatas.
- Pengendalian vektor hanya terfokus pada kegiatan rutin seperti IRS (*indoorresidualsprayingataupenyemprotanrumahdenganinsektisida/racunnya muk*) dan distribusi kelambu LLIN'S (*long lastinginsectisidenet's*) sedangkan untuk kegiatan pemetaan tempat perindukan vektor malaria serta kegiatan larvaciding atau kegiatan membunuh jentik nyamuk malaria dengan racun jentik nyamuk/larvasidadilagin-lagin,tambak-tambak belum maksimal
- Follow up pengobatan di puskesmas belum maksimal karena terkendala anggaran minim untuk petugas follow up
- Muncul kasus positif yang didominasi falsifarum terjadi pada penduduk pendatang dari buton, jawa, sumsel) yang melakukan pencarian timah serta menginap/membuat kamp/rumahsementara di pesisir pantai maupu jauh dari pesisir pantai di wilayah puskesmas
- Penyelidikan epidemiologi malaria sudah dilakukan puskesmas sekaligus melaksanakan MBS (*Mass Blood Survei*), PE dilakukan dengan dana BOK Puskesmas, namun belum maksimal di kab.bangka barat sehingga belum mampu memutuskan mata rantai penulatan malaria.
- Semua kasus malaria positif tidak terfollow up lengkap karena pasien positif malaria tidak kembali lagi ke puskesmas untuk pemeriksaan ulang dan follow up hasil pengobatan
- Munculnya kasus positif malaria di pesisir pantai maupun jauh dari pesisir pantai secara ilegal di wilayah kerja puskesmas dikarenakan daerah tersebut masih dikatakan daerah penularan atau bukan lagi daerah reseptif karena masih terjadi transmisi penularan ditandai dengan ditemukannya parasit malaria pada penambang ilegal, adanya lagun bekas kolong yang terdapat jentik nyamuk malaria (*anopheles*)/nyamuk *anopheles* di sekitar kamp



penambang timah ilegal di dusun tersebut.

- Kurangnya fasilitas laboratorium untuk deteksi dini penyakit menular lainnya.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi dini kanker serviks dan payudara
- masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama di daerah pedesaan yang belum tersentuh informasi tentang bahaya kanker serviks dan payudara
- Persediaan alat dan bahan habis pakai yang masih belum continue (terus menerus) dan Kerjasama lintas sektor yang belum maksimal
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi faktor resiko penyakit tidak menular
- Persediaan alat dan bahan habis pakai yang masih belum continue (terus menerus)
- Belum semua Kabupaten/Kota membentuk TPKJM, sehingga koordinasi dengan lintas sektor terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa masih belum optimal
- Pengelolaan ketersediaan obat program jiwa belum maksimal
- Masih kurangnya tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan dan IPWL
- Kurangnya promosi kepada masyarakat tentang layanan IPWL
- Kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk memfokuskan kegiatan dan memperpanjang kampanye imunisasi MR sampai 31 desember 2018 sehingga kegiatan lain yang telah disusun bersamaan waktunya dengan kampanye MR tersebut.
- Masih rendahnya anggaran yang direncanakan oleh Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- Adanya Narasumber dan peserta yang tidak bisa hadir sehingga penyerapan anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah rendah
- Masih ada kepala daerah yang tidak berkomitmen untuk memenuhi UU No. 44/2009 tentang rumah sakit yang mensyaratkan bahwa Direktur Rumah Sakit adalah seorang tenaga medis, sehingga menghambat survey verifikasi hasil penilaian akreditasi rumah sakit yang dilakukan oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) pada tahap akreditasi tingkat lanjut.
- Masih rendahnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional KIS menuju UHC yang kurang dari 95% dari sejumlah seluruh penduduk.
- Masih rendahnya informasi tentang pengelolaan JKN KIS
- Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 di Sub Bidang SDM Kesehatan masih terdapat kekurangan dalam masalah koordinasi baik dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun dengan bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri maka untuk itu kami menawarkan beberapa solusi atas permasalahan yang ada selama pelaksanaan kegiatan di 2018.
- Penyusunan rencana kebutuhan obat belum sepenuhnya berdasarkan data-data yang valid antara lain data ketersediaan obat dan data pemakaian obat, belum optimalnya koordinasi antara pengelola program dengan pengelola farmasi dalam penyusunan rencana kebutuhan obat.
- Penyedia obat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditetapkan.

- Kegiatan penyuluhan keamanan Pangan (PKP) bagi IRTP tidak diikuti oleh satu Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan kegiatan yang serupa dengan anggaran sendiri, sampel makanan yang akan diuji tergantung dari proses produksi IRTP sehingga ada beberapa IRTP tidak membawa sampel untuk diuji, sampel yang diuji beranekaragam sehingga tidak bisa mematok secara pasti biaya pengajuan untuk sampel tersebut. Selain itu kegiatan penyuluhan keamanan Pangan (PKP) juga dilaksanakan instansi lain seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan target yang sama.
- Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan penyalur alkes dan PKRT tidak dilaksanakan karena sudah dianggarkan menggunakan dana dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DK-07)
- Pembinaan dan Pengawasan ketersediaan Alkes dan PKRT di Fasyankes, pada saat dilaksanakan pembinaan dan pengawasan petugas pengelola alkes dan PKRT tidak ada ditempat.

**Solusi:**

- Sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten Kota khususnya program kesehatan sesuai dengan pembagian tugas, fungsi/peran dan kewenangan masing-masing serta pengintegrasian program kegiatan bidang kesehatan secara internal maupun lintas sektor.
- Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja program kegiatan secara berkala (pemanfaatan di perencanaan program)
- DABA tahun 2020, hendaknya memprioritaskan e-puskesmas untuk di implementasikan data berkesinambungan serta penguatan sarana dan prasarana terkait e-puskesmas.
- Adanya konsep yang jelas dan terstruktur dalam penggunaan lasegar dan peraturan yang jelas terkait pemasukan daerah dikarenakan adanya fitur kerjasama dengan pihak ke 3.
- Koordinasi lintas program dan lintas sektor meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu dan P4K di setiap desa/kelurahan, penguatan manajemen pencatatan dan pelaporan di fasyankes swasta.
- Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang persalinan di fasyankes perlu ditingkatkan termasuk mutu fasilitas pelayanan kesehatan.
- Advokasi ke stakeholder terkait koordinasi lintas program dan lintas sektor meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes audit maternal perinatal dan Surveilans kematian Ibu.
- Advokasi ke stakeholder terkait, koordinasi lintas program dan lintas sektor, meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes, audit Maternal Perinatal
- Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, Meningkatkan kualitas kunjungan Neonatus dengan penerapan manajemen terpadu bayi muda, mutu fasilitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas antenatal terpadu, pengenalan tanda bahaya.
- Intervensi gizi spesifik: pelayanan gizi bagi anak balita, a. meningkatkan pelayanan bagi anak balita di Posyandu dengan melakukan pengukuran rutin

status gizi anak balita (BB/TB/PB) b. merujuk anak yang tidak naik dua kali berat badannya menangani anak dengan gizi buruk yang dirujuk dan diberikan PMT, pelayanan gizi bagi ibu hamil, a. meningkatkan pelayanan gizi ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan antropometri ibu hamil, b. pemberian tablet Fe 90 tablet, pelayanan gizi remaja putri, a. meningkatkan pelayanan gizi remaja putri disekolah dengan pemberian tablet tambah darah 52 tablet b. konseling gizi remaja dan PMT AS, untuk intervensi gizi sensitif: melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan masalah gizi, meningkatkan peran serta masyarakat bersama kader dan keluarga, pendekatan dengan Tim RAD pangan Daerah, pendekatan melalui sekolah, pendekatan ke Rumah sakit dalam menetapkan kebijakan terkait pemberian ASI dan susu formula.

- Melakukan sinkronisasi atas perbedaan data dan definisi operasional masing – masing kegiatan, melakukan *fee back* data triwulan ke kabupaten/Kota.
- Menyampaikan *feed back* hasil koordinasi dengan dinas kesehatan dan Bappeda kabupaten Belitung timur dengan harapan pihak yang berkepentingan (pemerintah daerah) untuk melakukan tindak lanjut pembentukan tim Kabupaten sehat.
- Menyampaikan *feed back* hasil survey dan mengharapkan pihak yang berkepentingan (pemerintah daerah) untuk melakukan tindak lanjut permasalahan yang ditemukan.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian kesehatan terutama Direktorat kesehatan lingkungan Dirjend kesehatan masyarakat berkaitan dengan aplikasi maupun juknis verifikasi desa/kelurahan STBM.
- Mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia sekaligus menggali kemitraan dengan pihak swasta.
- Advokasi ke pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan layanan HIV-AIDS dan IMS.
- Advokasike Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pemenuhan alat pengolahan data di puskesmas dan pelatihan petugas puskesmas dalam pelaporan malaria secara esimal.
- Advokasiprogramdalammemaksimalkandukungandanakegiatanprogrampene muanpengobatanmalaria,survei-surveimalaria,pengendalianvektor/pengendaliannyamukmalariadaridukungan-dukunganstakeholderterkaitbaikdana APBD,APBN,BOKmaupundana hibah.
- Penemuan kasus positif malaria melalui pemeriksaan laboratorium malaria dengan RDT atau Mikroskop tetap dilakukan secara pasif di puskesmas, Rumah Sakit pemerintah/swasta maupun di dokter/klinik swasta serta secara aktif melalui kegiatan *mass blood survey* atau *mass fever survey* terhadap pasien penambang timah
- Puskesmas diwajibkan melakukan pengobatan malaria dengan ACT/Sesuai tatalaksana kasus malaria terupdate dengan follow up yang lengkap terhadap semua kasus yang positif hasil pemeriksaan laboratorium malaria dengan RDT atau Mikroskop secara pasif di puskesmas, Rumah Sakit pemerintah/swasta maupun di dokter/klinik swasta serta secara aktif melalui kegiatan *mass blood survey* atau *mass fever survey* terhadap pasien

- Puskesmas diwajibkan melakukan follow up secara lengkap terhadap semua kasus yang positif hasil pemeriksaan laboratorium malaria dengan Mikroskop secara pasif di puskesmas dan aktif dengan dana BOK.
- Kelambu diberikan kepada setiap penambang timah positif malaria dari daerah kamp2 tambang timah ilegal yang belum punya kelambu baik penambang dari pesisir pantai maupun jauh dari pesisir pantai (tambang darat)
- Kabupaten bersama puskesmas agar dapat melakukan IRS (*indoor residual spraying*) di kamp2 tambang timah ilegal yang terbuat dari kayu/papan daerah pesisir pantai maupun jauh dari pesisir pantai (tambang darat)
- Mengoptimalkan kegiatan deteksi dini penyakit menular lainnya.
- Peningkatan KIE kepada masyarakat
- Mengoptimalkan kegiatan posbindu PTM
- Mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia sekaligus menggalang kemitraan dengan pihak terkait.
- Pembentukan TPKJM di semua Kabupaten/Kota
- Meningkatkan koordinasi dengan bagian farmasi serta RSJD tentang ketersediaan obat program kesehatan jiwa
- Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan IPWL
- Mengoptimalkan pengguna dana yang sudah tersedia sekaligus menggalang kemitraan dengan lintas sektor.
- Menyusun jadwal ulang pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan imunisasi PCV yang difasilitasi oleh subdit imunisasi kemenkes RI dan clinton health access initiative (CHAI) dan kegiatan lainnya sehingga pada kegiatan peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus dapat dilaksanakan.
- Peningkatan KIE kepada masyarakat
- Meningkatkan koordinasi dengan kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan serta RSUD Kab/Kota untuk mensinkronisasikan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan sehingga kebutuhan Narasumber maupun sasaran peserta terpenuhi sesuai permintaan
- Melakukan advokasi dan koordinasi dengan Pemda Kab/Kota serta sosialisasi UU No 44/2009 tentang rumah sakit
- Perlu peningkatan pembiayaan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, sosialisasi dalam pembiayaan JKN KIS kepada masyarakat Kabupaten/Kota yang belum tahu, lintas sektor terutama karyawan perusahaan yang mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN KIS melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan.
- Perlu dilakukan pembinaan terus menerus terhadap petugas Kabupaten/Kota capacity building atau orientasi dalam peningkatan kemampuan terhadap pemahaman pengelolaan JKN.
- Meningkatkan Koordinasi dengan kementerian Kesehatan bidang PPSDM Kesehatan Republik Indonesia dalam hal pengembangan kompetensi SDM Kesehatan, Perlu adanya Rapat Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait pengembangan kompetensi SDM kesehatan mengenai kebijakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, Meningkatkan Koordinasi dengan pihak perencanaan

dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya agar tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan kerja Anggaran.

- Adanya Penyusunan secara berjenjang mulai tingkat Puskesmas, tingkat Kab/Kota dan Provinsi, mengoptimalkan TPOT (Tim Perencanaan Obat Terpadu) yang terjadi dari pengelola obat dan pengelola obat program.
- Pemberian sanksi atau mem-blacklist penyedia obat yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan
- Pemberitahuan terlebih dahulu kepada IRTP yang akan dilakukan penyuluhan keamanan Pangan (PKP) sehingga pemilik usaha dapat menyediakan sampel PIRT untuk diuji, Koordinasi lintas sektor khususnya penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan (PKP) seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Dinas lainnya di Kabupaten/Kota.
- Perencanaan kegiatan APBD dan APBN untuk mensinkronkan kegiatan sehingga tidak ada kegiatan yang tumpang tindih anggaran
- Pada saat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan bimbingan teknis untuk memastikan ada petugas yang dapat bekerja sama untuk proses pembinaan dan pengawasan serta bimbingan teknis.

#### **Rumah Sakit Jiwa Daerah**

- Dalam pengembangan pelayanan dan pengembangan sarana prasarana rumah sakit belum adanya masterplan Rumah Sakit agar pengembangan rumah sakit lebih terarah dan terukur.
- Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang memadai, sehingga pengelolaan pelayanan kesehatan belum bisa optimal.
- Belum bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dikarenakan kurangnya SDM / Tenaga pelayanan pada pelayanan di RS. Jiwa Daerah Prov. Kep.Babel.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas adalah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membuat masterplan rumah sakit sesuai dengan peraturan yang ada.
- Mengidentifikasi kebutuhan akan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan menyusun program pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dimana perangkat kerasnya telah tersedia dan untuk softwrenya diadakan untuk perangkat lunak tahun anggaran berikutnya.
- Adanya penambahan SDM / tenaga pelayanan agar terlaksananya pelayanan yang optimal pada tahun anggaran berikutnya.

#### **Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Permasalahan :

Sarana Gedung Pendukung Dan Alat-Alat Kesehatan Belum Memenuhi Standar Rumah Sakit Sesuai Permenkes 56 Tahun 2014

Solusi :

Menyediakan Anggaran Untuk Melengkapi Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar Permenkes 56 Tahun 2014.

## ▪ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur

#### **Program Kebinamargaan**

- Perencanaan Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jalan
- Perencanaan Pembangunan Jembatan
- Pembangunan Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- Inspeksi Kondisi Jalan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Inspeksi Kondisi Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium
- Pembangunan Jalan (DAK)
- Eskalasi Jembatan Baturusa II Paket 1 dan 2
- Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka

#### **Program Pengembangan Sumber Daya Air**

- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Banjir
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air
- Penyusunan Regulasi Air Permukaan
- Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)

#### **Program Penataan Ruang dan Pertanahan**

- Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang

**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**

- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

**Program Pengawasan dan Peralatan PUPR**

- Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
- Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009, sampai dengan dilaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang SPM yang baru oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada kepastian format (bentuk) laporan yang akan disampaikan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi begitu pula bentuk laporan dari Pemerintah Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan solusinya terus melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku leading sektor pelaksanaan SPM.

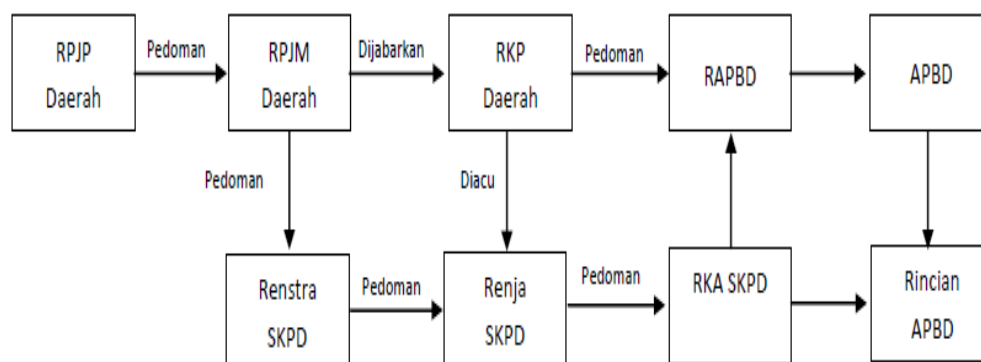
**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	102	-	102
		Gol.II	42	-	42
		Gol. I	1	-	1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-		
		S2	22	-	22
		S1/D. IV	71	-	71
		D. III	21	-	21
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	38	-	38
		SMP/ sederajat	1	-	1
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	15	-	15
		Fungsional:			
		Tertentu	7	-	7
		Umum	124	-	124
JUMLAH TOTAL			153	-	153

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.448.817.681,24	1.558.914.000	51.409.160.222,00	157.576.966.028	227.993.857.931,24	220.159.305.168,99	96,56	Dinas PUPR

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.



**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

- Kurangnya informasi data sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan.
- Kurangnya Sumber daya Manusia yang berkompeten pada bagian Perencanaan, Penataan Ruang dan Tenaga Teknik.

**Solusi**

- Disetiap bidang harus membuat data base dan menunjuk seorang staf khusus untuk mengolah data.
- Mengajukan permintaan Sumber Daya Manusia yang ahli dan berkompeten pada bagian perencanaan, penataan ruang dan tenaga teknik.

■ **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Program Keciaptakarya dan Permukiman**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman
- Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan

Rumah

- Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh
- Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-Gorong di Kawasan Kumuh
- Penyusunan DED Cluster Melayu
- Pembanguna Ruang Terbuka Hijau (RTH)

**Program Pembangunan Perumahan Rakyat**

- Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni
- Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana
- Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana
- Sosialisasi Pembiayaan Perumahan Kabupaten/Kota
- Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009, sampai dengan dilaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang SPM yang baru oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada kepastian format (bentuk) laporan yang akan disampaikan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi begitu pula bentuk laporan dari Pemerintah Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan solusinya terus melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku leading sektor pelaksanaan SPM.

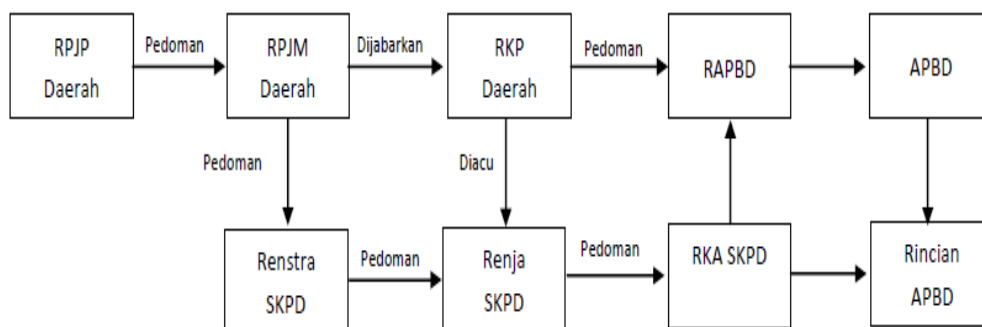
**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	5	-	5
		Gol. III	31	-	31
		Gol. II	8	-	8
		Gol. I			
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	13	-	13
		S1	20	-	20
		D. IV	2	-	2
		D. III	2	-	2
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	7	-	7
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	3	-	3
		Eselon IV	6	-	6
		Fungsional:			
		Tertentu	1	-	1
		Umum	33	-	33
JUMLAH TOTAL					

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.330.801.101,56	324,827,000,00	18,195,597,270,00	1,819,780,000,00	25.671.005.371,81	25.165.381.059,00	98,03	Dinas PERKIM

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan berkurangnya pagu anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- Pada Program Pembangunan Perumahan Rakyat kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Perumahan Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran .
- Pada Program Pembangunan Perumahan Rakyat kegiatan Survey Pembiayaan Micro Perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan Tidak tetap tidak dilaksanakan Karena rasionalisasi anggaran.
- Pada Program Keciaptakaryaan dan Permukiman pada kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk kegiatan fisiknya tidak bisa dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran.
- Pada Program Keciaptakaryaan dan Permukiman kegiatan Pembangunan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah paket pekerjaan Pengembangan Distribusi Air Minum Jalan Raya PELTIM Muntok batal dilaksanakan karena alasan keterbatasan waktu.

**Solusi**

Diperlukan proses perencanaan yang baik, professional sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan schedule dan anggaran yang telah ditetapkan.

■ **Sosial**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Sosial adalah Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

## **Dinas Sosial**

### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Penyuluhan Sosial
- Peningkatan dan Pengembangan perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah

### **Program Pemberdayaan Sosial**

- Pemberdayaan Keluarga
- Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP
- Peringatan Hari Pahlawan dan HKS
- Peningkatan Disiplin Aparatur

### **Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial**

- Pelayanan Psikososial bagi PMKS dipanti Sosial Bina Serumpun
- Peningkatan kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS
- Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial

### **Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial**

- Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien
- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti
- Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
- Penyediaan Bantuan UEP bagi eks Penghuni Panti
- Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti
- Rehabilitasi Ringan Prasarana Panti

### **Program Rehabilitasi Sosial**

- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
- Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA
- Pendampingan dan Advokasi Sosial Klien bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

### **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam
- Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial
- Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH

### **Program Penanganan Fakir Miskin**

- Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Warga Miskin
- Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)
- Pemberian bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis

## **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### **Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**

- Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana
- Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan dan Masyarakat
- Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana
- Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah

#### **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana**

- Pemeliharaan Jembatan Portable
- Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable
- Monitoring dan Evaluasi Pascabencana ke Kabupaten/Kota

#### **Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana**

- Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat
- Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana
- Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

### **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009, sampai dengan dilaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang SPM yang baru oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada kepastian format (bentuk) laporan yang akan disampaikan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi begitu pula bentuk laporan dari Pemerintah Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan solusinya terus melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku leading sektor pelaksanaan SPM.

### **4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

#### **Dinas Sosial**

No	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/Gol	Gol.IV	11	-	11
		Gol.III	55	-	55
		Gol.II	21	-	21
		Gol.I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S2	12	-	12
		S1	39	-	39
		D.1V	8	-	8
		D.III	12	-	12
		D.II	-	-	-

No	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		D.I	-	-	-
		SMA/Sederajat	16	-	16
		SMP / Sederajat	-	-	-
		SD / Sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktur			
		• Esselon II	1	-	1
		• Esselon III	7	-	7
		• Esselon IV	21	-	21
		• Fungsional	58	-	58
<b>Jumlah</b>			<b>87</b>	<b>-</b>	<b>87</b>

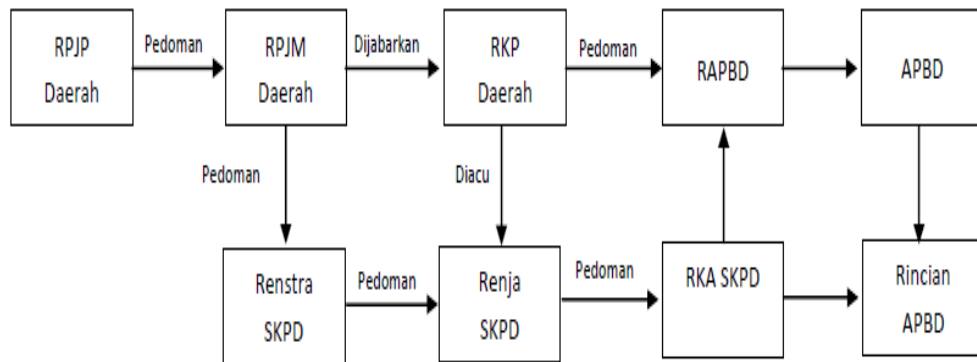
#### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/Gol.	Gol. IV	5	-	5
		Gol. III	18	-	18
		Gol. II	10	-	10
		Gol I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	2	-	2
		S1	20	-	20
		D IV	-	-	-
		D III	8	-	8
		D II	-	-	-
		D I	-	-	-
		SMA/Sederajat	3	-	3
		SMP/Sederajat	-	-	-
		SD/Sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		• Eselon II	1	-	1
		• Eselon III	4	-	4
		• Eselon IV	9	-	9
		Fungsional			
		• Tertentu	9	-	9
		• Umum	10	-	10
<b>Jumlah</b>			<b>33</b>	<b>-</b>	<b>33</b>

#### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.429.259.057,00	630.002.250,00	6.215.271.381,00	179.000.000,00	17.453.532.688,00	16.432.089.688,00	94,15	Dinsos
4.356.974.560,00	311.677.500,00	6.021.760.182,00	615.574.248,00	11.305.986.490,00	10.009.035.636,00	88,53	BPBD
<b>14.786.233.617,00</b>	<b>941.679.750,00</b>	<b>12.243.526.563,00</b>	<b>811.574.248,00</b>	<b>28.759.519.178,00</b>	<b>26.441.125.324,00</b>	<b>91,94</b>	

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

### Dinas Sosial

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	Masih dibutuhkan pengadaan Sarpras aparatur

**8. Permasalahan dan Solusi****Dinas Sosial****Permasalahan**

- Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 ini sebagaimana diketahui telah dilakukan beberapa kali perubahan dan pergeseran sepanjang tahun berjalan, hal ini dipahami sebagai konsekuensi adanya rasionalisasi anggaran pemerintah daerah yang mengalami defisit, sehingga ada beberapa kegiatan harus dikurangi, ditunda bahkan tidak dilaksanakan, akibatnya target capaian pun harus disesuaikan kembali;
- Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- Waktu yang tersedia untuk menyesuaikan perubahan rencana kerja sangat terbatas, akibatnya sering terjadi keteledoran dalam penyusunan finalisasi anggaran kegiatan;
- Belum kuatnya komitmen atau dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan belum berjalan maksimal;
- Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level pusat-provinsi, provinsi-kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;
- Penyerapan Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti tidak maksimal dikarenakan kurangnya klien yang ada pada tahun 2018;
- Penyerapan Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) tidak maksimal dikarenakan;
  - Adanya rasionalisasi;
  - Adanya anggaran yang tidak direalisasikan karena tidak efisien dengan output kegiatan;
  - Target WTP pada output kegiatan telah tercapai, sehingga dipandang tidak efektif dan efisien lagi utk diteruskan.

- Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis tidak maksimal dikarenakan sebagai berikut:
  - Administrasi kegiatan, serapan anggaran kecil dikarenakan menyesuaikan dengan petunjuk aturan yang ada dan pertimbangan kesesuaian dengan target kegiatan dan anggaran yang sudah dirasionalisasikan serta meminimalisir terjadinya potensi temuan;
  - Rakor Bansos Rastra tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
  - Pembayaran Sisa Subsidi Pemerintah Program Rastra dan Kerjasama dengan Bulog Subdivre Wilayah II Bangka tidak bisa dilakukan karena menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 511.1/9086/SJ tanggal 8 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018 pada poin 1 disebutkan bahwa mulai Januari 2018 subsidi beras sejahtera diubah menjadi bantuan sosial pangan beras sejahtera yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram per bulan dengan kualitas beras medium tanpa biaya tebus;
  - Untuk kegiatan monitoring (perjalanan dinas dalam daerah), serapan anggaran kecil dikarenakan pertimbangan kesesuaian antara target utama kegiatan yaitu subsidi biaya tebus Rastra yang telah dirasionalisasikan sehingga apabila dilaksanakan, dikhawatirkan monitoring yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien lagi;
  - Untuk kegiatan koordinasi dan menghadiri undangan rapat pelaksanaan rastra di tingkat pusat (dengan menggunakan dana perjalanan dinas luar daerah), serapan anggaran kecil dikarenakan pertimbangan efektif dan efisiensinya pelaksanaan koordinasi ke pusat/kementerian, mengingat penghematan anggaran yang dihimbau oleh Kepala Daerah serta Tim Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Bansos Rastra, secara rutin dan berkala melaksanakan koordinasi dan monitoring ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Permasalahan yang dihadapi organisasi Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Koordinasi dalam lintas sektoral penanggulangan bencana belum sangat optimal baik di tingkat Kabupaten dan Kota.
- Masih kurangnya keterbatasan sumber daya manusia seperti halnya pegawai yang kurang dari segi kualitas maupun kuantitas dalam hal kondisi paradok yang di hadapi yang merujuk pada Tugas dan Fungsi yang di sandang sebagai pengelola masalah kebencanaan serta tugas dan fungsi lainnya belum dapat diandalkan.
- Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana belum semuanya teregulasi.

- Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- Minimnya dukungan anggaran untuk urusan wajib Penanggulangan Bencana (APBD).
- Belum terbentuknya BPBD di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tidak optimalnya koordinasi apabila terjadi bencana di daerah tersebut, terkecuali Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Bangka Barat.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas telah dilakukan solusi sebagai berikut:

- Perlu diadakannya rapat koordinasi lintas sektoral penguatan kelembagaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam usaha pengurangan resiko bencana.
- Mengusulkan penambahan pegawai baik melalui rekrutmen dan pindahan dari unit kerja lainnya yang memiliki kemampuan memadai yang sesuai dengan kebutuhan serta mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan aparatur melalui latihan dan pendidikan baik di bidang penanggulangan bencana dan bidang teknis lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait secara intensif untuk menimalisasi kesalahan yang terjadi karena adanya perubahan peraturan-peraturan dan perundang-undangan lainnya.
- Mensosialisasikan masalah kebencanaan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota baik di selenggarakan oleh daerah maupun pusat.
- Mensinergikan penanganan masalah penanggulangan bencana melalui program dan anggaran APBD Provinsi dengan APBD Kabupaten/Kota.
- Melakukan sosialisasi secara intens ke Kabupaten/Kota untuk segera membentuk BPBD di Kabupaten/Kota.

## ■ **Tenaga Kerja**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, terdiri dari:**

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur;

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kinerja Industri (BLKI).

**Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial, terdiri dari:**

- Kegiatan Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- Kegiatan Peningkatan Fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan;
- Kegiatan Peningkatan Fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP;
- Kegiatan Peningkatan Sarana Hubungan Industrial;
- Kegiatan Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3).

**Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:**

- Kegiatan Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing);
- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan TKA;
- Kegiatan Bimtek Metologi Bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja, terdiri dari:**

- Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja;
- Kegiatan Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan;
- Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja.

**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri, terdiri dari:**

- Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/Kota.

**Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:**

- Kegiatan Pelayanan dan Peningkatan Produktivitas.

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

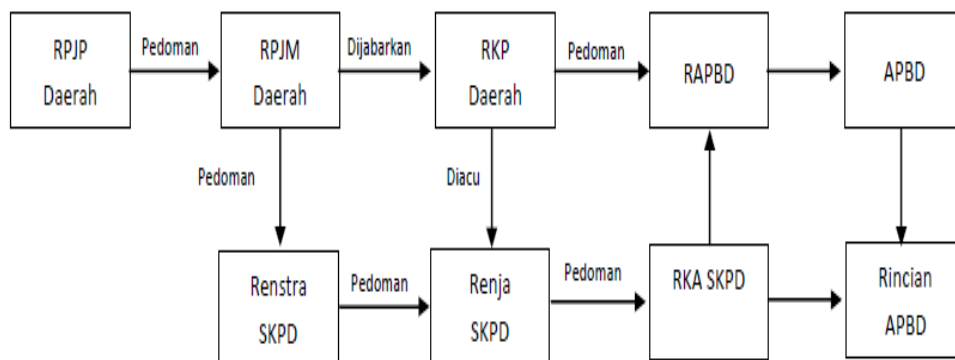
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	90	-	90
		Gol.II	13	-	13
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	6	-	6
		S1	83	-	83
		D. IV	1	-	1
		D. III	10	-	10
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	10	-	10
		SMP/ sederajat	-	-	-

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	10	-	10
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	19	-	19
		Umum	76	-	76
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>110</b>		<b>110</b>

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.315.524.068,00	481.245.500,00	5.004.199.118,00	788.000.000,00	20.588.968.686,00	18.787.127.184,00	91,25	DISNAKER TRANS

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

## 8. Permasalahan dan solusi

### Permasalahan

- Sarana dan prasarana Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memadai.
- Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kurangnya koordinasi antar Bidang Teknis dan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### Solusi

- Meningkatkan ketenagakerjaan dalam upaya melengkapi fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus secara komprehensif mengatasi masalah tenaga kerja dan kepemimpinan secara berkala.
- Meningkatkan koordinasi antar Bidang Teknis dan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tercapainya perencanaan yang matang.

## ■ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

### **Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

- Pembinaan Organisasi Perempuan
- Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia
- Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG
- Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumah Tangga Perempuan di Kab/Kota

### **Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak)
- Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel
- Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan
- Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak/Kota
- Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan
- Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)
- Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Indikator Kinerja Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, terdapat 8 indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014.

Indikator yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung yaitu:

1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sampai dengan tahun 2014 sebesar 100%.
2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan PPT/PKTDi RS sebesar 100%

3. Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 75%
4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sebesar 75%
5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 80%
6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 50%
7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 50%
8. Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%



**Pencapaian Indikator SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan  
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN 2011			PENCAPAIAN 2012			PENCAPAIAN 2013			PENCAPAIAN 2014			PENCAPAIAN 2015		
			X	Y	HASIL	X	Y	HASIL	X	Y	HASIL	X	Y	HASIL	X	Y	HASIL
I	Penanganan Pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	207	207	100%	219	219	100%	87	87	100%	10	10	100%	80	80	100%
II	Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2 Cakupan perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RumahSakit	5	5	100%	42	42	100%	47	47	100%	51	51	100%	25	25	100%
III	Rehabilitasi sosial Bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3 Cakupan layanan rehabilitasi Social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	6	6	100%	56	56	100%	209	209	100%	13	13	100%	0	40	0%
		4 Cakupan layanan bimbingan Rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	32	32	100%	26	26	100%	0	0	0%	38	38	100%	38	38	100%
IV	Penegakan dan Bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5 Cakupan penegakan hukum Dari tingkat penyidik sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	6	6	100%	4	4	100%	0	0	0%	141	141	100%	107	107	100%

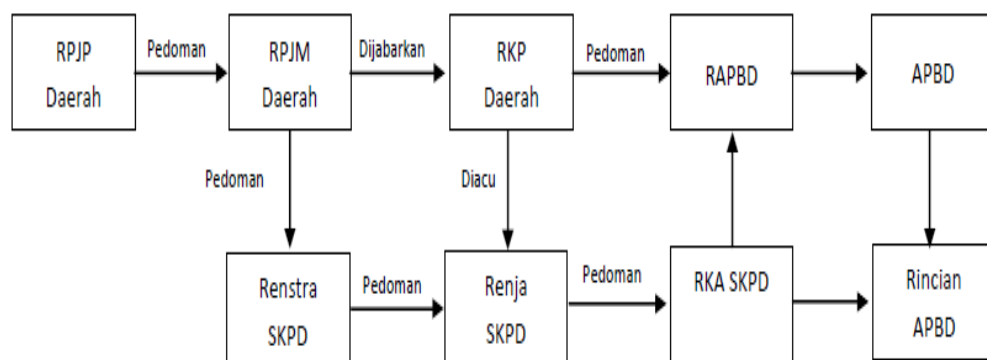
#### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	6	-	6
		Gol. III	21	-	21
		Gol.II	8	-	8
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	7	-	7
		S1	20	-	20
		D. IV	-	-	-
		D. III	2	-	2
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	3	-	3
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	12	-	12
		Fungsional:			
		Tertentu	5	-	5
		Umum	12	-	12
JUMLAH TOTAL			35	1	35

#### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.311.010.745,00	622.404.000,00	2.853.080.950,00	185.560.000,00	9.972.055.695,00	8.857.457.045,00	88,82	DP3ACSKB

#### 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh)

tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

- Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender/PPRG dan Persentase SKPD yang memiliki data terpilah masih belum maksimal
- Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender masih rendah
- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen
- Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender
- Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan
- Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

- Belum optimalnya koordinasi, bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan
- Belum maksimalnya koordinasi dengan Instansi terkait
- Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak
- Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan
- Belum semua Kab/Kota berkomitmen terhadap Kab/Kota Layak Anak
- Belum semua Kab/Kota Membentuk Forum Anak
- Belum optimalnya implementasi Grand design kependudukan dalam pengambilan kebijakan pada pemda Provinsi dan Kab/Kota
- Belum optimalnya kapasitas SDM, penyediaan data terpilih, kecukupan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, serta belum digunakannya instrument analisis responsive gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan berbagai institusi yang menangani pemberdayaan perempuan.
- Belum optimalnya penanganan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai perlakuan yang salah, tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi.

#### **Solusi**

- Advokasi mengenai PUG secara intensif kepada para pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Memperbanyak pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dan mengoptimalkan peran dan fungsi pokja PUG yang sudah ditunjuk;
- Mendata kembali ke 43 SKPD untuk melihat jumlah keseluruhan SKPD yang sudah memiliki data terpilih gender;
- Advokasi secara intensif kepada Orsospol, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar berperan secara optimal dalam pembangunan pemberdayaan perempuan;
- Memberi panduan pada SKPD mengenai penyusunan dan pengumpulan data terpilih agar advokasi-advokasi yang mereka lakukan dapat lebih tajam dan terukur.
- Melakukan pendataan terkait peran perempuan, kelompok ekonomi produktif perempuan dan lainnya guna mencapai sasaran strategis “meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di segala bidang pembangunan”;
- Meningkatkan koordinasi dengan organisasi perempuan, organisasi sekolah, organisasi profesi dan institusi media massa dalam mencapai meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di segala bidang pembangunan.
- Advokasi kepada legislative agar mendapat dukungan dalam menghasilkan Peraturan Daerah tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Menyusun standar pelayanan (SP) tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pembangian tugas yang jelas pada instansi yang terkait.

- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait agar penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat berjalan optimal.
- Peningkatan kapasitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pusat layanan, pusat informasi dan pemberdayaan.
- Optimalisasi kebijakan dan percepatan pembentukan kabupaten/kota layak anak.

## ▪ Pangan

### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pangan adalah Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### **Peningkatan Ketersediaan Pangan**

- Rencana Induk Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- Penanganan Desa Rawan Pangan
- Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan
- Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
- Penyusunan Dokumen Daerah Rawan Pangan

#### **Pengembangan Distribusi Pangan**

- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
- Pengendalian Distribusi Pangan
- Penyusunan Prognosa Neraca Pangan
- Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
- Database Harga dan Stock Pangan di Tingkat Distributor
- Pengembangan Cadangan Pangan

### 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

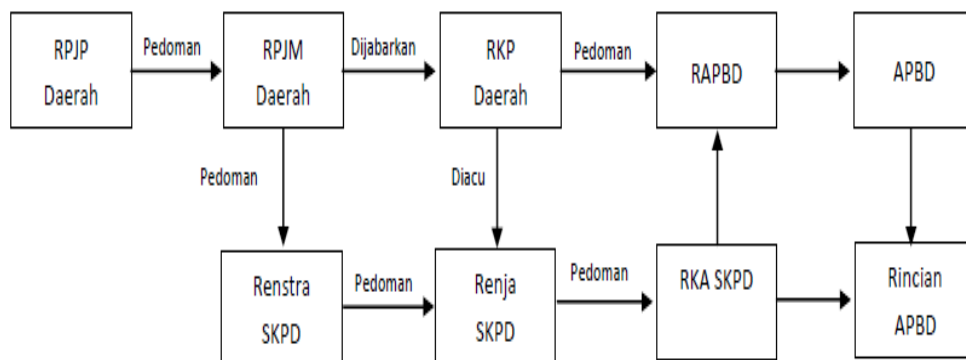
### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	26	-	26
		Gol. II	5	-	5
		Gol. I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	7	-	7
		S1	22	-	22
		D.IV	1	-	1
		D.III	3	-	3
		D.II	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	6	-	6
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		- Ess II	1	-	1
		- Ess III	4	-	4
		- Ess IV	9	-	9
		Fungsional	25	-	25
JUMLAH			39		39

### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.979.422.616,00	496.539.000,00	4.109.107.702,00	117.600.001,00	9.702.669.318,00	8.918.404.418,00	91,92	Dinas Pangan

### 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	Menempati Laboratorium Perkebunan APBN Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 8. Permasalahan dan solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan Ketahanan Pangan selama tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan urusan wajib Ketahanan Pangan belum memadai;
- Operasional kantor Dinas Pangan masih meminjam Laboratorium Perkebunan milik Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bobot beban kerja yang besar sementara sumberdaya aparatur yang ada masih dirasakan kurang baik dari kualitas maupun kuantitas; dan

- Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan program pembangunan Ketahanan Pangan.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada serta melakukan penambahan dan perbaikan fasilitas kerja secara bertahap;
- Mengusulkan pembangunan gedung kantor Dinas Pangan;
- Mengkoordinasikan penambahan sumberdaya aparatur yang memenuhi kriteria untuk ditempatkan di Dinas Pangan;
- Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan dengan instansi terkait baik dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun dalam bentuk koordinasi lainnya.

## ■ **Pertanahan**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pertanahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan**

- Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung

### **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

### **4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	1	-	1
		Gol. III	3	-	3
		Gol. II	-	-	-
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	-	-	-
		S1	2	-	2
		D. IV	-	-	-

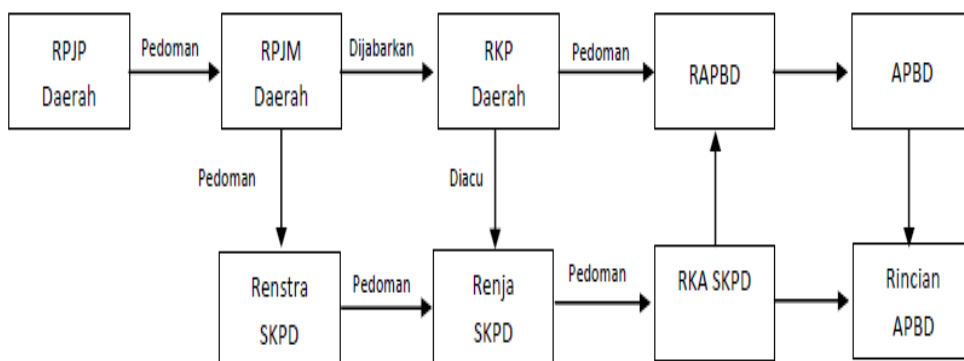


No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		D. III	1	-	1
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	-	-	-
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	-	-	-
		Eselon III	1	-	1
		Eselon IV	1	-	1
		Fungsional:			
		Tertentu	-	-	-
		Umum	2	-	2
JUMLAH TOTAL			4	-	4

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	103.400.000,00	5.000.000,00	108.400.000,00	107.444.000	99,12	SETDA

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum

APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	√	

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

Dari target sebanyak 30 bidang yang disertifikatkan dapat dilakukan pengukuran sebanyak 31 bidang tanah dan yang sudah terselesaikan sebanyak 23 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan sisanya sebanyak 8 bidang masih berproses di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sebanyak 2 bidang dan Bangka Tengah sebanyak 6 bidang.

■ **Lingkungan Hidup**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup**

- Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium
- Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sampling Parameter Kualitas Lingkungan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium

**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**

- Penyusunan Rencana Perindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
- Penyusunan Dokumen KLHS
- Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup
- Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
- Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota

**Program Peningkatan Pengendalian dan Pnaatan Lingkungan Hidup**

- Pengendalian Beban Pencemaran Air
- Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Pelaku Usaha/Kegiatan
- Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penerimaan, Penelahaan dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat

**Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas**

- Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura
- Studi Manajemen dan Produksi Persampahan
- Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu
- Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Implementasi Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklam)
- Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

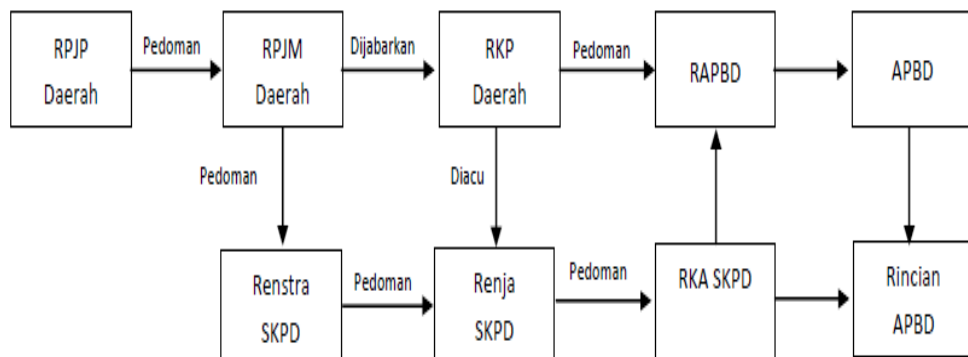
**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	47	-	47
		Gol.II	5	-	5
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	16	-	16
		S1	31	-	31
		D. IV	-	-	-
		D. III	9	-	9
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	3	-	3
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
		III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:	
Eselon II	1			-	1
Eselon III	5			-	5
Eselon IV	12			-	12
Fungsional:					
Tertentu	7			-	7
Umum	34			-	34
JUMLAH TOTAL			59	-	59

**5. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.068.944.560,00	565.050.000,00	6.028.180.016,00	96.000.000,00	14.758.174.576,00	12.522.277.977,00	84,85	DLH

**6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

- Data pendukung dari sungai baturusa yang sangat minim, dikarenakan belum adanya studi khusus tentang morfologi sungai baturusa yang dilakukan;
- Menggunakan jasa Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Output Rekomendasi Pengendalian Beban Pencemaran Air Sungai Baturusa, dimana penyesuaian jadwal untuk penyampaian hasil yang tidak sesuai jadwal;
- Jadwal narasumber yg padat dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung yg mencakup beberapa wilayah di provinsi dan kabupaten kota lainnya serta tugas rutin lainnya
- Penganggaran dana uji emisi untuk biaya analisa laboratorium tidak mencukupi dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga laboratorium terakreditasi KAN untuk 3 (tiga) titik di setiap 7 (tujuh) Kabupaten/Kota

dengan total 21 (dua puluh satu titik), sehingga dana tersebut tidak terserap;

- Tidak bisa dilakukan kerjasama dengan UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
- Periode pemantauan yang terbatas hanya 2 (dua) kali pemantauan, sehingga belum cukup untuk mewakili data sekunder periode puncak musim kemarau, musim kemarau, musim peralihan, musim hujan dan puncak musim hujan
- Belum dibuat peta DDDTLH skala detail pada penyusunan KLHS KSP KIPT Sadai sehingga harus dilakukan proses skoring yang memakan waktu 2 bulan untuk pengolahan data skala detail 1:5000
- SDM pemetaan yang kurang sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaian peta
- Belum terlaksana dikarenakan KRP Teluk Kelabat Baru diterima pada bulan September sehingga sulit untuk menyelesaikan dokumen KLHS

#### **Solusi/ tindak lanjut**

- Untuk tahun berikutnya, perlu lebih diperhatikan dan dilakukan kerjasama dengan BPDAS Cerucuk, Dinas Kehutanan, Bapelitbangda dan Forum DAS Bangka Belitung dalam hal sharing data, narasumber dan penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung sungai baturusa.
- Pelaksanaan di Tahun berikutnya harus memperhatikan biaya kerjasama dengan pihak ke tiga (Laboratorium terkreditasi KAN). Untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 bekerjasama sama dengan kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga diperoleh data untuk udara ambien dengan metode passive sampler, namun hanya untuk 2 (dua) parameter saja, yaitu parameter  $SO_2$  dan  $NO_2$ .
- Dalam pelaksanaan di Tahun berikutnya diharapkan bisa dilakukan penambahan periode pemantauan

### ■ **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

### Program Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)
- Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)
- Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparatur Kab/Kota (DAK)
- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)
- Sosialisasi dan Pencanangan Gerakan Nasional GISA Tingkat Provinsi

## 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

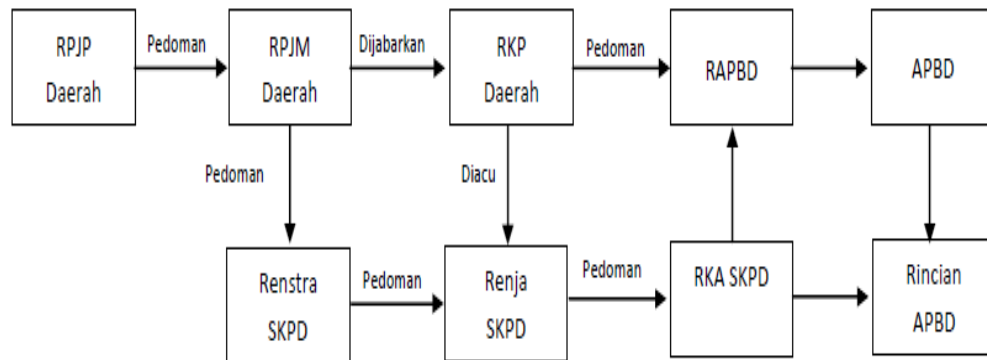
## 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	1	-	1
		Gol. III	6	-	6
		Gol.II	-	-	-
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	1	-	1
		S1	6	-	6
		D. IV	-	-	-
		D. III	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	-	-	-
		SMP/ sederajat	-	-	-
SD/ sederajat	-	-	-		
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	-	-	-
		Eselon III	1	-	1
		Eselon IV	3	-	3
		Fungsional:			
		Tertentu	-	-	-
		Umum	3	-	3
JUMLAH TOTAL			7	-	7

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	257.365.000,00	1.561.497.562,00	-	1.818.862.562,00	1.648.832.016,00	90,65	DP3ACSKB

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.



**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

- Belum optimalnya koordinasi, bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan
- Belum optimalnya implementasi Grand design kependudukan dalam pengambilan kebijakan pada pemda Provinsi dan Kab/Kota
- Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota
- Rendahnya kualitas pelayanan kabupaten/kota dalam kepemilikan dokumen kependudukan
- Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota
- Rendahnya kualitas pelayanan kabupaten/kota dalam kepemilikan dokumen kependudukan;

**Solusi**

- Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
- Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

■ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur

- Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah

**Program Pembinaan Pemerintah Desa**

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Penataan Kewenangan Desa

**Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**

- Pendampingan Kelembagaan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat
- Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa

**Program Pendayagunaan SDA TTG dan Pelatihan Masyarakat**

- Pengembangan TTG
- Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat

**Program Pengembangan Kawasan Perdesaan**

- Pembangunan Kawasan Perdesaan

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

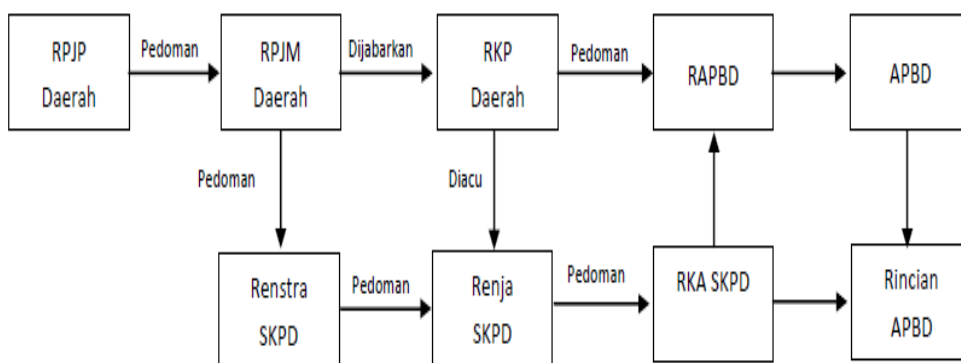
**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jabatan Struktural dan Fungsional					
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	33	1	34
		Gol.II	10	-	10
		Gol. I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	5	-	5
		S1	32	1	33
		D. IV	-	-	-
		D. III	4	-	4
		D. II	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	8	-	8
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD / sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		- eselon II	1	-	1
		- eselon III	5	-	5
		- eselon IV	11	-	11
		Fungsional			
		- Tertentu	4	-	4
			29		
JUMLAH			50		50

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.713.509.758,00	447.920.000,00	6.005.589.780,00	22.500.000,00	12.189.519.538,00	11.842.596.251,00	97,15	DPMPD

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	Kendaraan Roda 4 Operasional ke Desa/Kelurahan di Prov. Kep. Babel

**8. Permasalahan dan solusi**

Tidak ada permasalahan yang signifikan

■ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)
- Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya 2018
- Advokasi dan KIE Program KKBPK
- Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan
- Pembinaan dan Penguatan Kampung KB

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

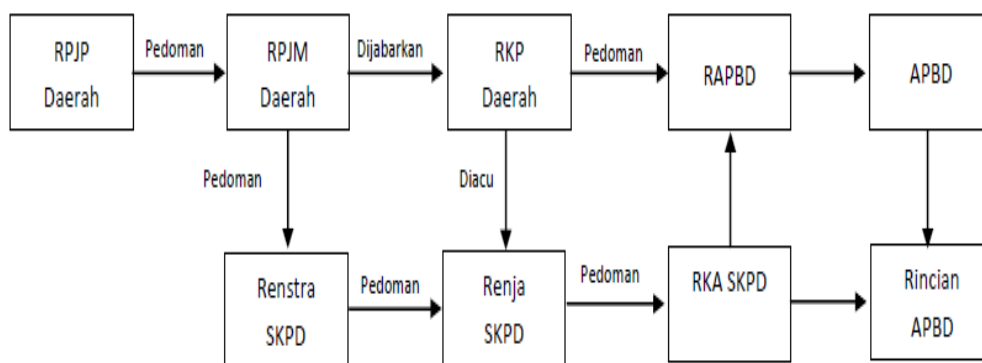
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	1	-	1
		Gol. III	5	-	5
		Gol.II	-	-	-

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	1	-	1
		S1	5	-	5
		D. IV	-	-	-
		D. III	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	-	-	-
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	-	-	-
		Eselon III	1	-	1
		Eselon IV	3	-	3
		Fungsional:			
		Tertentu	-	-	-
		Umum	2	-	2
JUMLAH TOTAL			6	-	6

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	78.024.500,00	1.152.224.850	-	1.230.249.350,00	1.142.588.330,00	92,87	DP3ACSKB

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan

penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

- Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki
- Sarana dan Prasarana terbatas.
- Tenaga bidang dan dokter yang terlatih dalam melayani KB terutama MKJP masih kurang
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).
- Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.
- Pendewasaan usia pernikahan belum menyentuh kalangan pondok pesantren, Tokoh agama, lembaga pendidikan

**Solusi**

- Usulan kegiatan tahun berikutnya agar lebih prioritas dalam mencapai sasaran berupa kegiatan fasilitasi penyusunan dan harmonisasi kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga yang meliputi: sosialisasi, advokasi, rapat koordinasi dan pembinaan.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan menyediakan alat kontrasepsi sesuai minat masyarakat dan meningkatkan pelayanan KB gratis bagi masyarakat.

## ▪ Perhubungan

### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dilaksanakan pdengan Praturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pasal 170 Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Perhubungan melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**, kegiatan untuk mendukung program ini antara lain :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan
- Pengumpulan Data dan monitoring pelayanan jasa perhubungan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)
- Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan
- Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

**Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat**, kegiatan untuk mendukung program ini antara lain :

- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas
- Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
- Inspeksi / Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi
- Review Tataan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka
- Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
- Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pengadaan Peralatan Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Pengoperasian Bus Sekolah

**Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut**, kegiatan untuk mendukung program ini antara lain :

- Study Kelayakan Pengganti Pangkalbalam
- Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- Studi Kelayakan Dermaga/ Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung

**Program Peningkatan Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan**, kegiatan untuk mendukung program ini antara lain :

- Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan
- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
- Pengadaan Road Barrier dan Traffic Cone
- Pekerjaan Konsultasi Penilaian/ Appraisal Pengembangan Bandara Depati Amir
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir
- Pengadaan dan Pemasangan Gardu Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir
- Pengadaan Pagar Panel/ BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir
- Pemasangan Saluran Air PDAM Gedung VIP Bandara Depati Amir
- Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir (lanjutan)

### 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perhubungan didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dimana target akhir pencapaian SPM adalah sampai dengan tahun 2014. Hingga saat ini belum ada rujukan aturan terbaru mengenai Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan.

### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Saat ini OPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah pegawai sebanyak 53 pegawai yang tersebar pada 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang dengan komposisi sebagai berikut :

No	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	6	-	6
		Gol. III	34	-	34
		Gol. II	13	-	13



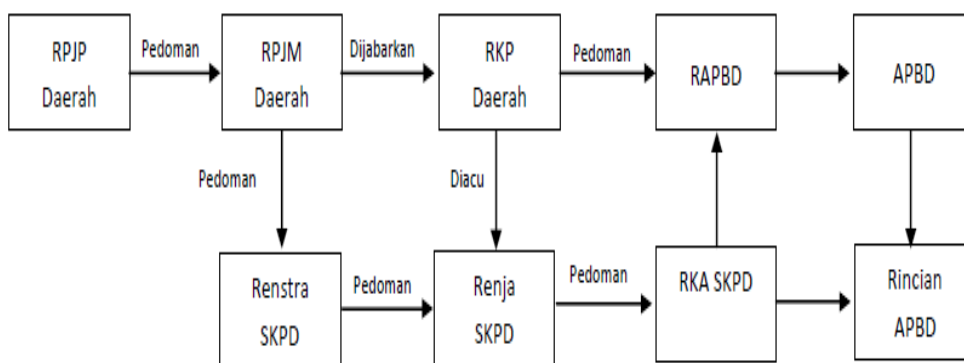
No	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		Gol. I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	11	-	11
		S1	23	-	23
		D. IV	2	-	2
		D. III	7	-	7
		D. II	1	-	1
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	8	-	8
		SMP/ sederajat	1	-	1
		SD / sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	12	-	12
		Staf (JFU)	37	-	36
JUMLAH					

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.485.620.606,00	564.025.000,00	7.309.921.000,00	8.724.722.700,00	23.084.289.306,00	18.531.298.629,11	80,28	DISHUB

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana Dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	√		Perlu penambahan SARPRAS aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksi

**8. Permasalahan dan solusi**

Kendala dan Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kurangnya fasilitas dan sarana koordinasi antar instansi terkait sehingga sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal;
- Belum adanya sinkronisasi capaian target yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra SKPD;
- Belum maksimalnya pencapaian target kinerja mengingat keterbatasan dalam alokasi dana untuk pelaksanaan program yang direncanakan;
- Tidak tersedianyaa lokasi dana untuk peningkatan kualitas SDM terutama kemampuan teknis perhubungan.
- Masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi sebagai satu-satunya alat transportasi masyarakat, yang menyebabkan rendahnya tingkat keterisian angkutan umum, sehingga mengakibatkan kurangnya perkembangan angkutan umum.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan langkah-langkha sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Koordinasi bidang Perhubungan dengan Kabupaten/Kota setiap tahun guna sinkronisasi Program Pembangunan;
- Melaksanakan Revisi RPJMD dan Revisi Renstra SKPD dan mensinkronkan capaian targetnya sehingga hasil dari pelaksanaan pembangunan dan capaian target dapat diukur dengan baik;
- Mengupayakan percepatan pencapaian target kinerja melalui pembangunan sector prioritas;
- Mengajukan usulan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis perhubungan bagi para pegawai.
- Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan konektivitas antar wilayah serta konektivitas antar moda transportasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## ■ **Komunikasi dan Informatika**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik**

- Pengelolaan saluran komunikasi pemerintah daerah dan non pemerintah daerah
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- Pengelolaan kemitraan

#### **Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah berbasis teknologi informasi**

- Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan teknologi
- Layanan Publik dan pemerintah berbasis e-Government
- Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah
- Pengawasan dan pengendalian keamanan sistem informasi

#### **Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian**

- Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

### **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

#### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	5	-	5
		Gol. III	31	-	31
		Gol.II	6	-	6
		Gol. I		-	
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	4	-	4
		S1	21	-	21
		D. IV	-	-	-
		D. III	13	-	13
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	3	-	3
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	3	-	3
		Eselon IV	9	-	9
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu			
		Pranata Humas	6	-	6
		Arsiparis	1	-	1
		Pranata Komputer	6	-	6
		Umum	16	-	16
		<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>42</b>

#### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.439.895.345,00	622.075.000,00	7.777.679.154,00	2.430.299.114,00	17.269.948.613,00	15.720.885.677,00	91,03	DISKOMINFO

#### 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan di Dinas Komunikasi dan Informatika telah sesuai dimulai dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, RKA, sampai tersusunnya DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Dengan Program yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 3(tiga)

program yaitu Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik, Program peningkatan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan program pemberdayaan TIK, statistik dan persandian

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	

**8. Permasalahan dan solusi**

Permasalahan

Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan kurang optimal

Solusi

Penghematan pada pelaksanaan kegiatan.

■ **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah.**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**

- Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
- Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
- Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
- Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha

Koperasi

- Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

**Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil**

- Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil
- Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
- Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
- Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM

**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

- Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM
- Penyelenggara Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)

**Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM**

- Peningkatan Layanan Usaha Terpadu

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

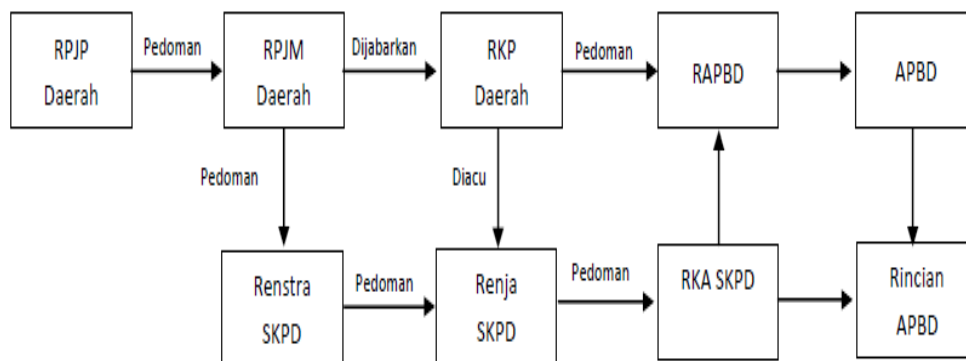
**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	28	-	28
		Gol.II	8	-	8
		Gol. I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	4	-	4
		S1	27	-	27
		D. IV	-	-	-
		D. III	5	-	5
		D. II	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	7	-	7
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD / sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		- Esselon II	1	-	1
		- Esselon III	5	-	5
		- Esselon IV	14	-	14
		Fungsional Tertentu	2	-	2
		Fungsional Umum	21	-	21
		<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>43</b>

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.361.904.764	367.166.000	10.380.533.521	653.923.175	17.763.527.460	16.849.063.196	94.85	DINKOPUKM

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	√		Bangunan gedung kantor dinas maupun UPTD belum memiliki landscape dan pagar

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

- Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan suatu kegiatan terpadu antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Ketidaksinkronan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat menyebabkan pemberdayaan dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah tidak menunjukkan hasil yang berarti.
- Dukungan pendanaan sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

**Solusi**

- Sinkronisasi program kegiatan sesuai kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat merupakan suatu keharusan agar pemberdayaan dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat berhasil dengan baik.
- Pemerintah kabupaten/kota seyogyanya mengalokasi dana yang cukup untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha mikro dan koperasi yang menjadi kewenangannya.

■ **Penanaman Modal**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran



- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

- Kegiatan Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi

**Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal**

- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
- Kegiatan Pembuatan Bahan Promosi

**Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu**

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Penyusunan Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

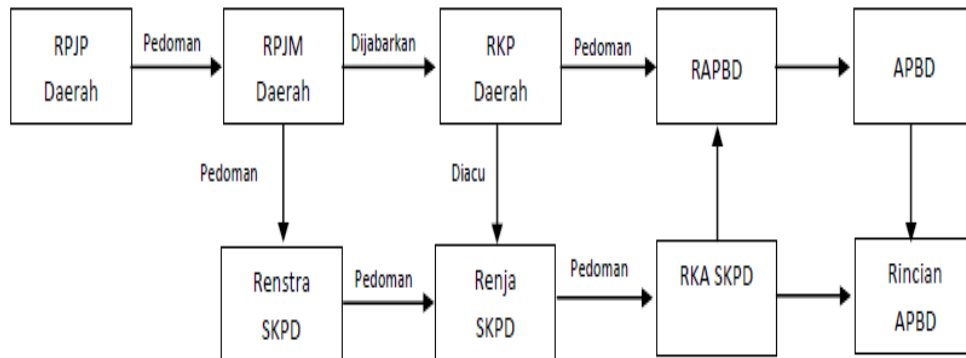
**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	6	-	6
		Gol. III	42	-	42
		Gol.II	6	-	6
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	9	-	9
		S1	34	-	34
		D. IV	1	-	1
		D. III	4	-	4
		SMA/ sederajat	5	-	5
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	14	-	14
		Fungsional:			
		Tertentu	5	-	5
		Umum	28	-	28
TOTAL			54	-	54

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.099.885.951,-	300.644.000,-	2.768.929.000,-	121.120.000,-	9.290.578.951,-	8.896.779.083	95.76	DPMPTSP

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	√		Kondisi SARPRAS masih kurang dalam mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelayanan publik

**8. Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

- Bahan materi promosi yang kurang up to date.

**Solusi**

- Perlu adanya koordinasi dengan kabupaten/kota dan instansi yang terkait untuk data yang up to date sebagai bahan materi promosi

■ **Kepemudaan dan Olah Raga**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan**

- Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan
- Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara
- Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang berdedikasi dan berprestasi
- Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda
- Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda

**Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga**

- Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Club Olahraga
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
- Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi
- Pengiriman Kontingen yang Berprestasi
- Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus

**Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga**

- Pengadaan Sarana Kepemudaan Olahraga
- Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
- Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga Standar Nasional,

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

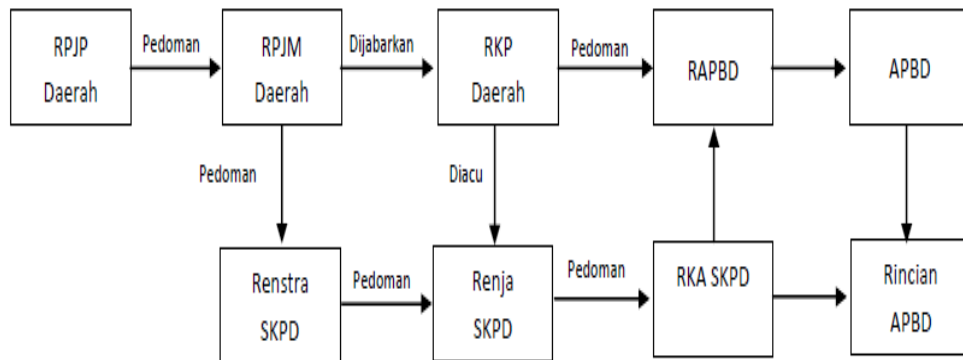
**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	25	-	25
		Gol.II	11	-	11
		Gol. I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	7	-	8
		S1	22	-	22
		D. IV	-	-	-
		D. III	1	-	1
		D. II	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	13	-	13
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD / sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		- eselon II	1	-	1
		- eselon III	4	-	4
		- eselon IV	9	-	9
		Fungsional	29	-	29
JUMLAH			43		43

**5. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.869.276.248,00	618.876.250,00	10.277.418.383,00	270.410.000,00	17.035.980.881,00	16.096.849.364,00	94,49	DISPORA

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

## **8. Permasalahan dan solusi**

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan Pemuda dan Olahraga selama tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Belum sinerginya gerakan kepemudaan yang tersebar di dalam berbagai organisasi kepemudaan, organisasi kesiswaan dan organisasi kemahasiswaan.
- Belum optimalnya pemberian fasilitas pemuda untuk memperoleh serta meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan keterampilan.
- Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang standar untuk pembinaan dan pelatihan olahraga.
- Belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Perlunya disusun kebijakan dan regulasi tentang kepemudaan sehingga dalam penanganan kepemudaan lebih terarah dan sinergi.
- Perlunya kejelasan organisasi yang menangani kepemudaan.
- Peningkatan kegiatan berkaitan dengan upaya untuk mengatasi kenakalan remaja melalui sarasehan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan baik dalam kewirausahaan, kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial.
- Peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana prasarana olahraga.
- Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang prioritas daerah.
- Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang pelatihan.

## **■ Statistik**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Statistik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Urusan Wajib Statistik) melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian**

- Inventarisasi dan pengelolaan data sektoral daerah

### 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	-	-	-
		Gol. III	1	-	1
		Gol.II	-	-	-
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	-	-	-
		S1	1	-	1
		D. IV	-	-	-
		D. III	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	-	-	-
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	-	-	-
		Eselon III	-	-	-
		Eselon IV	1	-	1
		Fungsional:			
		Tertentu			
		Pranata Humas	-	-	-
		Arsiparis	-	-	-
		Pranata Komputer	-	-	-
		Umum	-	-	-
JUMLAH TOTAL			1	-	1

### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	73.920.000,00	78.800.000,00	-	152.720.000,00	135.109.000,00	88,47	DISKOMINFO

### 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan di Dinas Komunikasi dan Informatika telah sesuai dimulai dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, RKA, sampai tersusunnya DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Dengan Program yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 3(tiga)

program yaitu Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik, Program peningkatan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan program pemberdayaan TIK, statistik dan persandian

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		<input checked="" type="checkbox"/>	

**8. Permasalahan dan solusi**

Permasalahan

Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan kurang optimal

Solusi

Penghematan pada pelaksanaan kegiatan.

▪ **Persandian**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Urusan Wajib Persandian) melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian**

- Pengelolaan dan pengembangan sumber daya persandian

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

-



## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	4.800.000,00	36.606.485,00	-	41.406.485,00	37.206.720,00	89,86	DISKOMINFO

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan di Dinas Komunikasi dan Informatika telah sesuai dimulai dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, RKA, sampai tersusunnya DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Dengan Program yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 3(tiga) program yaitu Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik, Program peningkatan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan program pemberdayaan TIK, statistik dan persandian

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		<input checked="" type="checkbox"/>	

## 8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan kurang optimal

Solusi

Penghematan pada pelaksanaan kegiatan.

### ■ Kebudayaan

#### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Urusan Wajib Kebudayaan) melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

### Program Pelestarian Budaya

- Kegiatan Penulisan Sejarah Bangka Belitung
- Kegiatan Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung
- Kegiatan Partisipasi dan Penghargaan serta Kerjasama di bidang budaya
- Kegiatan Kajian Tradisi Bangka Belitung
- Kegiatan Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI
- Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya
- Kegiatan Pendokumentasian dan Publikasi koleksi Museum Daerah
- Kegiatan Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung
- Kegiatan Festival Budaya Melayu
- Kegiatan Pentas Seni Budaya
- Kegiatan Pembinaan Drum Band Serumpun Sebalai

## 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

## 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	4	-	4
		Gol. III	20	-	20
		Gol.II	6	-	6
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	5		5
		S1	17		17
		D. IV	-		-
		D. III	6		6
		D.I	-		-
		SMA/ sederajat	2		2
		SMP/ sederajat	-		-
		SD/ sederajat	-		-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	4		4
		Eselon III	2		2
		Eselon IV	6		6
		Fungsional:			
		Tertentu	7		7
		Umum	11		11
JUMLAH TOTAL			30		30

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.486.049.860,16	338.120.000,00	8.828.177.199,00	552.795.801,00	17.205.142.860,16	15.045.558.432,00	87,45	DISBUDPAR

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan di Dinas Komunikasi dan Informatika telah sesuai dimulai dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, RKA, sampai tersusunnya DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Dengan Program yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 3(tiga) program yaitu Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik, Program peningkatan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan program pemberdayaan TIK, statistik dan persandian

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
√	-	-	

## 8. Permasalahan dan solusi

### Permasalahan

Untuk kegiatan Partisipasi Event Budaya, Promosi Pariwisata dan Festival Nusantara propal yang diajukan banyak tidak sesuai peruntukannya sehingga capaian kinerja kegiatan tidak tercapai maksimal.

### Solusi

Agar dalam penyampaian proposal mengacu kepada dokumen pelaksanaan anggaran mengacu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

### ■ Perpustakaan

#### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Urusan Wajib Perpustakaan) melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

### **Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan**

- Kegiatan Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah
- Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka
- Kegiatan Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah
- Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling
- Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca
- Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
- Kegiatan Pengelolaan Layanan Website
- Kegiatan Penyediaan Buku Bacaan dan Sekolah Pada perpustakaan sekolah

### **Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan**

- Kegiatan Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi
- Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pustakawan
- Kegiatan Pendataan Nomor Pokok Perpustakaan di Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov. Kep. Babel
- Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah
- Kegiatan Akreditasi Perpustakaan
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan

## 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

## 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

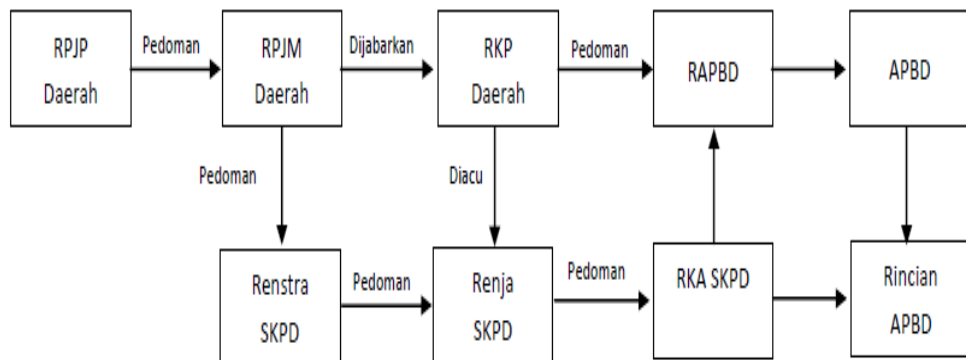
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	5		5
		Gol. III	18		18
		Gol. II	7		7
		Gol. I	-		-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	2		2
		S2	2		2
		S1	13		13

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		D. IV	-		-
		D. III	9		9
		D.I	-		-
		SMA/ sederajat	4		4
		SMP/ sederajat	-		-
		SD/ sederajat	-		-
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1		1
		Eselon III	3		3
		Eselon IV	7		7
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	13		13
		Umum	6		6
JUMLAH TOTAL			30		30

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.558.425.320,44	255.455.000,00	3.060.542.480,00	107.070.100,00	10.981.493.900,00	9.841.570.822,00	89.62	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	✓	-	-

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

- Belum adanya gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan DEPO Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Belum adanya gedung layanan perpustakaan yang layak
- Kurangnya koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
- Kurangnya Motivasi dan kreativitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengelola perpustakaan dan arsip
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi dari perpustakaan dan sadar arsip

**Solusi**

- Mengusulkan untuk membangun gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan DEPO Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Mengusulkan untuk membangun gedung layanan perpustakaan
- Meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
- Mengembangkan Motivasi dan kreativitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengelola perpustakaan dan arsip melalui lomba-lomba, pembinaan dan bimtek-bimtek
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan fungsi dari perpustakaan dan sadar arsip dengan publikasi, pameran, perpustakaan keliling, dll.

## ▪ Kearsipan

### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Kearsipan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Urusan Wajib Kearsipan) melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan**

- Kegiatan Lomba arsiparis teladan Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Lomba pengelolaan Kearsipan desa/kel, Perangkat Daerah, LKD Kab/Kota
- Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis
- Kegiatan Pembinaan, pendampingan dan lomba kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Pembinaan Kearsipan di SMA/SMK dan SLB Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Arsip Masuk Desa

#### **Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip**

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
- Kegiatan Pengelolaan dan pendataan arsip vital di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Provinsi kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Pemberkasan dan pendataan arsip terjaga di Provinsi kep. Bangka Belitung
- Kegiatan pengelolaan arsip dinamis di Kab/Kota
- Kegiatan Pendataan arsip Inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penelusuran sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

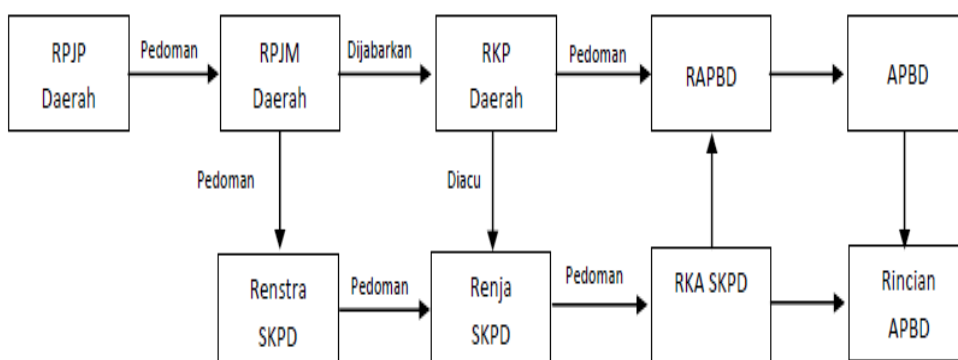
**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural danFungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	3		3
		Gol. III	16		16
		Gol.II	8		8
		Gol. I	-		-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3			-
		S2	2		2
		S1	13		13
		D. IV	-		-
		D. III	5		5
		D.I	-		-
		SMA/ sederajat	7		7
		SMP/ sederajat	-		-
		SD/ sederajat	-		-
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II			
		Eselon III	2		2
		Eselon IV	4		4
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	7		7
		Umum	14		14
JUMLAH TOTAL			27		27

**5. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	121.867.500,00	656.123.400,00	-	777.990.900	670.270.168	86.15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh)



tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	✓	-	-

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

- Belum adanya gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan DEPO Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kurangnya koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
- Kurangnya Motivasi dan kreativitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengelola perpustakaan dan arsip
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi dari perpustakaan dan sadar arsip

**Solusi**

- Mengusulkan untuk membangun gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan DEPO Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
- Mengembangkan Motivasi dan kreativitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengelola perpustakaan dan arsip melalui lomba-lomba, pembinaan dan bimtek-bimtek

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan fungsi dari perpustakaan dan sadar arsip dengan publikasi, pameran, perpustakaan keliling, dll.

## **b. RINGKASAN URUSAN PILIHAN**

### **▪ Kelautan dan Perikanan**

#### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

##### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

##### **Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut**

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut
- Kegiatan Pendampingan Teknis RZWP3K
- Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah
- Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Daerah (DAK)

##### **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

- Kegiatan Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap
- Kegiatan Pengadaan dan Sarana Perikanan Tangkap
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan PPI
- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Tangkap
- Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan

##### **Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan**

- Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran
- Kegiatan Pembinaan Pasar Hasil Perikanan Se-Bangka Belitung

- Kegiatan Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan
- Kegiatan Identifikasi Potensi Penyusunan Panduan Investasi Kelautan dan Perikanan

**Program Pengawasan SD Kelautan dan Perikanan**

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- Kegiatan Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Boost Centre

**Program Peningkatan Teknis Pengujian dan Penegdalian Mutu Perikanan**

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

**Program Peningkatan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau**

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak
- Kegiatan Peningkatan Produksi UPTD Balai Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP)
- Kegiatan Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau

**Program Peningkatan Teknis Pembenihan Ikan Air Laut**

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa
- Kegiatan Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa

**Program Peningkatan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar**

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

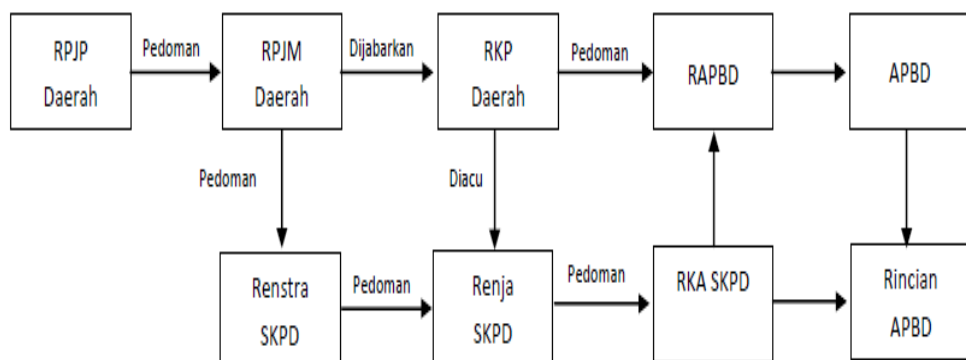
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	9	-	9
		Gol. III	67	-	67
		Gol.II	20	-	20
		Gol. I	1	-	1
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	12	-	12
		S1	53	-	53
		D. IV	6	-	6
		D. III	9	-	9
		D. II	1	-	1
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	16	-	16
		SMP/ sederajat	-	-	-

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		SD / sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			0
		- Eselon II	1	-	1
		- Eselon III	7	-	7
		- Eselon IV	20	-	20
		Fungsional Tertentu	18	-	18
		Umum	51	-	51
	<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>-</b>	<b>97</b>

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.411.739.589,00	731.886.000,00	16.114.011.400,00	2.835.850.000,00	34.093.486.989,00	24.861.237.818,00	72,92	DKP

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

## 8. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

- Masih kurang komitmen SDM Pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan.
- Adanya keterlambatan dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018, sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur realisasi masih rendah yaitu sebesar 47,63%, hal ini dikarenakan rendahnya penyerapan pada akun Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan.
- Kegiatan Pendampingan Teknis RZWP3K, realisasi masih rendah (48,69%), hal ini dikarenakan sebagai berikut: belum dilaksanakannya kegiatan Konsultasi Teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Konsultasi Publik di daerah, disebabkan belum adanya jadwal persetujuan dari pihak KKP karena masih diperlukan perbaikan draft dokumen antara, Raperda dan Peta Alokasi Ruang. Selain itu, hal ini dikarenakan juga masih banyaknya masukan dari stakeholder pusat dan daerah yang perlu berkoordinasi dan persetujuan, seperti batas daerah di gugusan Pulau Tujuh, alokasi ruang, pelabuhan, DLKr Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, alokasi ruang KEK pariwisata, dan alokasi ruang pertambangan.
- Realisasi capaian kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah masuk dalam kategori rendah (58,08%), hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan hanya di Ruang Pertemuan Balai Desa (tidak dikenai biaya), sehingga belanja sewa ruangan tidak dapat direalisasikan. Selain itu, untuk Belanja Tenaga Ahli yang dibutuhkan hanya 2 orang yang dibayarkan yaitu tenaga ahli kelautan dan GIS. Adapun output yg dicapai pada kegiatan ini adalah SK Gubernur (SK Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kab. Bangka), dan karena adanya Surat dari Bupati Bangka yang memuat pengurangan luas kawasan konservasi, sehingga belum bisa mendapatkan output berupa SK Menteri Kelautan dan Perikanan.

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk realisasi juga masih sangat rendah (36,17%). Hal ini dikarenakan beberapa hal berikut yakni: pada tanggal 23 November 2017 adanya penyerahan BAST PPI dari Kab/Kota ke Provinsi Kep. Bangka Belitung. Sementara itu, penyusunan anggaran program kerja (DPA) sudah harus disusun pada Bulan Maret 2017 (dalam masa transisi), dimana yang semulanya Bidang Perikanan Tangkap memperkirakan biaya untuk berikut ini:
- Pembayaran belanja listrik untuk 7 (tujuh) PPI disamaratakan, sementara kondisi di lapangan pada masing-masing PPI memiliki karakteristik yang berbeda, dan juga ada 1 (satu) PPI yang belum diserahkan ke DKP Prov. Kep. Babel yaitu PPI Muara Sungai Batu Rusa, sehingga penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kondisi riil yang ada.
- Terkait belanja honorarium tidak tetap yang mana direncanakan pada masing-masing PPI sebanyak 5 (lima) orang dengan total jumlahnya menjadi 30 (tiga puluh) orang, terealisasi untuk bulan Januari s.d. September 2018 sebanyak 12 (dua belas) orang yang di sebar di 7 (tujuh) PPI. Pada bulan September 2018, diterima lagi tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga total PHL menjadi 19 (sembilan belas) orang dari 30 orang tersebut, sehingga yang tidak terealisasi sebanyak 11 orang yang tersisa.
- Terkait dengan belanja barang dan jasa, karena rentang jarak kendali dan belum adanya kelembagaan di PPI sehingga menyulitkan dalam proses peng-SPJ-an.
- Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan juga masih rendah yaitu sebesar 46,47%, hal ini dikarenakan pada kegiatan Sosialisasi Log Book yang pada awalnya akan dilaksanakan di Hotel, karena adanya efisiensi anggaran, sehingga akhirnya dilaksanakan di kantor. Hal ini menyebabkan biaya sewa ruangan dan biaya hotel tidak direalisasikan, selain itu juga, ada beberapa peserta yang tidak datang sehingga mempengaruhi realisasi makan minum dan transport peserta, juga narasumber yang semula 2 OK menjadi 1 OK.
- Untuk kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan juga realisasi masih rendah yaitu sebesar 53,01%, hal ini karena uang layar belum ada SK yang pasti juga karena ada penambahan. Selain itu, uang makan untuk patroli belum bisa dicairkan/digunakan, karena belum terdapat dalam Pergub, yang mana dianggarkan dalam DPA Perubahan, dan kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada bulan November 2018 setelah keluarnya DPPA pada tanggal 30 Oktober 2018.

#### Solusi

- Meningkatkan konsolidasi internal terhadap hasil pencapaian target Program Pembangunan sebagaimana yang telah dicapai pada tahun 2018;
- Menempatkan ASN yang tepat pada kegiatan yang tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lebih baik;
- Mengevaluasi target pencapaian tahun 2018 sebagai bahan untuk mencapai target kedepan.

#### ▪ Pariwisata

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Buku Pariwisata Daerah
- Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK
- Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Musik Rampak Gendang
- Kegiatan Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung

#### **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat
- Kegiatan Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya
- Kegiatan Penyusunan RIRD KSPP Belinyu - Sungailiat dan Sekitarnya
- Kegiatan Penyusunan RIRD KSPP Pangkalpinang - Mendo Barat - Bangka Tengah dan Sekitarnya
- Kegiatan Penyusunan RIRD KSPP Pulau Belitung dan Sekitarnya
- Kegiatan Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata
- Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata
- Kegiatan Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung

### **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

### **4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah**

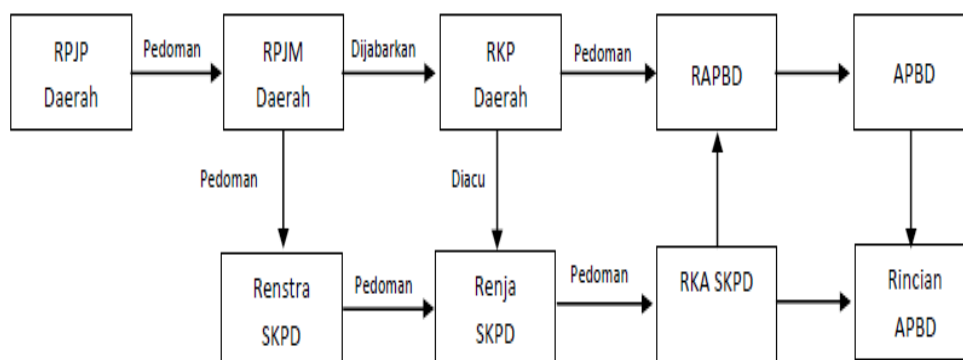
## Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	6	-	6
		Gol. III	21	-	21
		Gol.II	2	-	2
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	7		7
		S1	18		18
		D. IV	-		-
		D. III	2		2
		D.I	-		-
		SMA/ sederajat	2		2
		SMP/ sederajat	-		-
		SD/ sederajat	-		-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	-		-
		Eselon III	4		4
		Eselon IV	11		11
		Fungsional:			
		Tertentu	-		-
		Umum	14		14
JUMLAH TOTAL			29		29

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	217.686.000,00	6.559.429.000,00	-	6.777.115.000,00	5.520.614.243,00	81,45	DISBUDPAR

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
√	-	-	

**8. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

Untuk kegiatan Partisipasi Event Budaya, Promosi Pariwisata dan Festival Nusantara propal yang diajukan banyak tidak sesuai peruntukannya sehingga capaian kinerja kegiatan tidak tercapai maksimal.

**Solusi**

Agar dalam penyampaian proposal mengacu kepada dokumen pelaksanaan anggaran mengacu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

▪ **Pertanian**

**1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Pertanian adalah Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

### **Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

- Pengembangan Komoditi Hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik
- Pengembangan Komoditi Pangan dengan Penerapan GP-PTT (padi dan jagung)
- Pelatihan Teknis Budidaya, penanganan panen dan pasca panen komoditi pangan dan hortikultura
- Pengembangan Komoditi hortikultura lokal yang unggul

### **Program Pengembangan Parasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian**

- Pengembangan Komoditi hortikultura lokal yang unggul
- Pembangunan Jaringan irigasi tersier
- Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian
- Peningkatan Kapabilitas penyuluhan dan SDM Pertanian
- Penyusunan rencana desain kawasan, DED dan KLHS Agropolitan berbasis demonstran tion farmin sawah mekanisasi provinsi kepulauan Bangka Belitung
- Pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian
- Rembuk Tani Nasional

### **Program Pengembangan Perkebunan**

- Intensifikasi tanaman perkebunan
- Penanganan pasca panen tanaman perkebunan
- Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan
- Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan
- Ekstensifikasi/perluasan areal tanaman perkebunan

### **Program Pengembangan peternakan dan kesehatan hewan**

- Peningkatan Populasi Ternak
- Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Sub sektor peternakan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit hewan menular strategis zoonosis dan gangguan reproduksi
- Pemberian asuransi peternakan

- Sosialisasi pengawasan mutu hasil ternak sapi di RPH
- Pengawasan dan Bimtek Pengolahan limbah Ternak sapi/pupuk kompos/organik

**Program Peningkatan pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih**

- Pengawasan Peredaran benih dan pembinaan produsen
- Sertifikasi Benih pertanian/perkebunan
- Penilaian Kultivar/varietas unggul lokal
- Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB

**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman**

- Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman
- Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman

**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian**

- Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian
- Penyediaan Benih Sumber dan Benih Sebar
- Integrasi Jagung dan Sapi
- Pembangunan gedung pertemuan dan prasarana penunjang
- Pembangunan Gudang Pakan Ternak Silase
- Pembangunan kandang ternak beserta sarana dan prasarana

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	13	-	13
		Gol. III	99	-	99
		Gol. II	19	-	19
		Gol. I	1	-	1
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	19	-	19
		Profesi/ drh	5	-	5
		S1	75	-	75
		D. IV	0	-	0
		D. III	16	-	16
		D. II	-	-	-
		D. I	-	-	-
		SMA / sederajat	16	-	16
		SMP/ sederajat	1	-	1
		SD / sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		- eselon II	1	-	1
		- eselon III	8	-	8
		- eselon IV	24	-	24
		- Non Eselon	48	-	48
		Fungsional	51	-	51
JUMLAH TOTAL			132		132

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.379.416.398,50	1.205.695.000,00	20.800.255.420,00	3.768.170.000,00	42.153.536.818,50	38.565.340.627,00	91.49	DINAS PERTANIAN

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan di Dinas Pertanian telah sesuai dimulai dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RENSTRA Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, RKA, sampai tersusunnya DPA Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Dengan Program yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) program yaitu Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik, Program peningkatan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan program pemberdayaan TIK, statistik dan persandian

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	√	

## 8. Permasalahan dan solusi

### Permasalahan

- SDM yang kurang dalam bidang teknis seperti di bidang pertanian, peternakan (Medik dan Paramedik Veteriner), perkebunan, Perencanaan dan adanya Pergantian pejabat mulai dari pensiun, roling pejabat dan perpindahan pejabat dari struktural ke fungsional tertentu.
- Untuk bidang pertanian dan hortikultura sangat tergantung dengan musim dan masih banyak petani yang tidak mendapat informasi tentang ramalan cuaca.
- Rasionalisasi anggaran kegiatan.
- Untuk kegiatan di bidang hortikultura Khususnya kegiatan pengadaan benih cabe Penyedia tidak bisa memenuhi batas waktu barang/jasa yang telah di tetapkan
- Untuk bidang perkebunan khususnya bibit lada masih banyak yang mati mendadak di tingkat petani dan petani masih kesulitan dalam mengatasi penyakit kuning lada.
- Belum intensifnya pendampingan oleh petugas penyuluh pertanian kepada petani binaannya.
- Dalam Pengelolaan kebunnya petani belum optimal dan terbatasnya modal dalam pengelolaan kebunnya serta masih rendahnya pengetahuan,

Keterampilan dan Sikap petani dalam proses Good Agriculture practise (GAP), Good Handling practise (GHP) dan Good Manufacturing practise (GMP).

- Untuk kegiatan peningkatan populasi ternak adanya perubahan spesifikasi ternak serta adanya ancaman wabah jembrana, sehingga membutuhkan proses pengajuan kembali untuk mengubah spesifikasi dan satuan harga yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
- Untuk kegiatan pemberian asuransi peternakan masih terkendala masih minimnya dilaksanakan sosialisasi ke petani, masih rendahnya pengetahuannya keterampilan dan sikap petani dalam memelihara sapi, masih kurangnya tenaga kesehatan ternak yang ada di kabupaten, serta adanya syarat khusus yang menghambat dalam program AUTS.
- Untuk Kegiatan Pengembangan Pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian belum adanya gudang untuk menyimpan alat pertanian, tenaga teknis kerusakan alsintan yang terbatas, suku cadang tidak tersedia di provinsi, operator pelaksanaan alsintan yang belum terlatih serta pengelolaan alsintan yang belum termanajemen secara baik dan benar.
- Untuk kegiatan peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman pertanian terkendala masih kurangnya sarana dan prasarana utama dan pendukung balai proteksi tanaman pertanian,

**Solusi :**

- Pengusulan ke BKPSDM untuk penambahan SDM di bidang Teknis (Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perencanaan) serta meminimalkan pergeseran pejabat yang kompeten di bidang yang sudah sesuai dengan pendidikan dan teknis kegiatan serta pergantian pejabat untuk segera diisi untuk pejabat yang sudah pensiun
- Diharapkan ke BMKG untuk menyampaikan berita ramalan cuaca ke provinsi dan kabupaten dan ditembuskan ke kelompok petani
- Meminimalkan sosialisasi anggaran kepada pemangku pengambil kebijakan.
- Untuk tim teknis dan Pokja ULP agar lebih selektif dalam melaksanakan pemilihan penyedia dan penyedia hendaknya lebih profesional dalam memenuhi spesifikasi barang/jasa
- Untuk pengadaan bibit lada agar menggunakan jamur trikomerka di tingkat petani dan penyedia, untuk meminimalkan serangan mati mendadak bibit lada yang ditanam dan untuk penyakit kuning lada diharapkan ada penelitian lebih lanjut untuk penyakit tersebut seperti kerjasama dengan pihak UGM Jogjakarta dan pendampingan tingkat penyuluh ke petani dalam melaksanakan pengelolaan kebun secara baik dan benar ke petani.
- Meningkatkan pendampingan dan pengawasan dalam kinerja penyuluh pertanian.
- Bantuan yang diberikan hendaknya bersifat stimulan dengan harapan petani dapat lebih optimal dan mandiri, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan Pengetahuan, keterampilan dan Sikap petani.
- Untuk awal kegiatan hendaknya lebih direncanakan lebih matang serta pencegahan penularan mewabahnya penyakit jembrana.

- Meningkatkan sosialisasi kegiatan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dari tidak tahu menjadi mampu, menambah tenaga kesehatan hewan di kabupaten, mempermudah prosedur program AUTS serta pendampingan pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir.
- Pengusulan pembangunan gudang alsintan, pembangunan bengkel, mendatangkan tenaga teknisi dari luar serta melatih tenaga teknisi yang ada, serta mendatangkan suku cadang yang berasal dari luar daerah untuk tahun anggaran selanjutnya.
- Penambahan sarana dan prasarana di balai Proteksi Tanaman serta perlunya kajian dan fasilitasi terus menerus tentang proteksi tanaman.

## ▪ Kehutanan

### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kewenangan pengurusan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14, Ayat (1) bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. UPTD yang dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan.

### 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT

#### **Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan**

- Pemanfaatan Kawasan Hutan
- Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
- Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan
- Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu
- Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan
- Penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA
- Pembangunan Sarana dan Prasarana KPH (DAK)

**Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem**

- Penertiban Pelanggaran Tindak Pindan Kehutanan
- Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
- Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT
- Tenaga Pendukung Polisi Hutan
- Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial
- Perlindungan dan Pengamanan HUTAN (DBH)

**Program Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat**

- Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai
- Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH
- Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Pengembangan Perhutanan Sosial
- Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka/siswa sekolah
- Pembangunan Sumber Benih dan Konservasi ex situ Gaharu dan Pelawan
- Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)
- Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial (DBH Kehutanan)

**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan**

- Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir
- Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca
- Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas
- Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan
- Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung
- Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan
- Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau
- Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
1	2	3	4	5	6

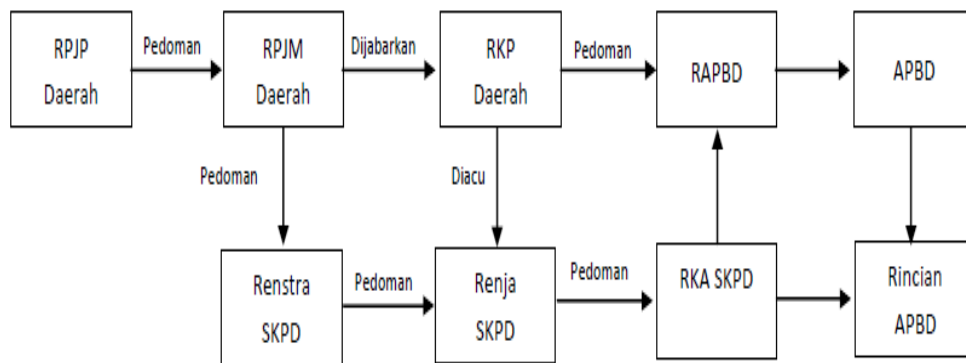
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
1	2	3	4	5	6
1	Berdasarkan Pangkat/ Golongan	Golongan IV	23	-	25
		Golongan III	128	-	132
		Golongan II	35	-	29
		Golongan I	-	-	-
2	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	15	-	15
		S1	117	-	117
		D. IV	1	-	1
		D. III	20	-	20
		D. II	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	33	-	33
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD / sederajat	-	-	-
3	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		- Eselon II	1	-	1
		- Eselon III	12	-	12
		- Eselon IV	34	-	34
		Fungsional Tertentu	72	-	72
		Fungsional Umum	67	-	67
Jumlah			186		186

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21.243.247.786,00	682.180.000,00	9.871.509.563,00	2.805.800.000,00	34.602.737.349,00	28.234.837.018,00	81,60	DINAS KEHUTANAN

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah





Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

#### 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana Dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 8 UPTD KPH : 7 memiliki bangunan, terdiri 6 di tanah aset propinsi dan 1 di tanah aset kabupaten</li> <li>- 1 belum memiliki bangunan kantor.</li> </ul>

#### 8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan-permasalahan yang ada menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan kehutanan secara optimal sehingga didapatkan pengaruh semakin membaiknya kualitas sumber daya hutan dan meningkatnya manfaat hutan. Indikator membaiknya kualitas sumber daya hutan adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatnya upaya – upaya rehabilitasi. Indikator meningkatnya manfaat hutan ditandai dengan meningkatnya kontribusi hutan terhadap perekonomian daerah berupa Pendapatan Domestik Bruto (PDRB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan kehutanan tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan kehutanan sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kabupaten/kota tidak menyelenggarakan urusan kehutanan namun dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, yang berakibat pengalihan pegawai, asset dan perlunya dibentuk lembaga di tingkat kabupaten/kota.
- Pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam, karena wisata alam dan jasa lingkungan belum maksimal dijadikan aset dalam *eco tourism* sebagai pendukung destinasi wisata;
- Rehabilitasi hutan dan lahan, dikarenakan cukup luasnya lahan kritis yang ada belum diikuti dengan penyediaan anggaran yang memadai;
- Pengembangan Perhutanan Sosial (PS) dalam skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) terkendala proses perijinan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Provinsi berperan dalam fasilitasi;
- Kurangnya sumber daya manusia untuk tenaga fungsional PPNS, Polisi Hutan dan Penyuluh Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Adanya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan selain kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan dan telah dilaksanakan dalam angka waktu lama, dan merupakan permasalahan social budaya dalam penetapan kawasan hutan;
- Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan;

Untuk menanggulangi kendala dan permasalahan di atas telah dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.797/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bentuk UPTD dipilih karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Memberikan dukungan terhadap kegiatan pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam melalui kegiatan

fasilitasi dan pembinaan dan mengajukan usulan kegiatan terkait pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa lingkungan.

- Melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terutama pada lokasi pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan dan IPPKH untuk fasilitas umum (jalan).
- Sosialisasi dan pendampingan ke kabupaten dalam rangka Perhutanan Sosial (PS) melalui skema : Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan mendorong pemegang IUIPHHK-HTI untuk melaksanakan Kemitraan Kehutanan (KK).
- Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Sektor Kehutanan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah (kepemilikan atau akses legal bukan bentuk kepemilikan) oleh masyarakat di dalam kawasan hutan, dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan;
- Meminta bantuan sarana dan prasarana pengamanan hutan, serta pelaksanaan penegakan hukum kehutanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

## ▪ Energi dan Sumber Daya Mineral

### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
- Peningkatan Fungsi pelayanan Kantor Cabang Dinas UPTD Kab, Bangka (wilayah Bangka tengah dan Bangka selatan )
- Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA )di provinsi Bangka Belitung

- Peningkatan Fungsi pelayanan Kantor Cabang Dinas UPTD Kab, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi pelayanan Kantor Cabang Dinas UPTD Kab, Bangka Belitung
- Peningkatan Fungsi pelayanan Kantor Cabang Dinas Kab, Bangka
- Peningkatan Fungsi pelayanan Kantor Cabang Dinas Kab, Belitung Timur
- DED Pengembangan dan pembangunan Gedung Kantor

#### **Program pengembangan Sumber daya Energi**

- Pembangunan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) diProv. Kep. Bangka Belitung
- Pembinaan dan Pengendalian pendistribusian BBM dan Gas di Prov. Kep. Bangka Belitung
- Koordinasi kegiatan Migas dengan pemerintah pusat dan partisipasi ADPM
- Pembinaan dan pegendalian Pendistribusian BBM dan Gasngadaan dan Pemasangan PLTS
- Penyusunan Dokumen Rencana Umum Energi daerah (RUED) propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di propinsi kepulauan Bangka Belitung
- Pembangunan Bio Gas Skala Rumah tangga di propinsi kepulauan Bangka Belitung. (DAK )

#### **Program peningkatan pengelolaan Geologi dan air tanah**

- Penyelidikan Kebumihan di Prov. Kep. Bangka Belitung
- DED danpembangunan Fasilitas pemakaian air Tanah di Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kajian Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan

#### **Program pengembangan pertambangan Mineral logam**

- Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan usaha petambangan Mineral Logam
- Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum Penilaian
- Verifikasi, Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR)
- Inventarisasi dan pemetaan Kawasan lahan terganggu oleh Aktivitas pertambangan didalam dan diluar Izin pertambangan

#### **Program pengembangan pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan**

- Pembinaan dan pengawasan Kegiatan usaha pertambngan bukan logam
- Penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambngan dan kepala teknik tambang
- Pertemuan Tahunan KTTdan pembina Usaha Pertambngan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penyusunan Blueprint Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

### **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

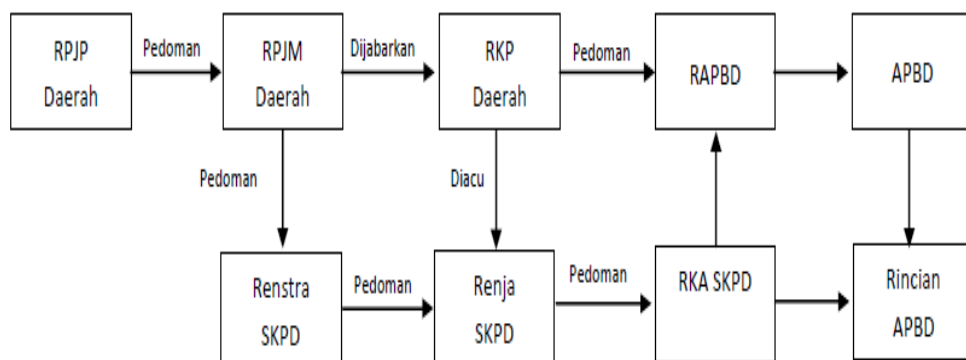
#### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/Gol.	Gol. IV	13	-	13
		Gol. III	99	-	99
		Gol. II	8	-	8
		Gol. I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	12	-	12
		S1	84	-	84
		D.IV	1	-	1
		D.III	9	-	9
		D.II	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SLTA / sederajat	14	-	14
		SLTP / sederajat	-	-	-
SD / sederajat	-	-	-		
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		– eselon II	1	-	1
		– eselon III	5	-	5
		– eselon IV	28	-	28
		Fungsional	-	-	-
		– JFU	59	-	59
– JFT	22	-	22		
J U M L A H			121	-	121

#### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.699.547.545,00	1.006.842.000,00	8.361.666.000,00	5.015.902.500,00	29.083.958.045,00	25.086.373.208,40	86,26	DINAS ESDM

#### 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

**7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	DESDM belum memiliki Laboratorium Presentatif

**8. Permasalahan dan solusi**

Permasalahan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

- Belum mencukupi SDM yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi dan kurangnya fasilitas operasional yang mendukung, yang berdampak kepada lambannya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlebih lagi dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan kekurangan personil semakin banyak.
- Masih adanya benturan kewenangan dengan kehutanan baik hutan produksi maupun hutan lindung meskipun kawasan hutan ditentukan setelah keluarnya Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Belum jelasnya zonasi laut serta kawasan pertambangan laut , wisata dan lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan.
- Masih maraknya kegiatan penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin baik di kawasan hutan maupun di areal yang sudah direklamasi.
- Masih terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang – undangan sektor pertambangan dengan sektor lain.
- Bagi hasil sektor pertambangan belum berpihak pada daerah penghasil.
- Industri turunan dari sektor pertambangan belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan nilai tambah bagi daerah.
- Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sudah sebagian dilaksanakan namun kendalanya terjadi dipengawasan ,yang membutuhkan ESDM yang handal dan sering terjadi pencurian perangkat oleh masyarakat
- Energi baru dan terbarukan belum dikembangkan secara terpadu baik untuk wilayah pesisir, terpencil dan pulau – pulau kecil, disamping itu juga potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat sedikit.
- Baru terbentuknya cabang cabang Dinas ESDM ,yang masih membutuhkan SDM Yang Cukup
- Defisit Anggaran / Rasionalisasi Anggaran

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan :

- Perlu mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Diklat baik yang diselenggarakan di daerah maupun di luar daerah dan menambah jumlah fasilitas operasional yang dapat mendukung berjalannya program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan.Bappeda , Dinas PU mengenai kawasan,KEK, hutan lindung dan produksi,Pembangunan Jaln Jembatan dan Irigasi dengan wilayah pertambangan.
- Bekerjasama dengan instansi terkait guna menerapkan zonasi laut untuk kawasan perikanan/tangkap dan kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.
- Melakukan pengawasan bersama dengan Instansi terkait terhadap kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi dan melakukan berkoordinasi terhadap Kab/Kota dari kegiatan penambangan di Wilayah Kab/Kota.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait mengenai Peraturan Perundangan-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain.
- Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, BUMN dan pelaku tambang lainnya untuk menyepakati besarnya royalty bagi daerah penghasil tambang.
- Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, bersamasama pemerintah provinsi untuk mendatangkan investor dan pelaku tambanglain untuk berinvestasi di industri turunan sektor pertambangan sehingga dapat menambah nilai tambah bagi daera

- Bekerjasama dengan PT PLN (Persero ), Pemerintah Pusat guna menambah jaringan listrik dan pembangunan pembangkit listrik ,baik melalui PJUTS,Bio gas dan lain lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Harus adanya Kegiatan Peningkatan pelayanan Perizinan/Rekomendasi di Bidang Usaha Ketenagalistrikan dan Logam , non logam dan batuan bersama-sama dengan PTSP prov Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar adanya Tim yang Baik
- Aktif berkoordinasi dengan TAPD dan instansi terkait untuk memperkecil dampak dari rasionalisasi / pengurangan anggaran sehingga target capaian kinerja dinas bisa tercapai dengan baik.

## ▪ **Perdagangan**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perdagangan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program Pengembangan Perdagangan**

- Pelaksanaan pasar Murah
- Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral
- Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang
- Pembinaan monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha
- Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk
- Partisipasi Pepper Day
- Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Sektor Perikanan

#### **Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian**

- Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- Peringatan Hari Konsumen Nasional
- Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen

#### **Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk**

- Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM
- Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium
- Monitoring Mutu Pengujian
- Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD B SPM



### 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

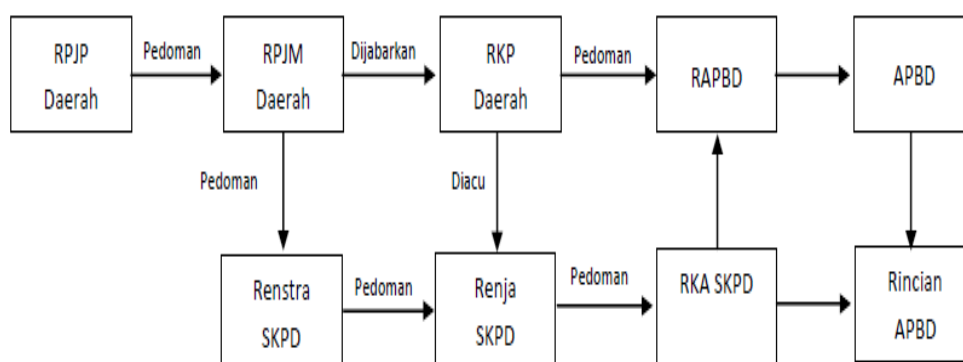
### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7		7
		Gol. III	44		44
		Gol.II	19		19
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	10		10
		S1	29		29
		D. IV	-	-	-
		D. III	18		18
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	13		13
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	12	-	12
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	11	-	11
		Umum	42	-	42
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>70</b>	<b>-</b>	<b>70</b>

### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.296.620.830,00	650.534.000,00	10.275.568.250,00	602.000.000,00	22.824.723.080,00	21.383.228.285,00	93.68	DISPERINDAG

### 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan Laboratorium belum mencukupi</li> <li>- Kendaraan operasional masih kurang;</li> <li>- Peralatan dan perlengkapan gedung kantor belum mencukupi.</li> </ul>

## 8. Permasalahan dan solusi

Tidak ada permasalahan untuk urusan perdagangan

### ▪ Perindustrian

#### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Perindustrian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perindustrian) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

### Program Pengembangan Wilayah dan Pegawasan Industri

- Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis
- Finalisasi RPIP
- Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)
- Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri
- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri

### Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi dan Akses Industri

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan
- Peningkatan Daya Saing Produk Industri
- Pemberdayaan Dekranasda
- Rumah Pengembangan Produk
- Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP
- Seminar Halal Internasional
- Lomba Industri Kreatif
- Promosi/Gelar Produk Industri
- Pembinaan dan Pengembangan OVOP

## 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak ada SPM yang dilaksanakan

## 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

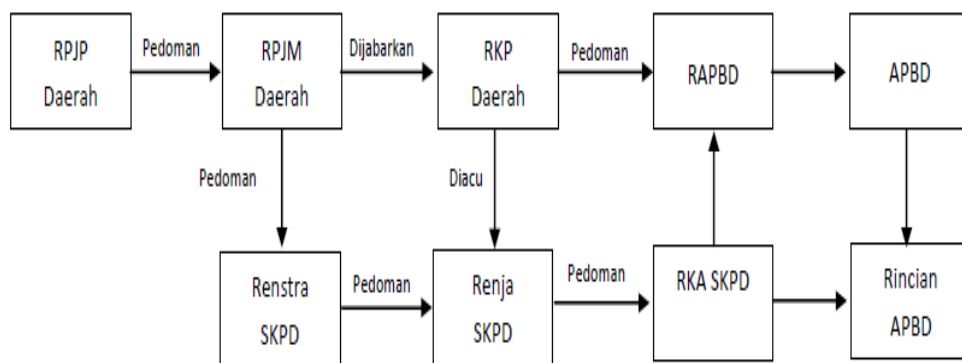
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	2		2
		Gol. III	22		22
		Gol.II	2		2
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	2		2
		S1	18		18
		D. IV	-	-	-
		D. III	2		2
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	4		4
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	-	-	-
		Eselon III	2	-	2
		Eselon IV	6	-	6
		Fungsional:			
		Tertentu	5	-	5
		Umum	13	-	13
JUMLAH			26	-	26

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)
-	35.760.000,00	471.690.960,00	-	507.450.960,00	410.696.620,00	80.93	DISPERINDAG

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan

oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan Laboratorium belum mencukupi</li> <li>- Kendaraan operasional masih kurang;</li> <li>- Peralatan dan perlengkapan gedung kantor belum mencukupi.</li> </ul>

## 8. Permasalahan dan solusi

### Permasalahan

- Adanya kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dikarenakan ketidaksesuaian dengan peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang tata cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### Solusi

- Untuk selalu mempedomani Peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2016 dalam melakukan Penyusunan dan Perencanaan Penganggaran yang bersifat pemberian bantuan barang produksi kepada masyarakat dan pelaku industri

## ▪ Transmigrasi

### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

**Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari:**

- Kegiatan Peningkatan Fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi;
- Kegiatan Gema Hari Bhakti Transmigrasi Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Transmigrasi.

## 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

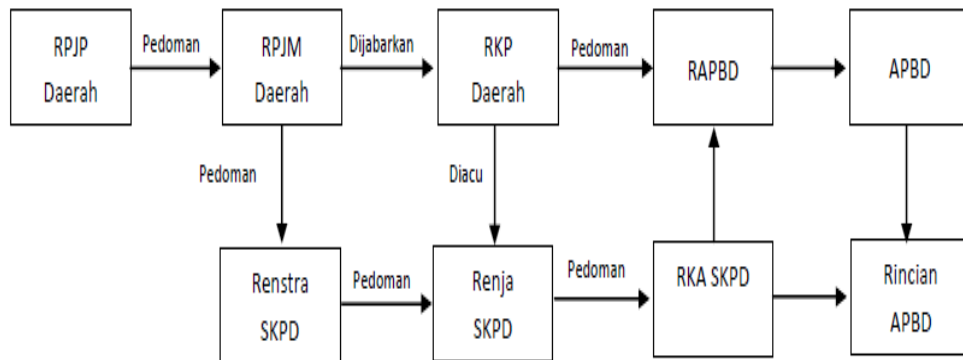
## 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	-	-	2
		Gol. III	2	-	1
		Gol.II	1	-	-
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	-	-	2
		S1	2	-	-
		D. IV	-	-	1
		D. III	1	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	-	-	-
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	-	-	-
		Eselon III	-	-	1
		Eselon IV	1	-	-
		Fungsional:			
		Tertentu	-	-	2
		Umum	2	-	2
JUMLAH TOTAL			3		3

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	5.240.000,00	92.680.000,00	-	97.920.000,00	87.836.400,00	89,70	DISNAKER TRANS

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

## **8. Permasalahan dan solusi**

### **Permasalahan**

- Sarana dan prasarana Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memadai.
- Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kurangnya koordinasi antar Bidang Teknis dan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Solusi**

- Meningkatkan ketenagakerjaan dalam upaya melengkapi fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus secara komprehensif mengatasi masalah tenaga kerja dan kepemimpinan secara berkala.
- Meningkatkan koordinasi antar Bidang Teknis dan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tercapainya perencanaan yang matang.

## **B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA)**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang Lainnya) adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang Lainnya) sebagai berikut :

#### **Sekretariat Daerah**

##### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah

##### **Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian**

- Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan



#### Bangka Belitung

- Monitoring dan Evaluasi Analisis Makro Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Monitoring, Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Forum Pengembangan Ekonomi

#### **Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam**

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya**

- Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung
- Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN**

- Koordinasi Kebijakan APBN
- Pengelolaan Pengembangan Aplikasi Sistem e-Monev APBN
- Tim Terpadu Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan APBN

#### **Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT**

- Publikasi Media Massa / Cetak Publikasi Media Elektronik/IT
- Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho
- Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi
- Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT

#### **Program Peningkatan Pelayanan Protokoler**

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Workshop Bidang Keprotokolan

#### **Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi**

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah
- Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan
- Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan

#### **Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan**

- Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan, Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan)

- Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah
- Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pengadaan Lahan

#### **Program Pengembangan Otonomi Daerah**

- Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LKPJ)
- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Penngangkatan KDH dan WKDH
- Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri
- Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Koordinasi Penerapan Pelaksanaan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Workshop Penataan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah**

- Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI
- Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama
- Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat

#### **Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan**

- Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung
- Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
- Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung
- Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji
- Musabaqoh Hafidz Qur'an
- Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional

#### **Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda**

- Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**

- Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah
- Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah

#### **Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

- Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Penyusunan Naskah Hukum Lainnya
- Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Propempperda dan Rancangan Peraturan Daerah

**Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah**

- Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda
- Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi
- Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota

**Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum**

- Pengelolaan dan Pengembangan JDIH
- Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum
- Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001-2017 dan Kompilasi Perda dan Pergub Tahun 2017
- Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Program Perencanaan Setda**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah

**Program Pengendalian Pembangunan Daerah**

- Koordinasi Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota
- Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota
- Tim Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPR) Provinsi Kabupaten/Kota
- Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan APBD**

- Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monev APBD Kebijakan
- Monitoring Evaluasi APBD

**Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan**

- Peningkatan penerapan data dan informasi layanan Peningkatan Pelayanan Publik
- Pengelolaan data dan informasi babel
- Penyusunan laporan kinerja tahun 2017 dan perjanjian kinerja tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
- Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
- Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Bimbingan teknis E-LHKPN
- Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah

### **Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah**

- Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik
- Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

### **Sekretariat DPRD**

#### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### **Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan**

- Rapat-rapat paripurna
- Pembahasan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hokum lainnya
- Reses
- Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
- Rapat koordinasiasosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia (ASPSI)
- Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik
- Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan
- Kunjungan Kerja Komisi
- Kunjungan Kerja Badan Musyawarah
- Kunjungan Kerja Badan Anggaran
- Kunjungan Kerja badan legislasi/pembentukan perda
- Kunjungan Kerja Kehormatan
- Fit and proper Test tentang pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

#### **Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan**

- Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Forum Komunikasi Sekwan se-Indonesia
- Peningkatan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat

## **Inspektorat**

### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, dengan kegiatan sebagai berikut:**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

### **Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:**

- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### **Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:**

- Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah
- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah
- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
- Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

### **Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut:**

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Konsultasi Audit

## **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

### **Program Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan / Organisasi
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

### **Program Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan Kepangkatan**

- Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan ASN
- Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun
- Kegiatan Promosi dan Mutasi ASN

### **Program Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan ASN**

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN
- Kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
- Kegiatan Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian
- Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN

**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara**

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
- Kegiatan Peningkatan Pendidikan Formal
- Kegiatan Peningkatan Mutu Kediklatan

**Program Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi ASN**

- Kegiatan Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur

**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah****Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan

**Program Perencanaan,Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
- Pengembangan sistem informasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
- Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah

**Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**

- Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
- Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II

**Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

- Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan SDA I
- Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan SDA II
- Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA

**Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan**

- Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I
- Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II
- Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

**Program Penelitian dan Pengembangan**

- Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah
- Penguatan Jaringan Kelitbangan
- Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- Kajian Science Technology Park
- Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan

**Badan Keuangan Daerah****Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA
- Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur

#### **Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah**

- Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner
- Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Instansi Terkait
- Penyusunan Pedoman tentang Dasar pengenaan PKB dan BBNKB
- Sosialisasi Pajak Daerah
- Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang
- Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka
- Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung
- Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur

#### **Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah;**

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
- Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah
- Penyusunan Pedoman tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah;
- Tim Pengawasan Peningkatan Pendapatan Daerah

#### **Program Penganggaran Pembangunan Daerah**

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD
- Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
- Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- Penyusunan Analisa Standar Belanja
- Evaluasi Raperda Kab/kota tentang APBD
- Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pedoman tentang Penyusunan RKA-PD/PPKD
- Penyusunan KUA dan PPAS

#### **Program Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan**

- Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD
- Pengelolaan perbendaharaan dan Kas Daerah;
- Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan**

- Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung

#### **Program Peningkatan Tata kelola Asset Daerah**

- Pembinaan Teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung
- Pembinaan Teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
- Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah Daerah
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD
- Penilaian/Apraisal Barang Milik daerah/Asset Daerah
- Penyusunan Pedoman tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### **Badan Penghubung**

##### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

##### **Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi**

- Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah
- Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Perantauan
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
- Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan
- Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah
- Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai

### **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.**

Tidak ada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan



4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

**Sekretariat Daerah**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	60	-	60
		Gol. III	209	-	209
		Gol.II	57	-	57
		Gol. I	1	-	1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	4	-	4
		S2	47	-	47
		S1/D. IV	190	-	190
		D. III	34	-	34
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	51	-	51
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	1	-	1
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon I	1	-	1
		Eselon II	15		15
		Eselon III	27	-	27
		Eselon IV	78	-	78
		Fungsional:			
		Tertentu	17	-	17
		Umum	214	-	214
		JUMLAH			327

**Inspektorat**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	15		
		Gol. III	58	1	
		Gol.II	4		
		Gol. I	-		
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-		
		S2	12		
		S1	56		
		D. IV	2		
		D. III	4		
		D.I	-		
		SMA/ sederajat	4		
		SMP/ sederajat	-		
		SD/ sederajat	-		
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1		
		Eselon III	3		
		Eselon IV	2		
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	40		
		Umum	24		
JUMLAH TOTAL			78		

**Sekretariat DPRD**

NO	KRITERIA	RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	4	-	4
		Gol. III	43	-	43
		Gol.II	20	-	20
		Gol. I	1	-	1
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	8	-	8
		S1	35	-	35
		D. IV	-	-	-
		D. III	7	-	7
		D. II	1	-	1
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	16	-	16
		SMP/ sederajat	-	-	-
	SD / sederajat	1	-	1	
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		eselon II	1		
		eselon III	3	-	1
		eselon IV	6	-	3
		Fungsional	6	-	6
		Tertentu	52	-	6
	Fungsional Umum				
Jumlah			68		

**Badan Keuangan Daerah**

No	KRITERIA	RINCIAN	PNS	CPNS	TOTAL
1	Berdasarkan Pangkat/Golongan	Gol. IV	21	-	21
		Gol.III	172	2	174
		Gol.II	74	-	74
		Gol.I	1	-	1
2	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	22	-	22
		S1	139	-	139
		D.IV	-	-	-
		DIII	44	-	44
		DII	-	-	-
		DI	-	-	-
		SMA/Sederajad	62	-	62
		SMP/Sederajad	1	-	1
		SD/Sederajad	-	-	-
3	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		Esselon I	-	-	-
		Esselon II	1	-	1
		Esselon III	14	-	14
		Esselon IV	42	-	42
		Fungsional Tertentu	14	-	14
Jumlah			268		268

### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	18		18
		Gol. III	64		64
		Gol.II	18		18
		Gol. I	1		1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1		1
		S2	18		18
		S1	56		56
		D. IV	3		3
		D. III	13		13
		D.I	-		-
		SMA/ sederajat	9		9
		SMP/ sederajat	-		-
		SD/ sederajat	1		1
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1		1
		Eselon III	4		4
		Eselon IV	11		11
		Fungsional:			
		Tertentu	46		46
		Umum	55		55
Jumlah			101		101

### Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	9	-	9
		Gol. III	53	-	53
		Gol.II	9	-	9
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	4	-	4
		S2	20	-	20
		S1/D. IV	37	-	37
		D. III	3	-	3
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	7	-	7
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	13	-	13
		Fungsional:			
		Tertentu	25	-	25
		Umum	26	-	26
Jumlah			71	-	71

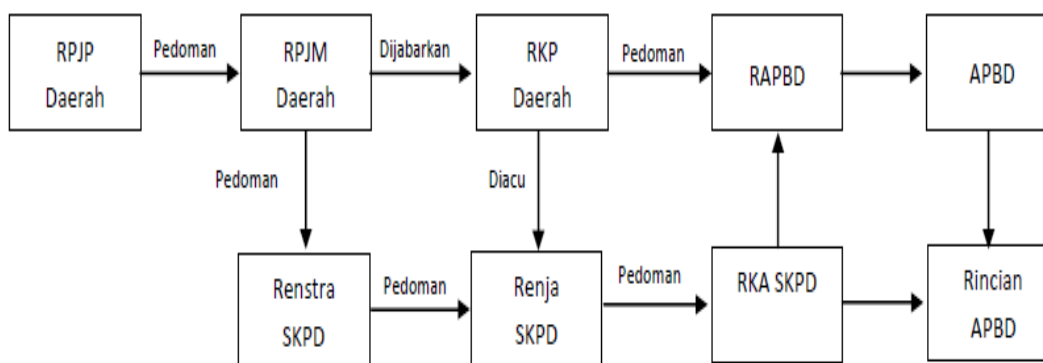
### Badan Penghubung

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	3	-	3
		Gol. III	21	-	21
		Gol.II	6	-	6
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	7	-	7
		S1/D. IV	14	-	14
		D. III	1	-	1
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	4	-	4
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II		-	
		Eselon III	1	-	1
		Eselon IV	4	-	4
		Fungsional:			
		Tertentu		-	
		Umum	25	-	25
Jumlah				-	30

### 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46.523.640.658,00	5.620.401.100,00	68.063.843.809,00	3.774.238.300,00	123.982.123.867,00	113.648.677.812,00	91,67	SEKRETARIAT DAERAH
12.471.042.449,00	997.628.000,00	5.761.162.030,00	70.000.000,00	19.299.832.479,00	17.437.550.423,00	90,35	INSPEKTORAT
8.955.003.355,65	472.591.000,00	92.578.743.410,00	2.253.842.000,00	104.260.179.765,65	85.620.836.956,00	82,12	SEKRETARIAT DEWAN
9.575.263.550,00	1.343.099.000,00	7.692.221.509,00	685.300.000,00	19.295.884.059,00	16.189.813.870,00	83,90	BAPPELIT BANGDA
805.727.674.361,20	3.799.511.500,00	19.318.779.698,00	3.144.980.600,00	831.990.946.159,20	770.527.309.483,02	92,61	BAKUDA
12.979.556.778,00	1.646.496.000,00	17.876.317.510,00	1.411.529.000,00	33.913.899.288,00	30.976.749.935,00	91,34	BKPSDMD
3.581.982.920,00	347.246.000,00	8.737.498.940,00	292.000.000,00	12.958.727.860,00	10.218.325.825,00	78,85	BADAN PENGHUBUNG
<b>899.814.164.071,85</b>	<b>14.226.972.600,00</b>	<b>220.028.566.906,00</b>	<b>11.631.889.900,00</b>	<b>1.145.701.593.477,85</b>	<b>1.044.619.264.304,02</b>	<b>91,18</b>	

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	✓	-	-

## 8. Permasalahan dan solusi

### **Sekretariat Daerah**

Tidak ada permasalahan

### **Inspektorat**

Permasalahan

- Adanya kegiatan yang terkendala aturan dan juknis pelaksanaan
- Belummaksimalnyapencapaian target kinerjamengingat adanya rasionalisasi anggaran dan terlambatnya anggaran perubahan
- Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sehingga mengganggu dalam kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Solusi

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap aturan dan juknis kepada pihak terkait secara berkala.
- Melakukan pertemuan secara berkala terkait upaya dalam mencapai target kinerja dan anggaran sehingga, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dengan hasil yang maksimal
- Meningkatkan dan menambah fasilitas sarana dan prasarana sehingga dapat membantu kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

### **Sekretariat DPRD**

Permasalahan

- Minimnya SDM di Sekretariat DPRD yang memiliki sertifikat Perancang Undang-undang sehingga, yang selama ini selalu menggunakan SDM dari Luar.

Solusi

- Agar pihak terkait bias menempatkan ASN yang sesuai dengan jenjang pendidikannya dan dapat mengikuti Diklat PerancangUndang-undang.

### **Badan Keuangan Daerah**

Permasalahan

- Kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut:
- Sampai sekarang jumlah pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Masih terkendalanya permasalahan asset daerah yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Provinsi.
- Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk dapat mengisi kekurangan pegawai terutama di UPTB yang personilnya masih kurang yaitu UPT BAKUDA Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan UPT BAKUDA Wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Solusi

- Solusi untuk penanggulangan asset sekarang sudah mendekati target yang hendak dicapai dengan terlibatnya Gubernur sebagai kepala daerah dengan memerintahkan setiap kepala perangkat daerah untuk lebih teliti lagi dalam hal inventarisasi asset disetiap perangkat daerah.

## **BKPSDMD**

### **Permasalahan**

- Kesejahteraan pegawai belum maksimal
- Disiplin pegawai belum maksimal
- Pengembangan kompetensi SDM belum optimal
- Promosi dan mutasi belum optimal

### **Solusi**

- Implementasi program tukin untuk meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai
- Penetapan kelas jabatan
- Penetapan standar kompetensi teknis
- Percepatan pembentukan lembaga kediklatan yang mandiri, terpisah dengan urusan administrasi kepegawaian

## **Bappelitbangda**

### **Permasalahan:**

- Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung perencanaan.
- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan.
- Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan kinerja.
- Belum optimalnya kualitas SDM Bappeda.
- Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
- Belum optimalnya penyelenggaraan forum-forum perencanaan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif.
- Kurangnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan. Hal ini disebabkan dominasi pejabat struktural lebih besar daripada pejabat fungsional tertentu (Perencana, Peneliti, Statistisi) dalam proses perencanaan

### **Solusi**

- Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan. Antara lain melalui penguatan Forum Data Provinsi dan pengembangan aplikasi Babel Satu Data.
- Mengembangkan aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan aplikasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Peningkatan ketaatan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan.
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara lebih proporsional dan efisien melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, short course dan pendidikan penjenjangan
- Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan

- Peningkatan kualitas forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, *Focus Group Discussion* dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan
- Memberi peran dan akses yang lebih kepada para pejabat fungsional tertentu untuk terlibat dalam berbagai kesempatan yang akan memperkaya wawasan dan pengalaman yang diperlukan dalam perencanaan.

### **Badan Penghubung**

#### **Permasalahan**

- Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Mess Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang kurang representatif dimana gedung Kantor dan Mess berada di daerah wilayah pemukiman penduduk dan bukan di daerah wilayah gedung perkantoran hal ini menyebabkan tidak diperbolehkannya adanya peningkatan gedung sehingga menyebabkan luas bangunan yang sangat terbatas tersebut harus dibagi antara ruang Kantor Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan ruang Mess Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dari para karyawan kantor maupun dari tamu yang menginap di mess tersebut.
- Masih perlunya ditingkatkan lagi pemahaman dan dukungan bersama dari OPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan arti pentingnya peran Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugasnya demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
- Masih belum dimaksimalkan pemanfaatan potensi Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
- Masih terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Banyaknya SDM tetapi tidak disertai kualitas dan kinerja yang baik dari SDM itu sendiri.
- Banyaknya PNS yang pindah ke Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dengan berbagai macam alasan kepindahan, sementara di Kantor Badan Penghubung sendiri tenaga PNS dan PHL sudah terlampaui banyak dan ruang kerja yang sudah tidak representatif lagi dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan sementara beban kerja yang tidak terlampaui banyak menyebabkan sedikitnya pekerjaan yang dapat dibagikan kepada PNS yang ada, misalnya 1 pekerjaan dapat diselesaikan oleh 1 orang dikarenakan banyaknya PNS yang ada jadi harus dibagi dan dikerjakan oleh 2 orang.
- Menurunnya prosentase tamu yang menginap di mess Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah diberlakukannya sistem *at cost* pada perjalanan dinas sehingga target retribusi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya jauh melampaui target dan meningkatnya tamu yang sakit dari daerah yang akan berobat di Jakarta dalam waktu yang cukup



lama dengan kemampuan yang kurang untuk membayar sewa, sehingga mempengaruhi target pendapatan sewa.

#### Solusi

- Berusaha membenahi sarana dan prasarana gedung Badan Penghubung secara bertahap dan telah adanya wacana untuk pengadaan gedung dan mess Badan Penghubung di Jakarta yang baru dan lebih representatif sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada tamu mess Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan kekayaan daerah yang ada pada Badan Penghubung di Jakarta dan pada Tahun Anggaran 2017 tersebut telah dianggarkan untuk pengadaan pembelian lahan Badan Penghubung dan Mess Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, namun sayang belum dapat terlaksana karena anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami defisit anggaran sementara anggaran yang ada tidak mencukupi untuk membeli lahan tersebut untuk penambahan anggaran dalam anggaran perubahan tidak dapat dilakukan sehingga kegiatan pengadaan lahan tersebut dengan terpaksa di tunda terlebih dahulu dan akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- Mengupayakan langkah-langkah peran aktif dalam membina hubungan baik dalam peningkatan kerjasama yang efektif antara Badan Penghubung dengan OPD lain di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh instansi dan lembaga terkait.
- Mengupayakan kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif untuk pemanfaatan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di TMII antara lain dengan mempromosikan dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengadakan acara pameran, pagelaran seni dan budaya daerah dalam rangka mempromosikan pariwisata dan budaya daerah masing-masing juga bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta paguyuban masyarakat daerah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di Jakarta dan sekitarnya.
- Pengiriman SDM untuk mengikuti diklat dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan pada Tahun Anggaran 2017 telah menganggarkan kegiatan dalam rangka peningkatan Kapasitas Aparatur.
- Adapun upaya yang telah dilakukan adalah selain meningkatkan pelayanan, Badan Penghubung berusaha mencari sumber retribusi lain untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun untuk TA. 2018 karena akan adanya rehabilitasi anjungan TMII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dianggarkan kembali pendapatan atas penginapan dan anjungan.

### C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **2. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut :

### **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **Program peningkatan pelayanan pemerintah**

- Pelayanan administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Peningkatan disiplin aparatur
- Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

#### **Program Penguatan Kewaspadaan Nasional**

- Penguatan kerjasama intelijen lintas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencegahan konflik sosial dan aksi terorisme di Bangka Belitung
- Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA
- Penguatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Bangka Belitung
- Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial

#### **Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

- Pembuatan Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan
- Pembentukan, pendidikan dan pelatihan kalender bela Negara
- Pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan
- Peningkatan kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **Program Pembinaan Politik dalam Negeri**

- Monitoring dan Pemantauan perkembangan situasi politik di daerah
- Workshop pendidikan etika dan budaya politik
- Penguatan indeks demokrasi (IDI)
- Verifikasi penyaluran bantuan keuangan partai politik
- Sosialisasi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

#### **Program ketahanan ekonomi, seni, budaya agama dan kemasyarakatan**

- Forum komunikasi dan kerjasama antar umat beragama
- Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan narkoba
- Evaluasi data dan informasi lembaga usaha ekonomi serta pemantauan stabilitas harga sembako di daerah
- Penguatan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah dan ormas

### **Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan**

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja**

- Pembinaan Peningkatan Personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja
- Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur

**Program Penegakan Perda dan Perkada**

- Penindakan Yustisial terhadap Pelanggar Perda
- Pembinaan dan Penindakan Non Yustisial terhadap Pelanggar Perda dan Perkada
- Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pemberdayaan Peran dan Tugas PTI (Petugas Tindak Internal)

**Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

- Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Gelar Pasukan dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas serta Kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran

**Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat**

- Pembinaan dan Penyelenggaraan Kantrantibmas bagi Satlinmas Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tidak ada SPM yang dilaksanakan.

**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	26	-	26
		Gol. II	5	-	5
		Gol. I			
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	4	-	4
		S1	27	-	27
		D. IV	-	-	-
		D. III	1	-	1
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	6	-	6
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	8	-	8
		Fungsional:			
		Tertentu	2	-	2
		Umum	23	-	23
JUMLAH TOTAL			38		38

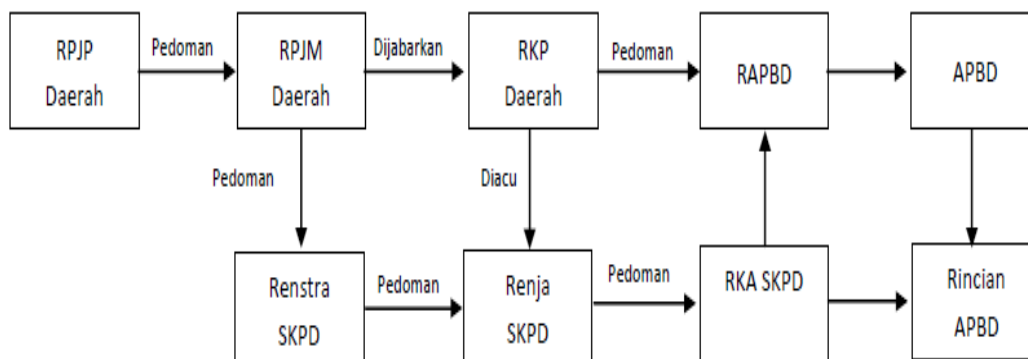
### Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	6	-	6
		Gol. III	41	2	43
		Gol.II	34	-	34
		Gol. I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	7	-	7
		S1	38	2	40
		D. IV	-	-	-
		D. III	2	-	2
		D. II	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	34	-	34
III	Berdasarkan Jabatan	SLTP	-	-	-
		Struktural			
		- eselon II	1	-	1
		- eselon III	5	-	5
		- eselon IV	11	-	11
		Fungsional Tertentu	46	-	46
Fungsional Umum	18	2	20		
JUMLAH TOTAL			81	2	83

### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.308.351.860,11	683.408.000,00	3.398.324.200,00	4.500.000,00	9.394.584.060,11	8.662.036.468,00	92,20	Kesbangpol
9.926.861.495,00	2.004.599.500,00	5.715.232.390,00	409.202.000,00	18.055.895.385,00	17.335.519.488,00	96,00	Satpol PP
<b>15.235.213.355,11</b>	<b>2.688.007.500,00</b>	<b>9.113.556.590,00</b>	<b>413.702.000,00</b>	<b>27.450.479.445,11</b>	<b>25.997.555.956,00</b>	<b>94,70</b>	

### 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas gubernur bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Gubernur. Kemudian Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-Perangkat Daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

### Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	√	

### Satuan Polisi Pamong Praja

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

## 8. Permasalahan dan Solusi

### Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengalami permasalahan/hambatan dalam hal pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018.

## **Satuan Polisi Pamong Praja**

### **Permasalahan**

- Belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menumpang pada Gedung Serba Guna Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kurangnya pegawai Satpol PP yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Kurangnya SDM di bidang Administrasi Perkantoran dan Teknologi Informasi.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan.
- Belum adanya sarana teknologi informasi berbasis *online* yang mencukupi untuk pelaksanaan tugas yang berbasis komputerisasi.

### **Solusi**

- Perlu adanya anggaran yang cukup untuk dapat mempunyai kantor sendiri sehingga tupoksi dapat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menjaga Ketentraman dan Ketertiban dan sebagai penegak perda.
- Ujian Sertifikat Pengadaan barang dan Jasa tetap harus terus diikuti sehingga akhirnya akan didapat Pegawai yang Mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sehingga SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tidak tergantung dengan Petugas dari SKPD lain yang mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.
- Adanya penambahan formasi pegawai yang berkualitas di bidang Administrasi Perkantoran khususnya di bidang Komputer dan Teknologi Informasi.
- Mengupayakan ketersediaan anggaran untuk penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang tugas pengamanan Satpol PP di lapangan.
- Mengupayakan sarana dan prasarana penunjang untuk sistem komputerisasi/teknologi informasi berbasis *online* yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaporan dan transparansi informasi SKPD.

## **D. INDIKATOR KINERJA KUNCI**

### **1. Tataran Pengambil Kebijakan**

#### **a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah**

##### **1. Kabupaten/Kota yang memiliki Perda IMB.**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dan semuanya sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu :

- Perda Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
- Perda Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomo 15 Seri D);
- Perda Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
- Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan.
- Perda Kabupaten Bangka Selatan Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Izin

- Mendirikan Bangunan.
- Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2. Kabupaten/Kota yang memiliki Perda Kependudukan.  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Kependudukan, dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada, yaitu :
  - Perda Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung.
  - Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 3. Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantib).  
Rasio Personil Satpol PP yang PNS terhadap jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 berjumlah 81 (jumlah Satpol PP seluruh Kab/Kota) orang. Dengan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya sebanyak 1.379.767 orang, maka rasio personil Satpol PP PNS terhadap 50.000 penduduk sesuai dengan rumus penghitungan dengan pembulatan adalah 1,519% per 50.000 penduduk.

**b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.**

1. Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah.  
Penyampaian LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 **Tepat Waktu**. Disampaikan berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 120/0237/I tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Pengantar Nomor : 045.2/249/I tanggal 22 Maret 2018.
2. Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja.  
Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

Penyampaian Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 baru disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diaudit, sehingga laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah paling lambat tanggal ---- Maret 2019 **Tidak Tepat Waktu**.

3. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM yang telah diterapkan oleh Kabupaten/Kota se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 42 urusan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka sebanyak 6 urusan;
- Kabupaten Belitung sebanyak 6 urusan;
- Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 6 urusan;
- Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6 urusan;
- Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6 urusan;
- Kabupaten Belitung Timur sebanyak 6 urusan;
- Kota Pangkalpinang sebanyak 6 urusan;

4. Hubungan Antar Daerah.

Jumlah MOU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Lain yang masih berlaku pada Tahun 2018 adalah sebanyak 8 MOU.

**c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah.**

1. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

Kesesuaian Prioritas Pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional yaitu 60%.

Berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 terdapat 6 program prioritas pembangunan daerah, sedangkan prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2018, adalah sebanyak 10 program.

2. Kewenangan.

Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota adalah sebanyak 168 urusan wajib sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014.

3. Keuangan.

- Waktu penetapan PERDA APBD 2018

Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2018 (31 Desember 2017), PERDA Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Desember 2017. (tepat waktu)

- Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (ada)

- Belanja untuk Pelayanan Dasar.

Secara umum besarnya belanja yang digunakan untuk membiayai pelayanan dasar yang dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar, sebagai berikut:

1) Urusan Pendidikan Rp. 769.712.963.114,44

2) Urusan Kesehatan Rp. 270.738.445.129,90



3) Urusan Tata Ruang Rp. 227.993.857.931.24

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp.  
25.671.005.371,81

5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. 27.450.479.445,11

6) Urusan Sosial Rp. 40.493.137.435

Total Belanja pelayanan dasar untuk enam (6) urusan sebesar Rp.  
1.362.059.888.427,50,- di bagi total Belanja APBD Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.  
2.596.704.155.898,11 atau sebesar 52,46%.

- Belanja untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan.

Jumlah belanja pelayanan dasar untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan  
Rp. 1.040.451.408.244,34, di bagi jumlah total belanja APBD Tahun  
Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11 atau sebesar 40,06%.

4. Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor  
8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditetapkan  
pada tanggal 8 Oktober 2015.

5. Kepegawaian.

- Ratio PNS terhadap penduduk

Rasio PNS terhadap jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung. Jumlah PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018  
berjumlah 5.329 orang dan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung semester II tahun 2018 sebanyak 1.379.767 orang, maka rasio  
personil PNS terhadap jumlah penduduk sesuai dengan rumus  
penghitungan dengan pembulatan adalah 0,38%.

- Sistem Informasi Kepegawaian.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki Sistem Database  
Kepegawaian yaitu SIMADIK (Sistem Manajemen Data dan Informasi  
Kepegawaian).

6. Kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan dengan telah  
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah  
sebanyak 42 unit yang terdiri dari Sekretariat Daerah 9 biro, 1 Inspektorat  
Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 23 dinas, 6 badan, 2 unit rumah sakit provinsi.

**d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD**

1. Produk Peraturan Perundangan.

Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebanyak  
10 Peraturan Daerah, yaitu sebagai berikut :

- Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
- Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

2. Raperda yang Diajukan Tahun Berjalan.

Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018 sebanyak 24 Raperda dan Raperda yang diusulkan DPRD tahun 2018 sebanyak 24 Raperda atau sebesar 100%.

**e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.**

Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti pada tahun 2018 sebanyak 35 keputusan yang dihasilkan oleh DPRD dan semuanya ditindaklanjuti atau sebesar 100%.

**f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.**

1. Tindaklanjut Keputusan Gubernur (Kepgub).

Keputusan Gubernur yang ada di Tahun 2018 adalah sebanyak 1.214 keputusan dan semua keputusan tersebut ditindak lanjuti atau sebesar 100%

2. Tindaklanjut Peraturan Gubernur (Pergub).

Peraturan Gubernur yang ada di Tahun 2018 adalah sebanyak 66 dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 sebanyak 66, atau sebesar 100%

**g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang - Undangan.**

Jumlah PERDA yang dibatalkan tidak ada.

Adapun PERDA yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebanyak lima (5) PERDA, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi jasa usaha
- 2) Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017
- 3) Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018
- 4) Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019
- 5) Perda Nomor ----- Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu

**h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah.**

**1. PERDA tentang konsultasi publik.**

Keberadaan Perda atau Pergub tentang konsultasi publik belum mempunyai Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Konsultasi Publik.

**2. Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik.**

Secara umum terdapat media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik meliputi [www.babelprov.go.id](http://www.babelprov.go.id), yang dibentuk berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 480/696/DISKOMINFO/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Pendaftaran Nama Domain.

**i. Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil.**

Dana Perimbangan.

Sumber Penerimaan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum;
- Dana Alokasi Khusus.

**1. Serapan Dana Perimbangan.**

Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan penerimaannya sebesar Rp. 1.685.118.643.150 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.697.727.953.344 atau 100,75% dari target yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci penerimaan dari Dana Perimbangan, sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak  
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 188.486.286.150 dengan realisasi sebesar Rp. 215.400.034.877 atau 114,28%.

**2. Alokasi Belanja pada APBD Dari Dana Alokasi Umum.**

Perbandingan jumlah belanja publik (Belanja Langsung) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 1.135.511.218.578,25 dengan realisasi sebesar Rp. 1.003.339.279.306,78 atau 88,36%, dari Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.018.673.218.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.018.435.174.809 atau 99,98%, sehingga perbandingannya sebesar 11,62%

- Dana Alokasi Khusus  
Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 477.959.139.000 dengan realisasi sebesar Rp. 463.892.743.658 atau 97,06%.

**3. Alokasi Belanja pada APBD.**

Perbandingan jumlah belanja publik (Belanja Langsung) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 1.135.511.218.578,25 dengan

realisasi sebesar Rp. 1.003.339.279.306,78 atau 88,36% berbanding terhadap total APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11 dengan realisasi sebesar Rp. 2.363.595.139.082,80 atau 91,02%, sehingga perbandingannya sebesar 2,66%

**j. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah.**

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besaran PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar Rp. 789.629.819.565,87 dari total realisasi pendapatan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar Rp. 850.562.863.170,27 atau sebesar 107,72%.

**k. Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD.**

**1. Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu).**

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah selama 2 tahun terakhir sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 BPK RI memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2018 BPK RI belum memberikan opini karena masih dalam proses audit.

**2. Besaran SILPA.**

Rasio SILPA terhadap total pendapatan, besaran SILPA APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 109.638.515.332,24 dari total pendapatan sebesar Rp. 2.487.065.640.565,87 atau sebesar 4,40%.

**3. Realisasi Pendapatan.**

Rasio Realisasi Pendapatan PAD terhadap anggaran pendapatan Tahun 2018 jika dilihat dari rasio perbandingan antara realisasi Pendapatan PAD sebesar Rp. 850.562.863.170,27 dengan total pendapatan sebesar Rp. 2.487.065.640.565,87 atau sebesar 34,20%.

**4. Realisasi Belanja.**

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.363.595.139.082,80 total anggaran belanja sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11 adalah 91,02%.

**5. Pengawasan Inspektorat Provinsi.**

Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti berdasarkan hasil inventarisasi terhadap hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2018, jumlah temuan BPK sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 432 temuan 1.049 rekomendasi, sedangkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 699 temuan atau sebesar 66,63%.

**l. Pengelolaan Potensi Daerah.**

**1. Peta Potensi Daerah**

Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD yaitu jumlah realisasi PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 850.562.863.170,27 dibagi dengan potensi PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 789.629.819.565,87 atau sebesar 107,72%.

2. Peningkatan PAD.

Total PAD tahun 2018 sebesar Rp. 850.562.863.170,27 sedangkan PAD dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebesar Rp. 737.192.092.935,16 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp. 113.370.770.235,11 atau sebesar 15,38% dari Tahun Anggaran 2017.

**m. Terobosan Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

1. Penghargaan.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Tahun 2018 adalah sebanyak 45 penghargaan, yaitu:

- Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI diberikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang telah terintegrasi dengan system JDIHIN
- Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dari Komisi Aparatur Sipil Negara
- Penghargaan dari Menkopulhukam sebagai Provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bernilai baik
- Penghargaan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Peranian RI diberikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman sebagai kepala daerah peduli pembangunan perkebunan berkelanjutan pada acara Hari Perkebunan ke-61 tahun 2018. Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Pengadaan Barang dan Jasa.

Keberadaan E-procurement di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dimulai pada tahun 2010 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah diterapkan melalui media elektronik (e-procurement) melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) melalui Biro Layanan Pengadaan.

3. Daya saing Daerah.

Jumlah realisasi izin Investasi dalam tahun 2018, ada 906 izin persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total nilai investasi Rp. 658.900.000.000,-

**2. Tataran Pelaksana Kebijakan**

**a. Administrasi Umum.**

Indikator Kinerja Kunci pada Aspek Tataran Pelaksana Kebijakan Lampiran (I.2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan urusan kewenangan yang dilaksanakan.(terlampir)

**b. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

1. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi adalah sebagai berikut : SIMADIK, e-MONEV, SIPKAD, SIAK . e-PROC. siBahsos, e-Planing, e-Musrenbang, SIMDA, si Pena

2. Tapalbatas

Jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten/Kota yang diselesaikan dan dilaporkan sebanyak dua (2) segmen.

Penyelesaian batas daerah terhadap kedua segmen tersebut telah pada tahap penyusunan Draft Permendagri yang telah selesai dikoreksi oleh masing-masing Tim PBD Kabupaten/Kota. Kendala yang dihadapi adalah pada saat verifikasi di lapangan bersama dengan Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang didampingi oleh perangkat kecamatan setempat. Oknum perangkat kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka mengklaim bahwa pada daerah tertentu yang menjadi wilayah perbatasan dengan kecamatan di Kota Pangkalpinang merupakan sepenuhnya masuk kewilayah kecamatan Mendo Barat. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Tim PBD Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini cukup mengganggu proses verifikasi lapangan pada saat itu

3. Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD - Ada

4. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD - Ada

5. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD - Ada

6. Penjabaran program RPJMD dalam RKPD

Jumlah program RPJMD dalam RKPD sebanyak 203 program dan seluruh Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dilaksanakan semua atau sebesar 100%.

**c. Urusan Pemerintahan Umum**

Urusan pemerintahan umum melaksanakan kegiatan pembinaan politik di daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP, yaitu sebanyak 2 kegiatan.

**d. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.**

Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan wajib yang dilaksanakan oleh provinsi sebanyak 58 Indikator Kinerja Kunci. (lampiran terlampir)

Adapun Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan pilihan yang dilaksanakan oleh provinsi sebanyak 16 Indikator Kinerja Kunci. (lampiran terlampir)

# **BAB IV**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

**BAB IV**  
**REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)**  
**TAHUN 2018**

**4.1. Pelaksanaan Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 Prioritas Pembangunan Nasional dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

**Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah  
Dengan Prioritas Pembangunan Nasional**

<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>
1. Pendidikan;	1. Peningkatan Ekonomi;
2. Kesehatan;	2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Perumahan dan Permukiman;	3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;	4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat;
5. Ketahanan Energi;	5. Pembangunan Berdemokrasi;
6. Ketahanan Pangan;	6. Penanggulangan Bencana.
7. Penanggulangan Kemiskinan;	
8. Infrastruktur, Kenektivitas dan Kemaritiman;	
9. Pembangunan Wilayah;	
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.	

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”** maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen (\*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (\*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen (\*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar 5,10



- persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4. Laju inflasi 3,5 persen.

Keselaran Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam Tabel IV.4 dibawah.

**Tabel IV.1**

Keselaran Target Indikator Pembangunan Makro Antara Target Nasional, Regional Sumatera Dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Indikator	Tahun 2018		
	Nasional	Sumatera	Babel
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1	5,97	5,30
Tingkat Kemiskinan %	12,5	10,25	4,42
Tingkat Pengangguran %	4,44	4,8	2,10
Laju Inflasi (%)	3,5	3,5	3,8

*Sumber: RPJMN 2015-2019, Rancangan RKP 2018*

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sasaran perekonomian nasional tersebut diatas menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Penyelarasan 3 (tiga) dimensi pembangunan dengan 6 (enam) prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.5.

**Tabel IV.2**

Keselarasan Antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pokok Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2018)		Prioritas RKPD 2018	Sasaran RPJPD 2005-2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dimensi pembangunan manusia	1. Revolusi Mental	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.
		Pembangunan Berdemokrasi	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
	2. Pembangunan Pendidikan	Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
	3. Pembangunan Kesehatan		
	4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman		
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan	1. Kedaulatan Pangan	Peningkatan Ekonomi	Meningkatnya ekonomi daerah
	2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan		
	3. Kemaritiman dan Kelautan		
	4. Pariwisata		
	5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan	1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
	2. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
		Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam
4. Kondisi yang kondusif (kondisi perlu)	1. Pembangunan politik	Pembangunan demokrasi.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
	2. Hukum		
	3. Pertahanan dan Keamanan		

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, maka terlihat bahwa satu prioritas daerah dapat didukung beberapa sasaran pokok daerah. Pemilihan prioritas daerah dimaksudkan agar didalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* lainnya.

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 harus diselaraskan juga untuk mendukung pencapaian 10 (Sepuluh) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Pemukiman;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman;
9. Pembangunan Wilayah;
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan dan 10 (sepuluh) Prioritas Nasional, diperlukan dukungan dari prioritas pembangunan daerah. Pencapaian Prioritas Nasional tersebut didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.3 Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD Dalam Rangka Mendukung Prioritas RKP 2018.

**Tabel IV.3**

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan RKP 2018

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
I	<b>DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA</b>						
	<b>1 Revolusi Metal</b>						
	<b>Prioritas 10. Politik, Hukum, pertahanan keamanan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik</li> <li>• Reformasi Birokrasi Pemerintahan</li> <li>• Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa</li> <li>• Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa</li> <li>• Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik</li> </ul>	1 peningkatan Manajemen Perubahan	1 PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase konsistensi dan keselarasan dokumen rencana peningkatan manajemen perubahan	80%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BAPPEDA
			2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				BAPPEDA
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengembangan kinerja	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
		2 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan	1 PROGRAM PERENCANAAN , EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				BAPPEDA
			2 PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD	3 nilai		BAKUDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.					
		3 Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratis, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal dengan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat.	1 PROGRAM PERENCANAAN , EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				BAPPEDA
			2 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Prosentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah; tingkat pelayanan sistem informasi pajak daerah	89,64%; 4 nilai	Provinsi	BAKUDA
			3 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN LAIN YANG SAH	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	1,57%	Provinsi	BAKUDA
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Rata-rata prosentase realisasi penerimaan pajak daerah pada unit pelaksanaan teknis; indeks kepuasan masyarakat	100%; 75 nilai	SKPD, Bangka Selatan	BAKUDA
			5 PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan perubahan APBD	3 nilai	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
			6 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN
			7 PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI	Persentase Perangkat Daerah yang Menginput	100%	Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		4 Penegakan Perda dan Perkada yang memiliki sanksi	PELAKSANAAN APBD	Aplikasi E-Monev			
			8 PROGRAM PERENCANAAN SETDA	Penyusunan Laporan Dokumen Sekretariat Daerah	100%	Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN SETDA
			9 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Prosentase penegakan/penindakan pelanggar Perda	100%	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang	SATPOL PP
		5 Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	10 PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBN	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus) di Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Luar Daerah, Provinsi	BIRO PEMBANGUNAN
			1 PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase penataan peraturan perundang-undangan	100%		BIRO HUKUM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Persentase Bantuan Hukum	85%	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang	BIRO HUKUM

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM	Persentase Pengembangan Informasi Hukum dan Dokumentasi Hukum	100%	Provinsi	BIRO HUKUM
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,	SETWAN
		6 peningkatan dan Penataan penguatan organisasi	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTA ANALISIS JABATAN	Persentase peningkatan kelembagaan dan analisis jabatan	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
			2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan tata laksana	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BIRO ORGANISASI
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengembangan kinerja	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI
		7 peningkatan Tata Laksana	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan tata laksana	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO ORGANISASI

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			2 PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	Persentase Hasil Kegiatan Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	100%	Provinsi, SKPD	BIRO HUMAS
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT	Persentase Publikasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi yang Dipublikasikan	100%	Provinsi, SKPD	BIRO HUMAS
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER	Persentase kegiatan protokoler yang dilaksanakan	100%	Provinsi, SKPD	BIRO HUMAS
			5 PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN INVESTASI, PELAYANAN HUMAS DAN PROTOKOLER, SERTA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PENGHUBUNG PROVINSI	Persentase peningkatan informasi dan invesasi, pelayanan humas dan protokoler, serta hubungan antar lembaga penghubung provinsi	100 %	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN	Persentase pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,	SETWAN
		8 peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGADAAN SERTA PELAYANAN PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN	Persentase Ketepatan Waktu Penerimaan SK Pangkat dan Pensiun ASN Terhadap B; Persentase Kesesuaian ASN Pada Promosi, Mutasi dan Kepangkatan Terhadap Analisa Jabatan;	765 SK ASN; 95 %; 70 %; 4 Nilai		BKPSDM



No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Persentase Kesesuaian Antara Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Kebutuhan Organisasi serta Prioritas Pembangunan Daerah; Peringkat Kualitas Pelayanan Penerimaan ASN melalui Jalur Umum dan Pendidikan Kedinasan yang Objektif, Terbuka, Transparan dan Akuntabel			
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENILAIAN KINERJA, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Tingkat Penilaian Kinerja, Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Disiplin ASN; Tingkat Pelayanan Kesejahteraan ASN; Tingkat sarana dan prasarana terhadap Pelayanan ASN berbasis Teknologi Informasi	60 Orang; 4.116 Orang; 90 %		BKPSDM
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Jumlah ASN terlatih; jumlah SKPD terlatih	1.750 orang; 17 SKPD		BKPSDM
		9 Peningkatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengembangan kinerja	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur,	BIRO ORGANISASI

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
						Pangkal Pinang	
			2 PROGRAM PERENCANAAN , EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti</li> <li>- Persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, target indikator sasaran, program dan target indikator program dalam RKPD dengan RPJMD</li> <li>- Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang tervalidasi dan dapat Diakses</li> <li>- Persentase keselarasan Program, kegiatan dan pagu anggaran antara RKPD dengan APBD</li> </ul>			BAPPEDA
			1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	93%	Provinsi	INSPEKTORAT
		10 Peningkatan Penguatan Pengawasan	2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	INSPEKTORAT
			3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	Peningkatan level kelembagaan Inspektorat	3 level	SKPD	INSPEKTORAT

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN	Prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100%	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AKUTANSI DAN PELAPORAN	Tingkat pelayanan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; prosentase kabupaten/kota yang memiliki hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dengan rata-rata hasil WTP	4 nilai; 100%	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
		11 Opini Audit BPK	3 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ASET DAERAH	Prosentase aser daerah yang dapat diyakini kebenarannya; prosentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	100%; 0,33%	SKPD, Pangkalpinang	BAKUDA
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Rata-rata prosentase realisasi penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis			SAMSAT
			5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan tata laksana	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung,	BIRO ORGANISASI

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU			Belitung Timur, Pangkal Pinang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			7 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Perentase sekolah SMA yang fasilitas perizinaan/SMA Terakreditasi			DINDIK
			8 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Perentase sekolah SMK yang fasilitas perizinaan/Terakreditasi			DINDIK
			9 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Perentase sekolah Sekolahluar biasa yang fasilitas perizinaan/terekreditasi			DINDIK
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PLUT KUMKM	- Persentase KUMKM yang mendapatkan 7 layanan PLUT			KUMKM
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	1 persentase akreditasi pelayanan RS	1 100%	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	RSUP
			11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	RSUP
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	3 Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Layanan	3 80%	Kabupaten Bangka	RSJ

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				4 Persentase elemen Akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	4 80%	Kabupaten Bangka	
			13 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	1 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan keswa	3 100%		RSJ
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Persentase pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	100%	Provinsi	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			15 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	persentase pelayanan Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah	100%	Provinsi	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			16 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Persentase Penerapan aplikasi berbasis Elektronik yang diterapkan dalam proses pengadaan Barang/jasa pemerintah Provinsi Kepulauan bangka Belitung	100%	Provinsi, Luar Daerah	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			17 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara; Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat; persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	77.460.000 meter persegi;30 bidang;20 persentase	Provinsi	BIRO PEMERINTAHAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi; Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan; Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi; Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik	15 peringkat;10 Prosentase;20 %;90 %	Provinsi, SKPD	BIRO PEMERINTAHAN
			19 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan koordinasi hubungan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peningkatan jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	90%; 90%	Luar daerah, Provinsi	BIRO PEMERINTAHAN
			20 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	100%	Provinsi, SKPD	DKPUS
			21 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola	0%	Provinsi, SKPD, Pangkalpinang	DKPUS

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			PELESTARIAN ARSIP	(Dinamis dan Statis)			
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	0 %; 0 %; 0 %	SKPD	DKPUS
			23 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Jumlah layanan M- CAP di 6 Kabupaten	6 kabupaten provinsi, bangka barat, bangka selatan, baltim, bangka tengah, bangka, belitung	6 Kabupaten/Kota	DISKOMINFO (URUSAN TIK)
			24 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tingkat Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; Persentase Peningkatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Masyarakat	60 %	7 Kabupaten/Kota	DISKOMINFO (URUSAN PERSANDIAN)
			25 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	persentase PD yang difasilitasi dengan sistem informasi	40 %	PD Provinsi	DISKOMINFO
			26 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNKASI PUBLIK	persentase saluran komunikasi yang dikelola	40%	PD Provinsi	DISKOMINFO
			1 PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah penistaan terhadap simbol negara; Jumlah Konflik Sara	0 %; 3 Jumlah	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka	KESBANGPOL

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
						Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	
			2 PROGRAM Penguatan Kewaspadaan Nasional	Jumlah rekomendasi koordinasi antar pemangku kepentingan yang dijalankan; Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7 ; 0 %	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
		13 Menjamin Kebebasan sipil	3 PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; Jumlah Rekomendasi yang digunakan; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	25 %; 1 Hasil; 30 %	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
			1 PROGRAM Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas	100%	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang	SATPOL PP
			2 PROGRAM Peningkatan Perlindungan	Prosentase peningkatan kualitas Linmas	10%	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka	SATPOL PP



No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			MASYARAKAT			Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang	
		14 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (Linmas)	3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	100%	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang	SATPOL PP
			1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan; Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik; Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender			DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			2 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	· Prosentase penegakan/penindakan pelanggar Perda			DINSOS
		15 Menjamin Hak-hak politik	2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				BAPPEDA
			3 PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	Cakupan Pembinaan Poitik Daerah; Tingkat Kinerja Lembaga Demokrasi;	7 Jumlah; 45 %;	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
		16 Menjamin Lembaga-Lembaga Demokrasi	5 PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN	Persentase konsistensi dan keselarasan	80%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	BAPPEDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	dokumen rencana pembangunan demokrasi			
			6 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Persentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100%	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO KESRA
			1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA			DINAS PENDIDIKAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMA			DINAS PENDIDIKAN
			3 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK Pendidikan Khusus			DINAS PENDIDIKAN
	2 Pembangunan Pendidikan		1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikasi			DINAS PENDIDIKAN
	Prioritas 1. Pendidikan	1 peningkatan akses pelayanan pendidikan	2 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS PENDIDIKAN MENENGAH, KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SMA, SMA dan pendidikan khusus yang difasilitasi	100%		UPTD PENDIDIKAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN	persentase biaya BOS			SMA/SMK/SLB

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	<p>memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel</li> <li>• Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru</li> <li>• Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan</li> <li>• Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini</li> <li>• Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan</li> </ul>		PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN	yang terialisasi			
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	bangunan gedung arsip yang beroperasi	1	Pangkalpinang	DINAS PRKP
		2 peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing	5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap anak sekolah			PERHUBUNGAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap anak sekolah			PERHUBUNGAN
			8 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Jumlah ASN yang terakreditasi	40 SDM, PAK	Provinsi	DISKOMINFO
			9 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100%	Provinsi	BIRO KESRA
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS	Persentase pembinaan keagamaan	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,	BIRO KESRA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	tinggi		KEAGAMAN			Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN, PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN				BKPSDMD
			12 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			13 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				predikat/nilai SAKIP minimal B)			
			14 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	0 %; 0 %; 0 %	SKPD	DKPUS
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi; Pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	100 %; 40 orang	Provinsi, SKPD	DKPUS
			1 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT				

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			2 PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	23 Pper-100.000 kelahiran hidup	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	2 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7.2 per 1.000 kelahiran hidup	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	3 Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	70%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
	<b>3 Pembangunan Kesehatan</b>		5 ROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	4 Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	79,64%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
	<b>Prioritas 2. Kesehatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat upaya promotif dan preventif</li> <li>Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>Mempercepat perbaikan gizi masyarakat</li> <li>Meningkatkan pelayanan</li> </ul>	1 peningkatan derajat kesehatan masyarakat	6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN	5 Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	63%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				1 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	37%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				2 Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	17,50%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	keluarga berencana dan kesehatan reproduksi			3 Persentase menurunnya penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus)	32,90%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				4 Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%)	71,40%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				5 Prevalensi HIV (Ket: target prevalensi HIV kurang dari sepuluh persen)	10%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	6 Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	85,71	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				7 Persentase kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				8 persentase penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	100%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
							DINDIK
							DINDIK
							DINDIK
							SMK/SMA/SLB

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				persentase kecamatan yang diintervensi dengan sarana prasarana air bersih	8 persen		
			8 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO KESRA
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			10 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA



No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				minimal B)			
			11 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA
			13 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	1 Persentase pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	80%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	UPTD KESEHATAN
			14 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan yang aman dikonsumsi			DINAS PANGAN
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI				DISPERINDAG
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1			
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	2 Persentase RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	53%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	4 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	60%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1 Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	1800 sampel	Provinsi Kep. Bangka Belitung	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
			5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	1		Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		2 peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	1 Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	Persentase masyarakat yang terlayani	Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA	1 Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP		Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP
				1 Persentase Resep Sesuai Formularium	1 90%	Kabupaten Bangka	RSJ
				1 Persentase Pasien pasung yang terlayani	1 90%	Kabupaten Bangka	RSJ
			8 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	2 Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial	2 75%	Kabupaten Bangka	
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan keswa	3 100%	Kabupaten Bangka	
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi	4 100%	Kabupaten Bangka	
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGINIES PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	1 Persentase Ruang Rawat Jalan yang Memadai	1 90%		RSJ
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	2 Persentase Ruang Rawat Inap yang Memadai	2 90%	Kabupaten Bangka	

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN PEMERINTAH				
				3 Persentase Ruang Penunjang yang Memadai	3 90%		
				4 Persentase Bangunan Penunjang yang Memadai	4 70%	Kabupaten Bangka	
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAAN PEMERINTAH	5 Persentase Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	5 60%	Kabupaten Bangka	
				6 Persentase Peralatan Penunjang	6 75%	Kabupaten Bangka	
				7 Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan	7 95%	Kabupaten Bangka	
				Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
				Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73%		
				1 Persentase tenaga/SDM kesehatan yang mengikuti program peningkatan kompetensi	1 75%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				3 Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	3 90%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
				Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat	100%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSUP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		Provinsi Kep. Bangka Belitung	RSJ
				Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%		
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN, PROMOSI, MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENSIUN ASN				BKPSDM
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan panjang talud Sumber Air Baku (m); Panjang Penahan Abrasi pantai; Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/ Optimalisasi irigasi	2 Ha; 200 meter; 2000 meter; 50 Ha		DINAS PUPR
		3 Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE	Persentase kawasan kumuh yang diintervensi dengan sarana dan prasarana permukiman	30 persen		DINAS PRKP
							DLH

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				
			2 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP				PERTANIAN
				Pertumbuhan penggunaan sarana prasarana pertanian untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan			
	4 Pembangunan Perumahan dan Permukiman		1 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan sarana prasarana pertanian			PETANIAN
	<b>Prioritas 3. Perumahan dan Permukiman</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai</li> <li>Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam</li> </ul>	1 Pengembangan Sistem Sumber Daya Air	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN			DINAS PUPR	
		2 Pengembangan Sistem Prasarana Permukiman	2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase benih yang tersertifikasi			UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	persentase penurunan serangan hama penyakit tanaman			UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset</li> <li>• Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat</li> <li>• Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi</li> </ul>						
II	<b>DIMENSI PEMBANGUNAAN SEKTOR UNGGULAN</b>		1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Kontribusi produksi benih/ bibit pertanian terhadap PAD			
	<b>1 Kedaulatan Pangan</b>		5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			PETANIAN
	<b>Prioritas 6. Ketahanan pangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN</li> <li>• Peningkatan</li> </ul>	1 Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;	6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian			PETANIAN
		2 Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah produk pertanian;	7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor Pertanian			PETANIAN
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN	Produksi Perikanan	211.300		DKP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	aksesibilitas masyarakat terhadap pangan • Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi • Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan		PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	Ton;108 indeks		
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif; Jumlah Hari Operasi pengawasan yang efektif dan Efisien	50 Kelompok;150 Hari Operasi		DKP
			11 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	8.750.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR PAYAU	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	50.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			13 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LAUT	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	6.000 ekor;300.000 ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
			14 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	25 Rekomendasi Hasil		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN				KOMINFO

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN				
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kawasan Hutan Yang Terkelola	25%	Provinsi, SKPD, Bangka	KEHUTANAN
			17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAN
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAN
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			PERTANIAN
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN				UPTD BALAI PENYULUHAN
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN PENYULUHAN DAN PENINGKATAN SDM PERTANIAN	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA,	persentase penduduk rawan pangan yang	1%; AKP= 73 gr/kap/hari,		DINAS PANGAN



No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian	TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	tertangani; angka kecukupan protein (AKP) dan Angka Kecukupan (AKE)	AKE= 2539,8 kkal/kap/hari		
			1 PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	kontribusi harga pangan terhadap inflasi daerah	2%		DINAS PANGAN
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	skor PPH	89,2		DINAS PANGAN
		4 Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian	3 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN				UPTD PANGAN
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANGAN	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			PERTANIAN
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			PERTANIAN
		5 Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan	6 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA				DISPERINDAG
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN				DISPERINDAG
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			PERHUBUNGAN
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			PERHUBUNGAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase jalan yang menuju kawasan pertanian yang dibangun dan pelihara	96%		DINAS PUPR
			11 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan Panjang Talud Sumber Air Baku (m) ; Panjang Penahan Abrasi pantai; Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/Optimalisasi Irigasi	2 hektar; 200 meter; 2.000 meter; 50 hektar	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	DINAS PUPR
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				BIRO EKONOMI
			13 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA
			14 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang	83 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				digunakan sebagai rekomendasi kebijakan			
			15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				KOMINFO
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			17 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif; Jumlah Hari Operasi pengawasan yang efektif dan Efisien	50 Kelompok;150 Hari Operasi		DKP
			19 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	8.750.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR PAYAU	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	50.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			21 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LAUT	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	6.000 ekor;300.000 ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
			22 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	25 Rekomendasi Hasil		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
							MUTU HASIL PERIKANAN
			23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN				KUMKM
			24 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA				KUMKM
			25 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI				
				Kontribusi Sektor Minyak dan Gas ; Persentase Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas; Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Persentase Rasio Ketersedian Daya Listrik	400 Ribu Barel, 100%,100%,100 %		DISTAMBEN
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan	BIRO EKONOMI

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			2 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Kontribusi Sektor Minyak dan Gas ; Persentase Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas; Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Persentase Rasio Ketersedian Daya Listrik	400 Ribu Barel, 100%,100%,100 %		DISTAMBEN
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
				Perentase panjang jalan trans bangka pada kawasan tanjung kalian yang direncanakan	100%		DINAS PUPR
			1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN				DINAS PUPR
	2 Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan		3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				DINAS PRKP
	<b>Prioritas 5. Ketahanan Energi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, Pengembangan gas non konvensional</li> </ul>	1 Pemenuhan listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;	4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	persentase panjang jalan yang direncanakan untuk mendukung sistem transportasi darat			DINAS PUPR

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(shale gas dan CBM) • Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi • Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati • Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG • Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk	2 Pengembangan Sistem Jaringan /Listrik	1 PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			DISHUB
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal		Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah	DISHUB

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO) <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran</li> </ul>						
	<b>3 Kemaritiman dan Kelautan</b>		1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT			Pangkal Pinang, Bangka Tengah	DISHUB
	<b>Prioritas 8. Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman</b>	1 Pengembangan Kawasan Strategis Tanjung Kalian	1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya</li> <li>Pengaturan dan pengendalian ALKI</li> <li>Penguatan lembaga pengawasan laut</li> <li>Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak</li> </ul>			Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi	8%		DISNAKER
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga pelatih yang mendapat pelatihan (upgrading)	7,27%	Provinsi	UPD BLKI
		3 Pengembangan Sistem Transportasi Darat	2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja	13,33%	Provinsi	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN	pesentase SMK yang memiliki sarana/prasarana dan	50%		DINDIK

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Pidana <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda</li> <li>Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan</li> <li>Percepatan pengembangan ekonomi kelautan</li> <li>Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, dayadukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut</li> <li>Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan</li> <li>Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir</li> </ul>	4 Pengembangan Sistem Transportasi Laut	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	pengembangan kelembagaan sekolah			
			4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN				KUMKM
			5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS DAN PERKOPERASIAAN	Persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	75%		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	<b>4 Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</b>		6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN	pertumbuhan varitas bibit yang disertifikasi	1%		UPTD PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU BENIH



No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			MENENGAH				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa</li> <li>Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha</li> <li>Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)</li> <li>Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA: (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata</li> <li>Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur</li> </ul>	1 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing (pertanian, perikanan, pariwisata, timah)	1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	pertumbuhan jenis bibit pertanian yang di kembangkan	1%		UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertumbuhan produk pariwisata yang terstandarisasi	1%		BUDPAR
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Intensitas produk KUMK yang terinformasikan dalam setahun	2 kali		KOMINFO
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase koperasi berkualitas	109%		DKUKM
			5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	5%		KUMKM
			6 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL				DISPERINDAG
		2 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing	7 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase produk yang disertifikasi	5%		UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
			8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU	Jumlah Rekomendasi Hasil uji Keamanan Pangan dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	25 Rekomendasi Hasil		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan SDM dan IPTEK</li> <li>Pengembangan regulasi dan kebijakan</li> <li>Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal</li> </ul>		PRODUK				MUTU HASIL PERIKANAN
			9 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Beroperasiannya Pembangunan Gedung Promosi Produk-produk Koperasi dan UMKM	100%	Pangkalpinang	DINAS PRKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Pertumbuhan jumlah jenis benih yang diawasi	1%		UPTD PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Pertumbuhan volume usaha koperasi	1%		KUMKM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI				UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN				UPTD BALAI PETERNAKAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN	persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	75%		UPTD BALAI LATIHAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			KOMUNIKASI PUBLIK				PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PERTANIAN
			8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase Penurunan Serangan Hama Penyakit Tanaman			UPTD BALAI PROTEKSI
		1 Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk pertanian, perikanan, timah dan pariwisata	9 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN				UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN				DIPERINDAG
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Kontribusi Produksi Benih/ bibit Pertanian terhadap PAD			UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)			
			13 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase		BAPPEDA
			14 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	BIRO KESRA
			15 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Kontribusi subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAAN
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian			DINAS PERTANIAAN
			17 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	skor PPh	89,2		DINAS PANGAN
			18 PROGRAM PENINGKATAN	Pertumbuhan volume	5%		DKUKM

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	usaha pelaku usaha kecil			
			19 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase peningkatan SDM KUMKM terlatih	755%		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase koperasi berkualitas	109%		DKUKM
			21 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	8.750.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU TANJUNG KRASAK
			23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	50.000 Ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT TANJUNG RUSA
			24 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Jumlah Produksi Calon Induk Ikan yang Unggul ; Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul	6.000 ekor;300.000 ekor		UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL PEMALI
			25 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR				DISPERINDAG

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			TAWAR				
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PERTANIAN
			2 PROGRAM PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK				UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN INDUSTRI
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN INDUSTRI				
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH
			5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				DPMD
			6 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN				DISPERINDAG
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase kawasan industri yang dilayani air bersih	2%		DINAS PRKP
			2 Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam	2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah 6,47%		DLH

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				
			3 PROGRAM PEMLIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP				
							KUMKM
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN				KUMKM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PAREKRAF				KUMKM
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI				KUMKM
		3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	4 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENAWASAN KOPERASI	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				pengelolaan SDA & TTG			
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT				DINDIK
			5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN				DINDIK
	5	Pariwisata	1 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA				
	<b>Prioritas 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara</li> <li>Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri</li> </ul>	1 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	2 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			DISHUB
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			DISHUB
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT				DISHUB
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN				UPTD TERMINAL TIPE B
			6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERMINAL TIPE B	Persentase jalan yang menuju kawasan pariwisata yang dibangun dan dipelihara	50%		DINAS PUPR
			7 PROGRAM PEMBANGUNAN,	Persentase dokumen		Belitung, Belitung	DPMD



No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran</li> <li>Pembangunan kelembagaan pariwisata: membangun SDM pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional</li> </ul>	2 Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan		Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah	
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN				KUMKM
			9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL				KUMKM
			10 PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUMK	Persentase PD mitra Bidang Infratraktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratraktur dan Kewilayahan yang tercapai	60 Persentase; 80 Persentase		BAPPEDA
			11 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai;	80 Persentase; 60 Persentase		BAPPEDA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)			
			12 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				BIRO EKONOMI
			14 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Persentase pemuda yang mendapat pemberdayaan		Provinsi	DISPORA
			15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase atlet yang berprestasi		Provinsi	
			1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Rasio sarana olah raga dengan jumlah atlet		Provinsi	
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	100%		BUDPAR
			3 PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal	BIRO KESRA

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
						Pinang	
			1 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu)		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Bangka, Bangka Barat	DPMD
			2 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
			3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; Jumlah Rekomendasi yang digunakan; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	0 %; 0 Hasil; 0 %	Luar daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	KESBANGPOL
			4 PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Bangunan dan lingkungan; Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran	1 Dokumen		DINAS PRKP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				air tidak tersumbat; Rumah tangga pengguna air bersih; Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4); Ruang Terbuka Hijau ; Sarana air limbah; Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permukiman; Rumah tangga bersanitasi; Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara; Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi			
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE	Persentase kawasan KotaTua Mentok yang dikembangkan			

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		3 Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olah raga	LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				
			2 PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA				
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA				
			4 Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul.	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	100%	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial		Provinsi, Pangkal Pinang	UPTD PANTI SOSIAL
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial		Provinsi, Belitung Timur	UPTD PANTI SOSIAL
			2 PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI	1 Persentase masyarakat yang mendapat		Kabupaten Bangka	RSJ

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		5 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Tua Muntok	SOSIAL	elayanan kesehatan jiwa			
			3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIK KEJIWAAN	2 Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	2 42 Hari	Kabupaten Bangka	
			4	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase pembinaan keagamaan	100%	Luar Daerah, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung	BIRO KESRA
			6 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
III	<b>DIMENSI PEMERATAAN DAN WILAYAH</b>		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lansia yang ikut olah raga lansia			
	1 <b>Pemerataan antar Kelompok Pendapatan</b>		3 PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI	Persentase bantuan hukum	85%	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat,	BIRO HUKUM

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			OLAH RAGA			Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	
	<b>Prioritas 7. Penanggulangan Kemiskinan</b>  Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana Pengembangan dan	1 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan penanganan pada fakir miskin		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			6 PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	Pesentase			KUMKM
			1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI				KUMKM
			2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perdagangan			DISPERINDAG
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase pemuda miskin			DISPORA
		2 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	4 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Pesentase penduduk miskin yang bekerja disektor pertanian			PERTANIAN
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	perentase penduduk miskin yang bekerja disektor perkebunan			PERTANIAN
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	persentase penduduk miskin yang bekerja sebagai peternak			PERTANIAN
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase penduduk			DKP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar Efektivitas program Bidik Misi Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH	3 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	miskin yang bekerja sebagai nelayan			
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	persentase penduduk miskin yang bekerja disektor perikanan budidaya			DKP
			9 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Intensitas informasi yang ditayangkan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan			DKP
			10 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terhadap kondisi optimal			DISHUB
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT				DISHUB
			12 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Perentase penduduk miskin dengan rumah tidak layak huni			PEKIM
			13 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT				
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				BAPPEDA
			15 PROGRAM PERENCANAAN SOSBUD DAN PEMERINTAHAN	Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100%	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah,	BIRO KESRA



No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
						Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	
			16 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 Persentase kepesertaan JKN	1 77,50%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINAS KESEHATAN
			17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase siswa SMA miskin yang dapat beasiswa			DINDIK
			19 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase siswa SMK miskin yang dapat beasiswa			DINDIK
			20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswapendidikan khusus miskin yang dapat beasiswa			DINDIK
			21 PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	persentase sanitasi dan air bersih penduduk miskin			PERKIM
			22 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE				

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				
			23				
				Panjang Jalan dan jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	96%		DINAS PUPR
			PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN				DINAS PUPR
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				DINAS PUPR
			2 PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				DINAS PRKP
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				DINAS PRKP
			4 PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT	Luas Kawasan Konservasi; Jumlah Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang Konsisten	750.000 Ha;2 Rekomendasi Izin		DKP
			5 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
	<b>2</b>	<b>Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	7 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut terhadap Kondisi Optimal			DISHUB
		<b>Prioritas 9. Pembangunan Wilayah</b>	8 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT				DISKOMINFO
	<b>Pembangunan Perdesaan</b>	1 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	10 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				DISKOMINFO
	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi		11 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
	Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi		12 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG		Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	DPMD
	Pengawasan implementasi UU						

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikoordinir oleh pemerintah daerah Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan/trasmigrasi yang menuju klasterisasi permukiman		1 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan		Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah	DPMD
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu)		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Bangka, Bangka Barat	DPMD
			3 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA			Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang	
			4			Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan	
			PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN	persentase penduduk rawan pangan tertangani	1%		DINAS PANGAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan / transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota		PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	kontribusi harga pangan terhadap inflasi daerah	2%		DINAS PANGAN
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI PANGAN	skor PPH			DINAS PANGAN
			6 PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	1 Persentase kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	1 54%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	DINKES
		2 Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	4 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	4 60%	Provinsi Kep. Bangka Belitung	
			10				DISPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA				DISPORA
			11 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	pesentase sekolah daerah terpencil yang diinterpendisi			DINDIK
			12 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB			DINAS PERTANIAN
			13 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB			DINAS PERTANIAN
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian			DINAS PERTANIAN
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Peningkatan Kelompok Masyarakat Yang Memanfaatkan Hutan; Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Hutan	115 Kelompok;30 %		DINAS KEHUTANAN
			17 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Produksi Perikanan Tangkap; Nilai Tukar Nelayan	211.300 Ton;108 indeks		DKP
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			19 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN				DISKOMINFO
			20 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase transmigran yang mendapat bantuan	10%	Luar daerah, Provinsi	DINAS TENAGA KERJA
			21 PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Diintervensi Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	75%	Provinsi	BPBD
			22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam	80%	Provinsi	BPBD

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
				Kedaruratan dan Logistik/Peralatan Penanggulangan Bencana			
			1 PROGRAM LOGISTIK DAN PENINGKATAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75%	Provinsi	BPBD
			2 PROGRAM PENINGKATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	DINSOS
			3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	kontribusi harga pangan terhadap inflasi daerah	2%		DINAS PANGAN
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan panjang talud Sumber Air Baku (m); Panjang Penahan Abrasi pantai; Panjang Pengerukan dan Pengendalian; Luas Jaringan Irigasi/ Optimalisasi irigasi	2 Ha; 200 meter; 2000 meter; 50 Ha	Kab.Bangka, Kab.Bangka Selatan, Kab.Bangka Tengah, Kab.Bangka Barat, Pangkalpinang, Kab.Belitung Timur	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Tersedianya Dokumen inventarisasi data infrastruktur pengendalian banjir	100.000 meter	Kel,pasir padi Pangkalpinang	
			5				SMA/SMK/SLB

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TATA KELOLA KEPENDIDIKAN				KOMINFO
			7 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur	DPMD
	<b>Pembangunan Perkotaan</b>  Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni (memiliki taman, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi) Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal	3 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	8 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				DINAS KEHUTANAN
			9 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				UPTD KEHUTANAN
			10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN	Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 dokumen;70 %	Provinsi	DLH
			11 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				DINAS PUPR
			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 dokumen;70 %	Provinsi	DLH
			1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				DLH
			1 PROGRAM PENINGKATAN	Data dan Informasi	4 Dokumen;70		DLH



No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	%		
			1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	38,1 %;64 Nilai;82 Nilai;100 %	Bangka	DLH
			1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 Sertifikat	Provinsi, SKPD	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				PUPR
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				
			4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
		4 Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	5 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				PERKIM
		5 Pengembangan Pengelolaan kawasan yang memberikan	6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai	4 Dokumen;70 %		DLH

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		perlindungan kawasan bawahannya	BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Amdal			
		6 Pengembangan Pengelolaan kawasan perlindungan setempat	7 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	38,1 %;64 Nilai;82 Nilai;100 %		DLH
		7 Pengembangan Pengelolaan kawasan lindung lainnya	1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 Sertifikat		UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
		8 Pengendalian kualitas air	2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				DINAS PUPR
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				
			4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
			5 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN				PERKIM

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		9 pengendalian kualitas udara	EKOSISTEM				
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN				DLH
			7 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				DLH
			1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP				UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
			2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				PUPR
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR				
			4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
			5 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				PERKIM

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN, PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN DRAINASE LINGKUNGAN SERTA PERSAMPAHAN	Data dan Informasi Lingkungan Hidup ; Kinerja Komisi penilai Amdal	4 Dokumen;70 %		DLH
			7 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Penegakan Hukum Lingkungan	38,1 %;64 Nilai;82 Nilai;100 %		DLH
			1 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah	6,47%		DLH
		10 Peningkatan tutupan hutan	2 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP				DISHUT
			3 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 Sertifikat		UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN

No	Prioritas RKP 2018	Arah Kebijakan RKPD 2018	Program			Lokasi	Urusan/PD
			Uraian	Indikator Program (Outcome)	Target 2018		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
			4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN				
			5 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				DISHUT
			6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM				UPTD KEHUTANAN
			7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN	Luas Kawasan Konservasi; Jumlah Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang Konsisten	750.000 Ha;2 Rekomendasi Izin		DKP
			8 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
		11 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	9 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan	11.620 Ton;44 Kg/Org/Thn;20.610 Ton		DKP
			10 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				



# **BAB V**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. Tugas Pembantuan yang Diterima**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya.

1. Dasar hukum penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :
  - a) Undang–Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Nomer 42286);
  - b) Undang–Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4355);
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4578);



- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4816);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

## 2. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuan yang diharapkan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Tugas Pembantuan itu sendiri merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

Adapun alokasi dana Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2018, yaitu berasal dari 3 Kementerian dengan 3 Perangkat Daerah Pelaksana. Total Dana Tugas Pembantuan yang diterima yaitu sebesar Rp. 76.881.644.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.572.028.611,00 atau sebesar 83,99%.

## 3. Program dan Kegiatan

Rincian Instansi pemberi, Perangkat Daerah pelaksana, program/kegiatan, indikator kinerja kegiatan, pagu dana dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

## 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (terlampir di Tabel 5.1)

## 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan (terlampir di Tabel 5.1)

## 6. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan (terlampir di Tabel 5.1)

**Tabel 5.2.**  
Rekapitulasi Realisasi Program Dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian				14.649.385.000,00	14.460.758.087,00	98,71%	
			- Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jaringan Irigasi Tersier	0 Ha	10,00%	836.200.000,00	828.430.000,00	99,07%	
				Pengembangan Sumber Air	3 Unit	100,00%				
				Pembangunan Embung Pertanian	4 Unit	100,00%				
			- Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Optimasi Lahan	1100 Ha	100,00%	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00%	
			- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen_x000D_[Base Line]	290 Unit	100,00%	6.231.705.000,00	6.143.272.748,00	98,58%	
				Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian_x000D_[Base Line]	12 Bulan Layanan	100,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	24 Bulan Layanan	100,00%	2.583.680.000,00	2.521.003.339,00	97,57%	
			- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani_x000D_[Base Line]	7 Layanan	100,00%	597.800.000,00	568.052.000,00	95,02%	
			Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat				1.164.285.000,00	1.112.043.505,00	95,51%	
			- Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Mutu dan keamanan pakan_x000D_[Base Line]	50 Sampel	100,00%	50.000.000,00	46.931.000,00	93,86%	
			- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan_x000D_[Base Line]	2500 Dosis	100,00%	67.500.000,00	39.170.000,00	58,03%	
			- Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Optimalisasi Reproduksi_x000D_[Base Line]	1050 Akseptor	100,00%	770.635.000,00	753.109.697,00	97,73%	
			- Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH_x000D_[Base Line]	0.01 Sertifikat	100,00%	109.150.000,00	106.806.308,00	97,85%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Halal)	Pengendalian Pemotongan Betina produktif_x000D_[Base Line]	0.01 Lokasi	100,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%	167.000.000,00	166.026.500,00	99,42%	
			<b>Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan</b>				<b>12.034.250.000,00</b>	<b>10.013.521.006,00</b>	<b>83,21%</b>	
			- Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi_x000D_[Base Line]	10.150 Hektar	8,00%	9.759.060.000,00	7.838.345.126,00	80,32%	
				Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Sereal Lainnya_x000D_[Base Line]	7500 Hektar	61,00%				
				Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal_x000D_[Base Line]	12 Bulan	87,00%				
				Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik	Hektar	99,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	12 Bulan Layanan	99,00%	208.000.000,00	207.240.600,00	99,63%	
			- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan_x000D_[Base Line]	30 Unit	95,00%	1.600.940.000,00	1.532.040.480,00	95,70%	
				Fasilitas RMU / Revitalisasi RMu	4,00 Unit	96,00%				
			- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	1500.00 Hektar	93,00%	466.250.000,00	435.894.800,00	93,49%	
			<b>Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan</b>				<b>31.791.976.000,00</b>	<b>23.173.501.755,00</b>	<b>72,89%</b>	
			- Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar_x000D_[Base Line]	12 Bulan	95,24%	46.125.000,00	43.200.000,00	93,66%	
			- Dukungan Perlindungan Perkebunan	Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan_x000D_[Base Line]	250 Ha	99,37%	838.800.000,00	832.537.162,00	99,25%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN			
								Rp	%				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			
				Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan_x000D_[Base Line]	12 Bln	100,00%							
				Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan_x000D_[Base Line]	1 Provinsi	99,65%							
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	12 Bln	98,29%	378.200.000,00	369.565.337,00	97,72%				
			- Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya_x000D_[Base Line]	2150 Ha	76,33%	24.803.000.000,00	17.073.832.210,00	68,84%				
				Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah_x000D_[Base Line]	12 Bln	91,35%							
			- Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan_x000D_[Base Line]	2 KT	93,27%	924.460.000,00	819.534.504,00	88,65%				
				Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan[Base Line]	2 Kegiatan	84,92%							
				Pengembangan Pemasaran Hasil PerkebunanBase Line]	2 Kegiatan	95,45%							
			- Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan[Base Line]	58 Ha	90,72%	4.801.391.000,00	4.034.832.542,00	84,03%				
				Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan_x000D_[Base Line]	12 Bln	73,69%							
			Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura								3.265.000.000,00	2.104.573.790,00	64,46%
			- Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Kawasan Bawang Merah_x000D_[Base Line]	25 Ha	100,00%	2.487.500.000,00	1.271.345.000,00	51,11%				
				Kawasan Aneka	50 Ha	20,00%							

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Cabai_x000D_[Base Line]						
			- Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Benih buah lainnya	20000 Batang	0,00%	60.000.000,00	59.800.000,00	99,67%	
				Benih Cabai_x000D_[Base Line]	20000 Batang	100,00%				
			- Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	4 Layanan	100,00%	160.000.000,00	159.841.000,00	99,90%	
				Layanan Perkantoran_x000D_[Base Line]	12 Layanan	100,00%				
			- Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Kawasan Jeruk_x000D_[Base Line]	25 Ha	100,00%	337.500.000,00	334.632.500,00	99,15%	
			- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah_x000D_[Base Line]	2 Unit	100,00%	220.000.000,00	219.155.290,00	99,62%	
JUMLAH							62.904.896.000,00	50.864.398.143,00	80,86%	
2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				969.922.000,00	945.199.772,00	97,45%	
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Layanan Dukungan Manajemen Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi_x000D_[Base Line]	1 LAYANAN	99,11%	188.640.000,00	186.964.500,00	99,11%	
			- Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Laporan/ Kesepakatan Koordinasi dengan KL dan Pemda dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi_x000D_[Base Line]	1 Laporan	99,62%	33.312.000,00	33.185.000,00	99,62%	
			- Pengembangan Usaha Transmigrasi	Kawasan Perkotaan Baru yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agrobisnis dan Agroindustrinya_x000D_[Base Line]	1 KPB	99,78%	45.000.000,00	44.900.000,00	99,78%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			- Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya_x000D_[Base Line]	1 Kawasan	92,80%	486.970.000,00	466.105.000,00	95,72%	
				Kawasan Perkotaan Baru yang terpenuhi layanan sosial budayanya_x000D_[Base Line]	1 KPB	99,95%				
			- Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Bidang Tanah yang Difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Transmigran_x000D_[Base Line]	733 Bidang	99,10%	216.000.000,00	214.045.272,00	99,10%	
JUMLAH							969.922.000,00	945.199.772,00	97,45%	
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan				10.875.040.000,00	10.738.078.446,00	98,74%	
			- Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pemeliharaan Rutin Jalan_x000D_[Base Line]	74.31 km	100,00%	10.875.040.000,00	10.738.078.446,00	98,74%	
				Pemeliharaan Preventif Jalan_x000D_[Base Line]	1.6 km	100,00%				
				Rekonstruksi Jalan_x000D_[Base Line]	0.5 km	100,00%				
				Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%				
				Layanan Internal (Overhead)_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%				
			Pengelolaan Sumber Daya Air				2.131.786.000,00	2.024.352.250,00	94,96%	
			- Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara_x000D_[Base Line]	80 Km	100,00%	2.131.786.000,00	2.024.352.250,00	94,96%	
				Layanan Internal (Overhead)_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%				
JUMLAH							13.006.826.000,00	12.762.430.696,00	98,12%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
							Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TUGAS PEMBANTUAN						76.881.644.000,00	64.572.028.611,00	83,99%	

Sumber : Laporan Monev APBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No.	Kriteria	Golongan Ruang	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	28
		Gol. III	290
		Gol. II	108
		Gol. I	78
		Jumlah	398
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-
		S2	44
		S1	233
		D. IV	4
		D. III	48
		D. II	-
		D. I	-
		SMA/ sederajat	67
		SMP/ sederajat	2
		SD/ sederajat	-
		Jumlah	398
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:	
		Eselon I	-
		Eselon II	3
		Eselon III	12
		Eselon IV	36
		Fungsional:	
		Tertentu	
		Umum	347
JUMLAH TOTAL			398

8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
√	-	-	-

9. Permasalahan dan Solusi  
Tidak ada permasalahan.





# **BAB VI**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. Kerjasama Antar Daerah**

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kerja sama antar daerah. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Adapun rincian kerja sama daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1

#### **B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut antara lain dapat dilihat pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.1**  
**Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Pemerintah Daerah Lain**

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat (ditandatangani rabu tgl 12-6-2017 di ruang Tanjung Pendam) Dirapat di TKKSD tanggal 7 Juni 2017	POL PP Prov. Kep.Babel	Pol PP Kab/Kota	Perjanjian Kerja Sama antara Kasat POL PP Prov.Kep.Babel denan Kasat POL PP Kab/Kota se Prov.Kep.Babel	Kesepakatan Bersama antara Kasat POL PP Prov.Kep.Babel dengan Kasat POL PP Kab/Kota se Prov.Kep.Babel	Untuk efektivitas dan optimalisasi tugas SatPOL PP guna terciptanya situasi tertib, aman dan tentram.	5 tahun		
2.	Pengembangan Bidang Perdagangan	Disperindag	Dinas Perdagangan Sumsel	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Prov. Sumsel dengan Disperindag Prov.Kep.Babel	Nomor : 19/PKS-Perdagangan/I/2017 Nomor : 415.4/030.a/Disperindag/2017	1. Mewujudkan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya sistem logistik nasional dan meningkatkan daya saing. 2. Meningkatkan perekonomian regional Kep.Babel da Sumsel sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah melalui penguatan perdagangan dalam negeri.	5 tahun		
3.	Pengembangan Bidang Perindustrian	Disperindag	Dinas Perindustrian Sumsel	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Prov. Sumsel dengan Disperindag Prov.Kep.Babel	Nomor : 20/PKS-Perindustrian/2017 Nomor : 415.4/030.b/Disperindag/2017	1. Mweujudkan pengembangan industri untuk mendukung penguatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan daya saing. 2. Meningkatkan perekonomian regional Kep. Babel dan Sumsel sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah dengan meningkatkan daya saing industri melalaui peningkatan kualitas sumder daya manusia khususnya para pengusaha induatri dan menengah kedua wilayah dan pengembangan kawasan strategis induatri.	5 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Perlindungan Anak Provinsi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.	Perjanjian Nomor: 119/2192/BP3AKB/XII/2015 dan 120.2/359/BPKBPA/XII/2015.	Dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang .	5 Tahun (2015-2020)	Kurangnya pemahaman kasus kekerasan dari tindak pidana perdagangan orang.	Agar lembaga yang menangani kasus tersebut dapat mensosialisasikan kepada masyarakat.
5	a. Infrastruktur b. Perhubungan c. Pariwisata d. Energi dan SDA e. Perindustrian dan Perdagangan f. Kelautan dan Perikanan g. Pendidikan	Bappeda Provinsi	Seluruh provinsi di daratan Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau serta Kepulauan Bangka Belitung	Kerjasama RAKORGUB Se-Sumatera	Kesepakatan para Gubernur se-wilayah Sumatera di Provinsi Riau pada tanggal 27 September 2000.	Meningkatkan pembangunan di berbagai sektor antara lain infrastruktur, perhubungan, pariwisata, energi dan SDA, perindustrian dan perdagangan, kelautan dan perikanan serta pendidikan	Tidak dibatasi waktu	-	-
6	Penyelenggaraan Pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta kebijakan bidang kelautan dan perikanan.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi.	Provinsi: Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Maluku.	Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan	Kesepakatan Bersama para Gubernur Provinsi Kepulauan dalam Badan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kepulauan yang ditetapkan bersama yang disebut Deklarasi Kupang pada tanggal 12 November 2009 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.	Mingkatkan koordinasi antar Provinsi Kepulauan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.	Tidak dibatasi waktu	-	-
7	Investasi dan Penyertaan Modal	Bappeda Provinsi	Wilayah Provinsi se-Sumatera.	Kerjasama Shipping Lines	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C - 13127 HT.01.01. TH. 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Dalam rangka memberikan informasi perkembangan investasi, memberikan rekomendasi dan kemudahan, menjadi fasilitator dengan pihak lain, melakukan promosi serta hal lainnya sehingga tercapai tujuan dari pembentukan PT. SSL itu sendiri.	Tidak dibatasi waktu	-	-

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Kerja sama Pembangunan Daerah	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Nomor : 011 PKS-BAPPEDA/I/2018  Nomor : 120.23/30/I/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 tahun		

**Tabel 6.2**  
**Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Pihak Ketiga**

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  (Tidak dirapat di TKKSD diterima sudah ditandatangani kedua belah pihak)	Dinas Pendidikan	Universitas Negeri Jakarta	Peningkatan Kompetensi SDM Pemprov Kep. Babel Melalui Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Kesepakatan bersama No:421.4/004/ Disdik/2017 dan No.: 44/UN39/KS/ 2017	1.Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pd masyarakat dalammeningkatkan kemampuan professional pegawai pemerintah dilingkungan Pemprov.Kep.Babel 2. Meningkatkan kualitas dan kualifikasi SDM dilingkungan Pemprov.Kep.Babel khususnya tenaga pendidik/guru	5 Tahun		
2.	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama bidang SDM Perhubungan Darat. (Tidak Melalui TKKSD)	Dinas Perhubungan	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia bi Bidang Perhubungan Darat	Perpanjangan PKS No.: 188.44/016.C/ DISHUB/2017	Mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang Perhubungan Darat yang berkompeten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4 Tahun		
3.	Perjanjian Kerja Sama bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun kusumo	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	PKS No.: HK.05.01/XI.3/2537/ 2017 dan No.: 120.23/009/RSUDP/ 2017	Mensinergikan Sumber Daya Para Pihak dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatandi RSUD Dr. Ir. Soekerno Prov. Kep. Bangka Belitung	2 Tahun		
4.	Sinergi Informasi Investasi dan Pelayanan Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electricity) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPMPTSP	PT. PLN (Persero)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT.PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung	Nomor : 415.4/1/DPMPTSP/2018  Nomor : 001.PJ/HKM.00.01/W.BABEL/2018	Tujuannya untuk mendukung percepatan penyerapan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kep. Babel	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Asuransi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BKPSDM	PT. Asuransi Jiwa Taspen	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen	Nomor : 415.4/2/BKPSDM/2018 Nomor : MoU.001/TL/012018	Memberikan perlindungan dan jaminan kepada peserta Asuransi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Provinsi Kep.Babel	1 tahun		
6.	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kep.Babel	BAPPEDA	Institut Pertanian Bogor	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Institut Pertanian Bogor	Nomor : 415.42/6/BAPPEDA/2018 Nomor : 011/IT3/KsM/2018	1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan apartur pemerintah serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di Prov.Kep.Babel  2. Terciptanya hubungan profesional, sinergi, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK	1 tahun		
7.	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Manajemen Keuangan serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kep.Babel	Bakuda	Universitas Pendidikan Indonesia	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kep.Babel dengan Universitas Pendidikan Indonesia	Nomor : 074 / 2.a/I/2018 Nomor : 0654/UN40/HK/2018	1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, manajemen keuangan serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di 8.prov.kep.babel  2. terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan	1 tahun		



NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						menghormati dan mengindahkan peraturan <sup>2</sup> berlaku pada PARA PIHAK.			
8.	Peningkatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	DINKES	Rumah Sehat Baznas – Timah Pangkalpinang	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Rumah Sehat Baznas-Timah Pangkalpinang	Nomor : 415.4/4/DINKES/2018  Nomor : 18/050/MGT/RSB- PKP/II/2018	Untuk mendorong terciptanya sinergitas dalam peningkatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Provinsi Kep. Babel	1 tahun		
9.	Rehabilitasi, Bangun dan Pemanfaatan Gapura Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DISHUB	PT. Cinda Karya Media	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Cinda Karya Media	Nomor : 415.4/3/DISHUB/2018  Nomor : 01/CDA/MoU/02/2018	1. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan  2. menggunakan barang milik daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Dishub Prov.Kep.Babel  3. Merekondisi barang milik daerah dan memperindah wajah kota  4. meningkatkan pendapatan asli daerah Prov.Kep.Babel	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Portal Berita LKBN Antara	Diskominfo	Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Nomor : 483/8/Diskominfo/2018  Nomor : 024/MOU/DIR-AP/II/2018	Agar masyarakat Provinsi Kep. Babel mendapatkan informasi dan edukasi berkelanjutan tentang program dan kebijakan pembangunan serta kinerja Pemerintah Prov.Kep.Babel sehingga memperoleh pemahaman dan dukungan publik yang akhirnya akan menghasilkan suatu kerangka pendapat umum pisitif tentang kinerja Pemprov Babel.	1 tahun		
11	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr, (H.C) Ir. Soekarno Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangak Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kep. Babel dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	Nomor : 415.42/9/MOU/RSUDP/2018  Nomor : HK.03.01/XX.4/0022/2018	Untuk Mendorong terciptanya sinergitas dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan akses serta kesadaran masyarakat di Prov.Kep.Babel	1 tahun		
12	Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Diskominfo	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi Atma Luhur	Kesepakatan Bersama Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi Atma Luhur	Nomor : 074/8.a/Kominfo/2018	1. Terwujudnya peningkatan aspek Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Pola Kemitraandi Prov.Kep.Babel  2. Terciptanya hubungan profesional, sinergi, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahan Peraturan-Peraturan yang berlaku	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pada PARA PIHAK.			
13	Pengkajian, Penerapan dan Pemasarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kesepakatan Bersama Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Nomor : 415.43/13/I/2018  Nomor : 16/MOU/BPPT-PEMPROV BABEL/03/2018	Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian, penerapan dan pemasarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 tahun		
14	Pengembangan Pembangunan dan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	PT. Indonesia Research Institute Japan – Jakarta	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT. Indonesia Research Institute Japan – Jakarta	Nomor : 415.42/II/MOU/I/2018  Nomor : 001/SKK/IRIJ/III/2018	Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah  1. Mempromosikan pariwisata guna menarik wisatawan Jepang langsung ke Babel  2. Mendatangkan inventasi di Provinsi Kep.Bangka Belitung  3. Menyalurkan bantuan hibah, corporate social responsibility dan program lainnya dari Jepang dengan beban Nol Rupiah kepada Bangka Belitung	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Universitas Terbuka	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Universitas Terbuka	Nomor : 420/16/BKPSDMD/2018  Nomor : 2874/UN31/DN/2018	1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur pemerintah serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di Prov.Kep.Babel  2. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, Saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan2 yang berlaku pada PARA PIHAK.	1 tahun		
16	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Jaringan Perbankan di Provinsi Kep.Babel	Pemerintah Prov.Kep. Babel	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Nomor : 580/14/2018  Nomor : B.475- DIR/DJS/04/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Prov.Kep.Babel melalui pemanfaatan jasa dan layanan jaringan perbankan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.	1 tahun		
17	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Serta Pembangunan Daerah di Prov.Kep.Babel	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas	Nomor : 420/21/SEKJEN-YAH/2018  Nomor : 074/16.a/DPMD/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama Ini adalah :  1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur pemerintah serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kemitraan di Prov.Kep.babel  2. Terciptanya hubungan profesional, sinergi, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK			
18	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Syariah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	PT. Bank BRI Syariah	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT. Bank BRI Syariah	Nomor : 580/15/IV/2018  Nomor : B.006-BRIS/04-2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pemanfaatan jasa dan layanan perbankan syariah yang dimiliki oleh Pihak Kedua.	1 tahun		
19	Kerjasama dalam bidang Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kep.Babel	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Nomor : 415.4/16.b/I/2018  Nomor : KS.302/MoU.15/KB/IV/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melalui kerja sama dalam bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika	5 tahun		
20	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah, Serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Univeristas Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Univeristas Bangka Belitung	Nomor : 415.4/16.d/VII/2018  Nomor : 1792/UN50/KS/2018	Tujaun Kesepakatan Bersama ini adalah :  1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan Pengembangan Sumber	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Daya Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Pola Kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>2. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan-Peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.</p>			
21	Pengembangan dan Implementasi Solusi Pembayaran Elektronik Berbasis Aplikasi Cerdas	Pemerintah Prov.Kep.Babel	PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni)	<p>Nomor : 586/16.c/BAKUDA/2018</p> <p>Nomor : 004/Treni/LGL-MOU/V/2018</p>	<p>Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :</p> <p>1. meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki PARA PIHAK</p> <p>2. meningkatkan pengabdian PARA PIHAK kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing</p> <p>3. mendorong peningkatan kinerja PIHAK KESATU dalam mengemban tugas dan misalnya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial.</p>	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nomor : 415.4/16.e/l/2018  Nomor : 19513/001/BPS/1900/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : untuk meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi PARA PIHAK dalam rangka pemenuhan data dan/atau informasi statistik guna mendukung perencanaan, pengembangan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 tahun		
23	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)	Nomor : 415.42/18/DISDIK/2018  Nomor : 85.MoU/ITS/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini :  1. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan dan pendayagunaan SDA, dan pengembangan potensi daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  2. Terciptanya hubungan profesional, sinergi, dan saling memberi manfaat antara PARA PIHAK dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.	1 tahun		
24	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	Nomor : 41.5/19/DISDIK/2018  Nomor : 1416/PL28/MOU/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini :  1. Memberikan kesempatan yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan pengembangan SDM  2. Meningkatkan akses,	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma POLMAN Babel di Provinsi Kep. Bangka Belitung  3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah di Pro.Kep.Babel.			
25	Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nomor : 415.4/27/KUKM/2018  Nomor : 522/HK.02.02/JI/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 tahun		
26	Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung	Nomor : 180/29/III/2018  Nomor : W7.PP.01.02-4182	Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama PARA PIHAK dalam Pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 tahun		



NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Kerja sama Pembangunan Daerah	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Nomor : 011 PKS-BAPPEDA/I/2018  Nomor : 120.23/30/I/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 tahun		
28	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Universitas Tarumanegara	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Universitas Tarumanegara	Nomor : 074/33/I/2018  Nomor : 2803-R/9281/UNTAR/XI/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama adalah dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan SDM serta pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Tahun		
29	Kerjasama dalam bidang Komersialisasi, Penelitian dan Pengembangan	Malindo Business & Cultural Center	UKM Karya Leluhur	Memorandum Of Understanding Between Malindo Business & Cultural Center and UKM Karya Leluhur	-	Tujuan MoU adalah untuk memperkuat kerjasama timbal balik serta berusaha untuk mempromosikan pertukaran timbal balik.	-		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Kerjasama dalam bidang Komersialisasi, Penelitian dan Pengembangan	Malindo Business & Cultural Center	UKM Sinyo'E	Memorandum Of Understanding Between Malindo Business & Cultural Center and UKM Sinyo'E	-	Tujuan MoU adalah untuk memperkuat kerjasama timbal balik serta berusaha untuk mempromosikan pertukaran timbal balik.	-		
31	Kerjasama dalam bidang Komersialisasi, Penelitian dan Pengembangan	Malindo Business & Cultural Center	CV. Media 46	Memorandum Of Understanding Between Malindo Business & Cultural Center and CV. Media 46	-	Tujuan MoU adalah untuk memperkuat kerjasama timbal balik serta berusaha untuk mempromosikan pertukaran timbal balik.	-		
32	Sinergi Informasi Investasi dan Pelayanan Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electricity) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPMPTSP	PT. PLN (Persero)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT.PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung	Nomor : 415.4/1/DPMPTSP/2018  Nomor : 001.PJ/HKM.00.01/W.BABEL/2018	Tujuannya untuk mendukung percepatan penyerapan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kep. Babel	1 tahun		

### **C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

#### **1. Forum Koordinasi**

Untuk meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi penyalarsan pembangunan daerah dan pusat diperlukan peran instansi vertikal dalam memberikan masukan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, maka perlu membentuk Tim Kegiatan Program Penyalarsan Pemerintah Daerah dan Pusat Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 188.44/65/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembentukan Tim Kegiatan Program Penyalarsan Pemerintah Daerah dan Pusat Tahun Anggaran 2018.

#### **2. Instansi Vertikal yang Terlibat**

Instansi Vertikal yang Terlibat dalam Forum Komunikasi Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kakanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Basarnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Rektor UBB
- Rektor IAIN SAS Bangka Belitung
- Kepala KSOP Pangkalbalam

#### **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Sumber anggaran kegiatan Penyalarsan Program Pemerintah Daerah dan Pusat berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 888.700,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 809.805.068,- atau 91,12%.

#### **4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasal 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Biro Pemerintahan. Mengacu dari pergub tersebut organisasi perangkat daerah penyelenggara Instansi Vertikal di Daerah adalah Biro Pemerintahan.

#### 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No.	Kriteria	Golongan Ruang	Total
I.	Jumlah Pegawai	Gol. IV	1
		Gol. III	4
		Gol. II	-
		Gol. I	-
		Jumlah	5
II.	Pangkat dan Golongan	Gol. IV	1
		Gol. III	4
		Gol. II	-
		Gol. I	-
		Jumlah	5
III.	Kualifikasi Pendidikan	S3	-
		S2	1
		S1	4
		D. IV	-
		D. III	-
		D. II	-
		D. I	-
		SMA/ sederajat	-
		SMP/ sederajat	-
		SD/ sederajat	-
		Jumlah	5
IV.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	Struktural (eselon):	
		Eselon II.a	-
		Eselon II.b	-
		Eselon III.a	1
		Eselon IV.a	1
		Jumlah	2
		Fungsional:	
		Tertentu	-
		Umum	3
		Jumlah	3
		Jumlah	

#### 6. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

1. Rabu, 10 Januari 2018 (Rapat Koordinasi Tim Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Rangka Pembahasan dan Penertiban Tambang Ilegal di Wilayah Eks Kontrak Karya PT. Kobatin di Ruang Rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung);

2. Rabu, 24 Januari 2018 (Audiensi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Komisi 7 DPR RI di Ruang Rapat Komisi 7 DPR RI Jakarta);
3. Selasa, 24 April 2018 (Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kunjungan Kerja DPRD Bangka Belitung Mengenai Percepatan Penyelesaian Dokumen RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Lantai II Utara Kementerian Koordinator Bidang Kematiriman Jl. MH. Thamrin 8, Gedung I BPPT Lantai 8, Jakarta Pusat);
4. Selasa-Rabu, 1-2 Mei 2018 (Peringatan Hari Buruh Internasional, Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
5. Senin, 14 Mei 2018 (Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Forkopimda, Instansi Vertikal dan OPD Penerima APBN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Pasir Padi Lt. III Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung).

#### 7. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat penting untuk dilaksanakan mengingat peran pemerintah provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di lantik oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sebagaimana amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi khususnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal antara lain, koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kantor DJPb) dalam hal koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program/kegiatan bersumber dari dana APBN di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Forum Komunikasi dalam hal Pertukaran Data, Peraturan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Narasumber dan Informasi lainnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah serta Analisis/Kajian Ekonomi Regional Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama dengan Kantor DJPb juga dalam hal penyerahan DIPA untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Pembentukan Forum Koordinasi Instansi Vertikal.

Kerjasama dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terus dilaksanakan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban serta diadakannya rapat kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan meningkatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan meningkatkan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan oleh pemerintah kabupaten/kota, serta meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan dana APBN yang ada di wilayah Provinsi, dengan koordinasi dengan pejabat pengelola dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di instansi vertikal se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rangka percepatan pembangunan, Instansi Vertikal serta Forkopimda telah melakukan sinergitas melalui dana hibah bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka wajar menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada).

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang pembentukan daerah, belum didukung dengan batas daerah yang kongkrit. Penetapan batas daerah tersebut secara garis besar belum sampai pada titik koordinat dan masih bersifat indikatif.

Dalam rangka kebijakan penetapan dan penegasan batas daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi timbulnya permasalahan perbatasan, yang cenderung akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan dan pemerataan pertumbuhan. Kebijakan di bidang batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, dalam rangka memelihara keutuhan, kesatuan bangsa serta mewujudkan wawasan nusantara.

Terdapat 6 (enam) segmen batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 4 (empat) diantaranya sudah ditetapkan dengan Permendagri yaitu :

- a) Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;
- c) Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
- d) Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat.

Dengan telah ditetapkannya batas daerah di 4 (empat) segmen ini seyogyanya permasalahan batas daerah sudah dianggap selesai karena telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, akan tetapi permasalahan perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota masih terjadi sengketa, ada kabupaten yang belum menerima keberadaan Permendagri ini karena garis imajinear (garis batas) yang menghubungkan Pilar Batas Utama (PBU)/ Pilar

Acuan Batas Utama (PABU) antara satu dengan yang lainnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan dikehendaki untuk dilakukan penegasan kembali sesuai kondisi saat ini.

Segmen batas daerah yang belum ditetapkan Permendagri adalah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2018 telah dilakukan upaya percepatan penyelesaian terhadap 2 (dua) segmen batas daerah dimaksud sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian pada tahun 2017 yang lalu. Setelah difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat bersama dengan Tim PBD Provinsi dan Kabupaten/Kota akhirnya penyelesaian sudah pada tahap penyusunan draft Permendagri yang telah dikoreksi oleh masing-masing Tim PBD. Dan direncanakan Permendagri tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah akan terbit pada tahun 2019.

Upaya penyelesaian revisi Permendagri batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur yang telah dilakukan pada tahun 2017 telah menuai hasil dengan terbitnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pengganti Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.

- Dasar Pelaksanaan
  - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - h) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - i) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - j) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 28 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);

- k) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- l) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 7 Seri A);
- m) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/212/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Pada Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Maksud, Tujuan, dan Saran

Maksud, tujuan dan sasaran pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- Maksud  
Maksud diadakan kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah melakukan Pembinaan dan penyelesaian terhadap perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terselesaikan sehingga terciptanya tertib administrasi kewilayahan daerah perbatasan.
- Tujuan
  - a) Untuk menciptakan tertib administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis;
  - b) Untuk menghindari konflik di daerah perbatasan;
  - c) Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan khususnya di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi
- Sasaran  
Terselesaikannya permasalahan batas daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar kabupaten/kota dan provinsi ini dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah;
- b) Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan, letak dan posisi titik koordinat yang dikehendaki oleh kabupaten yang berselisih, dan untuk mengetahui potensi apa yang terkandung di dalamnya;
- c) Koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



- d) Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Penegasan Batas Daerah di Wilayah I yang dilaksanakan di Provinsi Sumatra Utara;
  - e) Rapat koordinasi penyelesaian daerah bersama Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota membahas batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah;
  - f) Koordinasi ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka meminta arahan dan saran dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - g) Verifikasi lapangan meninjau lokasi PBU dan garis imajiner batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota serta didampingi perangkat kecamatan setempat.
- Hasil dan Kegiatan
 

Hasil kegiatan pembinaan dan penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

    - a) Telah dilaksanakan survei dan pengumpulan data di lapangan terkait batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 17 dan 18 Januari 2018 di Kabupaten Bangka Tengah;
    - b) Telah dilaksanakan Rapat Penandatanganan Hasil Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota yang mengundang Pimpinan Daerah Kota Pangkalpinang, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Tengah pada tanggal 22 Maret 2018;
    - c) Telah dilaksanakan Rapat Tertutup dalam rangka penyelesaian batas daerah yang mengundang pimpinan daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 14 Mei 2018;
    - d) Telah dilaksanakan Rapat Tertutup dalam rangka tindak lanjut hasil rapat tertutup pada tanggal 14 Mei 2018 tentang penyelesaian batas daerah yang mengundang pimpinan daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 Mei 2018;
    - e) Telah disampaikan usulan rancangan Permendagri tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Gubernur Kep. Bangka Belitung ke Dirjen BAK Kemendagri pada tanggal 27 Agustus 2018;
    - f) Telah menghadiri undangan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Rencana dan Agenda Utama Penyelenggaraan Penegasan Batas pada tanggal 5 s.d. 7 September 2018 di Sumatera Utara;

- g) Telah menghadiri undangan Rapat Identifikasi Masalah Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok BAD 1 ke Ditjen BAK Kemendagri RI pada tanggal 18 s.d. 19 September 2018;
- h) Telah dilakukan Verifikasi Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 24 Oktober 2018 bersama Tim PBD Pusat ditandai dengan Berita Acara No: 07/BA-VER/BAD.1/X2018;
- i) Telah dilakukan Verifikasi Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka pada tanggal 25 Oktober 2018 Tim PBD Pusat ditandai dengan Berita Acara No: 06/BA-VER/BAD.1/X2018;
- j) Telah disampaikan hasil koreksi Draft Rancangan Permendagri Batas Daerah melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Dirjen BAK Kemendagri pada tanggal 30 November 2018;
- k) Telah dilaksanakan penelusuran dan survei di lapangan terkait batas daerah antara Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah pada tanggal 11 Desember 2018 di Kabupaten Bangka Tengah.
- Mekanisme Pelaksanaan  
Mekanisme pelaksana pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
  - a) Pembentukan Tim dan Panitia;
  - b) Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten/Kota;
  - c) Peninjauan ke lapangan atas batas daerah yang belum disepakati;
  - d) Koordinasi ke Kabupaten/Kota;
  - e) Koordinasi ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI;
  - f) Rapat fasilitasi bersama Tim PBD Kabupaten/Kota di Ditjen BAK Kemendagri RI;
  - g) Verifikasi lapangan bersama Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota.

## 2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut).

Dalam melaksanakan kegiatan ini ditemukan permasalahan/hambatan sebagai berikut :

- a) Batas Wilayah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan;
- b) Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah.

Penyelesaian batas daerah terhadap kedua segmen tersebut telah pada tahap penyusunan Draft Permendagri yang telah selesai dikoreksi oleh masing-masing Tim PBD Kabupaten/Kota. Kendala yang dihadapi adalah pada saat verifikasi di lapangan bersama dengan Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang didampingi oleh perangkat kecamatan setempat. Oknum perangkat kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka mengklaim bahwa pada daerah tertentu yang menjadi wilayah perbatasan dengan kecamatan di Kota Pangkalpinang merupakan sepenuhnya masuk kewilayah kecamatan Mendo Barat. Akan tetapi hal tersebut bertentangan

dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Tim PBD Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini cukup mengganggu proses verifikasi lapangan pada saat itu.

3. Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah.  
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasal 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Biro Pemerintahan. Mengacu dari pergub tersebut organisasi perangkat daerah penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah Biro Pemerintahan.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

No.	Kriteria	Golongan Ruang	Total
I.	Jumlah Pegawai	Gol. IV	1
		Gol. III	5
		Gol. II	-
		Gol. I	-
		Jumlah	6
II.	Kualifikasi Pendidikan	S3	1
		S2	-
		S1	2
		D. IV	3
		D. III	-
		D. II	-
		D. I	-
		SMA/ sederajat	-
		SMP/ sederajat	-
		SD/ sederajat	-
		Jumlah	6
III.	Pangkat dan Golongan	Gol. IV	1
		Gol. III	5
		Gol. II	-
		Gol. I	-
JUMLAH TOTAL			6

#### E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

##### 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana. Berbagai Ancaman bencana alam yang sering terjadi seperti bencana Bencana Kebakaran, Bencana Banjir, Bencana Puting beliung, Bencana Kekeringan, Bencana Tanah Longsor, Bencana

Konflik, Bencana Kegagalan Teknologi, Bencana Kebakaran, Bencana Pasang Air Laut, Bencana Epidemi/Kejadian Luar Biasa.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah bergerak mengikuti penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditingkat masyarakat juga sudah banyak terbentuk kelompok-kelompok siaga bencana, dari kondisi tersebut maka disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Tahun 2012 s.d. 2017, yang mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik-praktik penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana.

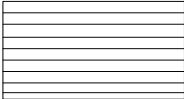
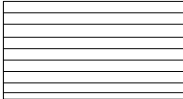

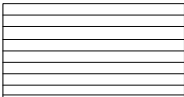
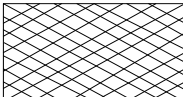
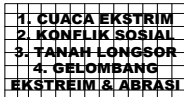

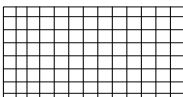
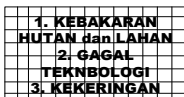
Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia yang dipadukan dengan data dari catatan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data DIBI, BNPB tahun 2011, dan BPBD Bangka Belitung, 2011), terdapat 10 jenis bencana yang mengancam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ancaman bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, konflik sosial serta gagal teknologi. Penentuan tingkat ancaman bencana menggunakan matriks tingkat ancaman, dengan memadukan indeks ancaman pada lajur dengan indeks penduduk terpapar pada kolom. Titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar adalah tingkat ancaman. Skala indeks ancaman dibagi dalam tiga kategori yaitu : rendah (0,0 –0,3), sedang (> 0,3 –0,6), dan tinggi (> 0,6 –1,0).


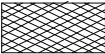
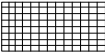
Skala indeks penduduk terpapar dibagi dalam tigakategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan masing-masing nilai indeks sebagai berikut :

- Rendah : 0,0 - 0,3, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/ Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20 persen
- Sedang: >0,3 - 0,6, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500 – 1000 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk kelompok rentan 20 persen –40 persen
- Tinggi : >0,6 – 1,0, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1000 jiwa/Km<sup>2</sup> , dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40 persen.

Tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada skala ancaman masing-masing jenis bencana dan skala penduduk terpapar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat pada gambar 6.4.

**Gambar 6.4**  
**Matriks Penentuan Tingkat Ancaman Multi Bencana**  
**di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

TINGKAT ANCAMAN		INDEKS PENDUDUK TERPAPAR (JIWA/KM <sup>2</sup> )		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS ANCAMAN	RENDAH			 1. EPIDEMI dan WABAH PENYAKIT 2. GEMPA BUMI
	SEDANG			 1. CUACA EKSTREM 2. KONFLIK SOSIAL 3. TANAH LONGSOR 4. GELOMBANG EKSTREM & ABRASI
	TINGGI	 BANJIR		 1. KEBAKARAN HUTAN dan LAHAN 2. GAGAL TEKNOLOGI 3. KEKERINGAN

 Tingkat Ancaman Rendah  
 Tingkat Ancaman Sedang  
 Tingkat Ancaman Tinggi

Berdasarkan matriks di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- Tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar rendah adalah banjir.
- Tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman rendah dan indeks penduduk terpapar tinggi adalah epidemi dan wabah penyakit dan gempa bumi.
- Tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman sedang dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain : cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, konflik sosial dan tanah longsor.
- Tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain: Kebakaran hutan dan lahan, gagal teknologi, dan kekeringan.

Indeks ancaman bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Dapat dikatakan bahwa indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi pada suatu daerah. Beberapa jenis ancaman (peta ancaman) telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, Jenis ancaman yang telah memiliki standar SNI tersebut meliputi :Gempa bumi (tim sembilan revisi gempa), Longsor (ES DM), Gunung api (PVMBG), Banjir (PU).

Sedangkan ancaman non SNI merupakan peta ancaman yang belum diperoleh dari Kementerian/Lembaga terkait. Zonasi ancaman ini harus ditentukan menggunakan metodologi yang telah ditentukan. Jenis ancaman non SNI meliputi: Tsunami, Konflik Sosial, Kegagalan teknologi, Epidemik dan Wabah Penyakit, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi. Dari kejadian bencana yang tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana antara lain:

- Dilakukan penyeleksi terhadap korban yang terkena bencana.
- Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) kepada korban bencana yang telah diseleksi.
- Monitoring dan Evaluasi terhadap bantuan yang diberikan.
- Menyusun peta rawan bencana untuk seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Turun langsung kelapangan memberi bantuan yang dibutuhkan oleh korban bencana saat tanggap darurat
- Melakukan rekonstruksi terhadap semua sektor pasca bencana

## 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

Kejadian-kejadian bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dikategorikan dalam status bencana yang sifatnya regional ataupun lokal. Ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat ditentukan statusnya dalam kategori Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal (Kabupaten/Kota) tergantung dari besar skala kejadiannya, antara lain :

### a. Banjir

Dari hasil kajian risiko maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman banjir tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar rendah. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir sedang.

### b. Cuaca Ekstrem

Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman cuaca ekstrem sedang dan memiliki indeks penduduk

terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir tinggi.

c. Tanah Longsor

Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman tanah longsor sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir tinggi.

d. Gempa Bumi

Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman gempa bumi rendah dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gempa bumi sedang.

e. Epidemik dan Wabah Penyakit

Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman epidemik dan wabah penyakit rendah dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman epidemik dan wabah penyakit sedang.

f. Kebakaran Lahan dan Hutan

Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kebakaran lahan dan hutan tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman kebakaran lahan dan hutan tinggi.

g. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman gelombang ekstrem dan abrasi sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gelombang ekstrem dan abrasi tinggi.

h. Kekeringan

Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kekeringan tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman kekeringan tinggi.

i. Konflik Sosial

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman konflik sosial sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Maka tingkat ancaman konflik sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tinggi.

j. Gagal Teknologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kegagalan teknologi tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gagal teknologi tinggi.

Selama ini dalam praktek penanggulangan bencana masih ditekankan pada “saat” serta “setelah (pasca)” terjadinya bencana. Sementara itu pada tahap “sebelum (pra)” terjadinya bencana yang telah diakomodasikan masih terbatas pada tahapan pencegahan (prevention), yaitu dengan menghindari pemanfaatan kawasan yang “rawan bencana” untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Setiap ancaman atau bahaya yang terdapat di suatu daerah memiliki risiko yang berbeda dari masing-masing jenis bencana. Tetapi pada umumnya ancaman ini merupakan sesuatu yang sulit untuk diubah dan diatasi, misalnya “daerah gunung api, daerah gempa, daerah longsor dan sebagainya. Sedangkan yang masih mungkin untuk dilakukan perubahan dan perbaikan adalah kerentanan. Untuk meningkatkan kapasitas, harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan/pengetahuan masyarakat di suatu daerah dengan misalnya tidak berdiam pada daerah-daerah yang rawan terhadap bencana tersebut.

### 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Urusan Wajib Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan Anggaran di APBD Induk sebesar Rp 11.976.831.141,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.203.466.361,-, sedangkan belanja langsung sebesar Rp 7.773.364.780,-.

Adapun di APBD-P tahun 2018 urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui 4 (empat) program dan 17 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.305.986.490,- Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 10.009.035.636,- atau 88,53%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.296.950.854,- atau 11,47%, dengan komposisi realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.128.782.289,- atau 94,76% dengan sisa anggaran Rp 228.192.271,- atau 5,24% dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.949.011.930,- atau 84,62% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.068.758.583,- atau 15,38% dari total Pagu anggaran.

### 4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Keterbatasan kewenangan provinsi sebagai koordinator, motivator dan katalisator percepatan upaya pengurangan risiko bencana di kabupaten/kota membutuhkan kebijakan dan strategi khusus dalam menyusun rencana penanggulangan bencana. Peran teknis pemerintah provinsi terbatas hanya pada aset provinsi yang berada di daerah. Peran teknis lain yang mungkin diemban oleh provinsi di daerah adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten/kota tidak mampu menangani bencana yang timbul.

Berbagai fungsi yang melekat pada pemerintah provinsi perlu dicermati sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dalam mengantisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana. Penguatan kelembagaan dan partisipasi segala pihak dengan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya menjadi salah satu fokus pencapaian



yang perlu diperhitungkan. Selain itu mekanisme dan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan penanganan darurat bencana pada status darurat bencana provinsi juga perlu diperkuat. Keseluruhan komponen ini perluditunjang dengan strategi signifikan untuk pengurangan risiko

bencana dalam wilayah kewenangan provinsi. Oleh karenanya kegiatan bencana dan daerah yang berpotensi menjadi kewenangan provinsi perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Proses identifikasi ini telah melahirkan zona prioritas penanggulangan bencana provinsi. Secara umum Antisipasi Daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana adalah :

- a. Mengsiagakan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- b. Mengadakan Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- c. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan Penanggulangan bencana.
- d. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu.
- e. Penelitian, pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana.
- f. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- g. Perlindungan masyarakat dari bencana.
- h. Sarana dan Prasarana antara lain Peralatan kesiapsiagaan penaggulangan bencana berupa peralatan penyelamatan (perahu dolpin, Kapal LCT, Alat komunikasi, tenda darurat, kendaraan untuk penanggulangan bencana.
- i. Bantuan untuk masyarakat terdiri dari :
  - Tanggap darurat bencana yang meliputi bahan pangan, bahan sandang, peralatan dapur keluarga, peralatan dapur umum.
  - Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi korban bencana.

#### 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perangkat daerah pelaksana urusan sosial (yang menangani bencana) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

#### 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	5	-	5
		Gol. III	18	-	18
		Gol.II	10	-	10
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	2	-	2
		S1	20	-	20
		D. IV	-	-	-
		D. III	8	-	8

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	3	-	3
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	9	-	9
		Fungsional:			
		Tertentu	9	-	9
		Umum	10	-	10
Jumlah			33	-	33

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)  
Tidak ada lembaga khusus yang dibentuk dalam menangani bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi  
Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Terdapat potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya, yaitu :

- Bencana angin puting beliung;
- Bencana banjir yang dipengaruhi pasang surut air laut;
- Bencana kebakaran;
- Bencana tanah longsor (kecelakaan kerja penambang Timah Inkovensional);
- Bencana tersambar petir.

## F. Pengelolaan Kawasan Khusus

### 1. Jenis Kawasan Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK terdiri dari satu atau beberapa zonasi, seperti zonasi pengolahan ekspor, logistik, industri, energi, pengembangan teknologi, pariwisata, atau zonasi kegiatan ekonomi lainnya, dan dapat pula dibangun fasilitas pendukung seperti perumahan bagi pekerja. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009, di dalam setiap KEK harus disediakan lokasi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendukung kegiatan usaha di kawasan ini. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoeкономи dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan

industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Ada empat kriteria pemilihan lokasi KEK. Pertama, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Kedua, didukung oleh pemerintah daerah bersangkutan. Ketiga, dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran internasional di Indonesia, atau terletak di wilayah yang memiliki sumberdaya unggulan. Keempat, mempunyai batas yang jelas. Pembentukan KEK dapat diusulkan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun badan usaha. Usulan pemerintah provinsi langsung disampaikan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha disampaikan melalui pemerintah provinsi. Baik usulan provinsi maupun badan usaha, harus mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memfokuskan pada peningkatan ekspor dan investasi pada beberapa kawasan khusus yang memang mendapatkan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Beberapa keunggulan yang dimiliki provinsi ini yang dapat menjadi peluang dalam menarik investasi, diantaranya letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat ideal bagi pengembangan pusat logistik dan distribusi karena dilewati oleh jalur maritim internasional dan posisi Indonesia terletak di tengah pasar yang sangat besar, yaitu pasar ASEAN.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, terdapat dua kawasan yang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu Kawasan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung dan Kawasan Tanjung Berikat di Kabupaten Bangka Tengah. Kedua kawasan ekonomi khusus tersebut telah diusulkan kepada yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Pansus Kawasan Ekonomi Khusus oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat Nomor 500/248/BPS&S/III/2009 tanggal 6 Juli 2009 perihal Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Bangka Belitung.

- **Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata**

Secara geografis, Bangka Belitung yang merupakan provinsi kepulauan memiliki keunggulan yang dapat menarik investasi terutama di bidang pariwisata, oleh karena itu diusulkan oleh Inisiator Badan Usaha Pariwisata (konsorsium) bahwa Tanjung Kelayang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Konsorsium selaku pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sampai sejauh ini sudah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2011. Progres terakhir dari Konsorsium ini adalah telah menyelesaikan *Feasibility Study* guna melengkapi persyaratan untuk KEK Pariwisata, dan hanya tinggal kajian Lingkungan Hidup yang harus dilakukan untuk KEK Pariwisata dapat ditetapkan.

Penggunaan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam pengembangan KEK perlu dilakukan mengingat dana untuk

itu sangatlah besar karena Pemerintah Daerah banyak berperan dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan. Hasil studi dari beberapa negara menunjukkan, KEK yang sepenuhnya dikelola oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah (Ayu Prima Yesuari, 2011).

Didalam kerangka pengembangan KEK bidang industri di Kawasan Tanjung Berikat dan Kawasan Tanjung Batu sebagai salah satu tawaran utama (*prime offer*) pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan daya saing, kompatibilitas dan komplementaritas dengan koridor ekonomi lainnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat semakin ketatnya persaingan diantara berbagai wilayah dalam mengembangkan berbagai bentuk kawasan ekonomi khusus baik yang berada di Koridor Ekonomi Sumatera maupun di Koridor Ekonomi Kalimantan dalam menarik investor untuk menanamkan investasinya di kawasan masing-masing.

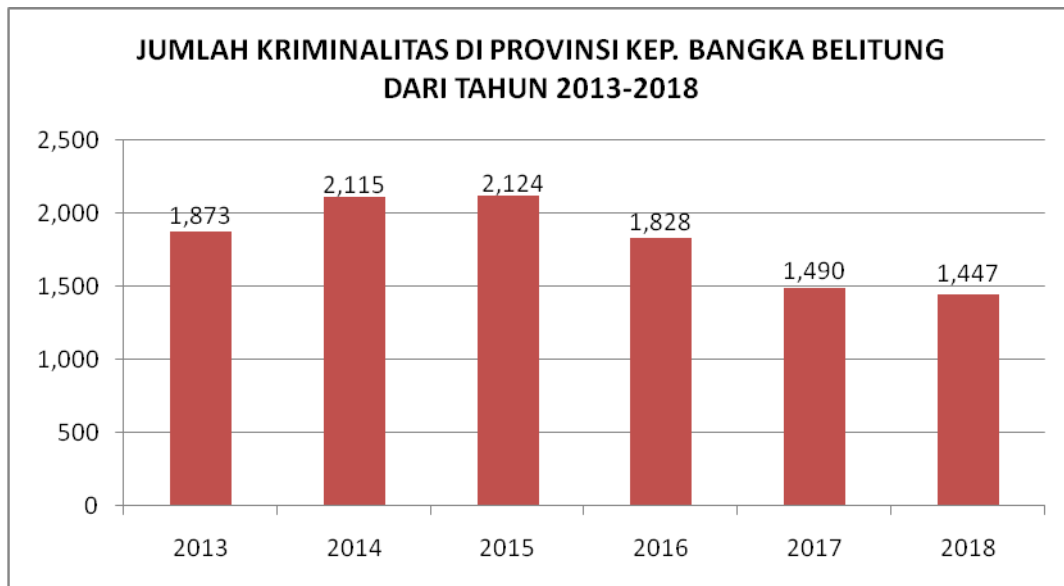
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
  - Hak Guna Usaha (HGU)
  - Dasar penetapannya adalah PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
3. Sumber Anggaran  
Swasta (PT.Belitung Pantai Intan)
4. Permasalahan yang Dihadapi  
Belum diberikannya fasilitas kemudahan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
  - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat selama tahun 2018 tidak terjadi konflik berbasis SARA dan kegiatan separatisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator keamanan menunjukan jumlah kriminalitas konvensional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar 1.447 kasus, namun demikian jika dilihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 trennya atau perkembangannya menurun. Dapat dilihat pada tabel 6.5

**Tabel 6.5**  
**Jumlah Kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Dari Tahun 2013 – 2018**



**2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani.**

Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasal (4) dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan sub Kebakaran dan Penyelamatan).

**3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.**

Secara umum jumlah pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2018 sebanyak 81 orang, yang terdiri 75 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Jika dirinci berdasarkan pangkat dan golongan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, pangkat golongan tertinggi adalah Pembina Utama Muda (IV c), dan terendah adalah Pengatur Muda (II a). Sementara itu pangkat dan golongan yang paling banyak adalah Penata Muda Tk. I (III b) sebanyak 22 orang, kemudian diikuti Pengatur Muda (II a) sebanyak 13 orang dan Pengatur Tk. I (II d) sebanyak 12 orang.

Adapun jumlah pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2018 yang bertugas di lapangan (selain Sekretariat) sebanyak 71 orang, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.

Berdasarkan eselonering, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, eselonering tertinggi adalah II a yang diduduki oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian eselon III a yang merupakan jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang yang berjumlah 5 (lima) orang, eselon IV a yang merupakan jabatan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, sebanyak 11 (sebelas) orang, dan selebihnya non eselon.

Berdasarkan tingkat pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5, tingkat pendidikan tertinggi pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pasca sarjana/ S-2 sebanyak 7 orang, sedangkan terendah adalah tingkat pendidikan SLTA sebanyak 34 orang. Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Sarjana S1 sebanyak 38 orang.

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	5	-	5
		Gol. III	41	-	41
		Gol.II	34	-	34
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	7	-	7
		S1	35	-	35
		D. IV	-	-	-
		D. III	1	-	1
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	33	-	33
		SMP/ sederajat	-	-	-
	SD/ sederajat	-	-	-	
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	11	-	11
		Fungsional:			
		Tertentu	46	-	46
		Umum	18	-	18
Jumlah			81	-	81

#### 4. Penanggulangan dan Kendalanya

Salah satu tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP adalah dengan menggiatkan kegiatan patroli. Patroli merupakan kegiatan mengamati dan mengawasi terhadap suatu wilayah dengan tujuan menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di masyarakat. Secara umum kendala yang dihadapi adalah minimnya jumlah personil anggota Satpol PP dan minimnya sarana patroli itu sendiri, karena cakupan wilayah patroli harus mencapai seluruh wilayah kecamatan dan desa di masing-masing daerah.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan terutama POLRI dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan sangat diperlukan, terutama terhadap kejadian-kejadian yang menjurus anarkis. Selain pada saat kejadian, POLRI juga dapat meminimalkan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan juga melakukan patroli dan mengoptimalkan fungsi intelejennya serta penguasaan wilayah oleh anggota.

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018, anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibiayai melalui APBD. Total anggaran sebesar Rp 18.055.895.385,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.334.519.488,00 atau sebesar 96%, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 9.926.861.495,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.562.008.954,00 dan belanja langsung sebesar Rp 8.129.033.890,-. dengan realisasi sebesar Rp. 7.793.510.534,-

# **BAB VII**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**



## **BAB VII PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2018 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya pembangunan tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semata, partisipasi pihak swasta dan masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang kita inginkan. Pembangunan adalah suatu proses yang berkelanjutan, sehingga hampir mustahil untuk mengharapkan suatu perubahan secara instant demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun apa yang telah dijalani dan dilaksanakan selama rentang waktu tahun 2018 ini, kesemuanya itu adalah pengalaman berharga dan juga merupakan tantangan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan pengabdian dari seluruh komponen pembangunan, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai pada tahun anggaran 2018, semuanya itu merupakan hasil kerja keras bersama yang dilaksanakan secara harmonis dan saling pengertian antara pihak eksekutif dan legislatif, antara sesama pimpinan instansi pemerintah baik otonom maupun vertikal, dan tidak terlepas berkat bantuan dan partisipasi seluruh kekuatan sosial politik, serta dukungan masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai. Dengan terbinanya kesamaan persepsi dan kesatuan pola tindak pihak eksekutif dan legislatif, pimpinan instansi pemerintah otonom maupun vertikal, seluruh kekuatan sosial politik, dan dukungan masyarakat, diharapkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Sinergitas dan Konektivitas Perkotaan dan Perdesaan”, dapat segera terlaksana sebagai refleksi dari cita-cita pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Demikian penyampaian LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

# LAMPIRAN I.1



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

LAMPIRAN: I.1 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak 7 daerah  Kab/kota usia di atas 3 tahun dan kepala daerah terpilih.	100%	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP
		Peraturan ttg kependudukan	2	Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan	Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	Kab/Kota yang memiliki perda kependudukan , sebanyak 7 daerah.  Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 7 daerah.	100%	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2018 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2018 : 81 orang  Jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 = 1.379.767 orang	2,98 per 50.000 penduduk	Sumber data dari BKD 0,01% per 50.000 penduduk
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman LPPD : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 120/0237/I tanggal 20 Maret 2019 tentang Penyampaian LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan Surat Pengantar Nomor : 045.2/249/I tanggal 22 Maret 2019.	Tepat	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otda
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2018, disampaikan pada tanggal ----- Maret 2018 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal --- Maret 2019. - Laporan Kinerja tahun 2017. disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- --- tanggal ----- 2017	Tepat	Sumber data dari Bagian Keuangan  <b>Normalisasi</b>
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%	1) Kota Pangkalpinang = 6 urusan. 2) Kab. Bangka = 6 urusan. 3) Kab. Belitung = 6 urusan. 4) Kab. Bangka Tengah = 6 urusan.	42 urusan	1. SPM Pendidikan 2. SPM Kesehatan 3. SPM PU dan Tata Ruang

LAMPIRAN I.1 LPPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
				Pemerintah	Rata-rata= .....urusan = ..... Kab/kota	5) Kab. Bangka Barat = 6 urusan. 6) Kab. Bangka Selatan = 6 urusan. 7) Kab. Belitung Timur = 6 urusan. Jumlah = 42 urusan  Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 7 Kab/Kot.		4. SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. SPM Trantibum dan Linmas 6. SPM Sosial
		Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain ( yang masih berlaku tahun 2018)	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2018, sebanyak 8 MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Tujuan kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) MOU dengan Provinsi: Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Maluku tentang Meningkatkan koordinasi antar Provinsi Kepulauan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 3) MOU dengan Wilayah Provinsi se-Sumatera tentang Dalam rangka memberikan informasi perkembangan investasi, memberikan rekomendasi dan kemudahan, menjadi fasilitator dengan pihak lain, melakukan promosi serta hal lainnya sehingga tercapai tujuan dari pembentukan PT. SSL itu sendiri. 4) MOU dengan Seluruh provinsi di daratan Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau serta Kepulauan	8 MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
						Bangka Belitung tentang Meningkatkan pembangunan di berbagai sektor antara lain infrastruktur, perhubungan, pariwisata, energi dan SDA, perindustrian dan perdagangan, kelautan dan perikanan serta pendidikan . 5) Dst---		
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi <u>Jumlah prioritas pembangunan nasional</u> <sup>1</sup>	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak 6 program.  - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak 10 program	60%	Sumber data dari BAPPEDA/ perangkat daerah yang bersangkutan
		Kewenangan	9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2017) X 100%	Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%  Rata-rata= 24% urusan = 7 Kab/kota	1) Kota Pangkalpinang = 24 urusan. 2) Kab. Bangka= 24 urusan. 3) Kab. Bangka Barat = 24 urusan. 4) Kab. Bangka Tengah = 25 urusan. 5) Kab. Bangka Selatan = 24 urusan. 6) Kab. Belitung = 24 urusan. 7) Kab. Belitung Timur = 23 urusan  Jumlah = 168 urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 7 Kab/Kot.	24%	
		Kuangan	10	Waktu penetapan perda APBD 2018	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2018 (31 Desember 2017)	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Desember 2017	Tepat	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD. <b>Tidak tepat</b> , apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2017.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
			11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 27 November 2015	Ada	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018. 1) Urusan Pendidikan Rp. 769.712.963.114,44 2) Urusan Kesehatan Rp. 270.738.445.129,90 3) Urusan Tata Ruang Rp. 227.993.857.931.24 4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 25.671.005.371,8 1 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. 27.450.479.445,11 6) Urusan Sosial Rp. 40.493.137.435  Total Belanja pelayanan dasar Rp. 1.362.059.888.427,50  Total Belanja APBD 2018, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	52,46%	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
			13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2018 1) Urusan Pendidikan Rp. 769.712.963.114,44 2) Urusan Kesehatan Rp. 270.738.445.129,90 Total Belanja Pend & Kes Rp. 1.040.451.408.244,34  Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	40,06%	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari : - Dinas Pendidikan - Perangkat daerah lain yang melaksanakan urusan pendidikan

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Pelayanan Publik	14	Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik <sup>2</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukum, Pergub Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tanggal 8 Okt 2015	Ada	Sumber data dari Bagian Hukum
		Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Provinsi tahun 2018 sebanyak 5.329 orang.  Jumlah penduduk provinsi tahun 2018 sebanyak 1.379.767 orang	0,38%	Pembilang : Sumber data dari BKD  Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
			16	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak ada database kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: SIMADIK (Sistem Manajemen Data dan Informasi Kepegawaian (tentang kepegawaian)	Ada	Sumber data dari BKD
		Kelembagaan	17	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 18/2016	Jumlah OPD, sbb: 1) Biro (Setda) = 9 unit 2) Setwan = 1 unit 3) Inspektorat = 1 unit 4) Dinas = 23 unit 5) Badan = 6 unit 6) Kantor = - unit 7) Rumah Sakit = 2 unit 8) <u>Lembaga Teknis lainnya = 0 unit</u> Jumlah perangkat daerah = 42 unit	42 unit	Sumber data dari Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	Perda yang ditetapkan	Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2018	Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2018, sebanyak 10 Perda ( Daftar Perda terlampir)	10 Perda	Sumber data dari Bagian Hukum
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	19	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018 dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2018	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2018, sebanyak 24 RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018, sebanyak 7 PERDA.	29,17%	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2018 X 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2018, sebanyak 35 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2018, sebanyak 35 keputusan	100%	Sumber data dari Setwan DPRD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)	21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KepGub dalam tahun 2018 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Gubernur dalam tahun 2018, sebanyak 1.214 keputusan.</li> <li>- Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak 1.214 keputusan.</li> </ul>	100%	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjut Peraturan Gubernur (PerGub)	22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah PerGub yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2018X100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak 66 Pergub.</li> <li>- Peraturan Gubernur dalam tahun 2018, sebanyak 66 Pergub.</li> </ul>	100%	Sumber data dari Bagian Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan dibagi Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	<p>Perda yang dibatalkan, sebanyak 0, yang terdiri dari:</p> <p>1.-----</p> <p>Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 5 Perda.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi jasa usaha</li> <li>2) Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017</li> <li>3) Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018</li> <li>4) Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019</li> <li>5) Perda Nomor ----- Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu</li> </ol>	0%	Sumber data dari Bagian hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda atau PerGub tentang konsultasi publik	24	Keberadaan perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada Perda atau PerGub	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (konsultasi publik) Tanggal 28 Jan 2016	Ada	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerGub	Apabila Ada, - Sebutkan nama media informasinya Babelprov.go.id dan. - Surat Sekda Nomor : 480/696/Diskominfo Tahun 2008 Tentang Pendaftaran Nama Domain	Ada	Sumber data dari Dinas Kominfo



	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2018 sebesar Rp. 1.697.727.953.344</li> <li>- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.685.118.643.150</li> </ul>	100,75%	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	27	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp. 1.135.511.218.578,25</li> <li>- DAU Tahun 2018, sebesar Rp. 1.018.673.218.000</li> </ul>	111,47%	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD	28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%	Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp. 1.135.511.218.578,25  Total Belanja APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	43,72%	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 789.629.819.565,87</li> <li>- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2018 (Realisasi), sebesar Rp. 2.487.065.640.565,87</li> </ul>	31,74%	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: WTP</li> <li>- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: -----</li> </ul>	Opini tahun 2017 = WTP  Opini tahun 2018= ----	Opini,: WTP/ <i>unqualified opinion</i> ); WDP/ <i>qualified opinion</i> ); TMP/ <i>disclaimer opinion</i> ), atau TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i> ).
		Besaran SILPA	31	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SILPA Tahun 2018, sebesar Rp. 108.917.676.505,24</li> <li>- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 2.487.065.640.565,87</li> </ul>	4,38%	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Realisasi Pendapatan	32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. 850.562.863.170,27</li> <li>- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 2.487.065.640.565,87</li> </ul>	34,20%	
		Realisasi belanja	33	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp 2.363.595.139.082,80</li> <li>- Total Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11</li> </ul>	91,02 %	Pembilang : Sumber data dari Laporan Realisasi Belanja/LRA  Penyebut : Sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Provinsi	34	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 432 temuan 1.049 rekomendasi</li> <li>- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2018, sebanyak 699 rekomendasi</li> </ul>	$\frac{699}{1.049} = 66,63\%$	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	35	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap <u>potensi PAD</u> <sup>3</sup>	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. 850.562.863.170,27</li> <li>- Potensi PAD pada APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 789.629.819.565,87</li> </ul>	107,72%	Sumber data dari BPKAD
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% atau (PAD 2018 = 850.562.863.170,27 -PAD 2017 = 737.192.092.935,16) : PAD 2017 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. 850.562.863.170,27</li> <li>- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. 737.192.092.935,16</li> </ul>	15,78%	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	Penghargaan yang diterima, sebanyak 45 yang terdiri dari 1) Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI diberikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang telah terintegrasi dengan	45 Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
						system JDIHIN 2) Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dari Komisi Aparatur Sipil Negara 3) Penghargaan dari Menkopulhukam sebagai Provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bernilai baik 4) Penghargaan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Peranian RI diberikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman sebagai kepala daerah peduli pembangunan perkebunan berkelanjutan pada acara Hari Perkebunan ke-61 tahun 2018.		
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada E-procurement	Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan Mei tahun 2010	Ada	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e-procurement
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2018	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2018, sebanyak 906 ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp. 658.900.000.000	906 ijin	Sumber data dari Kantor PTSP

# LAMPIRAN I.2



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS PENDIDIKAN  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** PENDIDIKAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional, sebanyak 6 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 5 program</li> </ul>	$\frac{5}{6} \times 100\% = 83.33\%$	.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Cuti Pegawai</li> <li>2. SOP ttg Prosedur Pengurusan Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB)</li> <li>3. SOP ttg Pengurusan Kenaikan Pangkat Ke BKPSDM Daerah</li> <li>4. SOP ttg Pengusulan Pengantar Pensiun</li> <li>5. SOP ttg Surat Masuk</li> <li>6. SOP ttg Penyusunan RKA SKPD</li> <li>7. SOP ttg Penelaahan KAK</li> <li>8. SOP ttg Penelaahan RKA SKPD</li> <li>9. SOP ttg Proses Pencairan Gaji</li> </ol>	Ada 11 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						10. SOP ttg Proses Pencairan Gaji Uang (GU) 11. SOP ttg Proses Pencairan TPP dan Uang Makan		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	$\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	Sumber data BKD/DAUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,  1. Pranata Humas 1 Orang 2. Penerjemah 1 Orang 3. Arsiparis Tingkat Terampil 1 Orang 4. Pranata Komputer 3 Orang 5. JFT Guru: 1.761	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 2046. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5329 personil	$\frac{2.046}{5.329} \times 100\% = 38,39\%$	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 18 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.</li> </ul>	$\frac{18}{21} \times 100\% = 85,71\%$	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 21 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.</li> </ul>	$\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.</li> <li>- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10</li> </ul>	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 10 program.</li> </ul>	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.</li> <li>Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 10 program.</li> </ul>	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 480.405.681.506</li> <li>Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.596.704.155.898,11</li> </ul>	$\frac{480.405.681.506}{2.596.704.155.898,11} \times 100\% = 18,50\%$	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 36.379.874.450</li> <li>Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 445.081.042.472,48</li> </ul>	$\frac{36.379.874.450}{445.081.042.472,48} \times 100\% = 8,17\%$	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.4.395.542.484</li> <li>Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 165.964.787.686,48</li> </ul>	$\frac{4.395.542.484}{165.964.787.686,48} \times 100\% = 2,65\%$	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.395.542.484</li> <li>Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 445.081.042.472,48</li> </ul>	$\frac{4.395.542.484}{445.081.042.472,48} \times 100\% = 0,99\%$	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. Laporan Operasional (LO) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Ada sebanyak 5 jenis :	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Buku Inventaris	Ada 1 Jenis Dokumen	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp .....	----- x 100% = %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Mobil keliling/Pintar 3. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 3 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang - ----	Tidak ada/belum melakukan survey kepuasan masyarakat (surat keterangan)	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI, RUMAH SAKIT Jiwa

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** KESEHATAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional, sebanyak 36 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 14 program	$36 / 14 * 100 = 38,88\%$	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir. 1. Dinas Kesehatan :12/9 2. RSUD Provinsi :12/3 3. <u>RSJ Provinsi : 12/2</u> Jumlah = 36 / 14
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 57 yang terdiri dari: A. DINAS KESEHATAN : 1. SOP ttg Pemeriksaan protein,total metode biuret,endpoint 2. SOP ttg Pemeriksaan alt (SGPT) metode optimized tris buffer (IFCC),Kinetic 3. SOP ttg Pemeriksaanst (sgot) .metode optimized tris buffer (IFCC),Kinetic 4. SOP ttg Pemeriksaan bilirubin, total/direct metode diazzo,endpoint 5. SOP ttg Pemeriksaan creatinine metode reaksi jaffe, fixed time kinetic 6. SOP ttg pemeriksaan BUN (ureum) liquid diazo, endpoint	Ada 57 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1. Dinas Kesehatan :21 SOP 2. RSUD Provinsi :33 SOP 3. <u>RSJ Provinsi : 3 SOP</u> Jumlah = 57 SOP

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						7. SOP ttg pewarnaan giemsa sediaan malaria. 8. SOP ttg pembuatan reagen ziehl nielsen (asam alkohol 3 % 9. SOP ttg pembuatan reagen ziehl nielsen (methylene blue 0,3 %) 10. SOP ttg pembacaan sediaan sputum (TB) 11. SOP ttg Pembuatan sediaan BTA 12. SOP ttg pembuatan reagen ziehl nielsen (carbol fuchsin 0,3%) 13. SOP ttg pembuatan sediaan malaria 14. SOP ttg PMI hematoanalyzer 15. SOP ttg proses menguji bahan kontrol 16. SOP ttg PMI malaria 17. SOP ttg pemeriksaan malaria. 18. SOP ttg pemeriksaan tinja mikroskopis 19. SOP ttg pemeriksaan urin carik celup. 20. SOP ttg Pemeriksaan HIV elisa 21. pemeriksaan anti hbs elisa  B. RSUP : 1. SOP Penyakit Anak 2. SOP Gigi dan Mulut 3. SOP Anestesi 4. SOP Bedah Umum 5. SOP Mata 6. SOP Rehabilitasi Medik 7. SOP Bedah Saraf 8. SOP Penyakit Dalam		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						9. SOP Akunpunter 10. SOP Kebidanan dan Penyakit Kandungan 11. SOP Bedah Urologi 12. SOP Keperawatan Umum 13. SOP Kebidanan 14. SOP Bidang Sarana 15. SOP Poliklinik 16. SOP Keperawatan Anak 17. SOP ICVCU 18. SOP Instalasi Rawat Jalan Dewasa dan Anak 19. SOP ICU 20. SOP Cathlab 21. SOP Laboratorium Patologi Klinik 22. SOP NICU 23. SOP PICU 24. SOP IGD 25. SOP Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis 26. SOP Hemodialisa 27. SOP Kamar Operasi 28. SOP Anak 29. SOP Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin 30. SOP Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 31. SOP Orthopedian Traumatology 32. SOP Pelayanan Farmasi 33. SOP Radiologi  C. RSJ : 1. SOP Pelayanan Medik 2. SOP Pelayanan Keperawatan 3. SOP Penunjang Pelayanan		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 7</li> <li>- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 7</li> </ul>	$7/7 * 100 = 100\%$	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 35</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 54</li> </ul>	$35/54 * 100 = 64,81\%$	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah` 1. Dinas Kesehatan : 25/25 2. RSUD Provinsi : 13/14 3. <u>RSJ Provinsi : 15/15</u> Jumlah = 35/54
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - A. DINKES : 1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat madya 2. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya 3. Nutrisionis Ahli Madya 4. Apoteker muda 5. apoteker pertama. 6. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda 7. Pembimbing kesehatan kerja muda. 8. perawat muda 9. pranata humas media 10. penyuluh kesehatan masyarakat 11. . Pranata Laboratorium Kesehatan pelaksana lanjutan 12. perawat mahir 13. asisten apoteker pelaksana lanjutan 14. perawat pelaksana 15. nutrisionis pelaksana 16. calon teknik elektromedik	Ada 47 jabatan fungsional	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018  1. Dinas Kesehatan : 20 2. RSUD Provinsi : 14 3. <u>RSJ Provinsi : 13</u> Jumlah = 47

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						17.perawat terampil 18.bidan pelaksana 19.calon sanitarian 20.calon pranata komputer pelaksana pemula.  B. RSUD : 1. JFT Perawat : 89 orang 2. JFT Dokter : 20 orang 3. JFT Dokter Gigi : 4 orang 4. JFT Bidan : 29 orang 5. JFT Laboratorium Kesehatan : 4 orang 6. JFT Perekam Medik : 9 orang 7. JFT Apoteker : 2 orang 8. JFT Asisten Apoteker : 7orang 9. JFT Fisioterapis : 3 orang 10. JFT Perawat Gigi : 3 orang 11. JFT Teknisi Gigi : 1 orang 12. JFT Radiografer : 4 orang 13. JFT Teknisi Elektromedis : 1 orang 14. JFT Nutrisionis : 6 orang  D. RSJ : 1. Jabatan Fungsional Dokter (13 org) 2. Jabatan Fungsional Perawat (78 orang) 3. Jabatan Fungsional Rekam Medis (5 orang) 4. Jabatan fungsional terapi wicara (1 orang) 5. Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan (3 orang) 6. Jabatan Fungsional Perawat Gigi (5 orang) 7. Jabatan Fungsional Apoteker (4 orang) 8. Jabatan Fungsional Ass. Apoteker (3 orang) 9. Jabatan Fungsional Radiolog (3 orang)		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						10. Jabatan Fungsional Fisioterapi (4 orang) 11. Jabatan Fungsional Gizi (3 orang) 12. Jabatan Fungsional Pranata Humas (1 orang) 13. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis (2 orang) 14. Jabatan Fungsional Tekhnisi Elektromedik (1 orang) 15. Jabatan Fungsional Sanitarian (2 orang)		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 581 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	10,90%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD. 1. Dinas Kesehatan : 127 2. RSUD Provinsi : 241 3. <u>RSJ Provinsi : 213</u> Jumlah =581
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 46 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 53 org.	85,18 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018. 1. Dinas Kesehatan :23/25 2. RSUD Provinsi :9/13 3. <u>RSJ Provinsi : 14/15</u> Jumlah =46/53
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 53 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 53 jbt.	100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018. 1. Dinas Kesehatan :25/25 2. RSUD Provinsi :13/13 3. <u>RSJ Provinsi : 15/15</u> Jumlah = 53 / 53

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. .Renstra 2. Renja 3. RKA	9 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan 1. Dinas Kesehatan :3 2. RSUD Provinsi :3 3. <u>RSJ Provinsi : 3</u> Jumlah =9
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 21 program.  - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 27	77,78%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs. 1. Dinas Kesehatan :11/17 2. RSUD Provinsi :5/5 3. <u>RSJ Provinsi : 5/5</u> Jumlah = 21 / 27
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program.  - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 11 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs. 1. Dinas Kesehatan :6/6 2. RSUD Provinsi :5/5 3. <u>RSJ Provinsi : 5/5</u> Jumlah = 11/ 11
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program.  - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 11 program.	100%	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.  1. Dinas Kesehatan :6/6 2. RSUD Provinsi :5/5 3. <u>RSJ Provinsi : 5/5</u> Jumlah = 11/11



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 269.508.195.779,90 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, , 2.596.704.155.898,11	10,38%	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggran)  1. Dinas Kesehatan : 52.334.778.323 2. RSUD Provinsi : 153.230.498.345 3. RSJ Provinsi : 63.942.919.111,90  Jumlah = 269.508.195.779,90 / , 2.596.704.155.898,11
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 89.723.783.359,22 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 249.711.203.409,78	35,94 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 1. Dinas Kesehatan : 1.718.491.770,16 / 46.214.838.494,16 2. RSUD Provinsi : 76.150.733.217,06 / 139.553.445.803,72 3. RSJ Provinsi : 11.854.558.372,00 / 63.942.919.111,90  Jumlah = 89.723.783.359,22 / 249.711.203.409,78
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.217.995.469 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 88.258.017.464,66	4,78%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir. 1. Dinas Kesehatan : 157.675.000 / 30.172.805.321 2. RSUD Provinsi : 2.400.120.564 / 18.924.605.240

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH							3. RSJ Provinsi : 744.267.000 / 12.283.855.688,59 Jumlah = 4.217.995.469/ 88.258.017.464,66
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.217.995.469  - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 249.711.203.409,78	1,69%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir. 1. Dinas Kesehatan : 157.675.000 / 46.214.838.494,16 4. RSUD Provinsi : 2.400.120.564 / 139.553.445.803,72 2. <u>RSJ Provinsi :</u> 744.267.000 / 63.942.919.111,90 Jumlah =4.217.995.469/ 249.711.203.409,78
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 9 jenis, sbb: A. DINKES : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk B. RSUD : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk C. RSJ : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 9 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)  1. Dinas Kesehatan :3 2. RSUD Provinsi :3 3. <u>RSJ Provinsi : 3</u> Jumlah =9
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada / Tidak Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								Tahun.) 1. Dinas Kesehatan :ADA 2. RSUD Provinsi :ADA 3. <u>RSJ Provinsi : ADA</u> Jumlah =ADA
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 2.115.613.850,00  - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 511.183.103.905,33	0,41 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan 1. Dinas Kesehatan : 0 / 18.836.812.849,66 2. RSUD Provinsi : 2.115.613.850,00/ 455.126.142.027,75 3. RSJ Provinsi : 0 / 37.220.149.027,92 Jumlah = 2.115.613.850,00 / 511.183.103.905,33
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :  1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  A.DINKES : 1. Leaflet 2. Mobil Keliling 3. Papan Pengumuman  B. RSUD : 1. Leaflet 2. Baleho 3. Papan Pengumuman 4. Mobil Keliling 5. Kotak Pengaduan 6. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 14 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)  1. Dinas Kesehatan :3 2. RSUD Provinsi :6 3. <u>RSJ Provinsi : 5</u> Jumlah = 14

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						C. RSJ : 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet 4. Website 5. Mobil keliling		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----- A . DINKES : Tidak Ada B. RSUD : Ada C. RSJ Ada yaitu : Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik	Ada / tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda. 1. Dinas Kesehatan : tidak ada 2. RSUD Provinsi : ada 3. RSJ Provinsi : ada Jumlah = ADA

**LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI**

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 8 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	87,5%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penggunaan dan Pemakaian peralatan kendaraan dan Alat-alat Berat 2. SOP ttg Pengumpulan data kinerja 3.	Ada 2 SOP :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100 %	Normalisasi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 22</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 23</li> </ul>	95,65%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pranata Komputer</li> <li>2. Teknik Jalan dan Jembatan</li> </ol>	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS, sebanyak 153 Personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5329 personil</li> </ul>	2,87%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 17 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 22 org.</li> </ul>	77,27 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 22 jbt.</li> </ul>	100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 program.	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 program.	100%	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 220.159.305.168,99 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.596.704.155.898,11	8,48%	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (Total anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 156.356.048.903,99 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 220.159.305.168,99	71,02%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.924.957.187,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 47.957.206.050,00	18,61 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.924.957.187,00 - Total Realisai belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 220.159.305.168,99	4,05%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1 LRA 2 Neraca 3 Calk 4 LO 5 LPE	Ada, sebanyak 5 jenis : LRA, Neraca, Calk, LO, LPE	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.898.646.697.570 50	0 %	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di mass media melalui website LPSE 3. Mobil Keliling 4. .... 5. ....	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN :**

1. CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN
2. PERUMAHAN RAKYAT

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</li> </ul>	12,5%	33,3%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 1 jenis yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Bidang Cipta Karya dan Permukiman</li> </ul>	Ada, sebanyak 2 jenis yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>- SOP Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana</li> </ul>	Ada	Ada	
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak -----.</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak -----</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak -----.</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak -----</li> </ul>	Tidak ada	Tidak ada	
		Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)	- Jabatan yang ada sebanyak 3	- Jabatan yang ada sebanyak 7	100%	100%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH			eselonering yang terisi	dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3	- Jabatan yang harus ada, sebanyak 7			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak ada	ada	Tidak ada	ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 17 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 27 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	0,32%	0,51%	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.	33,3%	100%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt.	- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 7 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbt.	100%	100%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 dokumen	3 dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program SKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program SKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, 1 sebanyak program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program	- Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program	100%	100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100%	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.  - Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.	100%	100%	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Alokasi Anggaran PD, sebesar Rp.	- Alokasi Anggaran PD, sebesar Rp.	0,093%	0,691%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						2.406.632.870,00 - Total Anggaran APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	17.933.571.400,25 - Total Anggaran APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.423.578.500,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 25.165.381.059,00	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 375.970.000,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 25.165.381.059,00	5,65%	1,49%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 16.514.587.537,00	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.149.356.300,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.16.514.587.537,00	0%	0,90%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 25.165.381.059,00	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 149.356.300,00,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 25.165.381.059,00	0 %	0,59%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. LO 4. LPE 5. CALK	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. LO 4. LPE 5. CALK	Ada, sebanyak 5 Jenis	Ada, sebanyak 5 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	Urusan Cipta Karya dan Permukiman	Urusan Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Yaitu Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik daerah	Apabila Ada, Yaitu Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik daerah	Ada, Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik daerah	-	
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp.0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 25.959.083.565,92,00	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 25.959.083.565,92,00	0%	0%	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Ada, yaitu : 1. Papan Pengumuman	Ada, yaitu : 1. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -- ---	Tidak ada	Tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS SOSIAL  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** SOSIAL

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 5 Program.</li> <li>- Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD), sebanyak 4 Program</li> </ul>	$\frac{4}{5} \times 100\% = 80,00\%$	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila ada, sebutkan ada banyak 69 SOP yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Lokasi PKH Nomor : 001/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018.</li> <li>2. SOP tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator &amp; Pendamping PKH Nomor : 002/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</li> <li>3. SOP tentang Penyusunan, Pembuatan dan Penyaluran Honor Korwil, Operator dan Pendamping PKH Nomor : 003/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</li> <li>4. SOP Monitoring Pelaksanaan PKH Nomor : 004/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</li> <li>5. SOP tentang Penyusunan, Perencanaan dan Pencairan Dana Operasional Kabupaten/Kota PKH Nomor : 005/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</li> </ol>	Ada 69 SOP	Pergub Kepulauan Bangka Belitung Nomor 71 Tahun 2014 Tgl 6 November 2014

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						6. SOP tentang Perencanaan, Pengumpulan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKH Tingkat Provins PKH Nomor : 006/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 7. SOP tentang Penyusunan, Pembuatan dan Penyaluran Honor Tim TKPKH Provinsi PKHN Nomor : 007/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 8. SOP tentang Penyusunan, Pembuatan dan Penyaluran Honor Tim Sekretariat UPPKH Provinsi Nomor : 008/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 9. SOP tentang Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Nomor : 009/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 10. SOP tentang Pemulangan Korban Terlantar Nomor : 010/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 11. SOP tentang Penyaluran Bahan Bangunan Rumah Nomor : 011/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 12. SOP tentang Penyaluran Buffer Stock BS Nomor : 012/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 13. SOP tentang Penyaluran Buffer Stock Nomor : 013/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 14. SOP tentang Supervisi Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Nomor : 014/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 15. SOP tentang Penyusunan RKA-SKPD Nomor : 015/DINSOS/2018 Tanggal		



NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						02 Januari 2018 16. SOP tentang Penyusunan LAKIP Nomor : 016/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 17. SOP tentang Penyusunan TOR Nomor : 017/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 18. SOP tentang Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Nomor : 018/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 19. SOP tentang Prosedur Pengusulan Bantuan UEP KUBE di Perdesaan Nomor : 019/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 20. SOP tentang Prosedur Pengusulan Bantuan UEP KUBE di Perkotaan Nomor : 020/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 21. SOP tentang Prosedur Pengusulan Bantuan UEP KUBE di Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil Nomor : 021/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 22. SOP tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Nomor : 022/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 23. SOP tentang Penyuluhan Sosial Nomor : 023/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 24. SOP tentang Pembuatan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>Nomor : 024/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>25. SOP tentang Pembuatan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Nomor : 025/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>26. SOP tentang Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN) Nomor : 026/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>27. SOP tentang Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan Nomor : 027/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>28. SOP Pemberian Bantuan Alat Bantu Bagi Lanjut Usia Nomor : 028/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>29. SOP tentang Pemberian Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Nomor : 029/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>30. SOP tentang Pemberian Bantuan Aksesibilitas Alat Bantu Bagi penerima Manfaat/ Komda / Rumah /Ibadah /ORSOS/ LKS Nomor : 030/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>31. SOP tentang Pengiriman Siswa / Penyandang Disabilitas Ke Balai /Panti Miliki Kementerian Sosial RI Nomor : 031/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>32. SOP tentang Pemberian Kebutuhan</p>		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>Dasar Anak Nomor : 032/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>33. SOP tentang Pemberian Perizinan Pengangkatan Anak Secara Langsung Nomor : 033/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>34. SOP tentang Pemberian Perizinan Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Nomor : 034/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>35. SOP tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Nomor: 035/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>36. SOP tentang Pelaksanaan Kegiatan Korban Penyalahgunaan NAPZA Nomor : 036/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>37. SOP tentang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Nomor : 037/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>38. SOP tentang Registrasi Klien Nomor : 038/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>39. SOP tentang Kepengasuhan Rumah Antara Nomor : 039/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>40. SOP tentang Kepengasuhan di Asrama/Rumah Asuh Nomor : 040/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>41. SOP tentang Kegiatan Orientasi di UPTD PSBS Nomor : 041/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p>		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						2018 42. SOP tentang Kegiatan Asesmen Biopsikosial di UPTD PSBS Nomor: 042/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 43. SOP tentang Rencana Intervensi Nomor : 043/ INSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 (u/ PSBS. di Pangkalpinang) 44. SOP tentang Bimbingan Mental Nomor : 044/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 45. SOP tentang Bimbingan Spritual Nomor : 045/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 46. SOP tentang Terapi Psikososial Nomor : 046/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 47. SOP tentang Bimbingan Pendidikan Sekolah Formal (Anak Dalam Lembaga) Diluar Lembaga Nomor : 047/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 48. SOP tentang Resosialisasi Nomor : 048/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 49. SOP tentang Reintegrasi Nomor : 049/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 50. SOP tentang Bimbingan Lanjut Nomor: 050/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 51. SOP tentang Terminasi Nomor : 051/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 52. SOP tentang Kegiatan Asesmen		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>Nomor : 052/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>53. SOP tentang Penerimaan Berkas Permohonan Masuk Panti Nomor : 053/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>54. SOP tentang Case Conference Nomor: 054/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>55. SOP tentang Penerimaan dan Penetapan PM Nomor : 055/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>56. SOP tentang Penetapan Petugas Pendamping PM Nomor : 056/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>57. SOP tentang Rencana Intervensi Nomor : 057/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 (u/ PSBL di Belitung Timur)</p> <p>58. SOP tentang Rujukan Kesehatan Nomor : 058/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>59. SOP tentang Terminasi Nomor : 059/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>60. SOP tentang Orientasi dan Pengenalan Program Nomor : 060/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>61. SOP tentang Bimbingan Nomor : 061/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018</p> <p>62. SOP tentang pertemuan orang tua Nomor : 062/DINSOS/2018 Tanggal</p>		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						02 Januari 2018 63. SOP tentang Parenting Skill Nomor : 063/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 64. SOP Sosialisasi Pemulangan Penerima Manfaat Nomor : 064/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 65. SOP tentang Terminasi Nomor : 065/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 66. SOP tentang Layanan Home Care Nomor : 066/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 67. SOP tentang Bimbingan Rekreasional Group Nomor : 067/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 68. SOP tentang Bimbingan Lanjut Nomor: 068/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018 69. SOP tentang Pengadaan Obat-obatan Klinik Nomor : 069/DINSOS/2018 Tanggal 02 Januari 2018		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 Perda	$2 \div 2 \times 100\% = 100\%$	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 29 Orang - Jabatan yang harus ada 29 Orang sebanyak	$29 \div 29 \times 100\% = 100\%$	SOTK terlampir
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah (PD)	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah (PD)	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tertentu bidang : 1. Pranata Komputer Ahli Pertama 1 orang 2. Pranata Komputer Pelaksana 1	Ada 7 Jenis	Data pendukung terlampir

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						orang 3. Pranata Komputer Pelaksana Pemula 1 orang 4. Perawat Muda 2 orang 5. Perawat Mahir 3 orang 6. Perawat Pelaksana 1 orang 7. Terapis Wicara Mahir 1 orang 8. Pekerja sosial Ahli Pertama 8 orang 9. Pranata humas Ahli pertama 1 orang 10. Arsiparis Mahir 1 orang 11. Penyuluh Sosial Ahli Pertama 2 orang		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah (PD) terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 87 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	$87 \div 5.332 \times 100\% = 1,63\%$	PNS berjumlah 87 Orang DUK terlampir
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah (PD) yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat PIM, sebanyak 26 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 29 org.	$26 \div 29 \times 100\% = 89,66\%$	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah (PD) yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 29 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 29 Jbt.	$29 \div 29 \times 100\% = 100\%$	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah (PD) -RENSTRA (PD) -RENJA PD -RKA-PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	Ada	Terlampir

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PD dibagi jumlah program dalam RENJA PD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja PD, sebanyak 6 Program.</li> <li>- Program Renja PD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program</li> </ul>	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PD dibagi jumlah program dalam RKA PD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak 6 Program.</li> <li>- Program dalam RKA PD, sebanyak 6 Program.</li> </ul>	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA PD diakomodir dalam DPA PD	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD dibagi jumlah program dalam DPA PD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD, sebanyak 6 Program.</li> <li>- Program dalam DPA PD, sebanyak 6 Program.</li> </ul>	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (PD) terhadap total belanja/realiasi APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah (PD) dibagi total belanja/realiasi APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Alokasi Anggaran Perangkat Daerah (PD), sebesar Rp. 17.453.532.688,00</li> <li>- Total Anggaran APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11</li> </ul>	$\frac{\text{Rp. 17.453.532.688,00}}{\text{Rp. 2.596.704.155.898,11}} \times 100\% = 0,67\%$	
		Besaran belanja modal (realiasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (PD)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah (PD) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah (PD), sebesar Rp 157.000.000</li> <li>- Total Belanja Perangkat Daerah (PD), sebesar Rp 16.432.089.688</li> </ul>	$\frac{\text{Rp 157.000.000}}{\text{Rp 16.432.089.688}} \times 100\% = 0.95\%$	
		Besaran belanja pemeliharaan (realiasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah (PD)) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah (PD), sebesar Rp 316.215.500</li> <li>- Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah (PD), sebesar Rp 5.683.550.792</li> </ul>	$\frac{\text{Rp 316.215.500}}{\text{Rp 5.683.550.792}} \times 100\% = 5.56\%$	



NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (PD)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah (PD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah (PD), sebesar Rp. 316.215.500 - Total belanja Perangkat Daerah (PD), sebesar Rp 16.432.089.688	Rp 316.215.500 ----- x 100% = 1.92% Rp 16.432.089.688	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LPE 5. CaLK	Ada	Terlampir
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset Perangkat Daerah (PD)	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah (PD)	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah (PD)	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : - Berita acara hasil Rekonsiliasi barang milik daerah	Ada	Terlampir
		Penggunaan Aset Perangkat Daerah (PD)	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah (PD)	Jumlah aset Perangkat Daerah (PD) tidak digunakan Perangkat Daerah (PD) dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 44.810.000,- - Aset yang dikuasai Perangkat Daerah (PD), Rp. 10.020.762.019,-	Rp. 44.810.000,- ----- x 100% = 0.004% Rp. 10.020.762.019,-	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media (Website)	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Posko Bencana & Sekretariat PKH 2. Papan Pengumuman 3. Mobil Keliling (UPSK) 4. Leaflet / Stiker 5. Website	Jumlah sebanyak 5 jenis	Data pendukung terlampir
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per Unsur Pelayanan	Ada	Data Pendukung terlampir

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN :** SOSIAL

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 0 program	0/4x100 %= 0%	Tidak Ada program yang dilaksanakan/ melekat oleh BPBD dari Pemerintahan Pusat BNPB
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau Tidak Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 18 yang terdiri dari:  Ada, Sebanyak 18 SOP Terdiri dari :  1. Menyusun Peta Resiko Bencana; 2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Di Tingkat Desa; 3. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana; 4. Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana; 5. Pengurangan Resiko Bencana; 6. Pemasangan Rambu-Rambu Rawan Bencana; 7. Peminjaman Peralatan Penanggulangan Bencana;	Ada 18 SOP	Tidak Ada

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						8. Pengoperasian Dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana; 9. Pemberian Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana; 10. Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana; 11. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) Penanggulangan Bencana 12. Tim Reaksi Cepat (Trc) Dan Tim Penanggulangan Bencana (Tim Pb); 13. Mobilisasi Dan Pengerahan Tim Reaksi Cepat (Trc) Dalam Tanggap Darurat Bencana; 14. Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana; 15. Laporan Data Pasca Bencana; 16. Penanganan Tanggap Darurat Bencana; 17. Kegiatan Koordinasi Mitigasi Bencana; 18. Rekonstruksi Pasca Bencana;		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0%	Tidak Ada
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 14 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 jbt	14/14x100 % = 100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada, Jabatan Fungsional yaitu : 1. Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, 2. Analis Kebijakan Ahli Pertama,	Ada (4 Jabatan Fungsional)	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						3. Pranata Komputer, 4. Arsiparis		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS OPD , sebanyak 33 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	$33/5.329 \times 100\% = 0,62 \%$	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	$14/14 \times 100\% = 100 \%$	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	$14/14 \times 100\% = 100 \%$	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA/RKPA	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA/RKPA	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak 4 program. - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	$4/4 \times 100\% = 100 \%$	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA OPD, sebanyak 4 program.	4/4x100% = 100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA OPD, sebanyak 4 program.	4/4x100%= 100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran (Realisasi)	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran OPD, sebesar Rp. 11.305.986.490- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	11.305.986.490-/ Rp. 2.596.704.155.898,11 x100 % = 0,44	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja OPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja OPD x 100%	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 615.574.248,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 10.009.035.636,-	Rp. 615.574.248,-/ Rp. 10.009.035.636,- x100% = 6,15%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa OPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 136.820.752,- - Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp. 6.021.760.182,-	Rp. 136.820.752,-/ Rp. 6.021.760.182,- x100% = 2,27%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	- total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 136.820.752,- - Total belanja OPD, sebesar Rp. 10.009.035.636,-	Rp. 136.820.752,-/ 10.009.035.636,- x100% = 1,37 %	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. CaLK	Ada sebanyak 5 jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, Jenis dokumennya sbb : 1. Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah TA 2018 (sensus Asset)	Ada	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD, sebesar Rp. 14.834.438.664,-	0/14.834.438.664,-% = 0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Baliho/Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 4 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS TENAGA KERJA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. URUSAN KETENAGAKERJAAN
2. URUSAN TRANSMIGRASI

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1). Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program</li> </ul>	100%	0%	Program Nasional RKP 2018
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengawasan Tenaga Kerja</li> <li>2. SOP Penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Ketenagakerjaan</li> <li>3. SOP Tindak Pidana Umum Ketenagakerjaan</li> <li>4. SOP Membuat Laporan IPK</li> <li>5. SOP Pelayanan Bursa Kerja Khusus</li> <li>6. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing</li> <li>7. SOP Pelayanan Lowongan Kerja</li> <li>8. SOP Pelayanan Pencari Kerja</li> </ol>	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyiapan Lahan Transmigrasi</li> <li>2. SOP Pelatihan di Kawasan Transmigrasi</li> <li>3. SOP Kegiatan Identifikasi Potensi Sasaran Transmigrasi</li> </ol>	Ada 5 SOP	Ada 3 SOP	Sesuai urusan.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1). Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	Ada Perda nomor 04 tahun 2018 tentang retribusi jasa umum	- Tidak ada	ada	- Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 15 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 15 orang	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 1 orang	100%	100%	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	1. Pengantar Kerja 2. Instruktur 3. Mediator HI 4. Pengawas Ketenagakerjaan	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ada	Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 107 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 4 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	2,00%	0,07%	- Sumber data SKPD mengacu kondisi terakhir/update Tahun 2018
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 15 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	100%	100%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 15 Jabatan.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.	100%	100%	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1). Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program.	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program.	100%	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100%	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.	100%	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 20.509.664.636 - Total Belanja APBD, sebesar	- Total belanja SKPD, sebesar Rp 177.224.050	0,789%	0,006%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1). Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Rp.2.596.704.155.898,11	- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 788.000.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 20.686.888.686	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar . Rp. 0	3,93%	0%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 413.824.500 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.096.879.118	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 0	8,11%	0%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 413.824.500 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 20.686.888.686	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 0	2,00%	0%	Tidak ada pemisahan Belanja Pemeliharaan
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. LPE 2. LRA 3. Calk 4. LO 5. Neraca	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. LPE 2. LRA 3. Calk 4. LO 5. Neraca	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan Laporan Keuangan
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2018	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2018	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1). Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 36.012.274.741	- Asset yang tidak digunakan Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 0	0%	0%	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenisnya 1. Website	5 Jenis	1 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :** PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:**

1. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1.	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak --3-- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak --2-- program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak --4--- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak --1-- program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak -2- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ---1-- program	66,6 %	25 %	50 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak --3--- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak- 2. SOP Sistem nilai-nilai keuangan perempuan 3. Dst ----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -0- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ---- 2. SOP ttg ---- 3. SOP ttg ---- 4. Dst ----	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak -3---- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Layanan data agregat dan informasi kependudukan 2. SOP ttg Permintaan dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan 3. SOP ttg Pemanfaatan data	Ada 2 SOP	-	Ada 3 SOP	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
								kependudukan				
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak ---1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak --1--	- PERDA pelaksanaansebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak --2-	Ada 100%	Ada 100%	Ada 100%	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak -17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	- Jabatan yang ada sebanyak - Jabatan yang harus ada, sebanyak	100 %	100 %	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Pranata Komputer Pranata Humas	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -.	Ada	-	-	
4	<b>PENGELOLAA N KEPEGAWAIA N DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 35. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5329 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 6 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5329 personil	- PNS yang menangani urusan (3) SKPD , sebanyak --7-. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5329 personil	0,66%	0,11%	0,13%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim , sebanyak 11---- org.  Jabatan, yang ada sebanyak 17 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak -4org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 org.	64,71. %	100. %	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak ..4 jbt.	100 %	100 %	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak --4--- jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak -- 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak -4-- jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program SKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program SKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2	- Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ..1	- Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	100. %	100 %	100. %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak -2-- -- program.	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak --1- program.	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak --1--- program.	100. %	100. %	100. %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak --2 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak --1--- program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ---1-- program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak --1--- program.	100 %	100 %	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 3.603.744.950 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.596.704.155.898, 11	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 1.230.249.350 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.596.704.155.898 ,11	- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.818.862.562, - Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.596.704.155.898 ,11	0,138 %	0,047 %	0,07 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 60.226.666,6 - Total Belanja SKPD, sebesar	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 60.226.666,6 - Total Belanja SKPD, sebesar	Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 60.226.666,6 Total Belanja SKPD, sebesar	0,51 %	0,51 %	0,51 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						Rp 11.774.607.391	Rp 11.774.607.391	Rp 11.774.607.391				
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 10.346.272 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 5.097.641.502	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 10.346.272 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 5.097.641.502	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 10.346.272 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 5.097.641.502	0,2 %	0,2 %	0,2 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 10.346.272 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.774.607.391	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 10.346.272 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.774.607.391	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 10.346.272 Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.774.607.391	0,088%	0,088%	0,088%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 6. Neraca 7. LRA 8. CALK 9. LO 1. LPE	Ada sebanyak 5 jenis	Ada sebanyak 5 jenis	Ada sebanyak 5 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Hasil Sensus 2. Hasil Rekon 3. Buku Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Hasil Sensus 2. Hasil Rekon 3. Buku Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya 1. Hasil Sensus 2. Hasil Rekon 3. Buku Inventaris	Ada sebanyak 5 jenis	Ada sebanyak 5 jenis	Ada sebanyak 5 jenis	dalam 5 Tahun.)



NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						4. Kartu Inventaris Ruangan	4. Kartu Inventaris Ruangan	4. Kartu Inventaris Ruangan				
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak --0-- asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 1.151.041.4259,33 asset.	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak --0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 1.151.041.4259,33 asset.	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ----0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 1.151.041.4259,33 asset.	.0.... %	...0.. %	...0.. %	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak ---5-- jenis.	Jumlah sebanyak --5-- jenis.	Jumlah sebanyak ----5-- jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---0--	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----0	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang 0	tidak ada	tidak ada	tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS PANGAN  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** KETAHANAN PANGAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional , sebanyak 1 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program</li> </ul>	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 15 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional;</li> <li>2. SOP ttg Penyusunan Pola Pangan Harapan;</li> <li>3. SOP ttg Proses Sertifikasi Prima;</li> <li>4. SOP ttg Proses Pendaftaran Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan;</li> <li>5. SOP ttg Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada Kelompok Masyarakat;</li> <li>6. SOP ttg Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah melalui KRPL;</li> <li>7. SOP ttg Mekanisme Pencairan Bantuan Pemerintah Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);</li> <li>8. SOP ttg Pegujian Sampel Pangan</li> </ol>	Ada 27 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Segar Asal Tumbuhan; 9. SOP ttg Pengawasan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah; 10. SOP ttg Cadangan Pangan dan Lumbung Pangan; 11. SOP ttg Prognosa Neraca Pangan 12. SOP ttg Pengendalian Distribusi Pangan; 13. SOP ttg Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat; 14. SOP ttg Penetapan Petugas Pendamping Desa, Petugas Pendamping Kabupaten dan Petugas Pelaksana Propinsi dan Kabupaten Optimalisasi Pemanfaatan Lahan melalui KRPL; 15. SOP ttg Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk GEMA SABUK AMANG; 16. SOP Penyusunan Peta FSVA; 17. SOP ttg Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan; 18. SOP ttg Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); 19. SOP ttg Penangan Daerah Rawan Pangan (PDRP); 20. SOP ttg Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); 21. SOP ttg Panel Harga dan Data Base Harga dan Stok Pangan tingkat Distributor; 22. SOP ttg Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan; 23. SOP ttg Pemberian Bantuan		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Kawasan Daerah Mandiri Pangan; 24. SOP ttg Pembuatan Kalender Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; 25. SOP ttg Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara; 26. SOP ttg Pemantauan dan Analisis Akses Pangan; 27. SOP ttg Penyusunan Dokumen Rawan Pangan.		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 PERDA, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERDA No 12. th 2017 ttg Cadangan Pangan</li> <li>2. PERDA No 16. Th 2017 ttg Penyelenggaraan Keamanan Pangan</li> </ol> </li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 PERDA</li> </ul>	100 %	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 14</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 14</li> <li>- Daftar nama Pejabat eselon</li> </ul>	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Perencana 1 org</li> <li>- Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 3 org</li> <li>- Fungsional Analis Ketahanan Pangan 4 org</li> </ul>	Ada	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS, sebanyak 39 Personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak</li> <li>- 5.329 personil</li> </ul>		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.</li> </ul>	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.</li> </ul>	100 %	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJMD 2017 – 2022</li> <li>2. RKPD 2018</li> <li>3. RENSTRA Dinas Pangan 2017 – 2022</li> <li>4. RENJA Dinas Pangan 2018</li> <li>5. DPA</li> </ol>	5 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program ENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.</li> <li>- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program</li> </ul>	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 program program.</li> </ul>	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 program.</li> </ul>	100 %	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.702.669.318,-</li> <li>- Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11</li> </ul>	0,00373 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp.115.847.000,-</li> <li>- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.918.404.418,-</li> </ul>	0,13%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 194.009.785,-</li> <li>Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.817.754.752,-</li> </ul>	0,0508 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.194.009.785,-</li> <li>Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.918.404.418,-</li> </ul>	0,0217 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk, Laporan Operasional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:</li> <li>1. LRA</li> <li>2. Neraca</li> <li>3. Calk</li> <li>4. Laporan Operasional</li> <li>5. LPE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada sebanyakjenis</li> <li>: 5 Jenis</li> </ul>	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada,</li> <li>1. Berita Acara Rekonsiliasi Asset</li> <li>2. Buku Inventaris</li> </ul>	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 0,- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 674.097.188,-		
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Banner 2. Stiket 3. Poster 4. Leaflet	Jumlah sebanyak 4 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN :** LINGKUNGAN HIDUP

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional, sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program	0/4 x 100% = 0%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 16 yang terdiri dari: 1. SOP Penilaian dan Pembinaan Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. SOP Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura 3. SOP Penyelenggaraan TPA Regional 4. SOP Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca 5. SOP Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup 6. SOP Pelaksanaan Tindakanlanjutan Verifikasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 7. SOP Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) 8. SOP Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air (PPA) 9. SOP Pelaksanaan Penyusunan IKPLHD 10. SOP Administrasi Penyusunan KLHS 11. SOP Pelaksanaan Validasi KLHS 12. SOP Penilaian AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan 13. SOP Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan 14. Penerbitan Lisensi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kep. Bangka Belitung	Ada 16 SOP, yang terdiri dari : 1. SOP Penilaian dan Pembinaan Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. SOP Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura 3. SOP Penyelenggaraan TPA Regional 4. SOP Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca 5. SOP Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup 6. SOP Pelaksanaan Tindakanlanjutan Verifikasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 7. SOP Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) 8. SOP Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air (PPA) 9. SOP Pelaksanaan Penyusunan	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						15. SOP Penerbitan Rekomendasi Lisensi Kabupaten/Kota 16. Pelayanan Laboratorium	IKPLHD 10. SOP Administrasi Penyusunan KLHS 11. SOP Pelaksanaan Validasi KLHS 12. SOP Penilaian AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan 13. SOP Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan 14. Penerbitan Lisensi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kep. Bangka Belitung 15. SOP Penerbitan Rekomendasi Lisensi Kabupaten/Kota 16. Pelayanan Laboratorium	
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 3</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 3</li> </ul>	$3/3 \times 100\% = 100\%$  <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kawasan Lindung Dalam Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung</li> <li>- PERDA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Dalam Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung</li> <li>- PERDA Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>	i
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 18</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 18</li> </ul>	$18/18 \times 100\% = 100\%$	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)</li> <li>- Fungsional Pegawai Lingkungan Hidup</li> </ul>	Ada 7 Orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (6 Orang)</li> <li>- Fungsional Pegawai Lingkungan Hidup (1 Orang)</li> </ul>	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS, sebanyak 59 Personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil</li> </ul>	$59/5.329 \times 100\% = 1,107 \%$	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 15 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.</li> </ul>	$15/18 \times 100\% = 83,33 \%$	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 18 jbt.</li> </ul>	$18/18 \times 100\% = 100\%$	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RENSTRA Perangkat Daerah</li> <li>2. RENJA Perangkat Daerah</li> <li>3. RKA Perangkat Daerah</li> </ol>	Ada 3 jenis dokumen yg terdiri dari:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RENSTRA Perangkat Daerah</li> <li>2. RENJA Perangkat Daerah</li> <li>3. RKA Perangkat Daerah</li> </ol>	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program</li> </ul>	$5/5 \times 100\% = 100 \%$	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	$5/5 \times 100\% = 100\%$	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	$5/5 \times 100\% = 100\%$	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 14.758.174.576,00;</li> <li>- Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.596.704.155.898,11</li> </ul>	$\text{Rp } 14.758.174.576,00 / \text{Rp } 2.596.704.155.898,11 \times 100\% = 0,568\%$	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp 95.595.000;</li> <li>- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 12.522.277.977;</li> </ul>	$= 95.595.000 / 12.522.277.977 \times 100\% = 0,76\%$	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja Pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp 353.137.700;</li> <li>- Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp 5.647.919.164;</li> </ul>	$= (353.137.700 / 5.647.919.164) \times 100\% = 6,25\%$	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp 353.137.700;</li> <li>- Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 12.522.277.977;</li> </ul>	$= (353.137.700 / 12.522.277.977) \times 100\% = 2,82\%$	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LPE 5. CALK	Ada sebanyak 5 jenis : 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LPE 5. CALK	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada, yaitu Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Buku Inventaris Barang Berita Acara Rekonsiliasi Asset	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6.272.353.306	0 %  Surat Pernyataan	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 4 jenis 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media <a href="http://dlh.babelprov.go.id/">http://dlh.babelprov.go.id/</a>	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang : Survei Kepuasan Pelanggan Atas Jasa Pelayan Laboratorium Lingkungan	Ada, Survei Kepuasan Pelanggan Atas Jasa Pelayan Laboratorium Lingkungan	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.</li> <li>Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</li> </ul>	1/1 X100=100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 10 yang terdiri dari:</p> <p>Ada, terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Survey dan Pengumpulan Data pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa</li> <li>2. SOP Pelatihan Ketrampilan dasar Fasilitasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Dengan Sarana Prasarana</li> <li>3. SOP Gelar TTG Tingkat Nasional</li> <li>4. SOP Posyantek</li> <li>5. SOP Bantuan RASKINTIS</li> <li>6. SOP Peningkatan Inovasi Masyarakat melalui Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi</li> <li>7. SOP Prosedur pelaksanaan kegiatan PMTAS</li> <li>8. SOP pengajuan cuti pegawai</li> <li>9. SOP usulan kenaikan pangkat</li> <li>10. Bintek Tentang Pedoman</li> </ol>	Ada 10 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Tatacara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Tidak ada	Tidak ada	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	17/17 x 100 % = 100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada;; 1.JFT Pranata Humas 2.JFT Pranata Komputer	Ada;; 1.JFT Pranata Humas 2.JFT Pranata Komputer	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 51 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 Personil	51/5.329= 0,96%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	17/17 x 100%=100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan.	16/17 x 100%=94,12 %	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program</li> </ul>	5/5 X 100% =100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	5/5 x100% =100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	5/5 x100% =100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja/realiasi APBD	Anggaran SKPD dibagi total belanja/realiasi APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 12.189.519.538,00</li> <li>- Total Realiasi APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11</li> </ul>	$\frac{12.189.519.538,00}{2.596.704.155.898,11} \times 100\% = 0,47\%$	
		Besaran belanja modal (realiasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.42.375.000,-</li> <li>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 12.189.519.538,00,-</li> </ul>	$\frac{22.500.000,00}{12.189.519.538,00} \times 100\% = 0,18\%$	
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 191.120.000,00</li> <li>- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.453.509.780,00</li> </ul>	2,96 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 171.120.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 12.189.519.538,00	1,40 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	ada, sebanyak 3 jenis : - Neraca - CALK - LRA	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	ada, yaitu BA Rekonsiliasi	
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0- - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 221.561.724,-	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman dimass media	Jumlah 3 Jenis : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak ada	



## LAMPIRAN: I. 2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PERHUBUNGAN

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program,  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program..	0 — x 100% = 0% 6	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	adaterdiridari 7 SOP, yaitu : 1. SOP Pengawasan Operasional Angkutan Laut 2. SOP Pengawasan Operasional Angkutan Darat 3. SOP Pengawasan Operasional Angkutan Udara 4. SOP Patroli Pemantauan Operasional Fungsi Fasilitas Keselamatan 5. SOP Pengaturan Lalu Lintas dan Perparkiran 6. SOP Pelaksanaan Ramp Check Angkutan Umum 7. SOP Pengendalian Disiplin Angkutan Umum di Jalan Raya 8. SOP Evaluasi Pelaksanaan Hasil Andalalin 9. SOP Pengumpulan Data Kinerja 10. SOP Pengumpulan Data Pembangunan Daerah	Ada	

2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Belum ada PERDA, Tapi Terdapat Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah sebanyak 2 (dua) Peraturan Kepala Daerah, yaitu : 1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2014 Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Trayek.	Tidak Ada	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) di bagi Jumlah jabatan yang ada x100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	17 — x 100% =100 % 17	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	1. PNS SKPD , sebanyak 54 personil 2. Total PNS Provinsi, sebanyak 5.338 personil	55 ----- x 100% =1,03 % 5.329	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x100%	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 17 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	17 — x 100% =100 % 17	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang Ada x100%	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	17 — x 100% =100 % 17	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA-PD TH 2017	Ada	

		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja PD, sebanyak 5 program.</li> <li>- Program Renja PD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program</li> </ul>	5 — x 100% =100 % 5	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak 5 program.</li> <li>- Program dalam RKA PD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	5 — x 100% =100 % 5	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD, sebanyak 5 program.</li> <li>- Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	5 — x 100% =100 % 5	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah Dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Belanja PD, sebesar Rp 23.084.289.306</li> <li>- Total Anggaran APBD, sebesar Rp 2.596.704.155.898,11</li> </ul>	23.084.289.306 ----- ----- X 100% 2.596.704.155.898,11  = 0,01%	
		Besaran belanja modal (realiasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Modal PD sebesar Rp 6.572.243.775,11</li> <li>- Total Realisasi Belanja PD, sebesar Rp 18.531.298.629,11</li> </ul>	6.572.243.775,11 ----- -- X 100% 29.042.908.348,77  = 35,47%	
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja pemeliharaan PD, sebesar Rp 668.087.306,00</li> <li>- Realisasi Belanja barang dan jasa PD, sebesar Rp. 6.468.522.638,00</li> </ul>	668.087.306 ----- X 100% 6.468.522.638  = 10,33%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja pemeliharaan PD, sebesar Rp. 668.087.306,00</li> <li>- Total Realisasi Belanja PD, sebesar Rp 29.042.908.348,77</li> </ul>	668.087.306 ----- - X 100% 18.532.198.629,11  = 3,61%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neraca</li> <li>- LRA</li> </ul>	Ada	

				Daerah(LRA, Neraca,Calk)	yang ada (LRA, Neraca,Calk)	- CaLK - LO - LPE		
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, tertuang Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Tahunan Tahun 2018 BA Nomor : 550/07/DISHUB/2019 tanggal 03 Januari 2019 dan KIB Tahun 2018	Ada	
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp.94.970.338.159,59 Sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 550/ /DISHUB tanggal 31 Desember 2018	0 — ----- ----X 100% 94.970.338.159,5 9 = 0%	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ Prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	Ada 2 (dua) Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:**

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
2. Urusan Statistik

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penguasaan serta pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi</li> <li>2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik</li> </ol> </li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program (Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah berbasis Teknologi Informasi, Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program Program Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian</li> </ul>	100% (2 / 2 x 100%)	100% (1 / 1 x 100%)	Program Nasional RKP 2018
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 13 SOP, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Penitipan Server SKPD</li> <li>2. SOP ttg Pemberian Remote Access</li> </ol>	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Data Sektoral Bidang Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur</li> </ol>	Ada	Ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						3. SOP ttg Pembuatan Sub Domain Website SKPD 4. SOP ttg Pembuatan Website SKPD 5. SOP ttg Pembuatan E-Mail Resmi Pemerintah 6. SOP ttg Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum Wilayah Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Frekuensi Radio 7. SOP ttg Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang 8. SOP ttg Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Local Wireline Wilayah Provinsi 9. SOP ttg Penyelenggaraan Konferensi Pers di Media Center Seksi Sarana Komunikasi 10. SOP ttg Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Provinsi 11. SOP ttg Penyelenggaraan Layanan Data Teknis Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Seksi Sarana Komunikasi 12. SOP ttg				

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Penyelenggaraan Pemutaran Film Media Center 13. SOP ttg Penyelenggaraan Peliputan Berita.				
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 (dua): PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung No.03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Prov. Kep. Bangka Belitung.</li> <li>- PERDA Prov Kep Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 (dua)</li> </ul>	- Tidak ada	- Ada	- Tidak ada	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang terisi sebanyak 13 orang</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 15 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang terisi sebanyak 1 orang</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 1 orang</li> </ul>	86,66%	100%	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Pranata Humas Arsiparis Pranata Komputer	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 42 personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 1 personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil</li> </ul>	42/ 5.329	1/ 5.329	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber data SKPD mengacu kondisi terakhir/updat e Tahun 2018</li> </ul>
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.</li> </ul>	84,61% ( 11 / 13 x 100%)	100% ( 1 / 1 x 100%)	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 13 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 1 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.</li> </ul>	86,66% ( 13 / 15 x 100%)	100% ( 1 / 1 x 100%)	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1</li> </ul>	100% (2 / 2 x 100%)	100% (1 / 1 x 100%)	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</li> </ul>	100% (2 / 2 x 100%)	100% (1 / 1 x 100%)	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</li> <li>- Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.</li> </ul>	100% (2 / 2 x 100%)	100% (1 / 1 x 100%)	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar Rp 15.855.994.077</li> <li>- Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.596.704.155.898,11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar Rp 15.855.994.077</li> <li>- Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.596.704.155.898,11</li> </ul>	Rp 15.855.994.077 / 2.596.704.155.898,11= 0,61%	Rp 15.855.994.077 / 2.596.704.155.898,11= 0,61%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 2.361.735.600</li> <li>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 15.855.994.677</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 2.361.735.600</li> <li>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 15.855.994.677</li> </ul>	2.361.735.600 / 15.855.994.677 =14,89%	2.361.735.600 / 15.855.994.677 =14,89%	Tidak Ada Pemisahan Belanja Modal

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 215.469.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.7.382.651.161	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 215.469.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.7.382.651.161	215.469.000/7.382.651.161 = 2,91%	215.469.000/7.382.651.161 = 2,91%	Tidak ada pemisahan Belanja Pemeliharaan
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 215.469.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 15.855.994.677	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 215.469.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 15.855.994.677	215.469.000 / 15.855.994.677 = 1,35%	215.469.000 / 15.855.994.677 = 1,35%	Tidak ada pemisahan Belanja Pemeliharaan
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. LPE 2. LRA 3. CalK 4. LO 5. Neraca	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. LPE 2. LRA 3. CalK 4. LO 5. Neraca	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan Laporan Keuangan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2018	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2018	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8	<b>PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Pengumuman (Papan Pengumuman, Baleho, Roll Banner) 2. Mobil keliling (Mobil unit Media Center) 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Tidak Ada	4 Jenis	Tidak Ada	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelayanan yang dilakukan oleh SKPD

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Daftar program Nasional :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM</li> <li>2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</li> <li>3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM</li> <li>4. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</li> <li>5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> </ol> </li> </ul>	1. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 2. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro  2 ---- x 100% = 40 % 5	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yang terdiri dari:  1. SOP Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi 2. SOP Penyelenggaraan Pengawasan Koperasi 3. SOP Penyelenggaraan Penilaian Koperasi 4. SOP Penyelenggaraan Pendataan Koperasi 5. SOP Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM	Ada 12 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						6. SOP Pengolahan Data CSR / PKBL 7. SOP Calon Penerima Bansos Kementerian 8. SOP Pengolahan Data Bansos SKPD-SKPD 9. SOP Pengolahan Data KUR 10. SOP Calon Peserta Program Bantuan LPDB 11. SOP Pengolahan Data NRB 12. SOP Pengolahan Data Sarana Pemasaran		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Pranata Humas - Instruktur Muda	Ada	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 43 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	$\frac{43}{5.329} \times 100\% = 0,81\%$	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 18 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.	$\frac{18}{20} \times 100\% = 90\%$	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen 100%	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 5 program.	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program.	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 17.763.527.460 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp2.596.704.155.898,11	$\frac{\text{Rp } 17.763.527.460}{\text{Rp } 2.596.704.155.898,11} \times 100\% = 0,68\%$	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp638.623.400 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp16.849.063.196	$Rp\ 638.623.400 \times 100\% = 3,79\%$ $Rp\ 16.849.063.196$	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp431.801.945 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp10.458.538.170	$Rp\ 431.801.945 \times 100\% = 4,13\%$ $Rp10.458.538.170$	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp431.801.945 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp16.849.063.196	$Rp\ 431.801.945 \times 100\% = 2,56\%$ $Rp16.849.063.196$	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. LO 4. LPE 5. CALK	Ada sebanyak 5 Jenis : 1. LRA 2. Neraca 3. LO 4. LPE 5. CALK	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Sebutkan jenis dokumennya: 1. KIB 2. BA Rekonsiliasi Asset	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp15.672.019.404	$\frac{0}{Rp15.672.019.404} \times 100\% = 0\%$	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman  2. Leaflet (kantong belanja)	Jumlah sebanyak 2 jenis.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan: survey kepuasan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM	Ada	



**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** PENANAMAN MODAL

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	ada 2 Jenis yang terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Perizinan 2. SOP Penanganan Layanan Pengaduan	Ada 2 SOP	
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	100 %	1. Perda Nomor 8/2015 tentang Pelayanan Publik 2. Perda Nomor 18/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov.Kep.Babel 3. Perda Nomor 7/2017 tentang Penyelenggaraan PTSP 4. Perda Nomor 5/2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								Berinvestasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 22 jabatan	95,45 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada, yaitu : 1. Fungsional Penerjemah (2 org) 2. Fungsional Pranata Humas (1 org) 3. Fungsional Pranata Komputer (1 org) 4. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (1 org)	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 54 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5332 personil 54 ----- x 100 % = 1,01% 5329	1,01 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	85,71 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 22 jbt.	95,45 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 (tiga) Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total anggaran APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 9.290.578.951,- - Total anggaran APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	0,36 %	Mengacu APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 101.944.900,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.896.779.083,-	1,15 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.813.381.870,-	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.896.779.083,-	0 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (N eraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. LO 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Ada 5 Jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada, Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Semester II TA 2018.	Ada	
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 3.251.048.900,-	0 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman (banner, running text, spanduk, plang penunjuk arah) 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media (Website BPPTPM)	4 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat per responden dan per unsur pelayanan.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

PROVINSI :KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	60%	Programnya: 1) Program Kebijakan dan Manajemen Olahraga 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	SOP terdiri dari : a. Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda c. Pengawasan Olahraga	Ada	
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- Ada	100%	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 14 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 14 Jabatan	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	- Jabatan yang ada sebanyak 1 Jabatan (Pranata Humas)	100%	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD, sebanyak 44 PNS personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5329 PNS personil	0,825%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 14 orang	92,85%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jabatan	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	3 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam renja SKPD sebanyak 4 program - Program renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 4 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 4 program	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 4 program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 4 program	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran (realisasi)	13	Alokasi anggaran SKPD terhadap total belanja SKPD/APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total belanja/realisasi APBD x 100%	- Total alokasi anggaran SKPD, sebesar Rp 17.035.980.881,00 - Total alokasi APBD, sebesar Rp. 2.363.703.681.501.80,-	0,7207 %	
		Besaran belanja modal (realisasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja modal SKPD, sebesar Rp. 268.795.000,00,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 16.096.849.364.00,-	1,669 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 423.154.500,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 15.673.694.864,-	0,026%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 423.154.500,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 15.673.694.864,-	0,014%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. LO 5. LPE	Ada 5 Jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	Rp. 0,- Rp. 108.998.494.811,-	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	- Papan Pengumuman - Baleho	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak ada	



**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:**

1. URUSAN KEBUDAYAAN
2. URUSAN PARIWISATA

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh PD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan PD, sebanyak 0 program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan PD, sebanyak 2 program yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</li> <li>2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</li> </ol> </li> </ul>	0%	66%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada banyak 3 SOP yang terdiri dari: 1.SOP ttg Registrasi Cagar Budaya 2.SOP ttg Misi Kesenian 3.SOP ttg Pendaftaran Warisan BudayaTak Benda	Ada, 10 SOP bidang Pariwisata: 1. SOP ttg Layanan Informasi Pariwisata Melalui Web 2. SOP ttg Pendataan Kunjungan Kerja 3. SOP ttg Partisipasi Event Promosi Pariwisata 4. SOP ttg Peningkatan Pencitraan Pariwisata Melalui Bahan Promosi Pariwisata 5. SOP ttg Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata 6. SOP ttg Kegiatan Wisata Kuliner 7. SOP ttg Pemilihan Putra Putri Kepariwisataaan 8. SOP ttg Izin Daya Tarik	Ada	Ada	Sesuai urusan.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							Wisata Lintas Kab/Kota 9. SOP ttg Tand Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kab/Kota 10.SOP ttg Penyusunan Data Base Kelompok Sadar Wisata ( Pokdarwis, berbasis E-CBT)			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMENTtg SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMENTtg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMENTtg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 Buah - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 buah	- PERDApelaksanaansebanyak 1 buah - PERDA yang seharusnya, sebanyak1 buah	100%	100%	Undang-undang tentang Kebudayaan belum disahkan oleh DPR RI sementara UU Cagar Budaya belum diturunkan PP kelengkapan hukum lainnya
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisianstruktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagijumlahjabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 jabatan - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jabatan	- Jabatan yang terisi sebanyak 15 jabatan - Jabatan yang ada sebanyak 15 jabatan	100%	100%	-
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Jabatan Fungsional Teknis: - Penerjemah - Pranata Humas - Pranata Komputer	-	Ada 7 orang	-	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS PD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan Kebudayaan PD , sebanyak 30 orang -Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 orang	PNS yang menangani urusan pariwisata sebanyak 29 orang Total PNS Provinsi 5.329 orang	0,56%	0,54%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat PD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim sebanyak 13 orang Pejabat yang ada sebanyak 15 orang	100%	86,67%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat PD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jabatan	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 orang Jabatan yang ada sebanyak 15 jabatan	100%	100%	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di PD -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan PD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA-PD 4. DPA-PD 5. DPPA-PD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak jenis, yg terdiri dari: 1. RIPPAPROV 2. RENSTRA PD 3. RENJA PD 4. RKA-PD 5. DPA- PD 6. DPPA-PD	Ada	Ada	-
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program PD yang diakomodir dalam RENJA PD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PD dibagi jumlah program dalam RENJA PD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja PD, sebanyak 1 program. - Program Renja PD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja PD, sebanyak 3 program. - Program RenjaPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	100%	100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA PD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PD dibagi jumlah program dalam RKA PD x 100%	- Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA PD, sebanyak 1 program.	- Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA PD, sebanyak 3 program.	100%	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD dibagi jumlah program dalam DPA PD x 100%	- Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA PD, sebanyak 1 program.	- Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA PD, sebanyak 3 program.	100%	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja PD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total APBD x 100%	Total realisasi Belanja PD sebesar Rp. 20.566.172.675,- sedangkan anggaran belanja total PD sebesar Rp. 23.982.257.860.16,- Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	Total realisasi Belanja PD sebesar Rp. 20.566.172.675,- sedangkan anggaran belanja total PD sebesar Rp. 23.982.257.860.16,- Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	0.79%	0,79%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja PD x 100%	Belanja Modal PD sebesar Rp. 552.795.801,- sedangkan realisasi Rp. 540.428.300,- Total Belanja PD Rp. 23.982.257.860,16,-	Belanja Modal PD sebesar Rp. 552.795.801,- sedangkan realisasi Rp. 540.428.300,- Total Belanja PD Rp. 23.982.257.860,16,-	2,31%	2,31%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa PD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan PD sebesar Rp. 548.003.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 488.120.760,- Total Belanja Barang dan Jasa PD sebesar Rp. 15.387.606.199,-	Total Belanja Pemeliharaan PD sebesar Rp. 548.003.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 488.120.760,- Total Belanja Barang dan Jasa PD sebesar Rp. 15.387.606.199,-	3,56%	3,56%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja PD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja PD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan PD sebesar Rp. 548.003.000 sedangkan realisasi sebesar Rp. 488.120.760,- Total Belanja PD sebesar Rp. 23.982.257.860.16,-	Total Belanja Pemeliharaan PD sebesar Rp. 548.003.000 sedangkan realisasi sebesar Rp. 488.120.760,- Total Belanja PD sebesar Rp. 23.982.257.860.16,-	2,29%	2,29%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan PD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK 4. LO 5. LPE	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK 4. LO 5. LPE	Ada	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asetPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asetPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Berita Acara Rekonsiliasi Asset 2. Buku Inventaris Barang 3. Kartu Inventaris Barang	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya 1. BA Rekonsiliasi 2. Buku Inventaris Barang 3. Kartu Inventaris Barang	Ada	Ada	
		Penggunaan AsetSKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh PD	Jumlah aset yang tidak digunakan PD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai PD, Rp. 7.686.040.869,-	- Aset yang tidak digunakan Rp. 0,- - Aset yang dikuasai PD Rp. 7.686.040.869,-	0%	0%	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Mobil bioskop keliling	Sebutkan jenisnya 1. website 2. mobil TIC 3. leaflet dan peta 4. video pariwisata 5. Alat Informasi mandiri (AIM) 6. Tourist Information Center (TIC) 7. Baleho	Ada	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pasar Pariwisata	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pasar Pariwisata	-	-	

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Perpustakaan
2. Urusan Kearsipan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program</li> </ul>	50% (1 / 2 x 100%)	0% (0 / 0 x 100%)	Program Nasional RKP 2018
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Prosedur Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka</li> <li>2. SOP ttg Prosedur Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pustakawan</li> <li>3. SOP ttg Pengembangan Kinerja SDM Perpustakaan</li> <li>4. SOP ttg Pelaksanaan Pendataan SDM Perpustakaan</li> <li>5. SOP ttg Penerbitan Literatur Sekunder BID</li> </ol>	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Dinamis</li> <li>2. SOP ttg Layanan Arsip inaktif</li> </ol>	Ada	Ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- Tidak ada	- Tidak ada	- Tidak ada	- Tidak ada	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	- Jabatan yang terisi sebanyak 6 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 6 orang	100%	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Pustakawan Penerjemah Pranata Komputer	Arsiparis	Ada	Ada	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 30 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 27 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	30/5.329	27/5.329	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.	90,9% ( 10 / 11 x 100%)	100% ( 6 / 6 x 100%)	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt.</li> </ul>	100% ( 11 / 11 x 100%)	100% ( 6 / 6 x 100%)	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2</li> </ul>	100% (2 /21 x 100%)	100% (2 /26 x 100%)	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</li> </ul>	100% (2 /2 x 100%)	100% (2 /2 x 100%)	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.</li> </ul>	100% (2 /2 x 100%)	100% (2 /2 x 100%)	



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar Rp 10.511.840.990,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.596.704.155.898,11		Rp 10.511.840.990,00 / 2.596.704.155.898,11 = 0,41%		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 45.100.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 10.511.840.990		45.100.000 / 10.511.840.990,00 = 0,43%		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 59.830.363,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.3.084.199.571,00		59.830.363,00 / 3.084.199.571,00 = 1,94%		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 59.830.363,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 10.511.840.990,00		59.830.363 / 10.511.840.990,00 = 0,57%		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. LPE 2. LRA 3. Calk 4. LO 5. Neraca	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. LPE 2. LRA 3. Calk 4. LO 5. Neraca	Ada	Ada	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2018	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2018	Ada	Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Ada	Ada	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Website 3. Mobil perpustakaan keliling 4. Leaflet 5. Buku panduan	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Website 3. Mobil masyarakat sadar arsip	5 Jenis	3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Jenis Data	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	<a href="#">Program Nasional [1]</a> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	- Jumlah program nasional (RKP) Sebanyak 2 Program - Jumlah program nasional yg dilaksanakan SKPD sebanyak 2 Program	2 ----- x 100% = 100% 2
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)	Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD	Ada (SOP) Perizinan Kapal
2	KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	- Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2 - Perda yang seharusnya sebanyak 2	2 ----- x 100% = 100% 2
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	- Jabatan yang ada sebanyak 28 - Jabatan yang harus ada sebanyak 29	28 ----- x 100% = 96,55% 29
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada yaitu : 1. Pengawas Perikanan ( 16 Orang) 2. Pranata Humas (1 Orang) 3. Pengawas Benih (1 Orang)	Ada (18 orang)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	- PNS SKPD, sebanyak 97 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	97 ---- x 100% =1,82 % 5329

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Jenis Data	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 28 - Pejabat yang ada, sebanyak 28 orang	28 ----- x 100% =96.43% 28
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 28 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 28 jabatan	28 ----- x 100% =100% 28
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD	- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD	- Renstra - Renja - RKA (3 jenis dokumen)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 program	9 ----- x 100% = 100% 9
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 9 program	9 ----- x 100% =100% 9
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program	9

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Jenis Data	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
					- Program dalam DPA SKPD sebanyak 9 program	----- x 100% =100% 9
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	- Total anggaran SKPD sebesar Rp. 34.093.486.989 - Total APBD sebesar Rp.2.596.704.155.898,11	34.093.486.989 ----- x 100% 2.596.704.155.898,11 1,313%
		Besaran belanja modal (realisasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.930.936.722 - Total belanja SKPD, sebesar Rp.24.861.237.818	930.936.722 -----x 100% 24.861.237.818 3,74%
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 423.352.500,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 23.930.301.096	423.352.500 -----x 100% 23.930.301.096 1,77%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 423.352.500,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.24.861.237.818	423.352.500 -----x 100% 24.861.237.818 1,70%
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)	Laporan Keuangan (ada 5 jenis)	Komponen yag ada: - LRA - Neraca

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Jenis Data	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- LO</li> <li>- LPE</li> <li>- CALK</li> </ul>
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Daftar barang atau asset SKPD yang aktif	Ada (dalam berita acara rekonsiliasi aset)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0</li> <li>- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.115.742.976.459,87</li> </ul>	0 ----- x 100% 115.742.976.459,87 0%
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papan Pengumuman</li> <li>- Pos Pengaduan</li> <li>- Leaflet</li> <li>- Mobil keliling</li> <li>- Pengumuman di Mass Media</li> </ul>	Sebanyak 4 Jenis, yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papan Pengumuman</li> <li>- Leaflet Produk Perikanan</li> <li>- Mobil Pengawas Perikanan</li> <li>- Website</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Papan Pengumuman</li> <li>- Leaflet Produk Perikanan</li> <li>- Mobil Pengawas Perikanan</li> <li>- Website</li> </ul>
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat	Dokumen kuesioner dan nama petugasnya	Tidak Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS PERTANIAN  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** PERTANIAN

	ASPEK	FOKUS		IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<u>Program Nasional</u> <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 6 program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan sebanyak 6 program	100%	Data terlampir
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Bidang - Pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis perkebunan - Pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura - Pelayanan perizinan dan kesehatan hewan dan kesmavet Peternakan - Pengembangan teknologi Balai Benih - Pengendalian hama Balai Proteksi - Pengawas Mutu Benih Balai BPSMB	Ada 6	Data Terlampir
2	<b>KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	PERDA pelaksana sebanyak 0  PERDA yang seharusnya sebanyak 0	100%	Tidak ada
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang terisi sebanyak 30  Jabatan yang harus ada 33	90,90%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila ada sebutkan nama bidang/ jabatan Fungsional: - Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Pengawas Benih Tanaman - Penyuluh Pertanian	Ada, 51 orang	Data Terlampir

	ASPEK	FOKUS		IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawas Mutu Pakan</li> <li>- Pengawas Bibit Ternak</li> <li>- Paramedik Veteriner</li> <li>- Medik Veteriner</li> <li>- Pranata Komputer</li> <li>- Analisis Pasar Hasil pertanian</li> <li>- Statistisi</li> <li>- Perencana Pertama</li> <li>- Pustakawan</li> <li>- Pengawas Bibit Tanaman</li> </ul>		
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS yang menangani urusan perangkat daerah sebanyak 131 personil</li> <li>- Jumlah PNS di Provinsi 5.329</li> </ul>	2,45%	Data Terlampir
			7	Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi syarat Diklat PIM sebanyak 24 orang</li> <li>- Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 30 orang</li> </ul>	80 %	Data Terlampir
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan 30 orang</li> <li>- Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 30 orang</li> </ul>	100 %	Data Terlampir
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD <ul style="list-style-type: none"> <li>- RENSTRA SKPD</li> <li>- RENJA SKPD</li> <li>- RKA-SKPD</li> <li>- DPA</li> </ul>	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD <ul style="list-style-type: none"> <li>- RENSTRA SKPD</li> <li>- RENJA SKPD</li> <li>- RKA-SKPD</li> <li>- DPA</li> </ul>	Ada 4 (empat), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RENSTRA SKPD</li> <li>- RENJA SKPD</li> <li>- RKA-SKPD</li> <li>- DPA</li> </ul>	Ada : 4 jenis dokumen	Dok Terlampir



	ASPEK	FOKUS		IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam Renja Perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program</li> <li>- Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 8 Program</li> </ul>	100%	Data Terlampir
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 program  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 program	100 %	
		Jumlah Program RENJA Perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 8 program  Jumlah program dalam DPA perangkat daerah sebanyak 8 program	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Anggaran perangkat daerah terhadap total belanja APBD	13	Anggaran SKPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.23.236.748.807,-  Total Belanja APBD sebesar Rp.38.565.340.627,-	0,602%	
		Realisasi belanja modal terhadap total belanja Perangkat daerah	14	Realisasi Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Realisasi Belanja modal Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.650.939.000,-  Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.23.236.748.807,-	0,157 %	

	ASPEK	FOKUS		IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan (Realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 31.000.000,- Total Belanja barang dan jasa perangkat daerah sebesar Rp22.005.950.420,-	0,001 %	
			16	Total Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Realisasi Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Realisasi Belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp 30.587.900,- Total Realisasi Belanja SKPD sebesar Rp.38.565.340.627,-	0,0007%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk, LO)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk, LO)	Apabila ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 4 jenis, sbb: LRA Neraca Calk LO	Ada : - Neraca - CaLK - LRA - LO	Data Terlampir
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya	Ada, dokumen BA Hasil Rekonsiliasi Asset	Data Terlampir
		Penggunaan aset oleh SKPD	19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD terhadap total aset SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD dibagi total aset yang dikuasai PD x 100%	Aset yang tidak digunakan sebesar Rp 0 Aset yang dikuasai PD sebesar Rp. 0	0,00 %	
8	<b>PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Leaflet - Mobil keliling - Kotak saran - Website dinas	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Leaflet - Mobil keliling - Kotak saran - Website dinas	Sebutkan jenisnya: - Papan Pengumuman - Leaflet - Mobil keliling - Kotak saran - Website dinas	Ada 5 jenis	Data Terlampir
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil survey kepuasan masyarakat	Apabila Ada sebutkan Hasil survey kepuasan masyarakat tentang Kegiatan Perluasan Sawah	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS KEHUTANAN  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** KEHUTANAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (1) (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional, sebanyak 4 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 4 program</li> </ul>	100 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi diatas 2.000 m3/tahun s.d 6.000 m3/tahun.</li> <li>2. Penyadaran Masyarakat Terhadap Hukum bidang Kehutanan.</li> <li>3. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</li> <li>4. Perlindungan Hutan Terhadap Tindak Pidana Kehutanan.</li> </ol>	Ada 4 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 PERDA, yaitu : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Pelaksanaan atas PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS)</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 PERDA</li> </ul>	100 %	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 47</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 49</li> </ul>	95,92%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					100%			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 1. Polisi Hutan (31) 2. Penyuluh Kehutanan (32) 3. Pengendali Ekosiste, Hutan (9)	Ada, 3 Kelompok Jabatan Fungsional	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 186 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	3,49%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 37 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 47 org.	78,72 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 47 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 47 jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA- Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 program program.		2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 34.602.737.349,00 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	1,18%	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.805.800.000,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 34.602.737.349,00	8,11 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.681.373.520,00,- - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.553.689.563,00,-	6,46%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 681.373.520,00,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 34.602.737.349,00	1,97%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk, Laporan Operasional)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. Calk 4. Laporan Operasional 5. LPE	Ada sebanyak : 5 Jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, 1. Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0</li> <li>- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.420.847.303,48</li> </ul>	0%	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dim anfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/ dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 15 yang terdiri dari:  1. SOP Penerbitan Surat Persetujuan RKAB. 2. SOP Penerbitan Surat Persetujuan rencana Reklamasi (RR) 3. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk surat Izin Pengusahaan Air Tanah. 4. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk surat Izin Pemakaian Air Tanah. 5. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis Perpanjangan surat Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah. 6. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk surat Izin Penggalian Air Tanah. 7. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk surat Izin Pengeboran Air Tanah. 8. SOP Penerbitan Surat Pengesahan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang. 9. SOP Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)	Ada 15 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						10. SOP Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan. 11. SOP Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian. 12. SOP Penerbitan Izin Operasional untuk Kelayakan Operasi Kapal Keruk Pertambangan dan Kapal Isap Pertambangan. 13. SOP Penerbitan Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral. 14. SOP tentang Ketenagalistrikan 15. SOP Pembuatan Peta		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 PERDA - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 PERDA	100%	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 35 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 41	85.4%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	- Inspektur listrik - Penyelidik bumi - Arsiparis - Inspektur Tambang	Ada	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 121 PNS personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	2,28%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 36 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 38org.	95 %	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 89 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 41 jbtn.	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	3 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.  Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program.	100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 45 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 19.383.958.045.00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 109.635.515.332,24	17,7%	
		Besaran belanja modal (Realisasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 4.390.487.928,40 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 29.086.373.208,40	15,09%	
		Besaran belanja pemeliharaan (Realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 196.000.000.00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.9.368`508.000.00	2.092%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (re6alisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 196.000.000.00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 25.086.373.208.40	<b>0,781 %</b>	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LO 3. LRA 4. LPE 5. CaLK	Ada sebanyak 5 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : 1. Laporan Buku Inventaris Tahunan. 2. Laporan kartu inventaris barang (KIB) A,B,C,D , E dan F 3. Laporan rekapitulasi buku inventaris 4. Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah 5. Daftar Pengadaan Barang	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp.52.693.629.724,00		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	Jumlah yang ada sebanyak 1 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	Tidak dilakukan survey kepuasan masyarakat.	

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. URUSAN PERINDUSTRIAN
2. URUSAN PERDAGANGAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian (1)	Urusan Perdagangan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA  AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 (tiga) program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 (tiga) program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional, sebanyak 4 (empat) program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 (tiga) program</li> </ul>	100%	75 %	Program Nasional RKP 2018
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 (dua) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelayanan Klinik Kemasan</li> <li>2. SOP Penyuluh dan Pendampingan Pelaku Usaha Oleh PFPP</li> </ol>	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 (dua) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Mekanisme Penerbitan Resi Gudang Lada</li> <li>2. SOP Surat Keterangan Asal</li> </ol>	Ada 2 (Dua) SOP	Ada 2 (Dua) SOP	Sesuai urusan.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian (1)	Urusan Perdagangan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- Tidak ada	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 1. PERDA NO 2 TAHUN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. PERDA NO 3 TAHUN 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	0 %	100%	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 (delapan) - Jabatan yang harus ada, sebanyak 8 (delapan)	- Jabatan yang ada sebanyak 17 (tujuh belas) - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 (tujuh Belas)	100%	100%	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Penyuluh Perindag muda sebanyak 4 (empat) orang 2. Penyuluh Perindag Pertama sebanyak 4 (empat) orang 3. Penyuluh Perindag Pelaksana sebanyak 2 (dua) orang	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama sebanyak 3 (tiga) orang 2. Penguji Mutu Barang Ahli Mahir sebanyak 2 (dua) orang 3. Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang 4. Statistisi Pelaksana Lanjutan 1 (satu) orang	Ada	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian (1)	Urusan Perdagangan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	PNS, sebanyak 26 (dua puluh enam) Personil Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 (lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan) personil	PNS, sebanyak 70 (tujuh puluh) Personil Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 (lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan) personil	0,49%	1,31%	- Sumber data SKPD mengacu kondisi terakhir/update Tahun 2018
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 7 org. Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 org. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	87,5 %	82,35%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	100 %	100 %	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD  -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 7 (Tujuh) jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2017-2022 2. RENJA 2018 3. RENJA perubahan 2018 4. RKA 2018 5. RKAP 2018	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 7 (Tujuh) jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2017-2022 2. RENJA 2018 3. RENJA perubahan 2018 4. RKA 2018 5. RKAP 2018	7 jenis dokumen	7 jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian (1)	Urusan Perdagangan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						6. DPA 2018 7. DPPA 2018	6. DPA 2018 7. DPPA 2018			
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 2 (dua) program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 (dua) Program	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 (empat) program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4(empat) Program	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 (Dua) program.  Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 2 (dua) program.	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 (empat) program.  Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 (empat) program..	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 (dua) program.  Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 2 (dua) program.	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 (empat) program.  Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 (empat) program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian (1)	Urusan Perdagangan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 4.997.308.500 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.596.704.155.898,11	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 18.334.865.540 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.596.704.155.898,11	0,19%	0,71 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.21.793.924.905,00	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 580.750.000,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.21.793.924.905,00	0 %	2,67 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Realisasi belanja Pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. - 10.462.675.663,00	- Realisasi belanja Pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 75.375.400,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. - 10.462.675.663,00	0%	0,72 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 21.793.924.905,00	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 75.375.400,00 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 21.793.924.905,00	0%	0,35%	Tidak ada pemisahan Belanja Pemeliharaan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian (1)	Urusan Perdagangan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 (lima) jenis, sbb: 1. LRA 2. LO 3. LPE 4. NERACA 5. CALK	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 (lima) jenis, sbb: 1. LRA 2. LO 3. LPE 4. NERACA 5. CALK	Ada sebanyak 5 jenis :	Ada sebanyak 5 jenis :	Tidak ada pemisahan Laporan Keuangan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada,Sebutkan jenis dokumennya. 1. Berita Acara Rekonsiliasi data barang milik daerah tahunan	Apabila Ada,Sebutkan jenis dokumennya. 1. Berita Acara Rekonsiliasi data barang milik daerah tahunan	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	Aset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 Aset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.385.331.266,50	Aset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 Aset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.385.331.266,50	0%	0%	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mass Media.	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mass Media	Jumlah sebanyak 3 Jenis.	Jumlah sebanyak 3 Jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian (1)	Urusan Perdagangan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Mass Media						
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	Tidak ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

## LAMPIRAN I.2 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	$\frac{2}{2} \times 100 \% = 100 \%$	Program Nasional (terlampir)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jika ada	21 Standard Operational Procedure (SOP) Satpol PP Prov. Kep. Babel	21 Standard Operational Procedure (SOP) Satpol PP Prov. Kep. Babel, yaitu: 1. SOP Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3. SOP Patroli 4. SOP Penjagaan Gedung dan Aset Penting 5. SOP Penjagaan Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemda 6. SOP Penjagaan Rumah Dinas Pejabat Pemda (Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah) 7. SOP Penjagaan Tempat Kedatangan dan Tujuan Tamu VVIP 8. SOP Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting 9. SOP Penjagaan Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah	Standard Operational Procedure (SOP) Satpol PP Prov. Kep. Babel (Terlampir)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
							10. SOP Penjagaan Tempat Upacara dan Acara Penting 11. SOP Pelayanan Pengaduan 12. SOP Penegakan Peraturan Daerah (Non Yustisial dan Yustisial) 13. SOP Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 14. SOP Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 15. SOP Operasional dalam Penegakan Perda dan Perkada 16. SOP Operasional dalam Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan Tugas PPNS 17. SOP Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran bagi Satlinmas 18. SOP Pemantauan, Pelaporan Kejadian Bencana/Peristiwa Lainnya dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran 19. SOP Mobilisasi/Penugasan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20. SOP Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 21. SOP Peningkatan Kapasitas/Diklat/Sosialisasi/Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 Perda</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 Perda</li> </ul>	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak =17 jabatan</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak =17 jabatan</li> </ul>	$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada, 2 Jabatan Fungsional Tertentu: 1) JFT Pranata Humas 2) JFT Pol PP		
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS SKPD sebanyak 81 personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil</li> </ul>	$\frac{81}{5.329} \times 100\% = 1.519\%$	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.</li> </ul>	$\frac{16}{17} \times 100\% = 94.12\%$	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan</li> </ul>	$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 4 program	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 18.055.895.385,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.598.989.042.215,22	$\frac{18.055.895.385}{2.598.989.042.215,22} \times 100\% = 0.69\%$	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 409.030.000,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 17.334.519.488,00	$\frac{409.030.000}{17.334.519.488} \times 100\% = 2.36\%$	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 218.470.200,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.468.655.534,00	$\frac{218.470.200}{5.468.655.534} \times 100\% = 3.99\%$	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 218.470.200,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 17.334.519.488,00	$\frac{218.470.200}{17.334.519.488} \times 100\% = 1.26\%$	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: - LRA - Neraca - LO - LPE - CaLK	Ada sebanyak 5 jenis : - LRA - Neraca - LO - LPE - CaLK	
7	<b>PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Sem II per 31 Des 2018	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Sem II per 31 Des 2018	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,00 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 5.741.604.634 ,00	0 %	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya -Papan Pengumuman -Pos Pengaduan -Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 3 jenis. -Papan Pengumuman -Pos Pengaduan -Mobil Keliling	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak ada	



**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program	0	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masin urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian/Survey 2. SOP ttg Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas, LSM dan Yayasan. 3. SOP ttg Bantuan Keuangan bagi Partai Politik.	Ada 3 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0%	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 Jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 Jabatan	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah <sup>1</sup>



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama jabatan fungsional Pranata Komputer.	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 38 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak personil	5,329%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	94,11	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan.	94,11 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA/DPA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENJA OPD 2. RENJA PERUBAHAN OPD 3. RKA/DPA OPD 4. RKAPD/DPPA OPD	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program.</li> </ul>	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 8.662.036.468,00</li> <li>- Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 9.394.584.060,11</li> </ul>	92,20	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (Total anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.500.000,-</li> <li>- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.662.036.468,00</li> </ul>	0,18 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 97.730.400 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp.3.167.297.841	3,09 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 97.730.400- Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.662.036.468	1,13 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, CALK, LPE, LO)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. LPE 5. LO	Ada  sebanyak 5 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, CaLK, LRA, LPE,LO)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp 0	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/ Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								digunakan /dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi 2. Web.site Kesbangpol	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** SEKRETARIAT DAERAH  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:**

1. PEMERINTAHAN
2. PERTANAHAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional, sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 4 program	- Jumlah program Nasional, sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program	100%	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 43 yang terdiri dari:  1. SOP ttg Registrasi Perda Kabupaten/Kota 2. SOP ttg Pelaksanaan Pengajian Rutin di Kantor Gubernur 3. SOP ttg Penyelenggaraan Pelaksanaan Peninjauan Lapangan 4. SOP ttg Penomoran SK Gub/SK Sekda/Pergub/MOU	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:  1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Ada 43 SOP	Ada ----- SOP / Tidak Ada :	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	
						5. Dst-----				
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 1</li> <li>- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak -----</li> <li>- PERDA yang sehatusnya, sebanyak -----</li> </ul>	100%	100%	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 119</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 2</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2</li> </ul>	98%	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencana Muda</li> <li>2. Arsiparis</li> <li>3. Pranata Komputer</li> <li>4. Pranata Humas</li> <li>5. Pustakawan</li> <li>6. Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>7. Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ol>	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Ada	Tidak Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 323 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	- PNS, sebanyak 4 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil	0.060%	0,0008%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 121 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 121 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak -2 org.	100%	100%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 121 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 121 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.	100%	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 25 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 26	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	96,15%	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 25 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 25 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 1 program.	100%	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 25 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 25 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 1 program.	100%	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 123.817.123.867 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 108.400.000,- - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	5,06%	0,0041%	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.774.238.300 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 113.523.817.812	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.-----	5,84%	0 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.078.367.375 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 61.488.482.705	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. -	24,27%	0%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.078.367.375 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 113.523.817.812	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	9,82%	0%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. NERACA 3. CALK	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. LRA 2. NERACA 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Pemerintahan	Urusan (2) Pertanahan	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah}}{\text{dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp . 3.162.263 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 407.403.735.727	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0	0,0008%	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 5 jenis.	Jumlah sebanyak 5 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Ada/tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** SEKRETARIAT DPRD  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** PEMERINTAHAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD tidak ada</li> </ul>	0/4* 100 % = 0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 33 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Pengajuan SPM Tambahan Penghasilan Pegawai</li> <li>2. SOP ttg Analisis Perencanaan Pembuatan Renja Tahunan</li> <li>3. SOP ttg Analisis Perencanaan Pembuatan RESTRA 5 Tahunan</li> <li>4. SOP ttg Analisis Perencanaan Penginputan Sirup dan Perubahan Sirup</li> <li>5. SOP ttg Pengajuan SPM GU/BL</li> <li>6. SOP ttg Pengajua SPM Gaji Pegawai</li> <li>7. SOP ttg Pengajuan SPM Pencairan BPOP</li> <li>8. SOP ttg Penyusunan Laporan Keuangan</li> <li>9. SOP ttg Pengajuan SPM Uang Makan Pegawai</li> <li>10. SOP ttg Pencairan Dana UP Kegiatan</li> <li>11. SOP ttg layanan sirkulasi di perpustakaan khusus</li> <li>12. SOP ttg Penyusunan Daftar Usulan</li> </ol>		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Kependidikan 13. SOP ttg Pengelolaan arsip aktif Sekretariat DPRD 14. SOP ttg Penanganan Surat Keluar 15. SOP ttg Penanganan Surat Masuk 16. SOP ttg Pengajuan Penghargaan Satyalencana Karya 17. SOP ttg Penyusunan Laporan Kehadiran PNS 18. SOP ttg Usulan Kenaikan Gaji Berkala 19. SOP ttg proses cuti pegawai 20. SOP ttg Penanganan Penyampaian Aspirasi Masyarakat DPRD Prov. Kep. Babel 21. SOP ttg Penyelenggaraan Kemitraan Dengan Wartawan 22. SOP ttg pemeliharaan sarana dan prasarana 23. SOP ttg penyusunan program kegiatan subbagian rumah tangga 24. SOP ttg Pemeliharaan gedung kantor 25. SOP ttg pengelolaan kendaraan dinas 26. SOP ttg evaluasi pelaksanaan program/kegiatan subbagian rumah tangga 27. SOP ttg penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan subbagian rumah tangga 28. SOP ttg Prolegda DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 29. SOP ttg pembuatan telaah/kajian hukum 30. SOP ttg pembuatan draft keputusan 31. SOP ttg pembahasan raperda inisiatif 32. SOP ttg pembahasan raperda dari eksekutif 33. SOP ttg penyusunan prolegda		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 1</li> <li>- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1</li> </ul>	100%	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 10</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 10</li> </ul>	10/10 X100% =100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arsiparis</li> <li>- Pustakawan</li> <li>- Pranata Humas</li> <li>- Perancang Peraturan Perundang-undang</li> </ul>	2 1 2 1	
4	<b>PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS SKPD , sebanyak personil 68</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak personil 5329</li> </ul>	68/5329x100% = 1,28%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak org 10</li> </ul>	8/10x100% = 80%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak jbt 10</li> </ul>	8/10x100% = 80%	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	100%	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3</li> </ul>	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	100%	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Realisasi Anggaran SKPD terhadap total belanja/realiasi APBD	Realisasi anggaran SKPD dibagi total belanja/realiasi APBD x 100%	- Total realisasi anggaran SKPD, sebesar Rp 104.260.179.765,65,- - Total APBD, sebesar Rp 2.363.703.681.501,80	4,41%	
		Besaran belanja modal (realiasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 2.097.263.400,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 85.620.836.956,00	2,45%	
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.985.512.250 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 75.387.735.628	2,63%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.985.512.250 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 85.620.836.956,00	2,32%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 4. LO 2. CALK 5. LPE 3. LRA	ada	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, berita acara rekonsiliasi barang milik daerah	ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp 53.280.872.798		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media Masa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di media masa	2	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	-	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** BADAN KEUANGAN DAERAH  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** PEMERINTAHAN

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	- Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi - jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 3 (tiga) SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Laporan pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran Pembantu 2. SOP ttg Pelaksanaan Pengumpulan data program kegiatan 3. SOP ttg Pangusulan Kenaikan Gaji Berkala	Ada 3 (tiga) SOP	
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 6, yaitu: a) Perda no 6 th 2018 ttg perubahan anggaran dan belanja daerah TA 2018 b) Perda no 4 th 2017 ttg perubahan atas perda Prov.Kep.Babel no.1 th 2011 ttg pajak daerah c) Perda no 15 th 2017 ttg APBD TA 2018 d) Perda no.09 th 2015 ttg perubahan kedua atas perda no 3 th 2012 ttg retribusi jasa usaha e) Perda no 10 th 2015 ttg perubahan atas Perda Prov.Kep.Babel no 2 th 2008 ttg pokok-pokok	100%	



No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						<p>pengelolaan keuangan daerah</p> <p>f) Perda no 01 tahun 2016 ttg pengelolaa Barang Milik Daerah</p> <p>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 6</p>		
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<p>- Jabatan yang ada sebanyak 57</p> <p>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 57</p>	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	<p>Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,</p> <p>1. JFT Pranata Humas (1 orang)</p> <p>2. JFT Arsiparis (1 orang)</p> <p>3. JFT Pranata Komputer (10 orang)</p>	12 orang	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<p>- PNS, sebanyak 268 Personil</p> <p>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil</p>	5,03%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<p>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 34 org.</p> <p>- Pejabat yang ada, sebanyak 57 org.</p>	59,64%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<p>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 57 org.</p> <p>- Jabatan yang ada, sebanyak 57 jbt.</p>	100%	

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 6 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 6 program.	100%	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 76.070.546.237,00 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11	2,93%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.040.082.200,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 70.111.412.243,62	4,33%	

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.197.302.166,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 16.464.677.679,00	7,28%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.197.302.166,00 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 70.111.412.743,62	1,70 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LPE 5. CaLK	Ada sebanyak 5 jenis	)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, yaitu:. - Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 45.773.973.273,00	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Ada 4 fasilitas/prasarana informasi, yaitu: 1) Papan Pengumuman 2) Mobil Keliling 3) Kotak saran 4) Pengumuman melalui Web bakudaprov.kep.babel.go.id	Jumlah sebanyak 4 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, berupa nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Unit Pelaksana Teknis Bakuda	ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI :** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN :** PERENCANAAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional , sebanyak ----- program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program</li> </ul>		Tidak ditetapkan jumlah program nasional pada RKP 2017.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 13 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah antarkabupaten/Kota (RKPD)</li> <li>2. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Lingkup Provinsi</li> <li>3. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/Kota</li> <li>4. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Antarkabupaten/Kota</li> <li>5. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Lingkup Provinsi</li> <li>6. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi</li> <li>7. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil Restra PD Provinsi</li> <li>8. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Provinsi</li> <li>9. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja PD</li> </ol>	Ada 13 SOP / <del>Tidak Ada</del> :	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						10. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Antar kabupaten/kota 11. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategisPD Lingkup Provinsi 12. SOP ttg Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan daerah Lingkup Provinsi (RKPD) 13. SOP ttg Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan jangka Menengah daerah Lingkup Provinsi (RPJMD)		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 ( Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	100%	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 22 - Perencana Muda - Perencana Pertama - Stastisi Pertama - Penerjemah Pertama - Pranata Komputer Muda - Pranata Komputer Pertama - Pranata Humas Pertama - Peneliti Pertama - Arsiparis Terampil Pelaksana	Ada/tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS SKPD, sebanyak 71 personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil</li> </ul>	$\frac{71}{5.329} \times 100\% = 1,332\%$	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 19 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.</li> </ul>	$\frac{19}{20} \times 100\% = 95\%$	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.</li> </ul>	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD	3 jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%mk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.</li> <li>- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program</li> </ul>	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 6 program.</li> </ul>	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 6 program.</li> </ul>	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 20.489.887.059,00</li> <li>- Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.596.704.155.898,11</li> </ul>	$\frac{20.489.887.059,00}{2.596.704.155.898,11} \times 100\% = 0,79\%$	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp 560.312.000,00</li> <li>- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.043.459.079,00</li> </ul>	$\frac{560.312.000,00}{17.043.459.079,00} \times 100\% = 3,29\%$	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.506.090.000,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.818.990.881,00	506.090.000,00 -----x 100% 8.818.990.881,00= 5,74 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Rp.506.090.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 20.489.887.059,00	506.090.000,00 -----x 100% 20.489.887.059,00 = 2,47 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: - LRA - Neraca - LO - LPE - CALK	Tidak Ada/ Ada  sebanyak 5 jenis :	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Buku Inventaris Gabungan.	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 21.207.376.202,00	0 ----- x 100% 21.207.376.202,00 = 0 %	/
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1 Papan Pengumuman 2 Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Mass Media (Website <a href="http://bappeda.babelprov.go.id">http://bappeda.babelprov.go.id</a> )	Jumlah sebanyak 3 jenis.	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	tidak ada	Ada/tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** PEMERINTAHAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional , sebanyak 4 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program</li> </ul>	25 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 21 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Penyiapan sarana dan prasarana ruang kelas</li> <li>2. SOP ttg Penyiapan sarana dan prasarana ruang pertemuan</li> <li>3. SOP ttg pengajuan usulan satya lancana</li> <li>4. SOP ttg Kenaikan gaji berkala</li> <li>5. SOP ttg Pelaksanaan diklat</li> <li>6. SOP ttg Pendaftaran peserta diklat</li> <li>7. SOP ttg Diklat prajabatan</li> <li>8. SOP ttg Diklat PIM III</li> <li>9. SOP ttg Diklat PIM Iv</li> <li>10. SOP ttg Analisis kebutuhan diklat</li> <li>11. SOP ttg Evaluasi pasca diklat</li> <li>12. SOP ttg Monitoring dan evaluasi kediklatan</li> <li>13. SOP ttg Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional</li> <li>14. SOP ttg Seleksi calon peserta diklat</li> </ol>	Ada 21 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						teknis dan fungsional 15. SOP ttg penanganan pelanggaran disiplin pegawai (lingkup PD) 16. SOP ttg Pembentukan tim pemeriksa kasus pelanggaran disiplin 17. SOP ttg Pelayanan penerbitan izin cuti untuk PNS 18.SOP ttg Permintaan data dan informasi kepegawaian 19. SOP ttg Penayangan berita/artikel website 20. SOP ttgPenerbitan SK tugas belajarPNS 21. SOP ttg Surat ijin belajar bagi PNS		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak TIDAK ADA</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak TIDAK ADA</li> </ul>	0 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak16</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 16</li> </ul>	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional (Widyaiswara, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, Perencana, Analis Kebijakan, Arsiparis, Pustakawan).	Ada (7JFT)	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS, sebanyak 101. Personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil</li> </ul>	1,89%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 13 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.</li> </ul>	81,25 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt.</li> </ul>	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra BKPSDMD 2. Renja BKPSDMD 3. Renja Perubahan BKPSDMD 4. RKA/DPA BKPSDMD	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program</li> </ul>	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program.</li> </ul>	100 %	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 33.913.899.288,00</li> <li>- Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11</li> </ul>	1,30 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.381.884.250,00</li> <li>- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 30.976.749.935,00</li> </ul>	4,46 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.019.433.350,00</li> <li>- Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.667.505.921,00</li> </ul>	5,77 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.019.433.350,00</li> <li>- Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 30.976.749.935,00</li> </ul>	3,29 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 6 jenis, sbb: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calk</li> <li>2. Neraca</li> <li>3. LRA</li> <li>4. LO</li> <li>5. LPE</li> <li>6. SPJ Fungsional</li> </ol>	Ada sebanyak 6 jenis	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya (Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Barang Berdasarkan Pemilik dan UPB, Buku Inventaris Gabungan)	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 37.130.989.531,00	0%	
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Papan baleho 3. Pengumuman Media Massa Pengumuman Media Elektronik 4. Kotak saran	Jumlah sebanyak 4 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI** : KEPUALUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH**: INSPEKTORAT DAERAH  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN** : PEMERINTAHAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat dikementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional, sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program	0%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada 4 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penyelesaian Proses Pemeriksaan yang terhambat karena auditi tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah pemeriksaan 2. SOP tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan 3. SOP tentang Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan 4. SOP tentang Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP 5. SOP tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler dan Kegiatan SKPD 6. SOP tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak/Tutup Kas 7. SOP tentang Reviu Laporan Keuangan Pemda/SKPD 8. SOP tentang Pemeriksaan Pengaduan 9. SOP tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah 10. SOP tentang Pelaksanaan	Ada 10 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Pemereiksaan Evaluasi LAKIP-SKPD		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	JumlahPERDAYangharusdilaksanakanPerangkat DaerahmenurutPeraturanMenteri(PERMEN)	3	JumlahPERDA pelaksanaanyangadaterhadapPERDAYang harusdilaksanakamenurut PERMEN	JumlahPERDApelaksanaan PERMENyangadadibagijumlahPERDAYangharusdilaksanakamenurut PERMENx 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDApelaksanaansebanyak 1</li> <li>- PERDAYangseharusnya, sebanyak 1</li> </ul>	$\frac{1}{1} \times 100 \%$ = 100 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisianstrukturjabatan	4	Rasiostrukturjabatandaneloneringyang terisi	Jumlahjabatanyangada (yangdiisi)dibagi jumlahjabatanyangadax 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatanyangadasebanyak7</li> <li>- Jabatanyangharusada, sebanyak7</li> </ul>	$\frac{7}{7} \times 100 \%$ = 100 %	
			5	KeberadaanjabatanfungsionaldalamstrukturorganisasiPerangkat Daerah	AdaatautidakadajabatanfungsionaldalamstrukturorganisasiPerangkat Daerah	ApabilaAda, sebutkannamabidang/jabatanfungsional: 1. JFT Auditor 2. JFT P2UPD 3. JFT Auditor Kepegawaian 4. JFT Pranata Komputer	Ada 4 Jabatan Fungsional Tertentu	
4	<b>PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	TingkatkompetensiSDM dalammenyelenggarakan tugasPerangkat Daerahyangrelevandenganurusanterkait	6	RasioPNSProvinsi	JumlahPNSPerangkat DaerahterhadapTotalPNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS, sebanyak78Personil</li> <li>- TotalPNSProvinsi,sebanyak 5.329 personil</li> </ul>	$\frac{78}{5.329} \times 100 \%$ = 1,463 %	
			7	Pejabatyangtelahmemenuhi persyaratanpendidikanpelatihankepemimpinan	Jumlahpejabatyang memenuhi persyaratan pendidikanpelatihankepemimpinanandibagijumlahtotalpejabatPerangkat Daerahyangadax100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabatyangtelahmengikutidiklatpimsesuaipenjenjangan,sebanyak7 org.</li> <li>- Pejabatyangada,sebanyak 7org.</li> </ul>	$\frac{7}{7} \times 100 \%$ 100 %	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 7 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 7 jabatan.</li> </ul>	$\frac{7}{7} \times 100 \%$ = 100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA - Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	4 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah sebanyak 4 program.</li> <li>- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program</li> </ul>	$\frac{4}{4} \times 100 \%$ = 100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program</li> <li>- Jumlah Program dalam RKAPD, sebanyak 4 program.</li> </ul>	$\frac{4}{4} \times 100 \%$ = 100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program</li> <li>- Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 program.</li> </ul>	$\frac{4}{4} \times 100 \%$ = 100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.299.832.479,- - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.596.704.155.898,-	$\frac{19.299.832.479}{2.596.704.155.898} \times 100$ = 0,743 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 65.412.500,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.437.550.423,-	$\frac{65.412.500}{17.437.550.423} \times 100\%$ = 0,375 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dan total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dan total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 231.655.525,- - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.298.456.929,-	$\frac{231.655.525}{5.298.456.929} \times 100\%$ = 4,372 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dan total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 231.655.525,- - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.437.550.423,-	$\frac{231.655.525}{17.437.550.423} \times 100\%$ = 1,328 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 (lima) jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	Ada Sebanyak 5 (lima) Dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	<b>PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	ManajemenassetPerangkat Daerah	18	Adanyainventarisasibarangat auassetPerangkat Daerah	Adaatautidakadainventaris asibarangatau assetPerangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris Ruangan 2. Kartu Inventaris Ruangan 3. Kartu Inventaris Ruangan 4. Buku Inventaris 5. Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah 6. Data Laporan Mutasi Barang Milik Daerah Tahunan	Ada 6 (enam) Dokume n	
		PenggunaanAssetPerangkat Daerah	19	Jumlahassetyangtidakdigunak anolehPerangkat Daerah	Jumlah asset yangtidakdigunakanPerang kat Daerahdibagi total asset yang dikuasaiPerangkat Daerah x 100%	- Assetyangtidakdigunakan, sebesarRp.0  - AssetyangdikuasaiPerangkat Daerah, sebesarRp.3.840,617,827,-	$\frac{0}{3.840,617,827} \times 100\% = 0\%$	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentukfasilitas/ prasaranaparticipasimasy arakat	20	Jumlahfasilitas/ prasaranainformasi: 1. Papan Pengumuman 2. PosPengaduan 3. Leaflet 4. Mobilkeliling 5. Pengumumandi MassMedia	Jumlahfasilitas/prasaranapar tisipasi	Sebutkanjenisnya 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3. Whistle Blowing System	Jumlahsebanyak 3 (dua)jenis.	
		Responsivitasterhadappartisipa simasyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil SurveyKepuasanMasyarak atterhadapPelayananpubl ik	ApabilaAda,sebutkansurvey kepuasantentang----	Tidakada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI:** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA PERANGKAT DAERAH:** BADAN PENGHUBUNG  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** PEMERINTAHAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan PD, sebanyak 0 program	-	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari:  1. SOP Pengajuan Cuti ASN Badan Penghubung Provinsi di Jakarta 2. SOP Penyewaan Penginapan 3. SOP Humas dan Layanan Protokoler 4. SOP Pengelolaan Administrasi Surat Keluar 5. SOP Pengelolaan Administrasi Surat Masuk 6. SOP Penyusunan Draft Bahan Rencana dan Program Kerja 7. SOP Fasilitasi Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 8. SOP Proses Urusan Pembinaan Organisasi Daerah Babel di Jakarta 9. SOP Proses Penyusunan Data dan Bahan yang berkaitan dengan Organisasi Masyarakat Daerah Babel di Jakarta dan sekitarnya	100 %	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						10.SOP Proses Urusan Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah, Non Departemen dan Swasta di Jakarta 11.SOP Penyusunan Rencana dan Program Kerja		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak .1 Perda. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1.	100 %	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 5 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 5 jabatan	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang / jabatan fungsional ada 2 jabatan yaitu : Jabatan Fungsional Arsiparis, dan Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat	Ada	Sumber data BKD / mengacu kondisi PD terakhir / <i>updated</i> Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS PD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS PD, sebanyak 30 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak personil 5329 personil	0,56 %	Mengacu kondisi OPD terakhir / <i>updated</i> Tahun 2018.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat PD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 orang.	20 %	Mengacu kondisi terakhir / <i>updated</i> Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat PD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 orang. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jabatan.	100 %	Mengacu kondisi terakhir / <i>updated</i> Tahun 2018.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di PD <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ RENSTRA PD</li> <li>➢ RENJA PD</li> <li>RKA-PD</li> </ul>	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan PD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak jenis, yg terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ RENSTRA PD</li> <li>➢ RENJA PD</li> <li>➢ RKA-PD</li> </ul>	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PD dibagi jumlah program dalam RENJA PD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja PD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Program Renja PD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program</li> </ul>	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-PD yang bersangkutan.
		Sinkronisasi program RKA PD dengan Program RENJA PD	11	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD dibagi jumlah program dalam RKA PD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 2 program.</li> </ul>	100 %	Mengacu dokumen RKA-PD tahun 2018 dan Renja-PD yang bersangkutan
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Anggaran PD terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran PD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKA PD yang diakomodir dalam DPA PD, sebanyak 2 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 2 program.</li> </ul>	100 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir (anggaran)
		Besaran belanja modal (realiasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja PD	Belanja modal dibagi total belanja PD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Belanja PD, sebesar Rp.12.958.727.860,00</li> <li>- Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.2.596.704.155.898,11</li> </ul>	0,50 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan (realiasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa PD) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal PD, sebesar Rp.206.600.000,00</li> <li>- Total Belanja PD, sebesar Rp.10.218.325.825,00</li> </ul>	2,02 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja PD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja PD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total belanja pemeliharaan PD, sebesar Rp.1.545.906.510,00</li> <li>- Total belanja barang dan jasa PD, sebesar Rp.6.651.699.368,00</li> </ul>	23,24%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Laporan keuangan PD	17	Keberadaan laporan keuangan PD (Neraca, LRA, CaLK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan PD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	- Total belanja pemeliharaan PD, sebesar Rp.1.545.906.510,00 - Total belanja PD, sebesar Rp.10.218.325.825,00	15,13%	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CALK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset PD	18	Adanya inventarisasi barang/aset PD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset PD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  1.Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Semester I T.A. 2018 2.Buku Inventaris Gabungan	Ada	Sumber data dari Bidang Asset Daerah tahun 2018
		Penggunaan Aset PD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh PD	Jumlah aset yang tidak digunakan PD dibagi total aset yang dikuasai PD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 439.344.500,00 - Aset yang dikuasai PD, Rp.16.271.648.322,00	2,70%	Sumber data berasal dari Bidang Aset Bakuda
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Pengumuman di Media Massa (Website) 2. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak Jenis 2 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada	Survey Kepuasan Pengunjung Anjungan Daerah Prov.Kep.Babel di TMII	

# LAMPIRAN I.3



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**



**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN**  
**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI -----X 100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	617 ----- x 100% = 99,68 % 619	Suber data Dinas Pendidikan/Sosial
		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS -----X 100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	239 ----- x 100% = 99,58 % 240	Suber data Dinas Pendidikan/Sosial
		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA -----X 100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA	130 -----x100 = 99,24% 131	Suber data Dinas Pendidikan/Sosial
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/Paket C ----- x 100% Jumlah Penduduk kelompok usia 16 -18 tahun	58.088 ----- x 100% = 75,80 % 76.634	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Dukcapil
		5	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA Pada tahun ajaran sebelumnya	15.130 ----- x 100% = 92,95 % 16.277	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA -----x 100% Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajara sebelumnya	596 ----- x 100% = 1,11 % 53.711	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	19.892 -----x100 = 95,51% 20.827	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

		8	Pembinaan Guru jenjang SD/MI	Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----- x 100% Jumlah Guru jenjang SD/MI	7.149 -----x100 = 83,57% 8.555	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		9	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS	Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----- x 100% Jumlah Guru jenjang SMP/MTS	3.617 -----x100 = 91,64% 3.947	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		10	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----- x 100% Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA	3.296 -----x100 = 95,01% 3.469	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		11	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peta penjaminan mutu Pendidikan	Ada	Sumber data dari Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	705,41 ----- = 100,77% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	673,47 ----- = 96,21% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization ( UCI )	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	682,61 ----- = 97,52% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		15	Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapatkan perawatan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	700 ----- = 100% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	433,02 ----- = 61,86% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	700 ----- = 100% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		18	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	678,76 ----- = 96,97% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		19	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	685,34 ----- = 97,91% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
3	Lingkungan Hidup	20	Pencemaran Udara	Jumlah Kabupaten dan Kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	7 ----- = 100% 7	Sumber data dari Dinas LH
		21	Kebersihan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	620 ----- = 88,57% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		22	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	159,15 ----- = 22,74% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		23	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	700 ----- = 100% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
4	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik ----- x 100% Panjang seluruh jalan orovinsi	711,92 ----- x 100 % =83,66% 850,99	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
		25	Rumah tangga persanitasi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	635.64 ----- = 90,80% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		26	Kawasan kumuh	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	0,614 ----- = 0,087% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		27	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	222,74 ----- = 31,82% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
5	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	620,97 ----- = 88,71% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		29	Rumah layak huni	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	635,31 ----- = 90,73% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
6	Kepemudaan & Olahraga	30	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	38.2544 ----- = 5,46% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		31	Lapangan Olahraga	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	5,7 ----- = 0,81% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
7	Penanaman Modal	32	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2018 – Realisasi PMDN thn 2017 -----X 100% Realisasi PMDN 2017	3112,91-1.734,73 -----x100 % 1.734,73 = 79,45%	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal
8	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	499,17 ----- = 71,31% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		34	Usaha Makro dan Kecil	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	697,92 ----- = 99,70% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
9	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	35	Ketersediaan data base kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Sumber data dari Dukcapil/ Perangkat Daerah yg menangani
10	Tenaga Kerja	36	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/buruh	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	615,74 ----- = 87,96% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		37	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	261 ----- = 37,28% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
11	Pangan	38	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Sumber data dari Dinas Pangan / Perangkat Daerah yg menangani
		39	Ketersediaan pangan utama	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	811,38 ----- = 115,91% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
12	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	40	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan ----- 100% Jumlah pekerja perempuan	21.430 ----- = 31,21% 68.655	Sumber data dari Dinas PP & PA/ Perangkat Daerah yg menangani
		41	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	305,01 ----- = 43,57% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
13	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	42	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	559,31 ----- = 79,90% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		43	Rasio petugas lapangan KB /penyuluh KB (PLKB) disetiap Desa/Kelurahan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	596,04 ----- = 85,14% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
14	Perhubungan	44	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	41,492 ----- =5,92% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
15	Komunikasi & Informatika	45	Web site milik pemda	Ada	Ada	Sumber data dari Dinas Kominfo / Perangkat Daerah yg menangani
		46	Pameran/ Expo	Menunjukkan jumlah pameran/Expo yang dilaksanakan per tahun	3 kali	Sumber data dari Dinas Kominfo
16	Pertanahan	47	Luas lahan bersertifikat	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	151,50 ----- = 21,64% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48	PKK aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	$\frac{700}{7} \times 100 = 100\%$	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
18	Sosial	49	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo & panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi dll yang terdapat di suatu daerah	2 buah	Sumber data dari Dinas Sosial/ Perangkat Daerah yg menangani
		50	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan -----X 100% Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	$\frac{87.892}{86.797} \times 100 = 101,26\%$	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
19	Kebudayaan	51	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	30	Sumber data dari Dinas Budpar/ Perangkat Daerah yg menangani
		52	Sarana penyelenggaraan seni & budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	Sumber data dari Dinas Budpar/ Perangkat Daerah yg menangani
20	Statistik	53	Buku "Provinsi dalam angka"	Ada	Ada	Sumber data dari Perencanaan Pembangunan/ Perangkat Daerah yg menangani
		54	Buku "PDRB provinsi"	Ada	Ada	Sumber data dari Perencanaan Pembangunan/ Perangkat Daerah yg menangani
21	Kearsipan	55	Pengelolaan Arsip secara baku	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari Dinas Arsip/ Perangkat Daerah yg menangani
		56	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelolaan Arsip	Tidak Ada Kegiatan (Karena Ada Rasionalisasi Anggaran)	Sumber data dari Dinas Kearsipan/ Perangkat Daerah yg menangani

22	Perpustakaan	57	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ----- X 100% Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	11.739 -----x100% =52,45% 22.379	Sumber data dari Dias Perpustakaan/ Perangkat Daerah yg menangani
		58	Pengunjung Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun -----X 100 % Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	8.131 -----x100% = 5,81% 139.834	Sumber data dari Perpustakaan/ Perangkat Daerah yg menangani

	URUSAN PILIHAN					
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi Perikanan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	821,42 ----- = 117,35 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		2	Exspor hasil perikanan	Nilai export hasil perikanan (kg pertahun) ----- X 100% Target daerah	20.676.559 -----x100% 13.543.325 = 152,67%	Sumber data dari Dinas Kelautan & Perikanan
		3	Konsumsi ikan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	760 ----- = 108,61% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
2	Pertanian	4	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	29.55 ----- = 4.22 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2018	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- X 100% Jumlah total PDRB	13,159,581.96 -----x100% 73,069,313.34 = 18,01%	Sumber data dari Buku PDRB sektor pertanian (harga berlaku)
3	Kehutanan	6	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi ----- X 100% Luas total hutan dan lahan kritis	14.482 Ha -----x100% 20.688 Ha  = 70%	Sumber data dari Dinas Kehutanan

		7	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kerusakan kawasan hutan -----X 100% Luas kawasan hutan	41.735,550 Ha -----x100% 657.378,26 Ha  = 6,35%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
4	Energi dan SDM	8	Pertambangan tanpa ijin	Luas penambangan liar yang ditertibkan ----- X 100% Luas area penambangan liar	82,5 ha -----X100% = 91,74% 93,2 ha	Sumber data dari Dinas ESDM
		9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2018	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan ----- X 100% Jumlah total PDRB	7.740,5 -----x100% =11,88% 65.125,3	Sumber data dari Buku PDRB sektor pertambangan
5	Pariwisata	10	Kunjungan wisata	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	2.072.023 orang/tahun	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2018	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- X 100% Jumlah total PDRB	1.735.578,86 -----x100% 69.973.232,48 = 4,06%	Sumber data dari buku PDRB, sektor jasa, hotel, restoran, (harga berlaku)
6	Perindustrian	12	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2018	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri -----X 100% Jumlah total PDRB	15.078.719,55 -----x100% 73.069.313,34  = 20,64%	Sumber data dari buku PDRB, sektor industri, (harga berlaku)
		13	Pertumbuhan industri secara keseluruhan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	196,91 ----- = 28.13% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
7	Perdagangan	14	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan -----X 100% Jumlah total PDRB	11.471.239,37 -----x100% 73.069.313,34 = 15,70%	Sumber data dari buku PDRB, sektor perdagangan, (harga berlaku)
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih= nilai ekspor – nilai impor 1.770.223.139,76-149.321.411,50	US\$. 1.620.901.728,26	Sumber data dari Dinas Perdagangan
8	Transmigrasi	16	Transmigrasi swakarsa	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	1 ----- = 100% 1	Normalisasi



	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	1. SIMADIK 2. e-MONEV 3. SIPKAD 4. SIAK 5. e-PROC 6. siBahsos 7. E-Planing 8. E-Musrenbang 9. SIMDA 10. si Pena	Sumber data dari Dinas Kominfo/ Perangkat Daerah yg menangani
		2	Tapalbatas	$\frac{\text{Jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten/Kota yg diselesaikan}}{\text{Jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten dan Kota yg dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari Biro Pemerintahan/ Perangkat Daerah yg menangani
		3	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD	Ada	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD	Ada	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	Ada	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		6	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	$\frac{\text{Penjabaran program RPJMD dalam RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	$\frac{203 \text{ program}}{203 \text{ program}} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Bappeda
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	1 kegiatan	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	1 kegiatan	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani